

Laporan Kinerja 2019



Sambutan Kepala BKKBN



Laporan kinerja ini merupakan informasi terbuka, terinci, dan terkini kepada masyarakat tentang kinerja BKKBN, agar masyarakat dapat menilai dan mengambil manfaat sebaik-baiknya terhadap kualitas pelayanan terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan komitmen dan perhatian penuh terhadap pelaksanaan Program KKBPK dan pengelolaan Anggaran Tahun 2019 dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka tahun 2019 merupakan tahun yang sangat strategis karena merupakan tahun akhir periode dan capaiannya akan menjadi dasar penentuan penyusunan RPJMN 2020-2024.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 memiliki prioritas antara lain pembangunan manusia dan pengurangan kesenjangan wilayah, dimana peran BKKBN dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Isu penting yang menjadi prioritas BKKBN tahun 2019 adalah Restrukturisasi Kelembagaan, Rebranding BKKBN, Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi, Sistem Rantai Pasok Alokasi, Pelaksanaan Kampung KB, Peningkatan Kompetensi PKB/PLKB, Penyusunan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nasional Periode 2020-2024.

Sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan

demikian, Laporan Kinerja ini merupakan suatu ikhtisar yang dapat menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja BKKBN yang disusun berdasarkan rencana kerja program dan anggaran Tahun 2019 beserta pelaksanaannya.

Acuan dasar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah Dokumen Perencanaan Strategis yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, yang kemudian dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah tertuang perencanaan kinerja BKKBN meliputi Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan target yang akan dicapai pada tahun 2019. Cakupan pengukuran capaian kinerja yang dilaporkan meliputi 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Tujuan, 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Sasaran Program, serta disampaikan pula capaian kinerja 5 (lima) *output* yang mendukung Proyek Prioritas Nasional (Pro PN).

Pengungkapan keseluruhan sasaran program tersebut merupakan upaya BKKBN untuk menyampaikan penjelasan secara terinci hubungan kausalitas terhadap sasaran strategis, agar seluruh pihak yang memanfaatkan laporan ini dapat menerima informasi yang utuh. Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai salah satu informasi publik yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai dan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif

Seluruh keberhasilan yang diperoleh oleh BKKBN merupakan hasil dari peningkatan komitmen, penumbuhan etos dan budaya kerja, penguatan sumber daya organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BKKBN untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Kesenambungan pencapaian tersebut harus didukung dengan perbaikan secara terus menerus pada seluruh jajaran BKKBN dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan, bekerja secara efisien dan selalu menumbuhkan budaya berkinerja.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN, baik Kementerian/Lembaga, Komisi IX DPR RI, Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Organisasi Profesi, Pihak Swasta, LSM, Lembaga Donor Internasional serta masyarakat yang telah mendukung tugas dan fungsi BKKBN, terutama dukungan di lini lapangan bagi seluruh Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia. Dukungan dan komitmen tersebut telah secara nyata dapat berkontribusi terhadap capaian kinerja dalam melaksanakan program dan anggaran BKKBN Tahun 2019. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN, namun harapan tertinggi kami adalah dapat bermanfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Kepala BKKBN

Hasto Wardoyo

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk tahun anggaran 2019 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2020

Inspektur Utama BKKBN



Drs. Agus Sukiswo, Ak, MM

Daftar Isi



Pendahuluan

BAB 01

A.	Latar Belakang	11
B.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	15
C.	Mandat dan Peran Strategis	21
D.	Program Reformasi Birokrasi	26
E.	Restrukturisasi Kelembagaan	31
F.	Permasalahan, Tantangan dan Peluang	33
G.	Isu Strategis	34



Perencanaan Kinerja

BAB 02

A.	Rencana Strategis	37
B.	Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2019	40
C.	Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2020	46
D.	Perjanjian Kinerja	53
E.	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis	59
F.	Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	65



Akuntabilitas Kinerja

BAB 03

A.	Capaian Kinerja	72
B.	Realisasi Anggaran	155
C.	Kinerja dan Capaian Lain	163
D.	Evaluasi Kinerja	175
E.	Perbaikan Rencana Program dan Anggaran TA 2020	180



Penutup

BAB 04

A.	Penutup	187
	Lampiran	195



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Rasio Ketergantungan Berdasarkan Dua Skenario Proyeksi Penduduk	19	Gambar 2.11.	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019	62
Gambar 1.2.	Grafik Tren Jumlah Penduduk Indonesia dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1971 – 2019	20	Gambar 2.12.	Akuntabilitas Kinerja BKKBN pada Website	63
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	23	Gambar 2.13.	Tangkapan Layar SIVIKA	64
Gambar 1.4.	Profil Demografi Pegawai BKKBN	24	Gambar 2.14.	Tangkapan Layar e-VISUM	64
Gambar 1.5.	Ruang Pelayanan Publik dan Pelayanan KIE	37	Gambar 2.15.	Tangkapan Layar <i>Prototype</i> e-Kinerja	65
Gambar 1.6.	Hasil Evaluasi Kelembagaan	38	Gambar 2.16.	Tangkapan <i>Dashboard Prototype</i> e-Kinerja	65
Gambar 2.1.	Arah Kebijakan BKKBN Periode 2015-2019	46	Gambar 2.17.	Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) BKKBN Tahun 2019	68
Gambar 2.2.	Prioritas Nasional Tahun 2019	47	Gambar 2.18.	Pelaksanaan RAKORNIS Kemitraan BKKBN Tahun 2019	69
Gambar 2.3.	Kerangka PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	48	Gambar 2.19.	Rapat Dengar Pendapat BKKBN dengan Komisi IX DPR RI	70
Gambar 2.4.	Kerangka PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Dasar	48	Gambar 2.20.	Rapat dengan Lintas sektor terkait di DPR	71
Gambar 2.5.	Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	53	Gambar 2.21.	Penghargaan BKKBN atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 dari Badan Pengawasan dan Pembangunan	72
Gambar 2.6.	Kerangka PP1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	54	Gambar 2.22.	Peta Strategi BKKBN	73
Gambar 2.7.	Kerangka PP2 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	54	Gambar 2.23.	Hasil Penilaian Implementasi Strategis di BKKBN berdasarkan SPEX2	74
Gambar 2.8.	Kerangka PP5 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa	55	Gambar 3.1.	Pyramidha Sasaran BKKBN	79
Gambar 2.9.	Kunjungan Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Muhadjir Effend	59	Gambar 3.2.	Kerangka Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Fertilitas	79
Gambar 2.10.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019	61	Gambar 3.3.	Penyerahan DIPA 2020	80
			Gambar 3.4.	Penyerahan DIPA 2020	92
			Gambar 3.5.	Kerangka Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Fertilitas	100
			Gambar 3.6.	Seminar Sertifikasi Pernikahan	123
			Gambar 3.7.	Seminar Sertifikasi Pernikahan	133

Gambar 3.8.	Penyerahan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BKKBN dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2019 Tanggal 12 September 2019	137	Gambar 3.23.	Penandatanganan MoU BKKBN dengan Pemerintah Seychelles dan Popcom The Philippines	177
Gambar 3.9.	Penghargaan BMN Award dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2019, Tanggal 12 September 2019	170	Gambar 3.24.	Penandatanganan MoU BKKBN dengan Universitas Indonesia	177
Gambar 3.10.	<i>Screenshot SIM SDM BKKBN</i>	171	Gambar 3.25.	Peserta <i>International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates</i> 18-29 Maret 2019	178
Gambar 3.11.	Tangkapan Layar <i>Whistle Blowing System</i>	172	Gambar 3.26.	Peserta <i>International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates</i> , Tanggal 18-29 Maret 2019	178
Gambar 3.12.	Penghargaan PR Indonesia Award kategori media massa dari Asosiasi Public Relations (PR) RI Tahun 2019, Tanggal 28 Maret 2019	172	Gambar 3.27.	<i>Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs)</i> di Kota Solo, Jawa Tengah	179
Gambar 3.13.	Penandatanganan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi	172	Gambar 3.28.	Peserta <i>International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates</i> 18-29 Maret 2019	179
Gambar 3.14.	Penyerahan Sertifikat Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV	173	Gambar 3.29.	Peserta <i>Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders</i> di Kota Surabaya, Jawa Timur	179
Gambar 3.15.	<i>Screenshot e-learning BKKBN</i>	173	Gambar 3.30.	Peserta <i>Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders</i> Kunjungan di Pusyan Gatra, Kota Surabaya, Jawa Timur	179
Gambar 3.16.	Peserta Pelatihan Dasar mengikuti Tes Potensi Akademik secara Online pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019	174	Gambar 3.31.	Peserta <i>Knowledge Sharing Program on Family Planning Reproductive Health</i> for Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara-Malaysia, di D.I.Yogyakarta	173
Gambar 3.17.	Peserta Pelatihan Dasar mengikuti Tes Pembelajaran secara Online pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019	174	Gambar 3.32.	Peserta <i>Short Course on Bridging Leadership for Mayor of District</i> , di Kota Jakarta	180
Gambar 3.18.	Penyerahan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Bangka Belitung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun 2019, Tanggal 10 Desember 2019	174	Gambar 3.34.	Peserta <i>coping Mission Demographic Dividend for The Phillipines Delegates</i>	181
Gambar 3.19.	Tangkapan Layar Prototype e-Kinerja	174	Gambar 3.35.	Peserta <i>Frame Work of SSTC Between Indonesia and Philippines</i> , Tapos, Depok	181
Gambar 3.20.	Tangkapan <i>Dashboard Prototype</i> e-Kinerja	175			
Gambar 3.21.	Kegiatan ICPD 25 tanggal 12 – 14 November 2019 di Nairobi, Kenya	175			
Gambar 3.22.	Kegiatan Sharing Experience Program KKBPK dengan Crown Princess of Denmark di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tanggal 2 – 4 Desember 2019	176			

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang didukung BKKBN	29	Tabel 3.8.	Pencapaian TFR diantara Negara ASEAN	86
Tabel 1.2.	Capaian Keberhasilan RB BKKBN 2015-2019	33	Tabel 3.9.	Perbandingan Target TFR Tahun 2019 Dengan Tahun 2020	87
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BKKBN Periode 2015-2019	46	Tabel 3.10.	Pencapaian Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR) Tahun 2019 Pencapaian Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) Tahun 2019	88
Tabel 2.2.	Output Prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Tahun 2019	49	Tabel 3.11.	Data Subscriber/Follower BKKBN Official	89
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Target dan Alokasi Anggaran BKKBN Tahun 2019	50	Tabel 3.12.	Rasio Ketersediaan Sarana	90
Tabel 2.4.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019	51	Tabel 3.13.	Perbandingan Target Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR) Tahun 2019 dengan Tahun 2020 IKU	91
Tabel 2.5.	Output Prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Tahun 2020	55	Tabel 3.14.	Pencapaian Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) Tahun 2019	93
Tabel 2.6.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Target dan Alokasi Anggaran BKKBN Tahun 2020	56	Tabel 3.15.	Pencapaian unmet need Tahun 2019 dengan tahun 2020	94
Tabel 2.7.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020	57	Tabel 3.16.	Pencapaian Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2019	95
Tabel 2.8.	Sasaran Strategis Renstra, Renja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BKKBN	60	Tabel 3.17.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang terlatih	95
Tabel 2.9.	Indikator Kinerja Renstra, Renja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BKKBN	61	Tabel 3.18.	Perbandingan Target Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2019 dengan Tahun 2020	96
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja	78	Tabel 3.19.	Pencapaian Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2019	97
Tabel 3.2.	Pencapaian Indikator kinerja tujuan 2019	81	Tabel 3.20.	Perbandingan Target Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2019 dengan Tahun 2020	98
Tabel 3.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1971-2019	81	Tabel 3.21.	Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2015 - 2019	99
Tabel 3.4.	Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2019	83	Tabel 3.22.	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019	101
Tabel 3.5.	Pencapaian Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) Tahun 2019	84	Tabel 3.23.	Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2019	103
Tabel 3.6.	Tingkat Pengetahuan Keluarga Yang Mengetahui Informasi Program KKBPK	84			
Tabel 3.7.	Indikator Sosial Ekonomi	85			

Tabel 3.24.	Pencapaian Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun pada Tahun 2019	105
Tabel 3.25.	Pencapaian Persentase PUS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua Jenis Metode Kontrasepsi Modern Tahun 2019	107
Tabel 3.26.	Pencapaian Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2019	109
Tabel 3.27.	Persentase Keluarga Menurut Pengetahuan Minimal Dua Nilai di Masing-Masing Fungsi Tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019	111
Tabel 3.28.	Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019	112
Tabel 3.29.	Pencapaian Persentase Pengetahuan Masyarakat (Keluarga) Tentang Isu Kependudukan Tahun 2019	115
Tabel 3.30.	Pencapaian Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018	117
Tabel 3.31.	Tren Pencapaian Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Periode Tahun 2015 - 2019	119
Tabel 3.32.	Indikator Tingkat Atribut Kepuasan Pengguna (user) Peserta Diklat atas Hasil Pelatihan/Orientasi Diklat	121
Tabel 3.33.	Pencapaian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional Tahun 2019	121
Tabel 3.34.	Pencapaian Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2019	122
Tabel 3.35.	Pencapaian Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Periode Tahun 2015-2019	124
Tabel 3.36.	Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2019	125
Tabel.3.37.	Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2019	125
Tabel 3.38.	Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional KKBPK Tahun 2019 terhadap Target RENSTRA 2015 - 2019	126

Tabel 3.39	Pencapaian Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek di LN hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2019	128
Tabel 3.40	Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di LN Periode Tahun 2015 - 2019	129
Tabel.3.41.	Pencapaian Indeks Kepuasan hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Tahun 2019	130
Tabel 3.42.	Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Periode Tahun 2015-2019	130
Tabel.3.43.	Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2019	131
Tabel 3.44.	Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Tahun 2019	132
Tabel 3.45.	Tren Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Periode Tahun 2015 - 2019	133
Tabel 3.46.	Pencapaian Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019	135
Tabel 3.47.	Tren Capaian Jumlah Produk Hukum Dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Periode Tahun 2015 - 2019	136
Tabel 3.48.	Pencapaian Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Tahun 2019	138
Tabel 3.49.	Tren Capaian Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Periode Tahun 2015 - 2019	139
Tabel 3.50.	Pencapaian Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap) Tahun 2019	140

Tabel 3.51.	Tren Pencapaian Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap) Periode Tahun 2015 - 2019	141	Tabel 3.63.	Perbandingan Target dan Realisasi Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokasi di Faskes (Provinsi) Tahun 2019	152
Tabel 3.52.	Perbandingan Target Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap) Target tahun 2019 dengan tahun 2020	141	Tabel 3.64.	Perbandingan Target dan Realisasi Terlaksananya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Tahun 2019	153
Tabel 3.53.	Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018	143	Tabel 3.65.	Perbandingan Target dan Realisasi Terlaksananya Promosi dan KIE pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan Tahun 2019	154
Tabel 3.54.	Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2019	144	Tabel 3.66.	Pencapaian Terlaksananya Promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis poktan/komunitas Tahun 2019	156
Tabel 3.55.	Tren Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Periode Tahun 2015-2019	144	Tabel 3.67.	Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	158
Tabel 3.56.	Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2019	145	Tabel 3.68.	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019	159
Tabel 3.57.	Tren Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Periode Tahun 2015 - 2019	147	Tabel 3.69.	Realisasi pagu anggaran per Program Tahun 2019	160
Tabel 3.58.	Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2019	148	Tabel 3.70.	Realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional TA 2019	161
Tabel 3.59.	Rincian Capaian Output Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	149	Tabel 3.71.	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2019	162
Tabel 3.60.	Tren Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Periode Tahun 2019 - 2020	149	Tabel 3.72.	Perbandingan Target Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020	167
Tabel 3.61.	Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional	151	Tabel 3.73.	Evaluasi PMPRB Periode Tahun 2015 - 2018	167
Tabel 3.62.	Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokasi di Faskes (DKI Jakarta) Tahun 2019	151	Tabel 3.74.	Evaluasi SAKIP BKKBN Periode Tahun 2015 - 2018	168
			Tabel 3.75.	Dukungan Unit Eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2015-2019	168
			Tabel 3.76.	Dukungan Unit Eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024	183
			Tabel 3.77.	Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024	185
			Tabel 3.78.	Dukungan Unit Eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2015-2019	188
			Tabel 3.79.	Dukungan Unit Eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024	188
			Tabel 3.80.	Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024	190

Daftar Grafik

Grafik 3.1.	Tren Pencapaian Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) 2015 – 2019	86	Grafik 3.15.	Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtangaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Periode 2015 - 2019	146
Grafik 3.2.	Tren Pencapaian mCPR BKKBN Tahun 2015-2019	91	Grafik 3.16.	Tren Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokasi di Faskes (DKI Jakarta) Tahun 2019 per Triwulan	155
Grafik 3.3.	Tren Pencapaian unmet need Periode 2015-2019	94	Grafik 3.17.	Tren Pencapaian Pemenuhan Alokasi (Provinsi)	156
Grafik 3.4.	Tren Pencapaian Peserta KB Aktif MKJP Periode 2015-2019	96	Grafik 3.18.	Tren Pencapaian Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	158
Grafik 3.5.	Tren Pencapaian Tingkat Putus Pakai Periode 2015-2019	98	Grafik 3.19.	Tren Pencapaian Pro PN Keluarga yang Terpapar Promosi 1000 HPK	159
Grafik 3.6.	Pencapaian Jumlah Peserta KB baru (PB) Periode 2015 – 2019	104	Grafik 3.20.	Tren Pencapaian Pro PN Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/Komunitas	160
Grafik 3.7.	Tren Pencapaian ASFR 15-19 tahun Periode Tahun 2015-2019	106	Grafik 3.21.	Tren Pencapaian Realisasi Anggaran BKKBN Tahun 2015-2019	163
Grafik 3.8.	Tren Pencapaian Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Periode Tahun 2015-2019	109	Grafik 3.22.	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN Tahun 2015	164
Grafik 3.9.	Tren Pencapaian Persentase Keluarga Yang Memiliki Pemahaman dan Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2015-2019	111	Grafik 3.23.	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN per Jenis Belanja Tahun 2016	165
Grafik 3.10.	Tren Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Generasi Berencana Remaja Periode Tahun 2015 - 2019	114	Grafik 3.24.	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN per Jenis Belanja Tahun 2017	165
Grafik 3.11.	Tren Pencapaian Persentase Pengetahuan Masyarakat (Keluarga) Tentang Isu Kependudukan Periode Tahun 2015 - 2018	116	Grafik 3.25.	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN per Jenis Belanja Tahun 2018	165
Grafik 3.12.	Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Periode Tahun 2015-2019	127	Grafik 3.26.	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN per Jenis Belanja Tahun 2019	166
Grafik 3.13.	Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Periode Tahun 2015-2019	134	Grafik 3.27.	Tren Komposisi Alokasi Anggaran per Jenis Belanja Periode Tahun 2015-2019	166
Grafik 3.14.	Tren Pencapaian Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja Periode Tahun 2015 - 2019	142	Grafik 3.28.	Tren Komposisi Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Periode Tahun 2015-2019	166

Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja 2019

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan tujuan BKKBN yaitu “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Sesuai dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, maka untuk mencapai tujuan tersebut, BKKBN menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Tujuan yaitu Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

(LPP) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu: (1). Menurunnya angka kelahiran total (TFR); (2). Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR); (3). Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*); (4) Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan (5) Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi. Keseluruhan sasaran, indikator dan target tersebut telah dijabarkan ke dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai pedoman yang lebih operasional.

Lebih lanjut, BKKBN melakukan penjabaran tugas dan fungsinya kedalam 4 (empat)

besaran program seperti yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2015-2019, yaitu: (1). Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah; (2). Program Dukungan Manajemen, dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN; dan (4) Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional. Penilaian terhadap kinerja tersebut diukur dengan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara keseluruhan, pada tahun 2019 telah ditetapkan 26 IKU yang merupakan komitmen Pimpinan BKKBN, yaitu 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan, 5 (lima) sasaran strategis, dan 20 IKU Sasaran Program. Secara khusus laporan kinerja tahun 2019, juga menyampaikan capaian indikator tentang Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) karena merupakan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selain 26 indikator tersebut, BKKBN mendapat amanat untuk melaksanakan 5 (lima) Proyek Prioritas Bidang yang mendukung Prioritas Nasional (Pro-PN), yaitu: (1). Proyek pemenuhan ketersediaan alokon DKI Jakarta, (2). Proyek pemenuhan ketersediaan alokon untuk 33 provinsi (3). Proyek keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK, (4). Proyek penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, dan (5). Proyek promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan. Masing-masing proyek prioritas tersebut memiliki satu indikator output yang harus dicapai, sehingga secara keseluruhan ada 5 *output* Pro PN.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam laporan ini dikategorikan berdasarkan persentase capaiannya dibandingkan target yang dibagi menjadi 4 (empat) jenjang yaitu kategori sangat baik apabila capaiannya lebih tinggi atau sama dengan 90 persen, kategori baik apabila capaiannya antara 80-90 persen, kategori cukup apabila capaiannya antara 70-79 persen, dan kategori kurang apabila capaiannya kurang dari 79 persen.

Secara garis besar hasil capaian kinerja BKKBN tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) IKU yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Tujuan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis terdapat 3 (tiga) INDIKATOR DENGAN KATEGORI SANGAT BAIK, yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk, *Total Fertility Rate*, dan Kesertaan KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan pencapaian di atas 90 persen. Sedangkan 3 (tiga) INDIKATOR DENGAN KATEGORI BAIK dengan pencapaian di atas 80 persen yaitu *Modern Contraceptive Prevalence Rate*, *Unmet Need* dan Tingkat Putus Pakai.

Apabila dilihat dari capaian program, maka dari 20 IKU Indikator Kinerja Sasaran Program terdapat 15 capaian indikator memiliki capaian dengan kategori sangat baik, 1 (satu) indikator dengan kategori baik, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup, dan 2 (dua) indikator dengan kategori kurang. Sedangkan untuk capaian *output* Pro PN dari 5 (lima) *output*, seluruh *output* tercapai dengan kategori sangat baik, dengan capaian tertinggi pada *output* Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan sebesar 109,59 persen.

Dukungan anggaran tahun 2019 untuk program KKBPK sebagaimana yang tertuang dalam DIPA BKKBN adalah sebesar Rp. 3.822.821.933.000,- Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 3.538.301.604.038 atau mencapai 92,56%. Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran strategis, tahun 2019 BKKBN mendapat dukungan sumber daya penganggaran dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yaitu melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub-Bidang KB dan Bantuan Operasional Khusus KB (BOKB) yang ditransfer langsung ke Kabupaten dan Kota. Untuk DAK Fisik Sub-Bidang KB mendapat alokasi sebesar Rp. 624.189.000.000,- yang diperuntukkan bagi 500 Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk BOKB mendapat alokasi sebesar Rp. 1.967.367.255.000,- bagi 508 Kabupaten dan Kota dan Rp. 7.800.000.000,- DAK Penugasan untuk stunting untuk 130 kabupaten/kota.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019

92,56%

Atau

Rp 3.538.301.604.038,-

Pengelolaan program dalam rangka mencapai kinerja tidak hanya dicapai melalui serangkaian pencapaian penetapan kinerja (*outcome/output*), tetapi juga melalui percepatan peningkatan kinerja manajerial organisasi secara internal melakukan pengelolaan reformasi birokrasi, pengelolaan anggaran yang akuntabel, penyempurnaan pengelolaan kinerja, meningkatkan pengelolaan barang dan jasa serta Barang Milik Negara (BMN), peningkatan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan ZI WBK.

Keberhasilan capaian BKKBN, tidak hanya terlihat dari sasaran strategis, program, dan Pro PN, tetapi juga dapat ditunjukkan dari berbagai capaian dan penghargaan. Capaian tersebut antara lain, opini WTP dari BPK, Level Maturitas SPIP berada pada level 3,285 “Terdefinisi”, ditetapkannya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unit kerja “Wilayah Bebas dari Korupsi serta Akreditasi Diklat untuk Pelatihan Kepemimpinan tingkat III dan IV. Sedangkan penghargaan yang telah dianugerahkan kepada BKKBN adalah BMN Award, *Public Relation Award*, dan Penghargaan Subroto bidang efisiensi Energi kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki peran penting dalam pengelolaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di kancah Internasional dalam beberapa event yaitu: 1) Ketua Delegasi RI pada

The Nairobi Summit on ICPD 25, 2) menjadi negara tujuan *Sharing Experience Program* KKBPK dengan *Crown Princess of Denmark* dan 3) Pengembangan MoU dengan pemerintah Seychelles, *Population commission of The Philippines*, Tunisia, JHUCCP, dan *International Training on Family Planning Services* dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia, serta 4) Pencapaian BKKBN sebagai pusat rujukan negara sahabat untuk *Sharing Best Practice* dalam Program KKBPK yaitu *International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates*, *Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs)*, *Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders*, *Knowledge Sharing Program on Family Planning Reproductive Health for Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara - Malaysia*, *Scoping Mission Demographic Dividend for The Phillipines Delegates*.

Upaya perbaikan ke depan, baik dalam RENJA Tahun 2020 maupun dalam kerangka RPJMN 2020-2024, diarahkan untuk peningkatan akuntabilitas melalui implemetasi SAKIP yang lebih baik. Rekomendasi dari KemenPAN & RB dan hasil reuiu dari Inspektorat Utama BKKBN menjadi dasar dalam perbaikan target dan pengukuran kinerja. Perbaikan juga dilakukan dalam perbaikan regulasi atau kebijakan, proses bisnis, dan sistem yang terkait dengan pengelolaan kinerja. Di sisi lain, terkait pelaksanaan anggaran, BKKBN telah melakukan bedah anggaran pada seluruh Satuan Kerja Pusat maupun Provinsi dalam rangka menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan *output (best fit)*, sehingga diharapkan pelaksanaan anggaran di tahun 2020 dapat lebih efektif. Hal ini sejalan dengan program penganggaran berbasis kinerja, program penegakan integritas, dan penguatan Reformasi Birokrasi, serta Transformasi Kelembagaan sesuai dengan lingkungan strategis.





Pendahuluan

B A B 01

A. Latar Belakang	11
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	15
C. Mandat dan Peran Strategis	21
D. Program Reformasi Birokrasi	26
E. Restrukturisasi Kelembagaan	31
F. Permasalahan, Tantangan dan Peluang	33
G. Isu Strategis	34

A Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Indonesia saat ini sedang menikmati periode Bonus Demografi yaitu suatu periode dimana jumlah penduduk usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini dipandang paling ideal untuk pembangunan dan mengoptimalkan produktifitas penduduk Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Bonus Demografi terjadi karena Indonesia mengalami transisi demografi sebagai dampak dari penurunan angka fertilitas yang terus menerus dalam jangka panjang.

Angka Fertilitas Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya program KB dimana pada tahun 1971 Total Fertilitas Rate (TFR) sebesar 5,7 rata-rata jumlah anak per perempuan menjadi 2,4 pada tahun 2017 (SDKI, 2017). Penurunan fertilitas ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur umur diikuti dengan penurunan Rasio Ketergantungan (RK). Bonus Demografi ditandai dengan RK dibawah 50 per 100 penduduk usia produktif dan diperkirakan akan mengalami

Bonus Demografi:

<15 tahun & >64 tahun



15-64 tahun

jumlah penduduk usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

< 50 / 100 penduduk usia produktif

RK dibawah 50 per 100 penduduk usia produktif dan diperkirakan akan mengalami titik terendah pada tahun 2020-2030

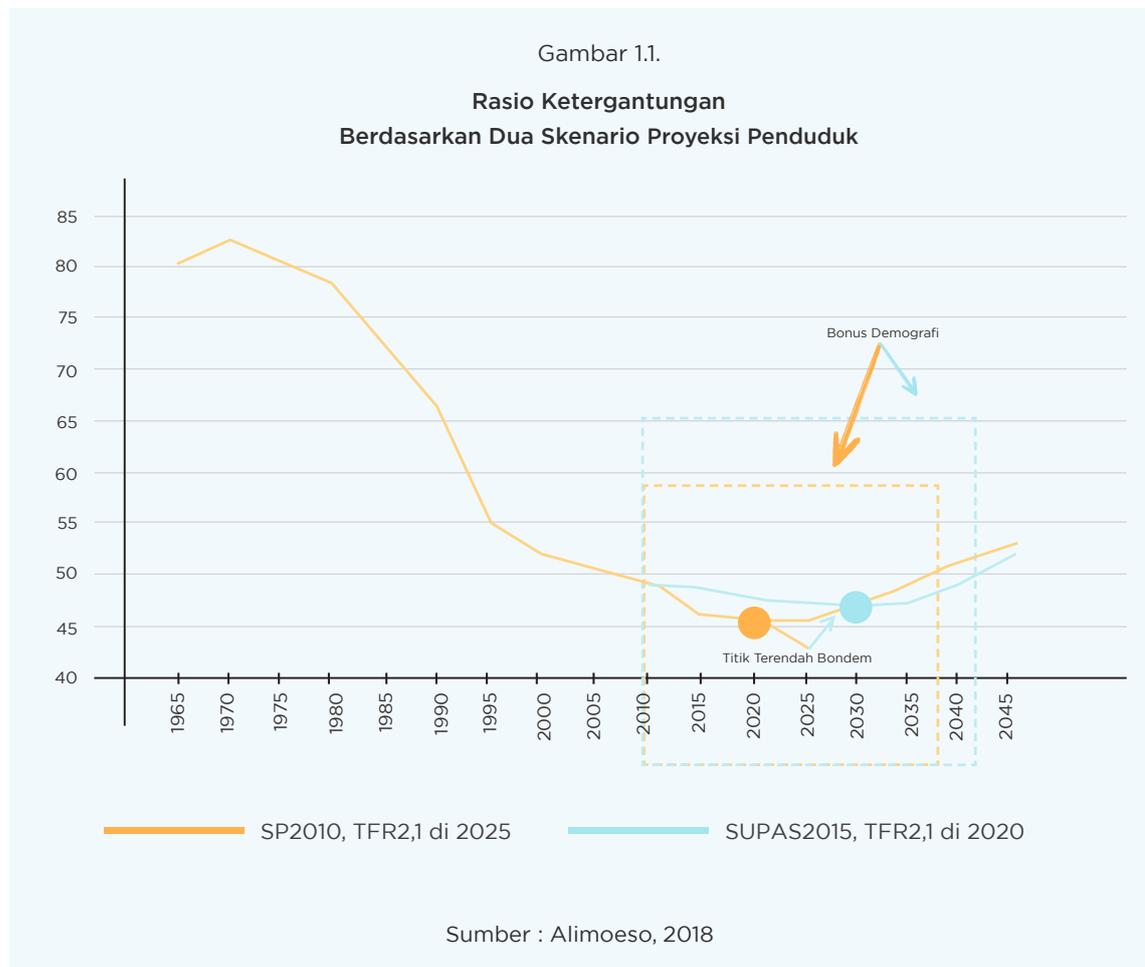
Angka Fertilitas

2,1 Untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

titik terendah pada tahun 2020-2030 sebelum kemudian angka RK akan meningkat kembali karena peningkatan rasio penduduk lanjut usia di Indonesia.

Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah pencapaian bonus demografi dan Struktur Umur Penduduk Seimbang (SUPS) dengan dicapai dan dipertahankan TFR=2,1 anak per perempuan. Alimoeso (2018) menunjukkan

adanya perbedaan panjangnya bonus demografi berdasarkan dua skenario. Skenario proyeksi pertama berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010 dan TFR=2,1 dicapai dan dipertahankan sejak tahun 2025 menghasilkan periode bonus demografi yang lebih panjang dibandingkan dengan skenario proyeksi kedua berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dan TFR 2,1 yang dicapai dan dipertahankan sejak tahun 2020 (Gambar 1.1).



BKKBN berkomitmen mewujudkan penduduk tumbuh seimbang sebagaimana yang diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan Indikator tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 yang dirumuskan **“Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang Melalui Upaya Penurunan Laju**

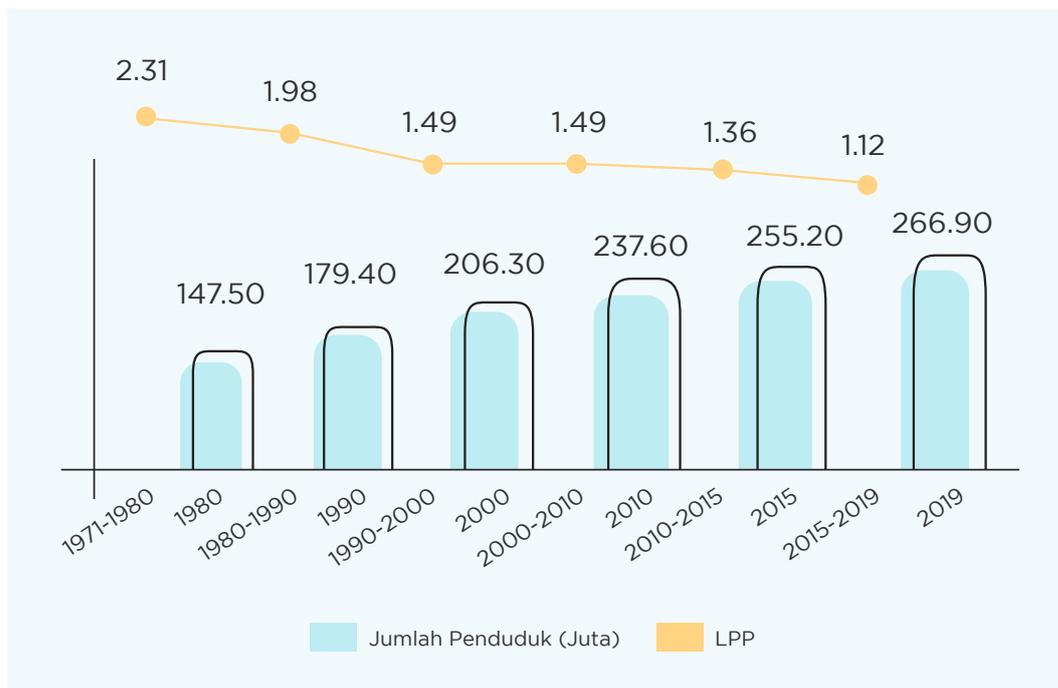
Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Perwujudan Keluarga Berkualitas” dengan target LPP tahun 2015-2019 sebesar 1,21.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk rata-rata per tahun dalam jangka waktu tertentu dan berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. LPP merupakan indikator kependudukan yang dipengaruhi oleh fertilitas/kelahiran,

mortalitas/kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Oleh karena itu, penurunan laju pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh pencapaian kinerja BKKBN,

namun dibutuhkan komitmen dan dukungan bersama dari instansi terkait. Berikut ini adalah gambaran tren laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 1971-2019.

Gambar 1.2.
Grafik Tren Jumlah Penduduk Indonesia dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1971 - 2019



Salah satu faktor penting yang mempengaruhi LPP adalah fertilitas yang diukur dengan TFR (*Total Fertility Rate*). Untuk mencapai PTS dibutuhkan penurunan fertilitas menjadi 2,1, sementara itu kondisi TFR Indonesia tahun 2017 adalah 2,4 sehingga masih diperlukan upaya dalam penurunan TFR. Pengendalian penduduk bukan semata-mata pada penurunan angka kelahiran secara terus menerus tetapi hendaknya TFR secara bertahap menurun hingga mencapai 2,1 untuk kemudian mempertahankan angka tersebut selama mungkin.

Berdasarkan analisis diatas, menunjukkan bahwa TFR memegang kunci penting dalam keberlangsungan bonus demografi. Dengan demikian, program pengendalian kuantitas penduduk seharusnya di masa mendatang harus tetap menjadi prioritas sebagai landasan

dalam pembangunan Indonesia. Hal ini ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan bonus demografi yang dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian dan pelestarian penduduk tumbuh seimbang di Indonesia.

Dalam pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), BKKBN harus dapat memenuhi kaidah-kaidah good governance yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan azas akuntabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Akuntabilitas ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan dalam peningkatan kinerja di lingkungan BKKBN, serta untuk mendapat masukan dari *stakeholders* dan mitra kerja guna perbaikan kinerja BKKBN yang berkelanjutan.



Gambar 1.1.
Kunjungan kerja di Papua

B Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

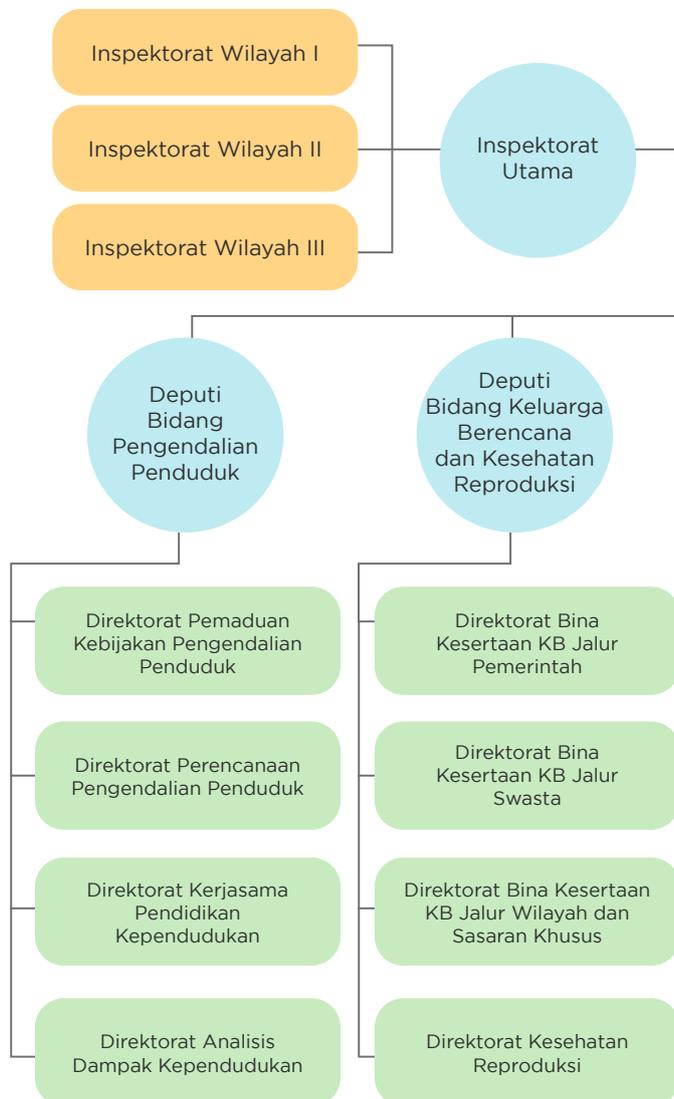
Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan nasional;
- Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi;

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan.

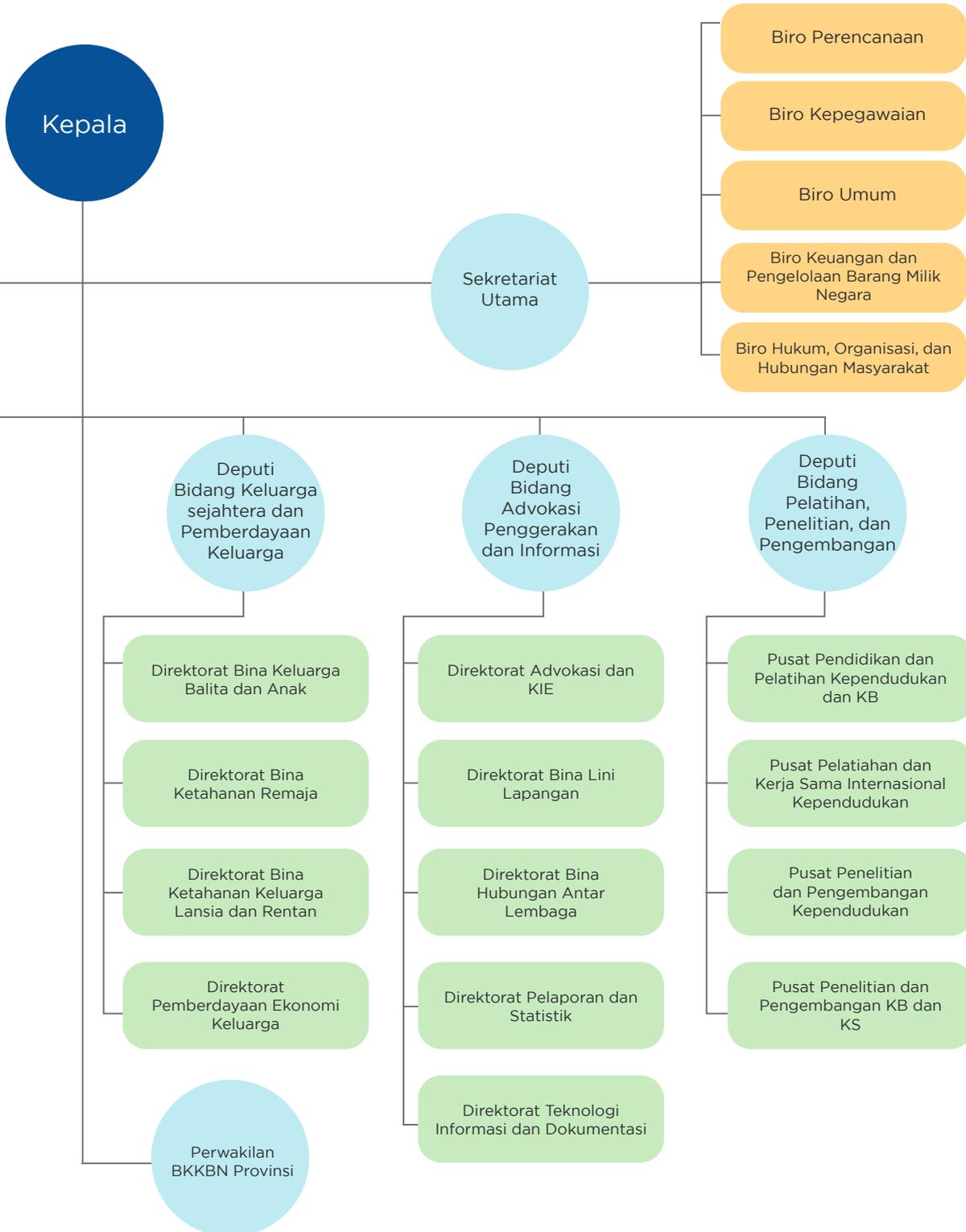


Keterangan:
 Jumlah Es I : 7
 Jumlah Es II : 29

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut, maka ditetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN tersebut, maka struktur organisasi dan tata kerja BKKBN adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3.
Struktur Organisasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



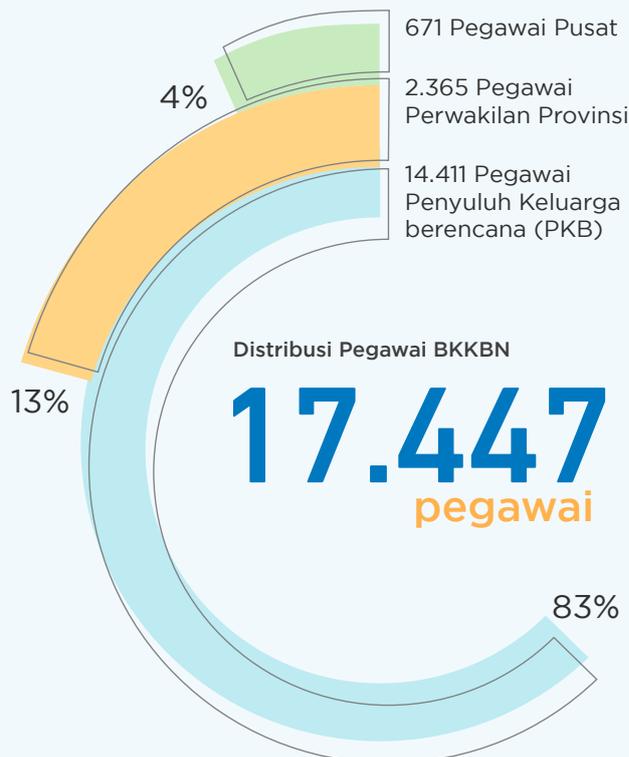
Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN, Kepala BKKBN dibantu oleh 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Kedepuyan Bidang Pengendalian Penduduk, Kedepuyan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kedepuyan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Kedepuyan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Kedepuyan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat provinsi, maka BKKBN memiliki instansi vertikal yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi di 32 Provinsi dan Balai Diklat di 8 Kab/Kota yaitu Bogor, Cirebon, Garut, Banyumas, Ambarawa, Pati, Malang, dan Jember. Dalam penyelenggaraan Program KKBPK di Provinsi DKI Jakarta dibentuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Untuk pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melimpahkan sebagian wewenang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana dekonsentrasi.

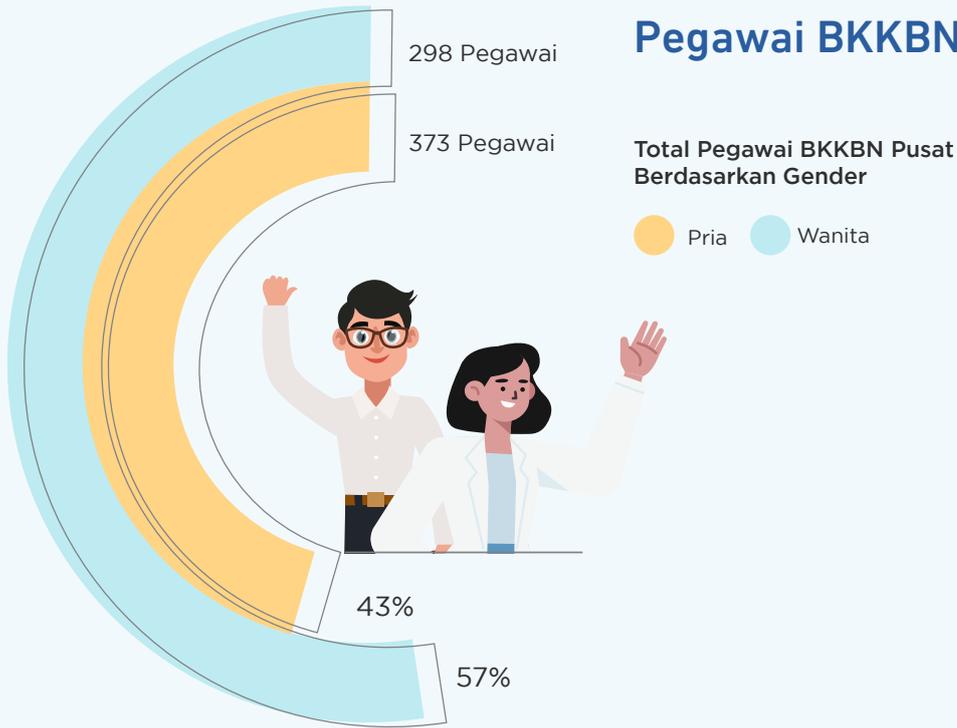
Dalam menjalankan tugasnya, BKKBN didukung oleh 17.447 orang pegawai (data per Desember 2019) yang terdiri dari 671 pegawai pusat (4%), 2.365 perwakilan provinsi (13%) dan 14.411 penyuluh keluarga berencana (83%) dari berbagai bidang keahlian seperti kependudukan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Secara umum, kondisi kuantitas pegawai BKKBN saat ini masih belum sesuai kebutuhan instansi. Namun, BKKBN berupaya untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja BKKBN. Profil Pegawai BKKBN Per Desember 2019 sebagai berikut:

Gambar 1.4.
Profil Demografi Pegawai BKKBN

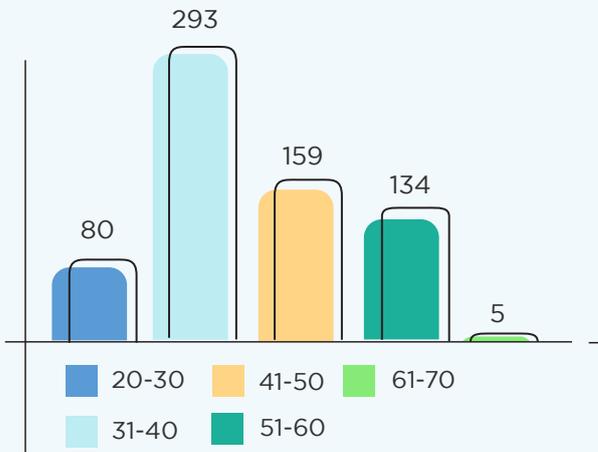
Distribusi Pegawai BKKBN



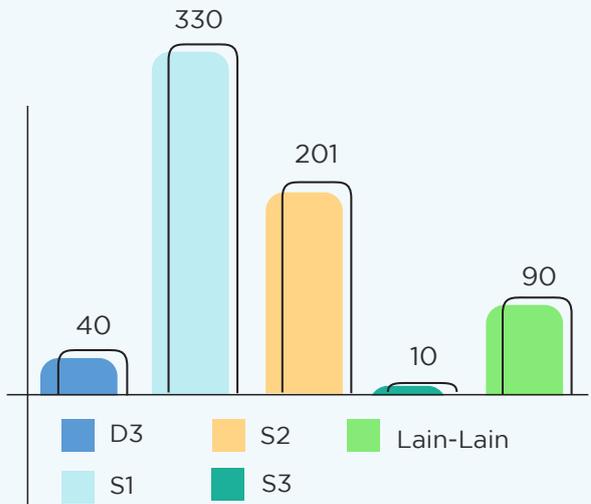
Pegawai BKKBN Pusat



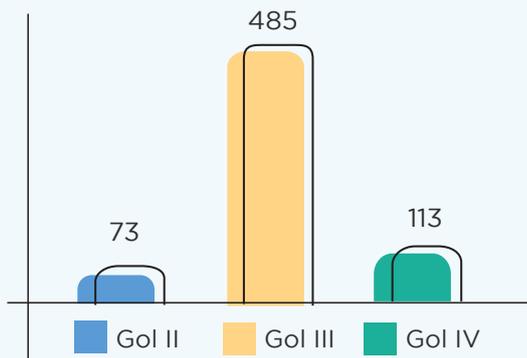
Pegawai BKKBN Berdasarkan Kelompok Umur

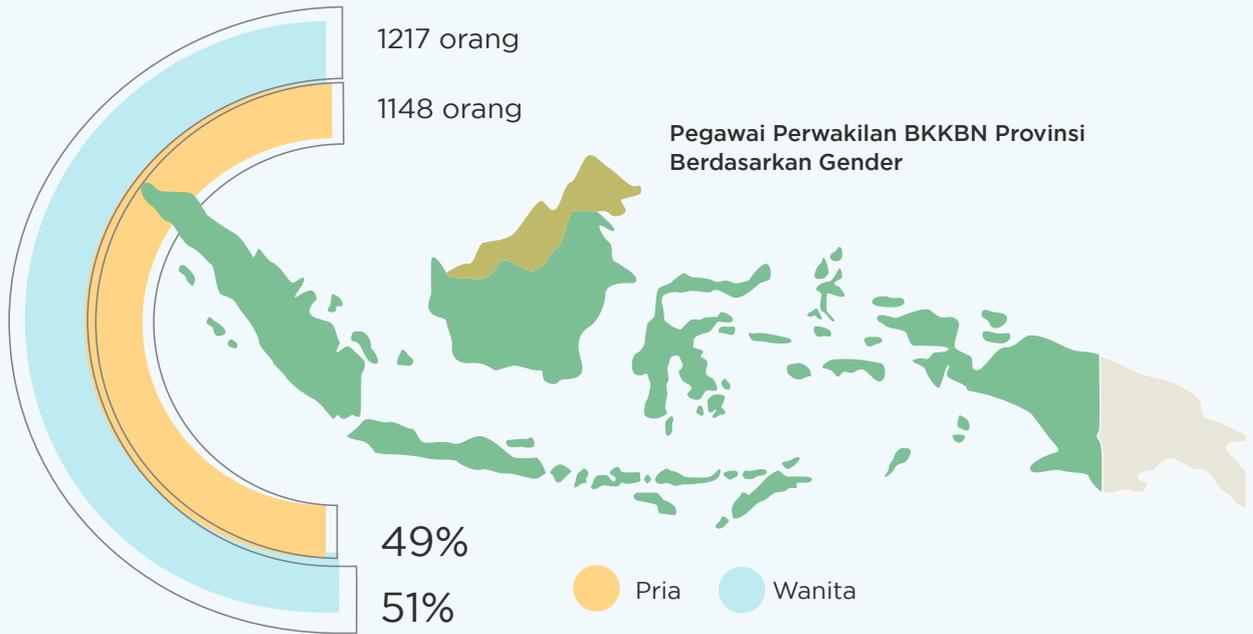


Pegawai BKKBN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

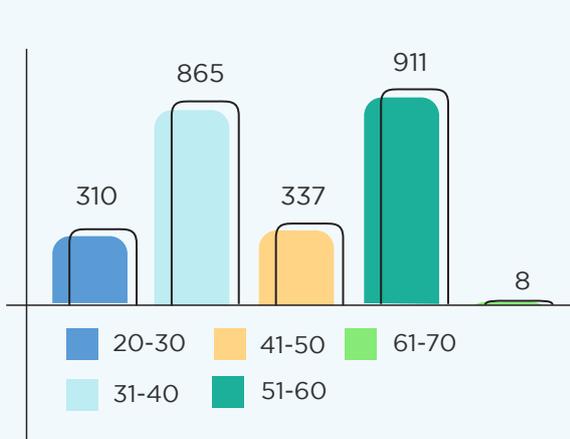


Pegawai BKKBN Berdasarkan Golongan

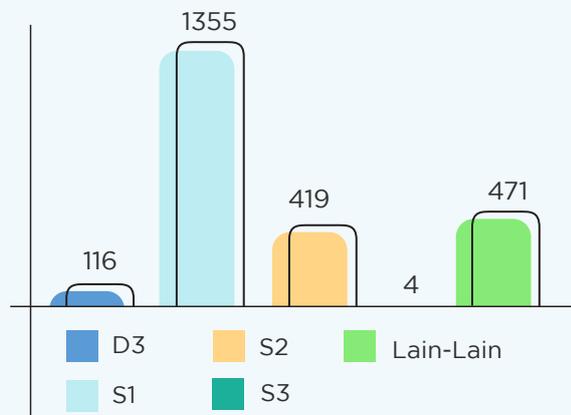




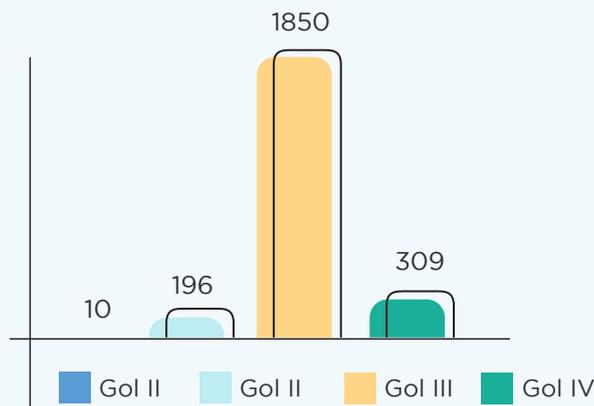
Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Berdasarkan Kelompok Umur



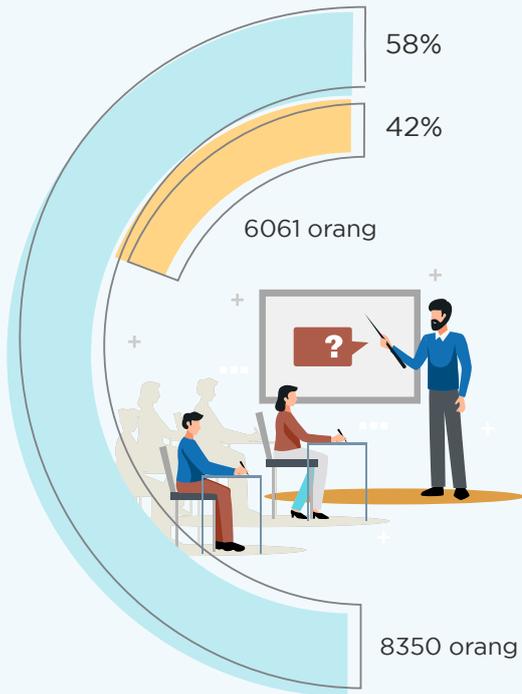
Pegawai BKKBN Provinsi Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Pegawai BKKBN Provinsi Berdasarkan Golongan



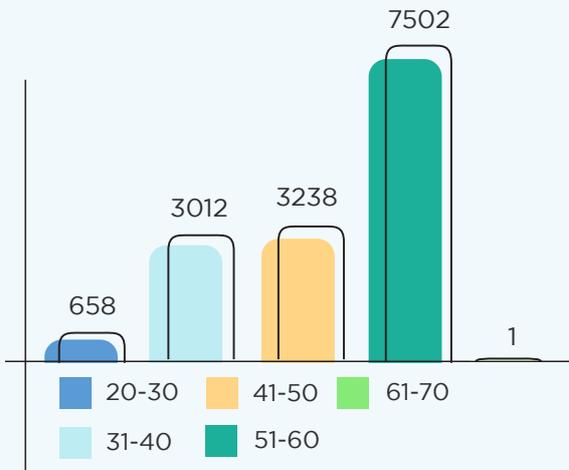
Penyuluh Keluarga Berencana



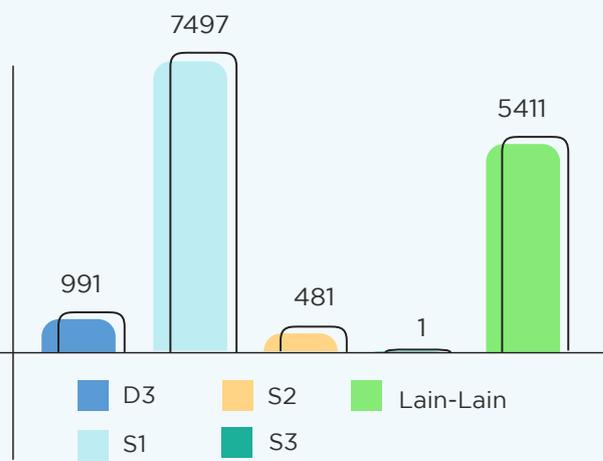
Penyuluh Keluarga Berencana Berdasarkan Gender



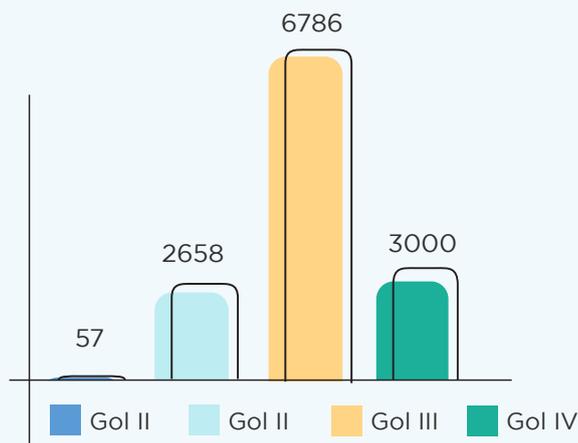
Penyuluh Keluarga Berencana Berdasarkan Kelompok Umur



Penyuluh Keluarga Berencana Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Penyuluh Keluarga Berencana Berdasarkan Golongan



C Mandat dan Peran Strategis



Mandat BKKBN

untuk mewujudkan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) sebagai berikut:

Cita ke-3, yaitu

3

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

Cita ke-5, yaitu

5

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

Cita ke-8, yaitu

8

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

BKKBN mempunyai peran strategis sebagai pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan periode 2015-2019, BKKBN diberikan mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terutama Cita ke-3, yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan", Cita ke-5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia" serta cita ke-8 yaitu "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa".

Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang dapat mengintegrasikan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Indonesia dari Pinggiran serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun sasaran yang ingin diwujudkan terkait agenda Nawa Cita dimaksud adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang didukung BKKBN

No.	Nawacita	Sasaran
1.	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan KKBPK (Mekanisme Operasional/Mekop) di lini lapangan oleh Petugas Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader) Implementasi Program KKBPK yang komprehensif dan sinergi lintas sektor melalui “Kampung KB”
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kespro (termasuk penyediaan Alokon), serta pemberian informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB Melaksanakan pembinaan Pembangunan keluarga melalui kelompok kegiatan (Poktan) bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB sesuai siklus hidup Menyelenggarakan Advokasi KKBPK kepada para pembuat kebijakan, serta promosi, KIE dan penggerakan langsung kepada masyarakat melalui Petugas Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader) Berkontribusi pada upaya penanganan stunting melalui sosialisasi 1000 HPK bagi keluarga yang memiliki Baduta Melaksanakan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga (bagi remaja) untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
3.	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan karakter sejak usia dini (anak) melalui Bina Keluarga Balita dan Anak Penguatan peran orang tua dalam membentuk karakter remaja melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), dan sosialisasi GenRe (Generasi Berencana) dengan sasaran langsung kepada remaja

Berdasarkan Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, BKKBN memiliki peran strategis dalam Agenda Pembangunan Nasional Nomor 6 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia”**. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata

di setiap wilayah dan kelompok masyarakat, melalui strategi:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem SJSN Kesehatan, dengan menata fasilitas kesehatan KB;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas

kesehatan KB dan kesehatan reproduksi serta jejaring pelayanan, yang didukung oleh pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB (persebaran fasilitas kesehatan pelayanan KB, baik pelayanan KB statis maupun mobile / bergerak);

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko *drop-out*, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, efektif, dan efisien.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan pelayanan pengayoman dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping;

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat



Audiensi bersama Menteri Sosial, Juliari P. Batubara

kontrasepsi KB, baik dengan keutamaan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang maupun metode kontrasepsi jangka pendek dengan tetap menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Selain itu juga dilakukan penguatan fungsi keluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera; dan
8. Penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.

Strategi tersebut juga menggambarkan peran strategis BKKBN sesuai Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa kebijakan nasional yang ditetapkan menjamin tercapainya bonus demografi, meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi, memberdayakan fungsi-fungsi keluarga, dan memperkuat semangat gotong rotong berbasis keluarga. Kebijakan nasional dalam bidang Pembangunan Keluarga lebih utama diarahkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, dan ekonomi, melalui upaya pembinaan berdasarkan siklus hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kementerian atau Lembaga wajib menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, BKKBN telah menetapkan NSPK bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.



Kunjungan kerja Papua

D Program Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan BKKBN secara umum telah dapat dilakukan dengan baik, seiring dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKKBN. Pelaksanaan RB-BKKBN pada periode *Road Map* 2015-2019 dilaksanakan melalui 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan mengacu *Road Map* RB -BKKBN yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi BKKBN Tahun 2015-2019. Pelaksanaan RB-BKKBN berdasarkan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai tertuang dalam Peta Jalan RB tersebut secara keseluruhan telah banyak membawa perubahan-perubahan. Berikut capaian Keberhasilan RB BKKBN 2015-2019:

Tabel 1.2.
Capaian Keberhasilan RB BKKBN 2015-2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2014)	Target 2019	Capaian	Keterangan
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini WTP Atas laporan keuangan	-	WDP	WTP	WTP	
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1-5	Belum ada	3	3	
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1-5	Baru akan dimulai	3	3.28	
	4. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)	-	B	BB	B	Nilai Tahun 2018, 2019 Belum di Keluarkan Menpan
Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 1-100	64,09	80,00	68,70	Nilai Tahun 2018, 2019 Belum di Keluarkan Menpan
	2. Indeks Kompetensi ASN BKKBN	Skor 1-100	Belum ada	80,00	Belum Ada	
	3. Indeks e-Government BKKBN	Skor 0-4	2,73	3,57	2.82	Nilai Tahun 2018, 2019 Belum di Keluarkan Menpan
Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	1. Indeks Integritas BKKBN	Skor 0-10	7.92	9	Belum ada	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KKBPK	%	87.5	95,00	94.3	Sangat Baik
	3. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	%	Belum ada	80,00	Belum ada	

Dilakukan melalui 8 (delapan) area perubahan yaitu:

1

Area perubahan 1

Perubahan Mental Aparatur

Perubahan Mental Aparatur pada Masing-masing Unit setara Eselon II untuk mendorong dan mendongkrak kinerja unit.

Para area ini telah dilakukan:



Pembentukan Tim RB-BKKBN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala No 87/KEP/B4/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKKBN, sebagaimana terlampir pada Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017



Pembentukan *Agent of Change* dengan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 114/KEP/B2/2018

2

Area perubahan 2

Penguatan Peraturan perundang-undangan

Penguatan Peraturan perundang-undangan sudah dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dengan mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di lingkungan BKKBN serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundangan yang diterbitkan

3

Area perubahan 3

Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu dengan telah disesuaikannya kebutuhan unit organisasi guna mendukung tugas dan fungsi melalui restrukturisasi kelembagaan. Penataan organisasi dilakukan oleh BKKBN antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap organisasi BKKBN, yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan tahapan dalam konteks penataan organisasi.

4

Area perubahan 4

Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata Laksana, secara umum dapat berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, melalui penetapan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penataan Tata Laksana (business process) di Lingkungan BKKBN dan Keputusan Kepala BKKBN Nomor

66/KEP/B4/2019 tentang Proses Bisnis di Lingkungan BKKBN guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam proses penyelenggaraan birokrasi di BKKBN, perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi di lingkungan BKKBN, serta penerapan sistem kearsipan yang handal.

Area perubahan 5

5 Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN sudah dapat dilaksanakan sesuai program kegiatan yang telah ditetapkan melalui :



Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi dengan Analisis Beban Kerja (ABK);



Terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun



Proses penerimaan pegawai dan promosi pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN



Pengembangan pegawai berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi



Promosi jabatan dilakukan secara terbuka. BKKBN telah menetapkan kebijakan tentang promosi terbuka



Penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Penilaian kinerja yang dilakukan melalui Sistem Informasi Visum Kinerja (SIVIKA) dan E-VISUM telah mempertimbangkan SKP dari masing-masing pegawai. Capaian kinerja yang didapatkan dari SIVIKA dan E-VISUM menjadi dasar salah satu komponen dalam perhitungan Tunjangan Kinerja.



Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan



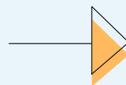
Telah dilakukan Analisis Jabatan, Dokumen Uraian Jabatan/ Informasi Jabatan Struktural dan Fungsional



Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi ([simsdm.bkkbn.go.id](https://www.simsdm.bkkbn.go.id))



Berdasarkan penilaian Komisi ASN, implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan BKKBN telah mencapai kategori III (baik) dengan nilai 310,5 dan indeks 0,77



6

Area perubahan 6

Penguatan sistem Pengawasan

telah mencapai:

Tingkat Maturitas SPIP

3,285

dari target Road Map RB sebesar 3

2

Unit Kerja

mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN dan RB yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Level 3

Level kapabilitas APIP BKKBN telah mencapai Level 3 dari target Road Map RB sebesar 3

7

Area perubahan 7

Penguatan Akuntabilitas

sudah dapat berjalan sesuai yang diharapkan melalui langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai keselarasan perencanaan dengan capaian pelaksanaan sebagai berikut :



Penyusunan *White Paper* Program KKBPK 2020-2024



Penetapan Perjanjian Kinerja BKKBN yang dapat diakses publik pada website resmi BKKBN (<https://www.bkkbn.go.id/pages/perjanjian-kinerja>)



Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program (Radalgram) melalui *Video Conference* dengan seluruh unit kerja BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi



Pelaksanaan *Workshop* Penyusunan LAKIP



Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja



Pengukuran Kinerja berbasis elektronik (SMART, E-Monev)



Penyusunan Renstra 2020-2024



Penyusunan Perjanjian Kinerja yang *dicascade* hingga unit Eselon IV

8

Area perubahan 8

Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Publik telah dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah yang dilakukan oleh BKKBN dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:



Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BKKBN dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 81 Tahun 2018



Membangun Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)



Menerapkan *Citizen Charter* (Maklumat Pelayanan)



Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur). Penerapan SOP menjadi bagian dari tindak lanjut penyempurnaan SOP yang telah dilakukan pada program penataan tatalaksana



Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BKKBN. Secara rutin, BKKBN melakukan survei untuk mengetahui kepuasan para pengguna, dan mengetahui berbagai kelemahan internal;



Meningkatkan inovasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan yaitu Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Penyuluhan untuk tenaga Penyuluh KB dan untuk Mitra.



Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia, yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, BKKBN mengembangkan dan mendekatkan layanan KB dengan membentuk program kampung KB, selain untuk mendekatkan layanan kampung KB juga bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Pemerintah juga berkewajiban mewujudkan ketersediaan, alat dan obat kontrasepsi di seluruh wilayah NKRI;

Gambar 1.5.

Ruang Pelayanan Publik dan Pelayanan KIE

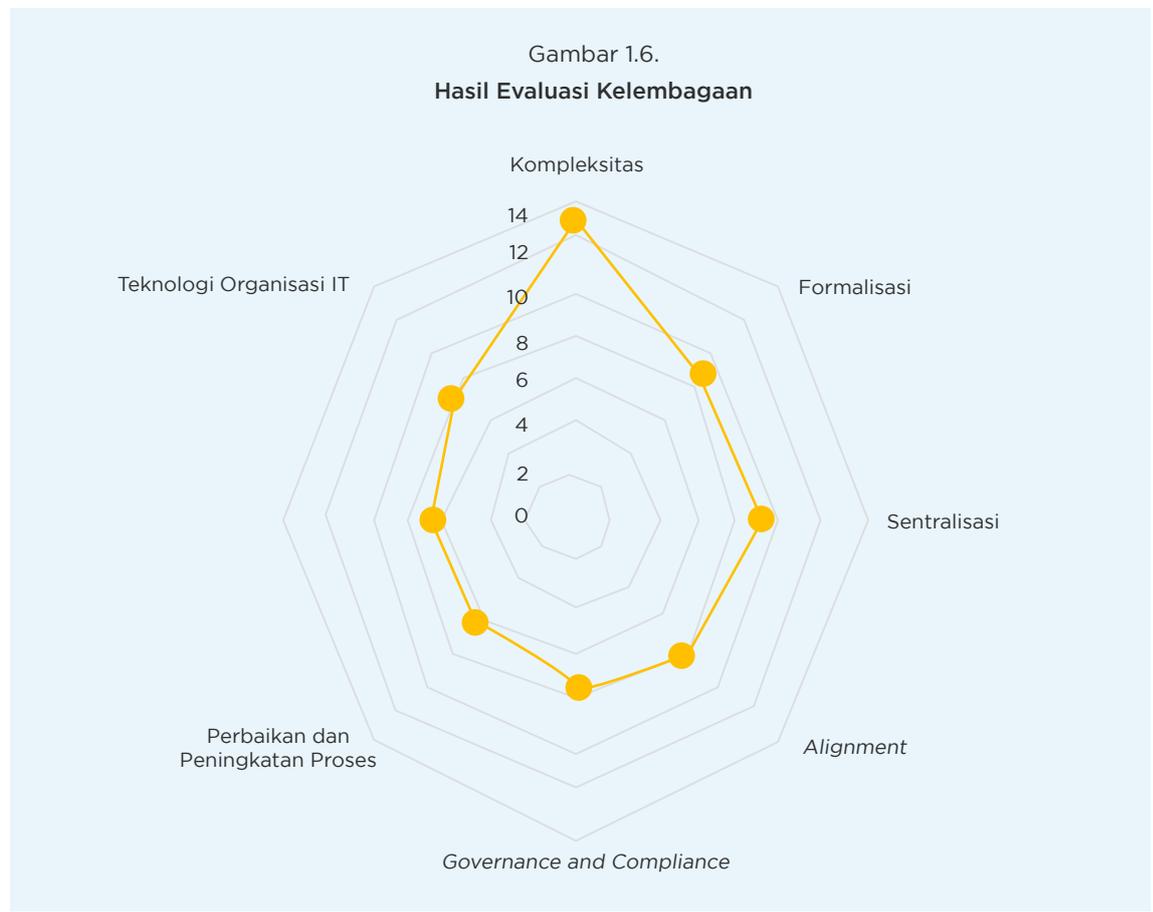


E Restrukturisasi Kelembagaan

Sejak pelantikan Kepala BKKBN pada 1 Juli 2020, salah satu program kerja 100 hari yang dicanangkan oleh Kepala BKKBN adalah melakukan Restrukturisasi Kelembagaan termasuk *Rebranding* BKKBN. Penataan organisasi dilakukan oleh BKKBN antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap organisasi BKKBN, yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan tahapan dalam konteks penataan organisasi. Upaya yang dilakukan untuk menuju arah yang diinginkan BKKBN antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
- b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit organisasi;
- c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit serta terhadap Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat unit kerja yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, contoh pada Biro Hukum dan Humas terdapat 3 (tiga) bagian yang berbeda yaitu Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Gambar 1.6.
Hasil Evaluasi Kelembagaan



- d. Penyusunan Kerangka Kelembagaan yang akan menjadi bagian dalam Renstra BKKBN, kesesuaian kelembagaan dengan Renstra dimaksudkan agar terjadi *organization follow process* dan *process follow strategic* agar lebih jelas dan tergambar pengukuran *output* kegiatan dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* (KPI) sehingga akan menjadikan BKKBN lebih fokus dan lebih responsif terhadap pelaksanaan desentralisasi. Adopsi pendekatan organisasi yang mengutamakan pelayanan pada pelanggan dimaksudkan untuk membantu memberikan visualisasi fungsi-fungsi dalam organisasi dan proses kerjanya.
- e. Perubahan Organisasi, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi guna mewujudkan organisasi yang ramping, efektif dan efisien melalui surat usulan Restrukturisasi BKKBN Kepada Kementerian PAN dan RB Nomor 134/OT.04/B4/2020 Tanggal 14 Januari 2020. Dalam usulan tersebut, BKKBN telah memangkas jabatan administrator dari 271 menjadi 43, sedangkan untuk jabatan pengawas telah dilakukan pemangkasan secara keseluruhan sejumlah 821 jabatan pengawas (100%).

Pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Prioritas Kerja tahun 2019-2024 antara lain Prioritas Ke 4 (empat) yaitu Reformasi Birokrasi melalui Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dimaksud adalah menyederhanakan eselonisasi hanya menjadi 2 (dua) layer. Kebijakan tersebut berimplikasi pada 440.029 pejabat struktural (Eselon III-IV) yang harus beralih menjadi pejabat fungsional. Sesuai dengan prioritas kerja tersebut, BKKBN menindaklanjuti arahan penyederhanaan birokrasi pada 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1) Aspek Organisasi

Pada aspek ini dilakukan penyusunan kriteria unit organisasi jabatan administrasi (Eselon III ke bawah) yang dapat dan tidak

dapat dialihkan menjadi jabatan fungsional. Selanjutnya, dilakukan pemetaan kesesuaian unit organisasi jabatan administrasi yang dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan.

2) Aspek Tata Laksana

Pada aspek ini dilakukan pengalihan kewenangan manajerial jabatan administrasi menjadi kewenangan jabatan fungsional. Selain itu, dilakukan pengaturan tata kerja diantara Jabatan Pimpinan Tinggi dengan fungsional dan antar jabatan fungsional. Pada aspek ini didorong penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

3) Aspek Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada aspek ini dilakukan penyiapan dan penyediaan jabatan fungsional yang akan menjadi jabatan pengganti jabatan administrasi. Selanjutnya dilakukan pemetaan mengenai kesetaraan tunjangan jabatan administrasi dengan tunjangan jabatan fungsional.

BKKBN telah melakukan identifikasi terhadap jabatan administrator dan pengawas yang dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan. Dari 251 pejabat administrator yang ada di BKKBN, diputuskan sebanyak 217 jabatan administrator (87%) dialihkan menjadi jabatan fungsional, dan sebanyak 34 jabatan administrator tidak dialihkan. Hasil identifikasi terhadap 821 jabatan pengawas yang ada di BKKBN, hasilnya adalah 821 jabatan pengawas (100%) dapat dialihkan. Hasil pemetaan tersebut telah diusulkan Kepala BKKBN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 2863/KP.03/B2/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Reformasi Jabatan Administrator (JA) ke Jabatan Fungsional (JF). Usulan ini juga dilengkapi dengan perbandingan tunjangan jabatan yang eksisting dengan proyeksi tunjangan jabatan yang akan diperoleh.

F Permasalahan, Tantangan dan Peluang

F.1. Permasalahan dan tantangan

1. Dalam pelaksanaan program, beberapa permasalahan diantaranya:
 - a. Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mengelola program bidang pengendalian penduduk pada pemerintahan daerah;
 - b. Belum ada revisi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional dan masih rendahnya capaian penyusunan GDPK di daerah (provinsi dan kab/kota);
 - c. Belum optimalnya keberadaan dan ketersediaan data di level kab/kota menyebabkan penentuan parameter pembangunan kependudukan sebagai bahan perencanaan pembangunan mengalami kesulitan;
 - d. Belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Belum optimalnya keterpaduan/sinkronisasi kebijakan dan program Pengendalian Penduduk lintas sektor dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. Belum meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan isu pengendalian penduduk dikarenakan pergantian pengelola pelaksanaan pengendalian penduduk di masing-masing provinsi;
 - g. Belum seluruh Program KKBPK menjadi prioritas daerah sehingga pengelolaan program KBKR di lini lapangan belum memadai;
 - h. Belum maksimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan sebagai wadah

pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di desa maupun di Kampung KB.

2. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, BKKBN belum dapat menunjukkan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi yang signifikan dikarenakan masih ditemukan beberapa rekomendasi tindak lanjut dari Kementerian PAN dan RB.

F.2. Peluang

1. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang untuk restrukturisasi kelembagaan BKKBN
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Adanya dukungan komitmen dari *stakeholders* dan mitra kerja



G Isu Strategis

Rebranding BKKBN

Isu strategis BKKBN pada tahun 2019 yaitu kebijakan *rebranding* dilakukan sebagai upaya BKKBN dalam merespon lingkungan strategis yang terus berubah dan lebih mendekati pada khalayak sasarannya, yaitu generasi x, milenials dan zilenial. Konstituen utama BKKBN saat ini adalah para millennials yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Dari 255 juta penduduk Indonesia, terdapat 81 juta generasi millenials atau penduduk berusia 19-39 tahun. Millennials dianggap istimewa karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup, dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pemahaman Program KKBPK karena pendekatan untuk era *Baby Boomer* (lahir di era 1946- 1955) sudah dianggap tidak relevan dengan perubahan kondisi saat ini.

Dengan khalayak sasaran yang berubah dan kondisi arus informasi yang bebas, cepat dan cenderung tidak akurat, BKKBN merasa perlu membangun posisi baru yang menjadikannya tetap relevan dan terpercaya dalam informasi pembangunan keluarga berkualitas, yang merefleksikan hubungan antara program pemerintah dengan khalayaknya. Adapun hasil yang telah dicapai dari Program *Rebranding* BKKBN 2019 antara lain sebagai berikut:

- Terciptanya aransemen baru Mars KB yang sesuai dengan era masa kini yang merepresentasikan citra BKKBN yang baru, segar dan menjadi sahabat bagi keluarga Indonesia;
- Terciptanya *jingle* BKKBN sebagai bentuk promosi komunikasi BKKBN kepada masyarakat luas;
- Terciptanya logo BKKBN;
- Terciptanya *tagline* BKKBN;

Tindak lanjut *Rebranding* BKKBN di tahun berikutnya adalah:



Mengelola logo, *tagline*, dan *jingle* yang terpilih untuk diaplikasikan menjadi unsur tetap *branding* BKKBN;



Menetapkan landasan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;



Sosialisasi, promosi dan publikasi melalui berbagai media



Penyesuaian terhadap seluruh produk internal BKKBN (seragam, atribut, interior, pesan promosi dan lain-lain)



Menjaga konsistensi implementasi *rebranding* BKKBN.



Perencanaan Kinerja

B A B 02

A. Rencana Strategis	37
B. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2019	40
C. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2020	46
D. Perjanjian Kinerja	53
E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis	59
F. Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	65

A Rencana Strategis



Visi



Misi

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada Visi Pemerintah Indonesia (Kabinet Kerja) 2015-2019 yaitu :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:



Mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;



Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;



Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;



Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;



Mewujudkan Indonesia yang Berdaya Saing



Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional



Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Tujuan



Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”

Selaras dengan misi pembangunan Pemerintah Indonesia (Kabinet Kerja) 2015-2019, BKKBN memiliki peran strategis, khususnya pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Peran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang unggul dengan peningkatan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan, BKKBN tidak menetapkan visi dan misi tersendiri sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna di Istana Merdeka tanggal 27 Juli 2016, bahwa yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh Kementerian/Lembaga satu suara mendukung visi misi tersebut. Arahan tersebut juga masih berlaku dan diingatkan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pertama di

Istana Merdeka bersama Menteri dan sejumlah petinggi Lembaga pada tanggal 24 Oktober 2019. Dengan demikian sesuai dengan peran strategisnya, maka BKKBN menetapkan tujuan strategis BKKBN sesuai yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2015-2019 adalah “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan perwujudan keluarga berkualitas melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang diharapkan dapat mencapai 1,21 pada akhir tahun periode RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019. Lebih lanjut, dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan sebagaimana diatas, BKKBN melaksanakan kebijakan dan strategi yang bermuara pada 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai pada periode 2015-2019.

A.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Penjabaran tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dalam lima tahun sesuai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan,

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BKKBN
Periode 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun						
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas	1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun) (Rata-rata kelahiran)	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
		2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/CPR</i>) (Persen)	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3
		3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%) (Persen)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
		4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP (Persen)	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50
		5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%) (Persen)	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6

A.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Renstra 2015-2019, BKKBN menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu:

Gambar 2.1.
Arah Kebijakan BKKBN
Periode 2015-2019



B Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2019

B.1 Dukungan BKKBN pada Prioritas Nasional Tahun 2019

Prioritas Nasional Tahun 2019 dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Dalam RKP tersebut, telah disepakati Prioritas Nasional (PN) yang meliputi :

Gambar 2.2.
Prioritas Nasional Tahun 2019



Dari kelima PN tersebut, BKKBN berkontribusi pada PN 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Selanjutnya, PN 1 dijabarkan menjadi 5 (lima) Program Prioritas (PP) meliputi (1) Percepatan Pengurangan Kemiskinan; (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) Pemerataan Layanan

Pendidikan Berkualitas; (4) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar. BKKBN mengambil peran pada PP 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 2.3.

Kerangka PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Selanjutnya, PP 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dijabarkan menjadi 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP) seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.4.

Kerangka PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Dasar



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas (KP) 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, BKKBN berkontribusi melalui *Output* Proyek Prioritas Nasional yang terdiri dari:

1. pemenuhan ketersediaan alokon di Faskes yang melayani KB di 33 Provinsi;
2. promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan;
3. penguatan peran Pusat Informasi Konseling (PIK) remaja dan Bina Ketahanan Remaja

(BKR) dalam edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu.

Disamping itu, BKKBN turut mendukung KP 2. Percepatan Penurunan Stunting, melalui *Output* Proyek Prioritas Nasional yaitu Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki Baduta. Dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah tahun 2019, BKKBN melaksanakan Proyek Prioritas Nasional dengan *output* prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Output Prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Tahun 2019

No	Proyek Prioritas Nasional	Target
Pusat		
1.	Proyek pemenuhan ketersediaan alokon (faskes)	529 faskes
Perwakilan BKKBN Provinsi		
2.	Proyek pemenuhan ketersediaan alokon (faskes)	18.257 faskes
3.	Proyek keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK (keluarga)	2.831.614 keluarga
4.	Proyek penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu (kelompok)	29.327 kelompok
5.	Proyek promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan (kelompok)	66.267 kelompok

B.2 Rencana Kerja Tahun 2019

Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan penjabaran program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BKKBN 2015-2019. Penyusunan Renja BKKBN dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif K/L yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah. Renja BKKBN disusun berdasarkan hasil kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral*

Meeting) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BKKBN.

Renja memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Renja berisi indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta rencana kegiatan. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Target dan Alokasi Anggaran yang tertuang dalam Renja 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis,
 Target dan Alokasi Anggaran BKKBN Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Alokasi 2019
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate</i> /TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,28	951.560.611.000
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate</i> /CPR)	61,3	671.029.881.000
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	9,91	575.055.851.000
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	23,50	719.703.948.000
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	24,6	905.471.642.000
TOTAL				3.822.821.933.000

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terdiri dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I; Kedepuitan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kedepuitan Bidang Pengendalian Penduduk, Kedepuitan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dan Kedepuitan Advokasi, Penggerakan dan Informasi. Selain itu, BKKBN juga melaksanakan 3 (tiga) Program Generik yaitu Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama; dan Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN (Lalitbang) yang dilaksanakan oleh Kedepuitan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Adapun sasaran dan indikator kinerja masing-masing program sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

No.	Program	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	
I	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1.	Jumlah peserta KB baru/PB (juta)	7.33
			2.	ASFR 15 - 19 tahun	38 per 1000 perempuan 15-19 tahun
			3.	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	70
			4.	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	50
			5.	Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	52
			6.	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	50
			7.	Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1.	Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program dan pengendalian penduduk dan KB	1
			2.	Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
			3.	Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	5
			4.	Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	63% pengembangan SDM
			5.	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4
			6.	Jumlah dukungan manajemen pengelolaan Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov

No.	Program	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target 2019
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK			
			1.	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	0% (dari satker yang diaudit eksternal)
			2.	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi	34 prov
IV	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK			
			1.	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	100% SDM Aparatur
			2.	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1
			3.	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3
			4.	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,4 (dari skala 1-4)
			5.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi	34 prov

C Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2020

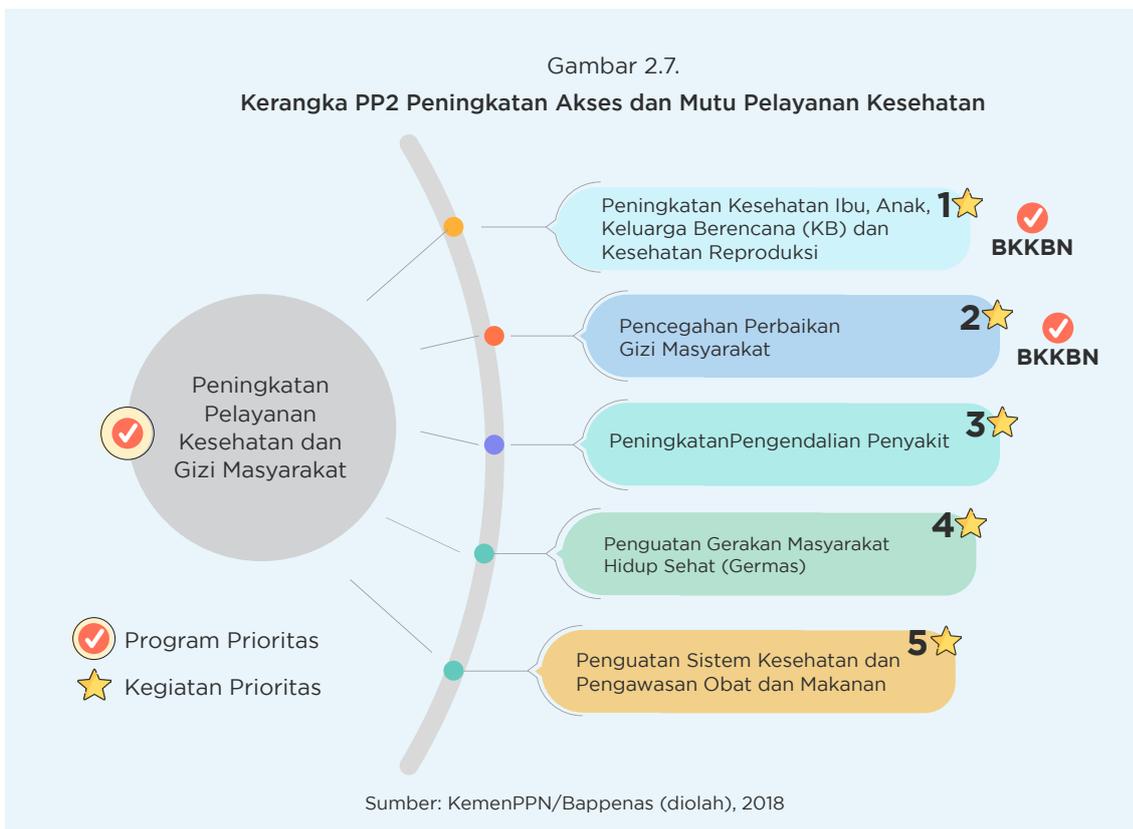
C.1 Dukungan BKKBN Pada Prioritas Nasional Tahun 2020

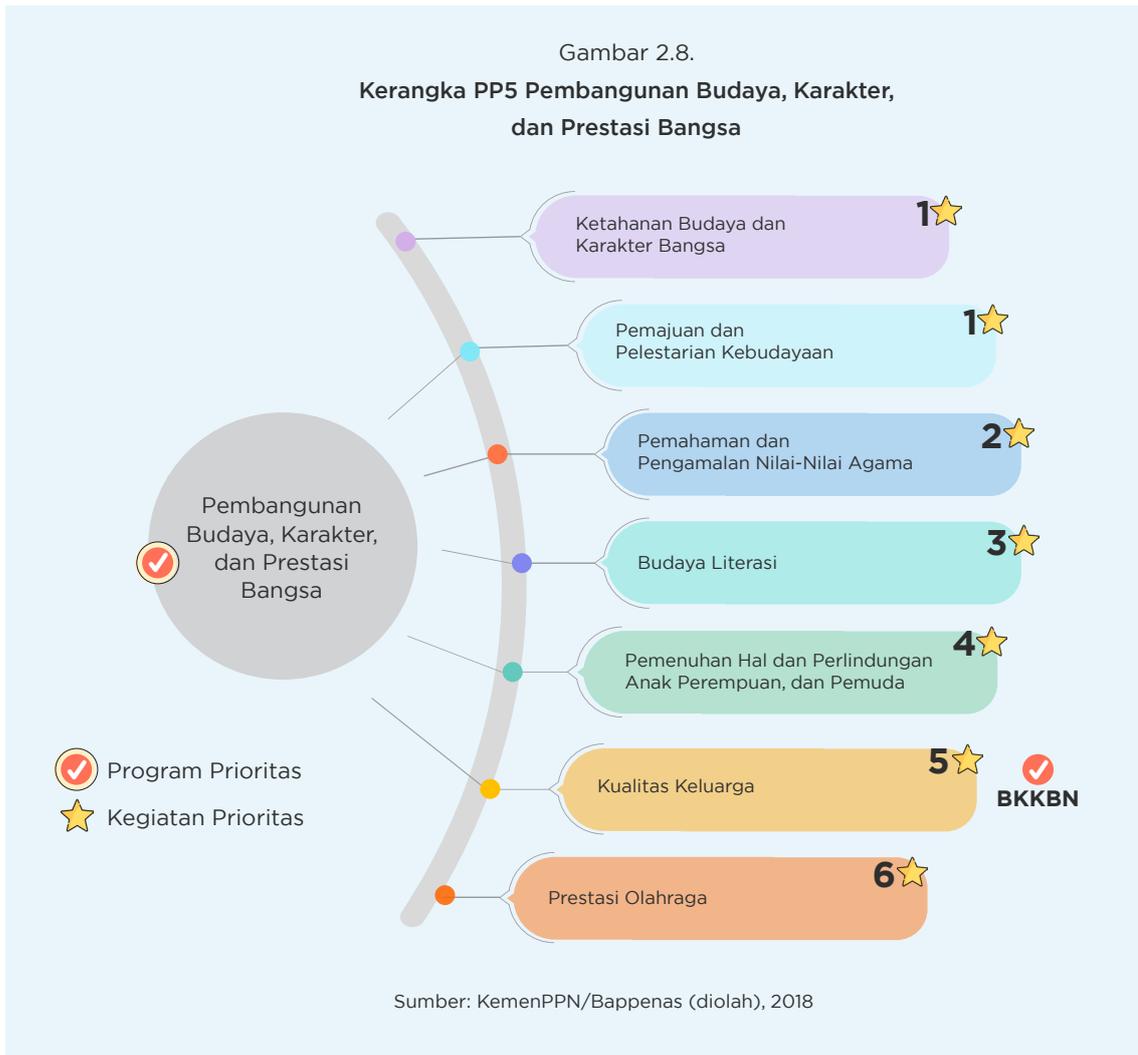
Prioritas Nasional Tahun 2020 dirumuskan oleh Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Dalam RKP tersebut, telah disepakati Prioritas Nasional (PN) yang meliputi: (1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; (2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah; (3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; (4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan (5) Stabilitas pertahanan dan keamanan. Dari kelima PN tersebut, BKKBN berkontribusi pada PN 1 Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, PN 1 dijabarkan menjadi 5 (lima) Program Prioritas (PP) meliputi (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa. BKKBN mengambil peran pada PP 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, PP 2 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan PP 5 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa sebagaimana gambar berikut:



Program Prioritas selanjutnya dijabarkan menjadi Kegiatan Prioritas (KP) seperti pada gambar di bawah ini:





Dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah tahun 2020, BKKBN melaksanakan Proyek Prioritas Nasional dengan *output* prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Output Prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Tahun 2020

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Output Prioritas	Target
Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia & Pengentasan kemiskinan				
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Lanjut Usia	Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi Lansia	9.984 kelompok BKL
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB & Kesehatan Reproduksi	Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes (Pusat & 33 provinsi)	1. Pusat: 529 faskes; 2. 33 Provinsi: 17.864 faskes

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Output Prioritas	Target
	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penurunan Stunting	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	4.122.784 keluarga
Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa	Kualitas Keluarga	Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	29.327 kelompok

C.2 Rencana Kerja Tahun 2020

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan penjabaran program dan kegiatan pada tahun peralihan (antara RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019 menuju Periode RPJMN/Renstra 2020-2024), sehingga dalam penjabarannya tetap mengacu pada Renstra BKKBN 2015-2019 dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, indikator dan kegiatan prioritas pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Renstra BKKBN 2020-2024.

Penyusunan Renja BKKBN dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif K/L yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema

prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah. Renja BKKBN disusun berdasarkan hasil kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BKKBN. Renja memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Renja berisi indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta rencana kegiatan. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Target dan Alokasi Anggaran BKKBN yang tertuang dalam Renja 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Target dan Alokasi Anggaran BKKBN Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Alokasi 2020 (Ribu)
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,26	1.005.213.984
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	61,78	2.504.855.038
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	8,60	60.106.917

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Alokasi 2020 (Ribu)
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	25,11	0
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25,79	11.378.121
TOTAL				3.581.554.060

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terdiri dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I; Kedepuitan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kedepuitan Bidang Pengendalian Penduduk, Kedepuitan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dan Kedepuitan Advokasi, Penggerakan dan Informasi. Selain itu, BKKBN juga melaksanakan 3 (tiga) Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya BKKBN yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama; dan Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN (Lalitbang) yang dilaksanakan oleh Kedepuitan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja masing-masing program sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

No	Program	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020
I	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1. Jumlah peserta KB baru/PB	7.550.045 peserta KB
			2. ASFR 15 - 19 tahun	25 per 1000 perem puan 15-19 tahun
			3. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50 %
			4. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	50 %
			5. Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	52
			6. Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	50 %

No	Program	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020
			7. Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1 data dan informasi
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1. Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program dan pengendalian penduduk dan KB	1
			2. Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
			3. Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	5 dokumen
			4. Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	63% pengembangan SDM
			5. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4
			6. Jumlah dukungan manajemen pengelolaan Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1. Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	0% (dari satker yang diaudit eksternal)
			2. Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi	34 prov

No	Program	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020	
IV	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	1.	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	100%
			2.	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1 Lembaga diklat
			3.	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3 MoU
			4.	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,4 (dari skala 1-4)
			5.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi	34 provinsi



Gambar 2.9.
Kunjungan Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Muhadjir Effendy

D Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil maka dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) BKKBN. PK merupakan penjabaran atas Renstra sehingga seluruh pelaksanaan BKKBN dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra.

Target Perjanjian Kinerja BKKBN tahun 2019 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target yang sudah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam

dokumen perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BKKBN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dokumen tersebut mencakup: (1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja BKKBN Tahun 2019; (2) Indikator Kinerja Utama dan target BKKBN Tahun 2019 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja BKKBN merupakan penjabaran dari Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Renja dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut (Tabel 2.8 dan Tabel 2.9):

Tabel 2.8
Sasaran Strategis Renstra, Renja Tahun 2019
dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BKKBN

Tujuan pada Renstra	Sasaran Strategis			
	No.	Renstra Tahun 2015-2019	Renja Tahun 2019	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas	1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
	2	Meningkatnya <i>Prevalensi Kontrasepsi</i> (CPR)	Meningkatnya <i>prevalensi kontrasepsi</i> (CPR)	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
	3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)
	4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	5	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

Berdasarkan hasil pemetaan sasaran strategis diatas dapat dilihat bahwa seluruh sasaran strategis yang ada dalam Renstra BKKBN terdapat dalam Rencana Kerja dan Perjanjian

Kinerja BKKBN. Selanjutnya, keterkaitan indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja BKKBN tahun 2019 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Renstra, Renja Tahun 2019
dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BKKBN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		
		Renstra Tahun 2015-2019	Renja Tahun 2019	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	Persentase pemakaian kontrasepsi <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ CPR</i>)	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP
5	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)

Gambar 2.10.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019



Gambar 2.11.

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019



Pada tahun 2019, Penandatanganan Perjanjian Kinerja BKKBN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2019 dan bulan September 2019. Penandatanganan Perjanjian Kinerja BKKBN dilakukan pada bulan Januari 2019 untuk memenuhi kaidah waktu penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Penandatanganan perjanjian kinerja pada bulan Januari 2019 dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Provinsi, namun belum dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala BKKBN dikarenakan belum adanya pejabat definitif yang dilantik sebagai Kepala BKKBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian apabila terjadi kondisi salah satunya pergantian atau mutasi pejabat. Sekaitan dengan adanya pelantikan dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) sebagai Kepala BKKBN

dan merujuk kepada Peraturan dimaksud, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN dan revisi penandatanganan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi pada bulan September 2019 bertepatan dengan dilaksanakannya kegiatan KOREN II BKKBN TA 2020 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Perjanjian Kinerja BKKBN Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 56/KEP/B1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019, Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Kepala BKKBN dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mencakup sasaran program, indikator kinerja, target, serta anggaran per kegiatan di lingkup kerja masing-masing Pimpinan Tinggi Madya dimaksud. Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Kepala BKKBN dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi mencakup sasaran strategis, sasaran program, sasaran Proyek Prioritas Nasional (Pro PN), sasaran strategis di luar Renstra, indikator kinerja, target, serta anggaran dari kegiatan pengelolaan program KKBPK Provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan perjanjian kinerja dengan Pejabat

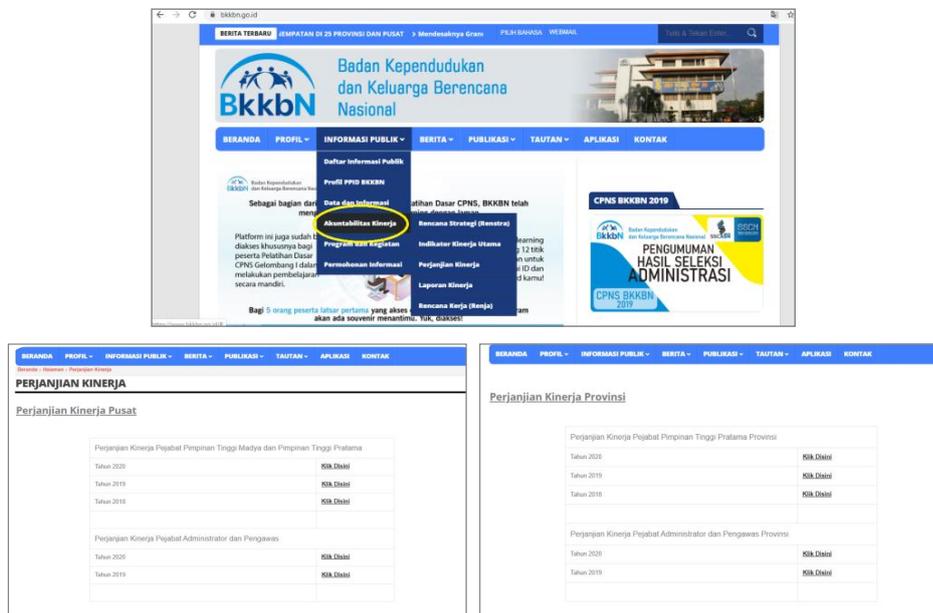
Pimpinan Tinggi Pratama dengan bidangnya masing-masing mencakup sasaran yang berkenaan, indikator kinerja (indikator kinerja RPJMN, indikator kinerja Renstra, dan indikator strategis diluar renstra) serta anggaran dari kegiatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.

Sebagai upaya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di BKKBN sekaligus untuk menindaklanjuti rekomendasi reformasi birokrasi dari Kementerian PAN dan RB berupa penyempurnaan ukuran kinerja secara berjenjang, maka BKKBN melakukan penjenjangan (*cascading*) penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan BKKBN tingkat Pusat dan Provinsi. Penyusunan penjenjangan perjanjian kinerja ini dilakukan dengan mengacu pada Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor

2735/I/RC.01/B1/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan BKKBN Tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut berisi indikator kinerja dan target kinerja yang merupakan penjenjangan dari indikator kinerja dan target kinerja atasan langsung sehingga diharapkan adanya keselarasan dan hubungan kausalitas dalam pencapaian kinerja atasan. Hubungan kausalitas kinerja individu dengan atasan dapat dilihat melalui pohon kinerja yang telah disusun pada masing-masing unit kerja.

Dalam rangka terselenggaranya transparansi akuntabilitas kinerja sektor pemerintah dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka BKKBN menyediakan akses informasi publik terkait dokumen akuntabilitas kinerja termasuk Perjanjian Kinerja pada website resmi BKKBN (<https://www.bkkbn.go.id/pages/perjanjian-kinerja>)

Gambar 2.12.
Tangkapan Layar Akuntabilitas Kinerja



Selanjutnya, pada level individu, Perjanjian Kinerja dijadikan dasar penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan surat Sekretaris Utama Nomor 4404/KP.08.01/B2/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 dan Sasaran Kerja Pegawai 2020. SKP sebagai rencana kerja dan perjanjian kinerja pegawai selama

1 (satu) tahun telah dihubungkan dengan Sistem Informasi Visum Kinerja (SIVIKA) sebagai instrumen penilaian kinerja harian pegawai. Pada awal tahun 2019, BKKBN telah meluncurkan SIVIKA versi 2.0 yang merupakan pengembangan dari SIVIKA versi 1.0 yang sebelumnya digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN non Penyuluh Keluarga

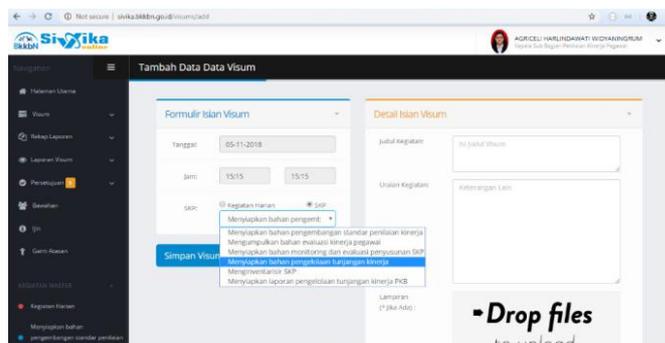
Berencana (PKB). SIVIKA sebagai bagian dalam sistem pengukuran dan penilaian kinerja pegawai yang terintegrasi dengan kebijakan pemberian tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, diklat dan hukuman disiplin dan diharapkan dapat menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Disamping itu, penilaian kinerja juga dilakukan untuk ASN BKKBN Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) melalui aplikasi E-VISUM. Penilaian capaian kinerja ini dilakukan setiap bulan dan target yang dibebankan kepada setiap PKB/PLKB adalah melakukan kegiatan penyuluhan sebanyak 22 kali setiap bulan dan kegiatan non penyuluhan sejumlah hari kerja pada bulan berjalan.

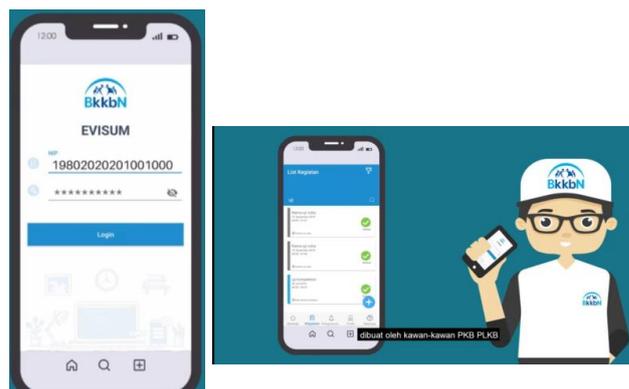
Pada akhir tahun 2019, BKKBN telah membangun *prototype* e-kinerja dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan RB yang menyatakan bahwa pemantauan

pencapaian kinerja di lingkungan BKKBN belum dilakukan secara berkala dan belum berbasis teknologi informasi. Aplikasi e-kinerja ini merupakan upaya pemenuhan *quick wins* pokja akuntabilitas seperti yang tertuang dalam Perka BKKBN No. 9 Tahun 2017 tentang *road map* RB di BKKBN dan upaya penyelarasan kinerja organisasi dan individu. Melalui aplikasi ini dapat diketahui pencapaian nilai kinerja organisasi dan mendokumentasikan seluruh dokumen perencanaan dalam rangka evaluasi periodik pencapaian kinerja baik organisasi maupun individu. Penjabaran kinerja organisasi yang diturunkan kepada kinerja individu telah dilakukan melalui *cascading* perjanjian kinerja eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan Provinsi seluruh Indonesia. Kinerja individu tersebut akan ditampilkan dalam bentuk form Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berisi kegiatan utama (berdasarkan *cascading* perjanjian kinerja) dan kegiatan tambahan.

Gambar 2.13.
Tangkapan Layar SIVIKA



Gambar 2.14
Tangkapan Layar e-VISUM



Gambar 2.15
Tangkapan Layar *Prototype* e-Kinerja

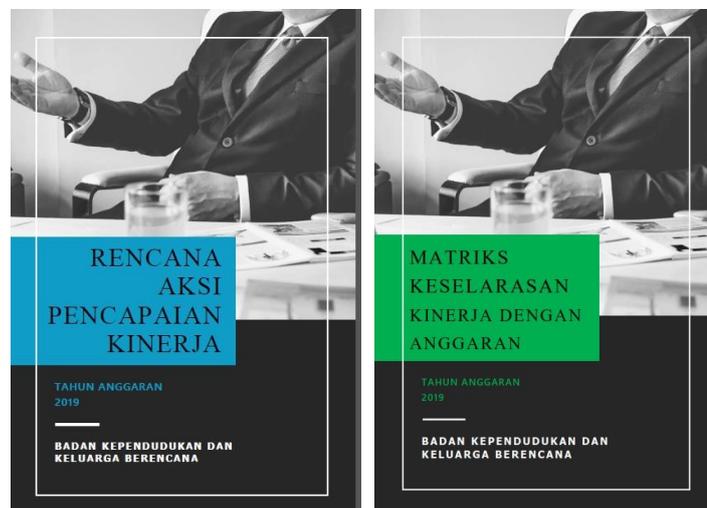


Gambar 2.16
Tangkapan *Dashboard* *Prototype* e-Kinerja



Dalam upaya pencapaian target/sasaran dari Perjanjian Kinerja BKKBN maka setiap tahunnya dilakukan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BKKBN dan Matriks Keselarasan Pencapaian Kinerja Dengan Anggaran BKKBN. Dalam Rencana Aksi dijabarkan terkait penetapan waktu pencapaian target, kegiatan-kegiatan prioritas yang diperlukan untuk mencapai target, anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan serta penanggung jawab kegiatan.

Disamping itu, BKKBN menyusun Matriks Keselarasan Pencapaian Kinerja dengan anggaran sebagai upaya evaluasi akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil capaian program terhadap penggunaan anggaran. Matriks tersebut menjabarkan keselarasan antara sasaran/target kinerja dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam RKAKL BKKBN setiap tahunnya.



E Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana serta untuk mendukung tercapainya sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 201/Kep/B1/2016 tentang Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Keputusan Kepala

BKKBN tersebut berlaku bagi unit kerja di lingkungan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan alat ukur prestasi kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja dan Sasaran Kinerja.

Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan hal yang rutin dilakukan di lingkungan BKKBN untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK. Adapun bentuk monitoring dan evaluasi pencapaian Rencana Strategis BKKBN sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi kinerja Program KKBPK Tahun 2019

Dilaksanakan setiap bulan melalui forum RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program) melalui fasilitasi *Video Conference* (VICON) yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN di pusat dan provinsi. Dalam Radalgram telah diintegrasikan informasi kinerja dan pelaksanaan anggaran sehingga pimpinan mendapatkan informasi tentang capaian kinerja dan keuangan secara berkala.

Unit kerja di lingkungan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib melaporkan hasil pelaksanaan kinerja kepada Kepala BKKBN setiap bulannya sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Monitoring perkembangan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi dilakukan melalui mekanisme RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program) serta termuat dalam:

- a. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan. Sub sistem ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Program KKBPK Nasional dari daerah secara baku dan teratur di seluruh tanah air. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (bulanan), Pelayanan Kontrasepsi (bulanan). Laporan umpan balik



disusun berdasarkan laporan bulanan yang dilaporkan secara rutin setiap bulan melalui program aplikasi Statistik Rutin berbasis web dengan alamat: <http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr>



Nasional. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Faskes KB (Semester) merupakan laporan ulasan umpan balik mengenai data potensi faskes KB yang ada diseluruh Indonesia.

d. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB pemerintah maupun swasta, serta Dokter/Bidan Praktek Swasta, sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

b. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Wilayah Program KBPK Nasional. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Wilayah (Semester) merupakan laporan umpan balik mengenai data potensi wilayah yang ada di seluruh Indonesia.

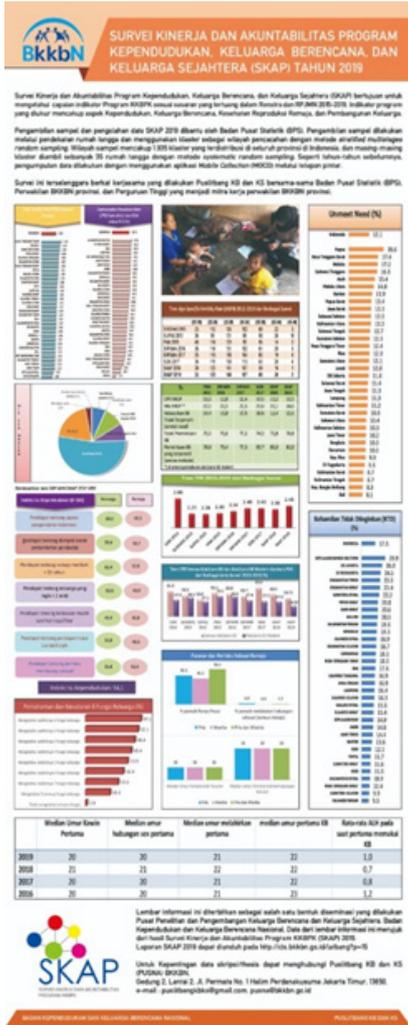
c. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Klinik KB Program KBPK



2. Survei Indikator Kinerja Akuntabilitas

Program KBPK (SKAP) adalah suatu survey tahunan yang bertujuan untuk mengetahui capaian indikator program KBPK sesuai sasaran yang tertuang dalam Renstra dan RPJMN 2015-2019. Indikator program mencakup aspek kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan pembangunan keluarga





3. Rapat Kerja Nasional Tahun 2019

BKKBN melaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan program tahunan. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian kegiatan tiap kedeputian telah dikembangkan kegiatan monitoring melalui kegiatan Rapat Kedeputian (Rapat di lingkungan masing-masing Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi; Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan), Rasestama (Rapat di lingkungan Sekretariat Utama), Ratama (Rapat di lingkungan Inspektorat Utama) yang rutin dilaksanakan setiap bulan.



Gambar 2.17. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) BKKBN Tahun 2019

4. Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Nasional (Rakornis) Tahun 2019.

Pada tanggal 1 Maret 2019, BKKBN melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Nasional (Rakornis) Tahun 2019. Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Kemitraan dengan lintas sektor dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antara kebijakan dan Program KKBPK dengan kebijakan dan Program yang ada di Kementerian dan Lembaga serta mitra kerja (organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta) termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan guna mempercepat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja BKKBN serta pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK.

RAKORNIS Kemitraan Tingkat Nasional Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dan dihadiri oleh 719 orang,

yang terdiri BKKBN Pusat sebanyak 80 orang, Perwakilan BKKBN Provinsi sebanyak 163 orang, para pemangku kepentingan dan pimpinan kerja tingkat pusat sebanyak 120 orang, dan mitra kerja provinsi sebanyak 306 orang. Rakornis pada tahun 2019 terutama membahas penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), khususnya di Kampung KB untuk mewujudkan SDM dan keluarga berkualitas. Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 dan sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 melalui laporan online Kampung KB, telah terbentuk sebanyak 14.110 Kampung KB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Inovasi dan gerakan Kampung KB merupakan langkah konkret BKKBN dalam mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan keluarga dan kemiskinan dapat diputus melalui perencanaan kehidupan berkeluarga. Dengan dilaksanakan Rakornis ini diharapkan agar segenap *stakeholder* dan mitra kerja dapat mengoptimalkan peran serta dalam pelaksanaan program KKBPK khususnya di Kampung KB dan daerah legok serta dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan di daerah masing-masing.

Gambar 2.18.

Pelaksanaan RAKORNIS Kemitraan BKKBN Tahun 2019



5. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI

Peningkatan komitmen dengan anggota Legislatif Komisi IX DPR RI dan Komite I DPD RI dilaksanakan berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan tukar pendapat mengenai program KKBPK antara Pimpinan BKKBN dengan Komisi IX DPR RI dan DPD RI. Seiring dengan perkembangan program KKBPK di era desentralisasi, kemitraan dengan berbagai instansi maupun legislatif merupakan hal yang sangat penting dan

strategis dan harus lebih dimantapkan sebagai upaya untuk memperkuat program KKBPK sebagai salah satu bagian yang integral dalam pembangunan nasional. RDP dengan Komisi IX DPR RI di Tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dalam 1 (satu) tahun untuk membahas kegiatan dan anggaran serta permasalahan yang menyangkut program KKBPK.

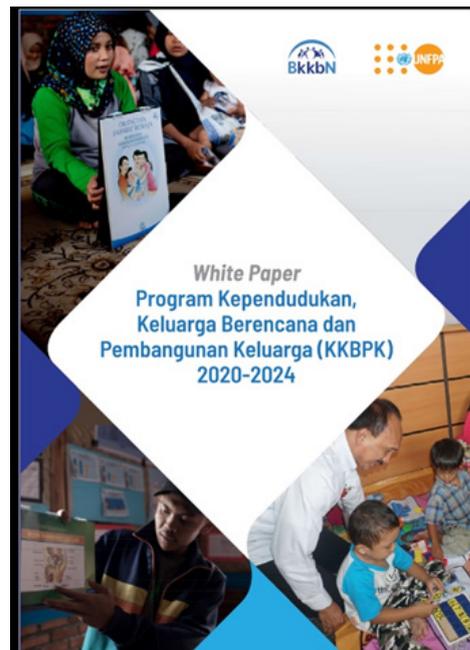
Gambar 2.19.

Rapat Dengar Pendapat BKKBN dengan Komisi IX DPR RI



6. Penyusunan *White Paper* Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2020-2024

BKKBN telah menyusun dokumen *White Paper* yang diawali dengan kajian dan analisis situasi dengan memperhatikan capaian program sampai dengan akhir tahun 2018, serta mempertimbangkan berbagai isu strategis terkait pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkembang saat ini. Dokumen *White Paper* ini memuat tentang visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan indikator program KKBPK untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai dokumen yang dinamis (*living document*). Hal ini dimaksudkan agar *White Paper* dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perumusan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dan dasar penyusunan *Balanced Scorecard* (BSC) yang diturunkan secara bertahap (*cascading*) hingga pejabat struktural terendah.



7. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mengamanatkan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL dan RKAKL. Para penanggung jawab program diwajibkan melakukan evaluasi atas program yang menjadi tanggungjawabnya. Secara paralel, E-monev yang dilaksanakan saat ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Planning and Budgeting*), serta lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi

kegiatan/program terhadap pencapaian target prioritas nasional. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, BKKBN telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran melalui aplikasi e-Monev. Pemantauan RKP dan e-Monev Kinerja Penganggaran pada unit kerja Eselon II yang evaluasinya dilakukan setiap triwulanan. Hasil evaluasi tersebut secara rutin diumpankan ke unit kerja Eselon II untuk kesinambungan sistem akuntabilitas kinerja BKKBN. Untuk melihat capaian realisasi anggaran, BKKBN menggunakan Aplikasi SMART (Sistem *Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu*) Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui capaian keluaran sehingga dapat digunakan bahan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya



Gambar 2.20.
Rapat dengan Lintas sektor terkait di DPR

F Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC)

Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BSC di BKKBN meliputi empat tingkatan yaitu:

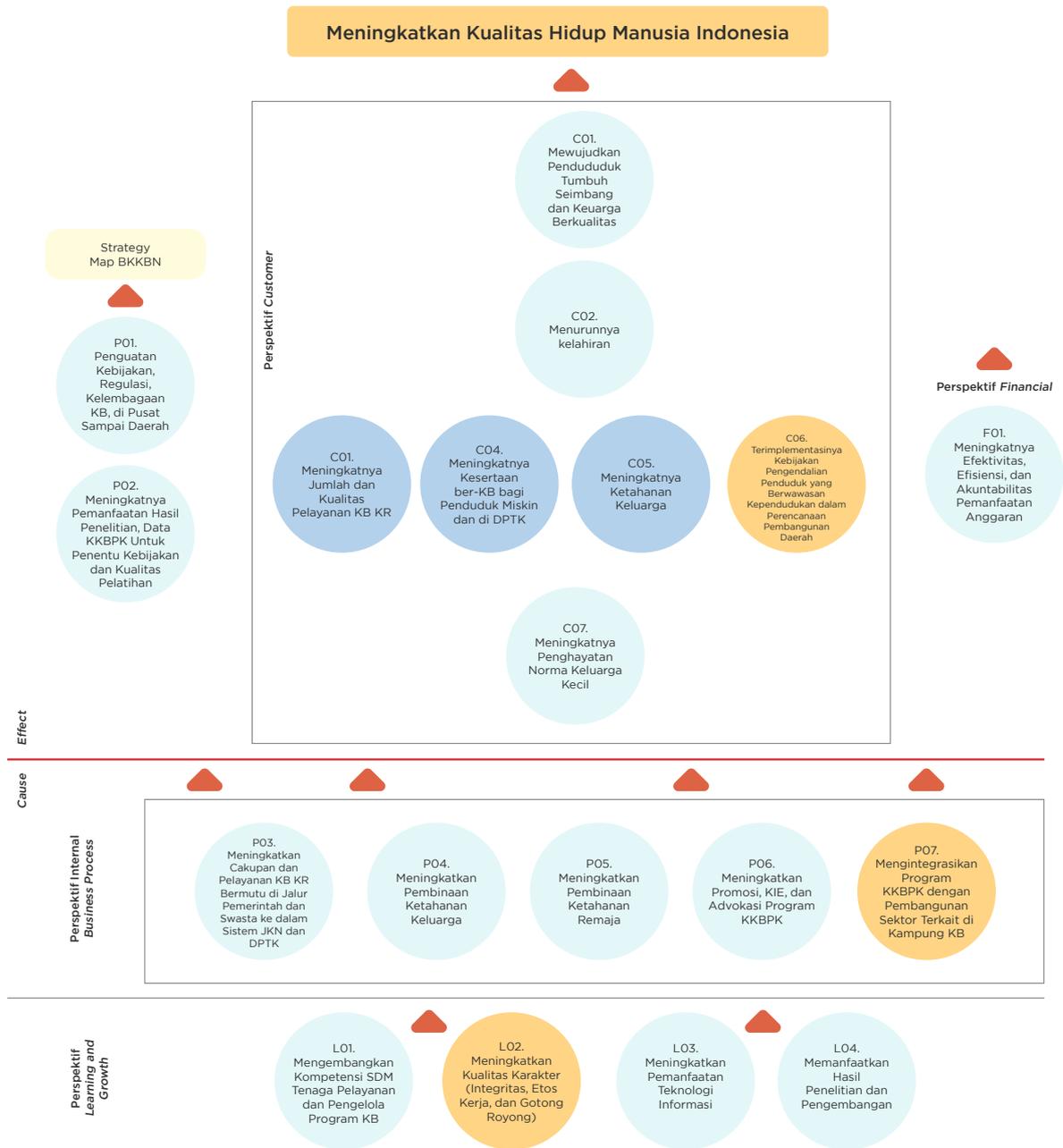
1. BKKBN-Wide, level lembaga;
2. Level Eselon I (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon I);
3. Level Eselon II (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon II);
4. Level Eselon III (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon III);
5. Level Eselon IV (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon IV).

Penerapan manajemen kinerja dengan pendekatan *Balanced Scorecard* telah dilaksanakan sejak penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 dan dilanjutkan pada penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, BKKBN melakukan *review* atas implementasi BSC BKKBN 2015-2019



Gambar 2.21. Penghargaan BKKBN atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 dari Badan Pengawasan dan Pembangunan

Gambar 2.22.
Peta Strategi BKKBN



dengan melakukan penilaian SPEx2 (*Strategy and Performance Execution Excellence*). Melalui penilaian SPEx2, dapat dilihat sejauh mana BKKBN mampu memformulasikan strategi yang efektif dan mengeksekusinya dengan lincah. Terdapat 6 (enam) area yang menjadi obyek audit atau penilaian menggunakan SPEx2®, yaitu: (1) *Strategy Development*; (2) *Strategy Mapping*; (3) *Organization Alignment*;

(4) *Operational Execution*; (5) *Monitoring and Realignment*, dan (6) *Leadership and Infrastructure*.

Penilaian terhadap proses pengelolaan kinerja dilaksanakan melalui analisis dan studi dokumen yang terkait dengan pengelolaan strategi dan kinerja serta dengan melakukan diskusi untuk melaksanakan validasi hasil temuan

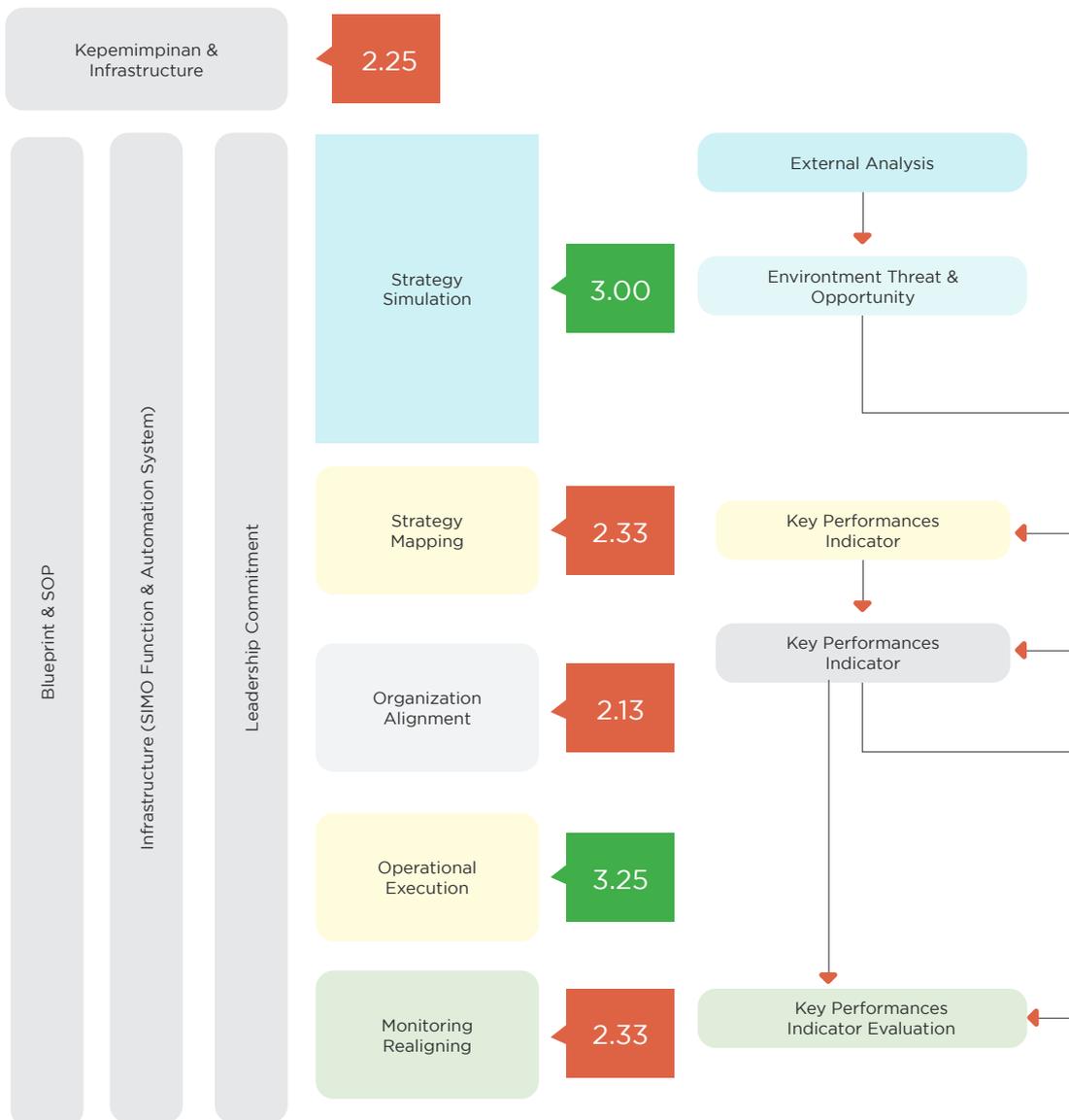
studi dokumen kepada SME (*Subject Matter Expert*). Adapun dokumen yang digunakan sebagai acuan antara lain: (1) Rencana Strategis BKKBN; (2) Program dan kegiatan strategis; (3) Sasaran strategis dan IKU organisasi maupun unit kerja, dan (4) Capaian kinerja organisasi. Penilaian SPEX2 menggunakan 3 metode sebagai sumber informasi untuk analisis, yaitu melakukan interviu atau sesi FGD (*Focus Group Discussion*) dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN; melakukan analisis data dan studi dokumen terkait dan melakukan survei efektivitas implementasi

SPEX2 dengan responden terpilih. Berdasarkan penilaian tersebut, BKKBN mendapatkan nilai capaian SPEX2 sebesar 2,55 yang merupakan kategori *mechanical level* yaitu *process of strategy development is being done, but full discipline has not been achieved*. Dari 6 unsur penilaian SPEX2, BKKBN dinilai masih rendah pencapaiannya pada unsur *Leadership and Infrastructure; Strategy Mapping; Organization Alignment; dan Monitoring and Realigning* yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan penilaian tersebut, strategi organisasi telah diterjemahkan ke dalam peta

Gambar 2.23.

Hasil Penilaian Implementasi Strategis di BKKBN berdasarkan SPEX2

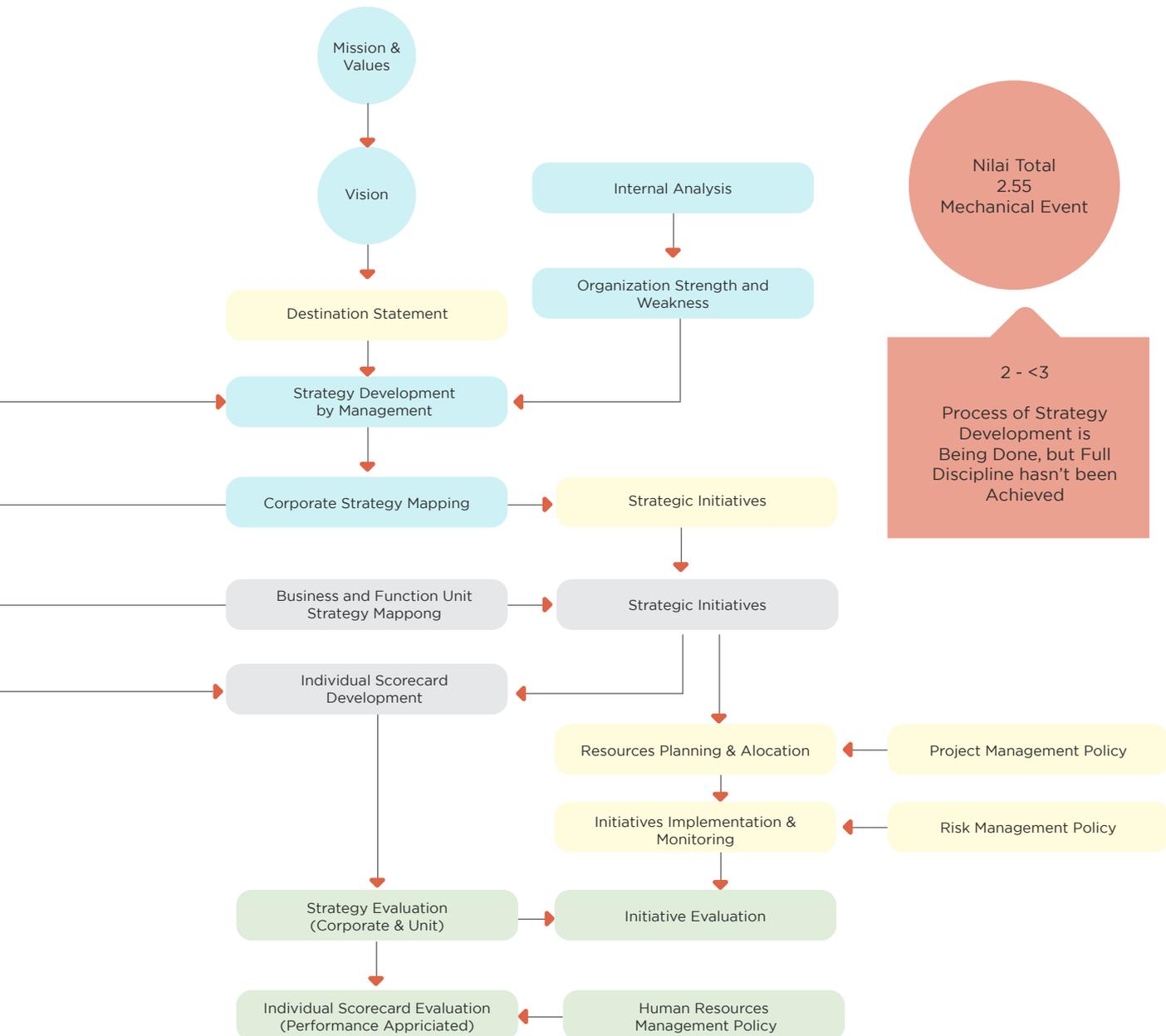


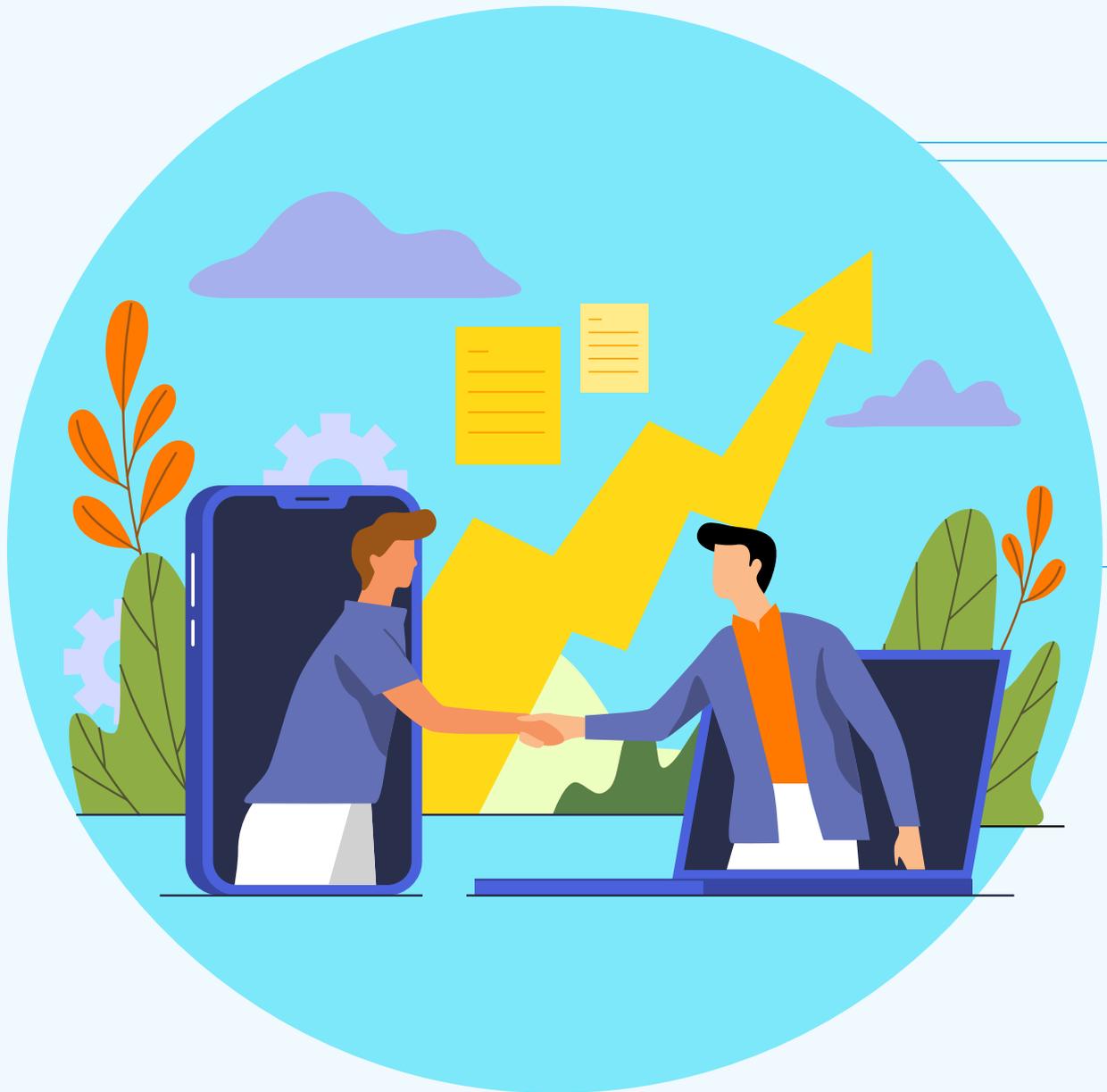
strategi, indikator kinerja dan inisiatif strategis BKKBN-Wide serta sudah di-cascade ke level Unit Eselon I. Dalam upaya peningkatan efektifitas implementasi strategi BKKBN, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Melanjutkan proses *cascading* strategi dan kinerja ke level Unit Eselon II, III, IV, sampai dengan individu individu;
2. Menetapkan peraturan dan prosedur operasional dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan unit kerja;
3. Membentuk tim SIMO (*Strategic Initiatives Management Officer*) sebagai pengelola

manajemen kinerja BKKBN maupun seluruh unit kerja;

4. Membekali tim SIMO agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan kinerja;
5. Membangun manajemen perubahan serta internalisasi sistem manajemen kinerja BKKBN agar dapat diterima dan dilaksanakan secara baik oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan BKKBN.





Akuntabilitas Kinerja

B A B 03

A. Capaian Kinerja	72
B. Realisasi Anggaran	155
C. Kinerja dan Capaian Lain	163
D. Evaluasi Kinerja	175
E. Perbaikan Rencana Program dan Anggaran TA 2020	180

Kinerja tahun 2019, BKKBN berkomitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui IKU BKKBN sebanyak:



Kinerja BKKBN selama tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas, anggaran dan kinerja lainnya yang menunjukkan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh BKKBN selama tahun 2019 dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas

Bab ini merupakan rangkuman pencapaian target kinerja BKKBN disertai dengan berbagai analisis mengenai upaya yang telah dilakukan, hambatan atau kendala

dalam pencapaian, serta rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan agar tidak terjadi kegagalan. Merujuk Perjanjian Kinerja tahun 2019, BKKBN berkomitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui IKU BKKBN sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator dan 5 (lima) output yang mendukung Proyek Prioritas Nasional.

Hasil kinerja BKKBN ditentukan melalui skala pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Utama Nomor: 458/RC.06/B1/2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai	Skala Pengukuran Kinerja	Status Capaian
1	≥90	Sangat Baik	
2	80 - 89	Baik	
3	70 - 79	Cukup	
4	< 70	Kurang	

A Capaian Kinerja BKKBN

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi dan Tujuan Strategis yang ditetapkan dalam Renstra BKKBN 2015–2019, dicapai dengan

1 (satu) Sasaran Tujuan, dan 25 (dua puluh lima) IKU yang terdiri dari 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Sasaran Program.

Gambar 3.1.
Pyramidha Sasaran BKKBN



Kerangka Logis Ukuran Fertilitas

Pembahasan capaian kinerja sasaran strategis yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah kerangka analisis yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran fertilitas di suatu populasi. Menurut Bongarts, J, dkk, 2012, besarnya fertilitas dalam sebuah populasi ditentukan oleh 4 faktor utama

(*proximate determinan*), yaitu penggunaan kontrasepsi, proporsi menikah, aborsi, dan metode amenore laktasi. Khusus dalam hal penggunaan kontrasepsi menggunakan kerangka analitik sebagaimana yang di ilustrasikan pada gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Kerangka Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Fertilitas



Sumber data : Bongarts, J, dkk, 2012

Ukuran fertilitas dalam sebuah populasi ditentukan oleh penggunaan kontrasepsi yang dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu permintaan kontrasepsi dan kebutuhan kontrasepsi yang tidak dapat dipenuhi. Permintaan akan kontrasepsi dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang ada di masyarakat yaitu preferensi jumlah anak yang ingin dimiliki oleh sebuah keluarga. Preferensi ini sendiri dipengaruhi oleh nilai anak. Pada populasi dengan pembangunan sosial ekonomi dan angka kematian bayi yang rendah maka persepsi masyarakat terhadap anak adalah investasi pendidikan dan kesehatan kepada anak. Pada kondisi seperti ini maka kecenderungan preferensi fertilitasnya ingin memiliki anak sedikit. Sebaliknya pada kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan disertai dengan angka kematian bayi yang tinggi maka dapat diasumsikan persepsi masyarakat terhadap nilai anak adalah sebagai sumber pembantu pencari

nafkah keluarga. Pada kondisi ini, preferensi fertilitasnya cenderung memiliki anak banyak.

Selain dipengaruhi oleh permintaan terhadap kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi juga ditentukan oleh *unmet need* atau permintaan yang tidak dapat dipenuhi. *Unmet need* ini dipengaruhi oleh keterjangkauan pelayanan baik dari aspek sosial, geografi, maupun finansial. Keterjangkauan kontrasepsi tersebut sangat ditentukan oleh maturitas program keluarga berencana. Dalam kerangka analisis di atas dapat disimpulkan bahwa program keluarga berencana tidak saja berpengaruh langsung terhadap aspek keterjangkauan pelayanan kontrasepsi tetapi juga terhadap nilai anak, sebaliknya pembangunan sosial ekonomi dan penurunan angka kematian dapat berkontribusi terhadap keterjangkauan pelayanan kontrasepsi.



Gambar 3.3.
Penyerahan DIPA 2020

A.1 Indikator Kinerja Sasaran Tujuan BKKBN Tahun 2019

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator kinerja tujuan 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Peraturan Kepala		RPJMN	Peraturan Kepala	
Laju pertumbuhan Penduduk	1,19 (2015-2020)	1,21 (2019)	1,12	106	108	

Sumber data : Hasil Pengolahan SUPAS 2015 dan Sensus 2010

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk rata-rata per tahun dalam jangka waktu tertentu dan berguna untuk mengetahui

perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu, dengan penghitungan rumus sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_o} \right)^{1/t} - 1$$

Metode Geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P_o : Jumlah penduduk tahun awal

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Tahun 2019 merupakan akhir periode RPJMN 2015-2019, sehingga dalam laporan ini disampaikan capaian LPP sebagai Indikator

Tujuan BKKBN. Tren LPP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1971-2019

Tahun	LPP	Jumlah Penduduk		Sumber
		Tahun	Jumlah	
1971-1980	2,31	1980	147.490.298	BPS Sensus Penduduk
1980-1990	1,98	1990	179.378.946	
1990-2000	1,49	2000	206.264.595	
2000-2010	1,49	2010	237.641.326	
2010-2015	1,36	2015	255.182.144	BPS Supas 2015 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045
2015-2019	1,12	2019	266.911.905	

Jika dilihat dari target RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN yang menetapkan bahwa LPP Indonesia yaitu 1,21 dibandingkan dengan pencapaian LPP yang tertulis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 266.911.905 jiwa pada tahun 2019 dengan LPP 2015-2019 adalah 1,12 menurut data proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 (hasil SUPAS 2015). Adapun perincian perhitungan sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{(t-1)}}$$

$$r = \left(\frac{266.911.905}{255.182.144} \right)^{\frac{1}{(5-1)}} = 1.12$$

Keterangan :

P_t = 266.911.905 (Proyeksi Penduduk 2019 berdasarkan Sensus 2010, BPS)

P_0 = 255.182.144 (Proyeksi Penduduk 2015 berdasarkan Supas 2015, BPS)

t = jangka waktu 2015-2019

r = LPP

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa target LPP berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan.

Dengan tercapainya target LPP Indonesia pada tahun 2015-2019 ini, maka tujuan BKKBN untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga yang berkualitas telah tercapai. Upaya yang telah dilakukan periode tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Menurunkan angka TFR berdasarkan data SDKI 2012 angka TFR Indonesia sebesar 2,6 turun menjadi 2,4 berdasarkan data SDKI 2017. Penurunan angka TFR ini akan berpengaruh pada penurunan angka LPP mengingat TFR merupakan salah satu komponen penentu pertumbuhan penduduk dilihat dari aspek fertilitas.

2. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) berdasarkan data SDKI 2012 angka MUKP Indonesia sebesar 20,1 meningkat menjadi 21,8 berdasarkan data SDKI 2017. Peningkatan MUKP ini mengurangi rentang reproduksi wanita Indonesia. Sehingga berpengaruh dalam penurunan TFR secara keseluruhan.
3. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern yang merupakan salah satu *proximate determinant* TFR. Peningkatan alokasi yang cukup signifikan adalah peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dari 21,3 pada tahun 2015 menjadi 24,6 pada Tahun 2019 (SKAP 2019). Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang kependudukan BKKBN bekerjasama dengan pakar Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) tentang dekomposisi fertilitas menunjukkan bahwa mCPR merupakan komponen paling kuat dalam menurunkan angka TFR.
4. Penguatan Program KKBPK melalui integrasi kebijakan dengan penetapan indikator KKBPK di dalam dokumen perencanaan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Dukungan pembiayaan biaya operasional keluarga berencana untuk Kabupaten dan Kota untuk 5.920 balai penyuluh KB, 18.309 faskes, 7.116 kecamatan, 82.917 kelurahan dan desa, serta 508 OPD KB dengan total anggaran Rp.1.967.367.255.000,-

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan capaian TFR pada suatu daerah :

1. Disparitas pencapaian TFR antar Provinsi yang berpengaruh kepada capaian TFR nasional. Menurut data SKAP 2019, tiga Provinsi dengan TFR paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 3,6, Provinsi Maluku sebesar 3,1 dan Sumatera Utara sebesar 3,04. Sedangkan 3 Provinsi dengan TFR paling rendah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,8, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,97, dan Provinsi Jawa Timur 2,22.
2. Belum optimalnya pelaksanaan komitmen pemerintah daerah terhadap Program KKBPK dikarenakan rendahnya pengetahuan

dan kepedulian pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah dalam pengarusutamaan isu pengendalian penduduk.

3. Masih besarnya disparitas antarwilayah terhadap capaian indikator penduduk tumbuh seimbang (hasil pemetaan data Supas 2015 dan SDKI 2017).
4. Masih beragamnya kelembagaan yang menangani Program KKBPK pada pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada prioritas pelaksanaan program dan anggaran KKBPK. Berdasarkan data hasil sinkronisasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB untuk pemerintah daerah provinsi dengan kategori A (utuh) dan B (digabungkan dalam dua fungsi) ada di 21 provinsi, sedangkan pada pemerintah Kabupaten/Kota berjumlah 196 dengan tipe A dan B, artinya masih terdapat 13 Provinsi dan 318 Kabupaten/Kota dengan kelembagaan bidang pengendalian penduduk yang masih tipe C atau bahkan tidak terdapat struktur kelembagaannya.

Rencana perbaikan perencanaan dikaitkan dengan penetapan target LPP sebesar 0,95 pada akhir Renstra 2020-2024 :

1. Mendorong komitmen Kementerian/ Lembaga dan lintas sektor terkait untuk menurunkan LPP melalui komponen pendukung pertumbuhan penduduk yaitu, fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk.
2. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan kependudukan melalui penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar (Pengendalian Kuantitas, peningkatan Kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan) dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan kepedulian pemerintah daerah terhadap situasi kependudukan di wilayahnya melalui pengembangan alat bantu sistem peringatan dini pengendalian penduduk, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun dan menetapkan regulasi kebijakan berwawasan kependudukan.

A.2 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2019

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2019

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1.	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Rata-rata kelahiran	2,28	2,45	93,06	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	61,3	54,97	89,7	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,91	12,1	81,9	
4.	Persentase peserta KB Aktif MKJP	Persen	23,5	24,6	105	
5.	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	Persen	24,6	29	84,8	

Sumber data : Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa dari 5 (lima) Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKKBN terdapat 2 (dua) ISS

dengan kategori sangat baik dan 3 (tiga) ISS dengan kategori baik. Penjelasan capaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

A.2.1 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) Per Wus (15-49 Tahun)

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Realisasi capaian angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun) untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2.3 (2015-2020)	2.28 (2019)	2.45	93.9	93.06	●

Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk ISS 1 adalah 2,45 dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar 2,28 maka capaiannya adalah 93,06 persen, apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 2,3 capaiannya adalah 93,9 persen dengan kategori sangat baik. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai TFR pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Promosi pendewasaan Usia Kawin pertama dan Kesehatan Reproduksi remaja melalui Program Generasi Berencana (GenRe) dengan capaian sebesar 33/1000 kelahiran dari target 38/1000 kelahiran pada tahun 2019 (SKAP 2019). Hal ini diperkuat dengan adanya teori fertilitas bahwa dengan meningkatnya umur kawin pertama perempuan akan memperpendek masa fertilitasnya.
2. Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan

fasilitas kesehatan yang melayani KB sebanyak 11.547 faskes sehingga peserta KB mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Sumber: Pengolahan data Statistik Rutin 2019 dan BPJS 2019)

3. Penyebarluasan video film pendek tentang promosi kesehatan reproduksi bertemakan pencegahan perkawinan anak melalui media sosial
4. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam program KKBPK melalui pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga indikator program KKBPK (termasuk LPP dan TFR) tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstrada dan RKPd) pada 34 provinsi dan 300 kabupaten/kota;
5. Promosi dan KIE tentang isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, melalui berbagai media dan tenaga lini lapangan dan melibatkan stakeholder dan mitra kerja. Menurut SKAP 2019, capaian pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan adalah sebesar 55,8 persen, sedangkan tingkat pengetahuan keluarga yang mengetahui informasi program KKBPK sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Tingkat Pengetahuan Keluarga Yang Mengetahui Informasi Program KKBPK

Informasi	Media Massa (%)	Media Luar Ruang (%)
Kependudukan	93	27
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	90,9	41,1
Keluarga Berencana (KB)	81,1	66,3
Pembangunan Keluarga (PK)	51,3	31,6

Sumber data : Modul Remaja, SKAP 2019

6. Advokasi kepada lintas sektor tingkat Pusat dan Daerah terkait program KKBPK, melalui pemberian penghargaan (Satya Lencana Pembangunan (SP), Satya Lencana Wirakarya (SWK), Manggala Karya Kencana (MKK), Citra Karya Kencana (CKK), Wira Karya Kencana (WKK), Dharma Karya Kencana (DKK)), dan kegiatan kemitraan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, TNI.
7. Memosisikan ulang BKKBN agar relevan terhadap sasaran terbesarnya yaitu generasi muda (millenial, zillenial, dan alpha) melalui *Rebranding* BKKBN
8. Pemanfaatan data mikro pendataan keluarga untuk pemetaan PUS dalam intervensi program oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD melalui kegiatan Surveilans Pasca Pelayanan untuk menjaga kesertaan PA dan memperoleh PB
9. Penguatan Kampung KB sebagai lokus penggarapan program KKBPK sebanyak 15.553 diseluruh Indonesia pada wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan KBnya masih rendah;
10. Penajaman intervensi sasaran wilayah berdasarkan pemetaan tahapan bonus demografi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota agar Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan sesuai dengan tahapannya yaitu mencapai, mempertahankan, atau memanfaatkan bonus demografi;

Tabel 3.7
Indikator Sosial Ekonomi

Indikator Sosial Ekonomi	NTT TFR : 3,26	DIY TFR: 1,80
PDRB (2018)	99,087 T	129,88 T
IPM (2018)	64,39	79,53
Rata-rata lama sekolah (2018)	7,3	9,32
Sumber data	BPS NTT, 2019	BPS DIY, 2019

Tabel di atas menunjukkan semakin baik indikator sosial ekonomi maka akan semakin baik pula penurunan pencapaian fertilitas. Sebagai contoh adalah perbandingan antara Provinsi DIY dan Provinsi NTT. Provinsi DIY memiliki TFR yang sangat rendah yaitu sebesar 1,8 jika dibandingkan dengan provinsi NTT yang memiliki TFR 3,26. Provinsi DIY memiliki nilai indikator sosial ekonomi yang lebih baik dilihat dari nilai PDRB dan nilai kualitas SDM yang tinggi diwakili oleh nilai IPM dan rata-rata lama sekolah. Data tersebut mengindikasikan bahwa jumlah anak yang lebih sedikit dalam keluarga membuat keluarga mampu meningkatkan investasi dalam hal pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM.

Efek timbal balik juga terjadi dimana daerah dengan rata-rata lama sekolah yang lebih lama juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya isu kependudukan dan kesehatan reproduksi sehingga usia kawin pertama menjadi lebih tinggi yang berdampak pada rentang reproduksi yang lebih pendek sehingga menurunkan tingkat kelahiran (TFR) secara keseluruhan. Uraian di atas menunjukkan adanya hubungan dinamis antara fertilitas dan sosial ekonomi masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun data pencapaian TFR di Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara di ASEAN, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian TFR diantara Negara ASEAN

No	Nama	TFR	Population 2019
1	Laos	2.7	7.169.465
2	Philippines	2.58	108.116.615
3	Cambodia	2.524	16.486.542
4	Indonesia	2.32	270.625.568
5	Myanmar	2.17	54.045.420
6	Vietnam	2.056	96.462.106
7	Malaysia	2.01	31.949.777
8	Brunei	1.848	433.285
9	Thailand	1.535	69.625.582
10	Singapore	1.209	5.804.337

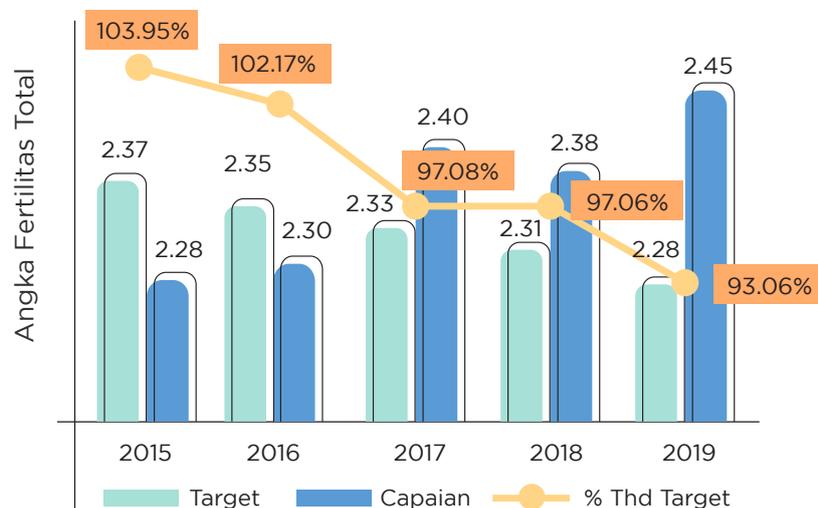
Sumber data : *worldpopulation.com, UNDESA, Population Divison, World Population Prospect (2019 revision)*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa TFR Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara Laos, Filipina dan Kamboja, tetapi masih lebih tinggi dari Myanmar, Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapore.

Pada tahun 2019 UN Desa melakukan proyeksi TFR, Laju Pertumbuhan Penduduk, jumlah penduduk dan lainnya untuk pertama kalinya sampai dengan tahun 2100. Dengan proyeksi ini (*World Population Prospects 2019 Revision*) Indonesia diprediksi akan terus mengalami penurunan TFR yang akan berimplikasi pada jumlah penduduknya. Periode 2045-2050 TFR

Indonesia diprediksi sebesar 1,91 dengan jumlah penduduk 331 juta lalu untuk periode 2095-2100 TFR diproyeksi mencapai 1,78 dengan jumlah penduduk menurun menjadi 321 juta. Mengacu pada proyeksi ini, maka urutan negara-negara di dunia dalam hal jumlah penduduknya akan berubah dimana Indonesia tidak lagi berada pada posisi 4 tapi turun pada urutan ke-6, disalip oleh Nigeria (negara di Afrika Barat) dan Pakistan. Dan pada tahun 2100 akan turun pada posisi 7 karena naiknya Congo di urutan 6. Adapun, tren pencapaian Angka Kelahiran Total (TFR) periode tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Grafik 3.1 di bawah ini.

Grafik 3.1
Tren Pencapaian Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) 2015 - 2019



Sumber data : Modul Wanita, SKAP 2019

Berdasarkan grafik di atas, capaian realisasi TFR sudah menunjukkan keberhasilan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing secara berurutan 103,9 persen (2015) dan 102,60 persen (2016). Namun, untuk tahun 2017 dan 2018, dan 2019 mengalami penurunan pencapaian di angka 97,08 persen di tahun 2017; 97,06 persen di tahun 2018; dan 93,06 di tahun 2019.

Tabel 3.9
Perbandingan Target TFR Tahun 2019
dengan Tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,28	2,26

Sumber: SKAP 2019 dan Renja 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan target pada tahun 2019 adalah sebesar 2,28 menjadi 2,26 pada tahun 2020. Dalam menyusun strategi yang lebih inklusif dan terintegrasi, BKKBN harus secara aktif meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Lembaga lain yang secara tidak langsung dapat menunjang peningkatan capaian TFR dengan menyusun kebijakan dan penguatan program, serta kerangka pendanaan yang terintegrasi pada pemerintah pusat dan daerah. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target TFR pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses distribusi rantai pasok alokon untuk menjamin ketersediaan alokon ke seluruh fasilitas kesehatan dan Praktek Mandiri Bidan (PMB);
2. Penguatan KB pasca persalinan melalui pembinaan model pelayanan KB Pasca Persalinan di FKRTL, serta revitalisasi Pelayanan KB Rumah Sakit;
3. Fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta pelatihan Bidan dan Dokter peserta pelatihan CTU melalui aplikasi MONIKA;
4. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KB melalui *pre Service Training* yang dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan CTU bagi

mahasiswa yang akan lulus dari Fakultas Kedokteran;

5. Pengajuan akreditasi pelatihan teknis medis CTU kepada PPSDM Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan JNPK dan mitra;
6. Penguatan Pelayanan KBKR pada Sasaran Risiko Tinggi seperti pengelolaan Kesehatan Reproduksi bagi PUS 4 Terlalu (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu dekat, dan Terlalu Banyak);
7. Penguatan akses pelayanan KB bagi pekerja migran Indonesia di daerah perbatasan wilayah Indonesia;
8. Digitalisasi pembinaan kesertaan KB melalui pengembangan sistem aplikasi Klik KB;
9. Penyediaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU) yaitu Sistem (rangkaian proses) pengumpulan dan analisis data, serta diseminasi informasi tentang dampak pengendalian penduduk untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan datang;
10. Penyediaan Percepatan Sinkronisasi Perencanaan dan Kebijakan Kependudukan (SIPERENJAKU) yaitu Percepatan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan serta advokasi pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah);
11. Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020 sebagai potret keluarga dalam rangka strategi intervensi Program KKBPK untuk penurunan TFR;
12. Melanjutkan upaya perubahan (*mindset, value, identitas*) melalui *Rebranding* BKKBN agar relevan terhadap sasaran terbesarnya yaitu generasi muda (*millenial, zillennial, dan alpha*).

A.2.2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)

Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implant) dan kondom. Realisasi capaian pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) pada tahun 2019 seperti tabel berikut:

Tabel 3.10

Pencapaian Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*) Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66 (2015-2020)	61,3 (2019)	54,97	83,3	89,7	

Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pemakaian kontrasepsi modern pada tahun 2019 adalah 54,97 persen dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar 61,3 persen maka persentase capaiannya sebesar 89,7 persen, apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 66 capaiannya adalah 83,3 persen dengan kategori baik. Dalam meningkatkan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi Pasangan Usia Subur di 18.852 fasilitas kesehatan yang ditetapkan sebagai salah satu output prioritas yang mendukung proyek prioritas nasional 2019:
 - a. Melakukan harmonisasi peraturan terkait alat dan obat kontrasepsi dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana

- b. Perencanaan kebutuhan alokon mempertimbangkan 4 (empat) metode kuantifikasi yaitu melalui data demografi, target berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat, data konsumsi, dan data pelayanan
- c. Pengadaan alokon khususnya IUD melalui katalog nasional, sedangkan implant dilakukan melalui katalog sektoral oleh BKKBN.
- d. Distribusi dinamis dilakukan untuk mencukupi kebutuhan suntik dan pil antar provinsi dan menggunakan stok cadangan (*buffer*) di pusat.
- e. Penyediaan dukungan distribusi alokon dari gudang Kabupaten dan Kota ke 18.309 faskes melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 25.874.000.000,-
- f. Modeling penguatan manajemen inventory pengelolaan alokon Pusat, 5 Provinsi (Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat), 60 Kabupaten/Kota, dan lebih dari 700 Fasilitas Kesehatan.

2. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui berbagai media baik *above the line, through the line* serta fokus pada strategi *below the line* dan melalui tenaga lini lapangan berbasis data dan informasi pencapaian program serta melibatkan *stakeholder*, mitra kerja untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kontrasepsi modern. Adapun data terkait *subscriber/follower* media social di BKKBN *official* tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Data *Subscriber/Follower* BKKBN Official

Media Sosial	Subscriber/Follower		Kenaikan <i>Follower</i> (%)
	2018	2019	
Youtube	486	1.630	30
Instagram	33.227	63.036	89
Twitter	15.750	20.576	31
Facebook	75.632	76.151	0,7

Sumber data : Data diolah dari media social BKKBN official update 7 Februari 2020

- Penguatan kinerja 14.183 PKB/PLKB PNS dan 14.025 PLKB non PNS, serta revitalisasi sebanyak 480.158 kader IMP untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat dengan penekanan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan melalui pemanfaatan aplikasi Penyuluhan Program KKBPK, Kuliah Whatsapp (Kulwap), dan Rumah Baca PKB/PLKB.
 - Melakukan penambahan 11 Fakultas Kedokteran dalam peningkatan kompetensi tenaga dokter (*pre-service training*) melalui pemberian dukungan pelatihan dan fasilitasi *Training of Trainer* di tahun 2019 serta pembinaan pada 19 Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya;
 - Dilakukan pendampingan dan pemanfaatan tenaga yang sudah dilatih sebesar 1080 tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang bekerjasama dengan PPSDM Kemenkes dan JNPK-KR (Aplikasi Monika, 11 Februari 2020)
 - Mendayagunakan peran 1.701 kelompok dan 3402 motivator KB Pria serta mitra kerja dalam memberikan sosialisasi mengenai KB Pria;
 - Replikasi Pengembangan Model Penguatan Implementasi KB pascapersalinan bekerjasama dengan JHPiego di 3 provinsi (Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara) di 7 kabupaten/kota, 29 fasilitas kesehatan serta pembinaan pada 160 fasilitas kesehatan tahun 2018 (6 provinsi, 23 kabupaten/kota).
 - Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di 73.491 poktan/komunitas;
 - Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
- Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target mCPR tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- Jumlah PKB/PLKB tidak sebanding dengan luas wilayah binaan dengan rasio saat ini 1:6 desa/kelurahan sehingga pemberian KIE dan penggerakan pelayanan serta pembinaan bagi peserta KB belum optimal;
 - Resistensi praktek mandiri bidang untuk menjadi jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan sehingga tidak mendapatkan program distribusi alokon;
 - Tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB yang memenuhi kompetensi sesuai standar yang ditetapkan hanya sebesar 51,80%;
 - Pemilihan media dan isi pesan tentang 8 jenis alat/ cara KB modern yaitu kondom, pil, suntik KB, susuk/implant, IUD/AKDR, Metode operatif wanita, metode operatif pria serta metode amenorrhea laktasi kepada wanita Pasangan Usia Subur belum efektif;
 - Perubahan perilaku pencarian informasi dan adanya variasi media yang beragam, terlihat dari penurunan pengunjung website BKKBN 11.115.181 pada tahun 2018 menjadi 9.215.472 pada tahun 2019.
 - Pengelola program KKBPK belum sepenuhnya memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dalam melakukan intervensi program di lapangan;

7. Masih tingginya tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi yaitu 29 persen. (SKAP 2019);
8. Fasilitas kesehatan yang teregistrasi dalam SIM BKKBN dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya sebesar 11.547 (47,02%) dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang berpotensi melayani KB yaitu sebesar 24.558 (Data Potensi Faskes BKKBN 2019 dan Data BPJS Kesehatan 2019);
9. Masih ada fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan alokon yaitu sebesar 16 persen untuk IUD, 19 persen untuk implant, 16 persen untuk suntikan, 14 persen untuk pil, dan 20 persen untuk kondom yang disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan alokon (Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi, 2019);
10. Menurunnya jumlah frekuensi pelayanan KB bergerak dari 3 kali gerak menjadi kurang dari 3 kali gerak/tahun/Kabupaten di wilayah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan miskin perkotaan pada tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan anggaran,
11. Masih terdapat hambatan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional pasal 15 ayat (1) dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan MOW interval hanya dapat dilakukan di FKRTL sehingga, dapat dirujuk apabila terdapat indikasi medis, sedangkan sebagian besar calon peserta MOW dalam keadaan sehat dan tidak memiliki indikasi medis.
12. Hambatan pembiayaan KB pasca persalinan di FKRTL berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan paket Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) sehingga pembiayaan KB pasca persalinan menjadi satu paket dengan persalinan.

13. Masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana pelayanan KB (*obgyn bed*, IUD kit, Implan kit) karena rasio sub standard, tercantum pada tabel di bawah:

Tabel 3.12

Rasio Ketersediaan Sarana

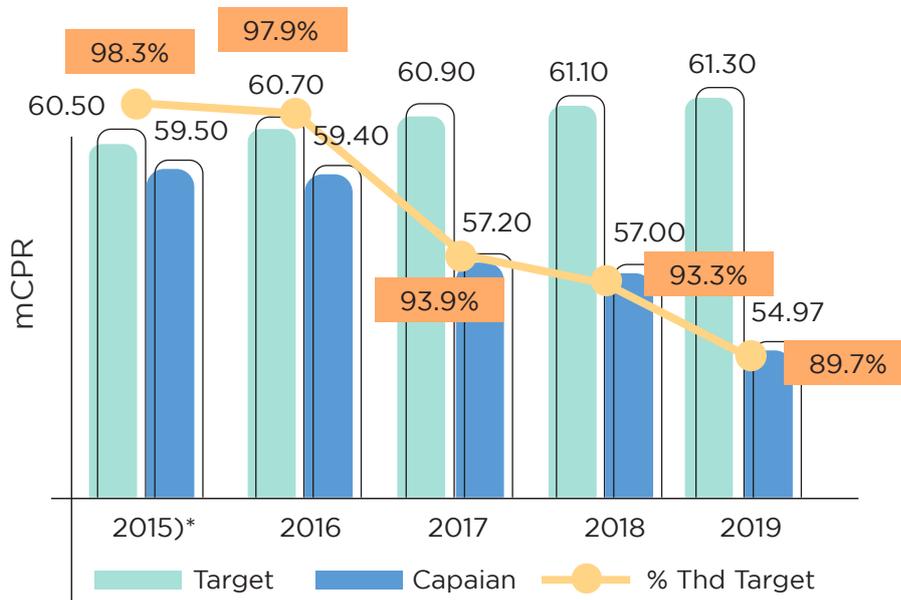
Sarana	Standar minimal sarana di faskes	Rasio ketersediaan sarana yang bisa digunakan
Konseling Kit	1	0,67
Tensimeter	1	1,43
<i>Obgyn Bed</i>	1	1,07
IUD Kit	3	1,43
Implan Kit	3	1,20
Sterilisator	1	0,57

Sumber Data : Potensi Faskes Semester I Tahun 2019

14. Masih rendahnya retensi keterampilan 1123 dokter umum pasca pelatihan yang memberikan pelayanan vasektomi (173 dokter umum yang melaksanakan pelayanan vasektomi);
15. Adanya keyakinan dan budaya tertentu sehingga PUS tidak menggunakan alat kontrasepsi modern;
16. Adanya budaya patrilineal dimana suami memegang keputusan mutlak dalam hal penggunaan kontrasepsi tanpa berkompromi dengan pasangannya sehingga tidak ber KB. Berdasarkan SDKI tahun 2017, pria mempunyai keinginan rata-rata jumlah anak ideal 2,9 dan wanita mempunyai keinginan rata-rata jumlah anak ideal 2,6.

Adapun tren pemakaian kontrasepsi modern periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah ini:

Grafik 3.2
Tren Pencapaian mCPR BKKBN Tahun 2015-2019



Sumber data: Modul Wanita, SKAP 2019

Berdasarkan grafik di atas, capaian realisasi ISS 2 mengalami tren penurunan dari tahun 2017, 2018, dan 2019 dari 93,9 persen (2017) menjadi 93,3 persen (2018) lalu di tahun 2019 menurun lagi menjadi 89,7 persen. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, mCPR belum dapat dinilai karena adanya perbedaan metode pengukuran dimana pada tahun tersebut dilakukan pengukuran pemakaian kontrasepsi untuk semua cara (*all method contraceptive: traditional method and modern method*).

Tabel 3.13
Perbandingan Target
Pemakaian Kontrasepsi Modern
(*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*) Tahun 2019 dengan Tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ mCPR</i>)	61,3	61,78

Sumber: SKAP 2019 dan Renja 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan target mCPR dari 61,3 pada tahun 2019 menjadi 61,78 pada tahun 2020. Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian mCPR tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan 9.738 PLKB Non PNS dengan menetapkan target kinerja yang tertuang dalam *E-Visum* versi PLKB Non PNS untuk memenuhi kekurangan rasio PKB/PLKB PNS;
2. Melakukan perluasan jangkauan pelayanan melalui penyesuaian kebijakan registrasi faskes yang tidak hanya dibatasi pada faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS tetapi juga pada praktik mandiri bidan;
3. Pengembangan desain isi pesan tentang 8 jenis kontrasepsi modern dan memilih media yang efektif fokus pada media sosial sehingga dapat menjangkau sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;
4. Re-desain *website* BKKBN sehingga memudahkan pengguna mencari informasi;
5. Pengembangan dashboard program KKBPK untuk peningkatan pemanfaatan data dan informasi sebagai peta kerja intervensi program;

6. Penguatan Mekanisme Operasional berbasis data dan peta sasaran untuk memastikan capaian program melalui peningkatan kinerja Penyuluh KB dan penguatan fungsi IMP, serta optimalisasi sumber daya di lini lapangan;
7. Menetapkan *Method Information Index* (MII) sebagai indikator yang mengukur kualitas konseling KB;
8. Memperluas varian pilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan PUS antara lain Kontrasepsi Pil Progestin/*Progestin Only Pill* (POP), obat suntik KB 3 bulanan 1 cc, implan 1 batang, dan obat suntik KB kombinasi 3 bulanan 1 cc;
9. Upaya mengatasi *stock out* alokon di faskes melalui:
10. Melakukan pengadaan/pembelian alokon tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis;
11. Melakukan pemetaan rasio ketersediaan alokon secara *realtime* dan berjenjang dari pusat sampai faskes dan melakukan realokasi alokon dari rasio alokon yang tinggi ke yang rendah;
12. Menetapkan indikator *stock out* alokon di faskes melalui dukungan dana distribusi alokon pada BOKB;
13. Mengembangkan sistem digital untuk memperkuat rantai pasok alokon berbasis data sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan yang lebih dinamis melalui *Mimtool* web dan aplikasi *smart phone* Stokku untuk operasional pelaksanaan gudang yang memiliki interoperabilitas diantara keduanya;
14. Pengembangan mekanisme pendanaan pelayanan KB diluar sistem pendanaan melalui BPJS kesehatan;
15. Pengembangan sistem rujukan pelayanan vasktomi dengan penguatan kapasitas 1 dokter sebagai pengampu di masing-masing kabupaten dan kota;
16. Memperkuat pokja advokasi untuk melakukan pendekatan kepada tokoh enam agama dan tokoh masyarakat di wilayah tertentu tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga;
17. Mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk memenuhi kebutuhan sarana pelayanan kontrasepsi melalui pemanfaatan DAK Fisik;
19. Meningkatkan peran serta 3402 motivator KB Pria kepada PUS terutama suami.



Gambar 3.4.
Penyerahan DIPA 2020

A.2.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) adalah persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Realisasi capaian angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Pencapaian Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*unmet need*) Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	9.9 (2015-2020)	9.91 (2019)	12.1	81.81	81.90	

Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk ISS 3 adalah 12,1 persen dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar 9,91 maka capaiannya sebesar 81,90 persen, apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 9.9 capaiannya adalah 83,3 persen dengan kategori baik.dengan kategori baik. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 untuk menurunkan *unmet need* adalah sebagai berikut:

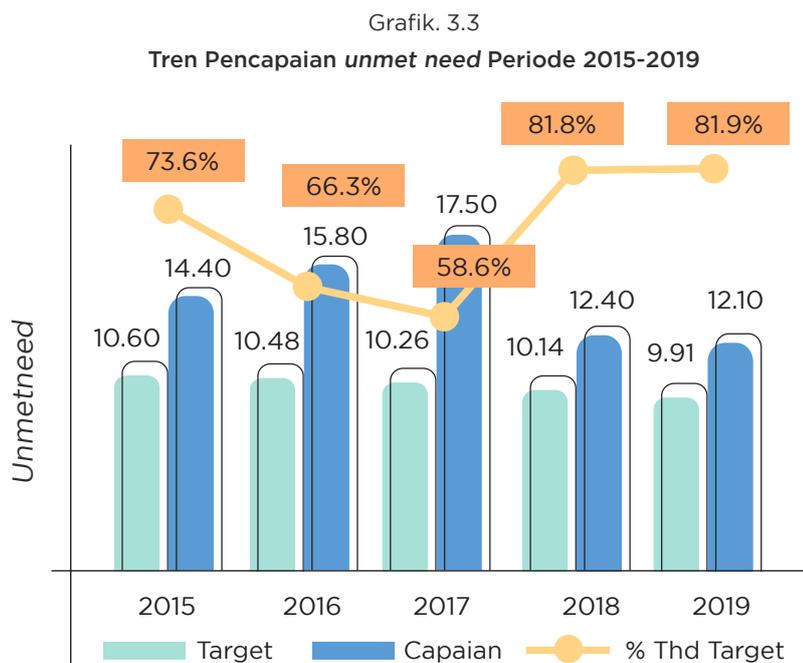
1. Meningkatkan peran serta kelompok kegiatan (poktan) sebanyak 87.738 kelompok BKB, 43.874 kelompok BKR, 50.342 kelompok BKL, 24.758 kelompok PIK R dalam memberikan KIE perencanaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan tujuan reproduksi (merencanakan, menunda kehamilan pertama, menjarangkan kehamilan berikutnya dan membatasi kehamilan);
2. Menyediakan media atau modul/materi terkait informasi tentang kontrasepsi, dan perencanaan berkeluarga dalam kelompok kegiatan;
3. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk penyediaan alat edukasi seperti BKB Kit regular, BKB Kit Stunting, Genre Kit, BKL Kit, KIE Kit;

4. Melaksanakan pembinaan Penggarapan pelayanan KBKR di 122 Kabupaten daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah tertinggal tahun 2015 - 2019 dan 97 wilayah perkotaan yang ditetapkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Tahun 2013;
5. Penguatan pelayanan KB di wilayah DTPK dan wilayah miskin perkotaan melalui penyediaan dukungan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali gerak per tahun per Kabupaten;
6. Meningkatkan kompetensi 90 tenaga kesehatan melalui pengembangan model pelayanan KB pasca persalinan di fasilitas kesehatan serta pembinaan pada 536 tenaga kesehatan yang sudah dilatih di tahun 2018;
7. Melaksanakan Advokasi dan KIE melibatkan *stakeholder*, mitra kerja termasuk tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap perencanaan keluarga dengan pemakaian kontrasepsi;
8. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui pendekatan siklus hidup terutama bagi PUS muda paritas rendah dan PUS tua paritas tinggi bagi 43.874 kelompok BKR dan 50.342 kelompok BKL;
9. Memfasilitasi tersedianya dana transfer untuk Kabupaten dan Kota melalui Biaya Operasional KB untuk pembinaan dan penyuluhan di Kampung KB pada 7.116 Kecamatan;
10. Pemodelan *public private partnership* dalam pelayanan KB melalui pemanfaatan CSR pihak swasta.

Faktor permasalahan yang mempengaruhi dalam mencapai target *unmet need* meliputi hal-hal berikut:

1. Baru 35,6% pemerintah daerah yang memiliki dinas Dalduk dan KB selebihnya bergabung dengan urusan bidang lain seperti Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan, dll. Sehingga kapasitas dinas yang belum utuh memiliki keterbatasan dalam hal SDM, penganggaran dan pengelolaan Program KKBPK;

2. Masih tingginya persepsi yang salah tentang kontrasepsi yang memberi rasa takut akibat efek samping penggunaan alokon sebesar 12,1% pada wanita dan 11,4% pada pria;
 3. Masih tingginya keinginan memiliki anak banyak sebesar 11% pada wanita dan 12, 8% pada pria;
 4. Masih tingginya penolakan pemakaian kontrasepsi sebesar 28% pada pria;
 5. Belum optimalnya penggarapan program KB pasca persalinan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya capaian KB pasca persalinan sebesar 1.340.044 dibandingkan dengan rata-rata jumlah persalinan sebesar 5 juta per tahun.
- Tren pencapaian *unmet need* periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi ISS 3 dari tahun 2015 ke 2017 mengalami tren penurunan, namun mulai tahun 2018 dan 2019 ISS ini mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 81,8 persen dan 81,9 persen.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan target capaian *unmet need* dari 9,91 di tahun 2019 menjadi 8,60 pada tahun 2020. Perbaikan kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan kapasitas Tim Pokja Advokasi di 50% provinsi dan di 20% kabupaten dan kota melalui pemanfaatan hasil *cost benefit analisis*
2. Penyediaan dan penyebarluasan informasi yang lebih difokuskan pada efek samping dan rumor penggunaan kontrasepsi sesuai segmentasi sasaran melalui pendekatan platform digital dan konvensional (*offline*);
3. Penyediaan dan penyebarluasan informasi dengan muatan yang difokuskan pada persiapan perencanaan berkeluarga, kaitan antara KB dan kesehatan ibu dan anak, serta kaitan antara KB dan tanggung jawab sosial;
4. Penyediaan dan penyebarluasan informasi

Tabel 3.15
Pencapaian *unmet need* Tahun 2019 dengan tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	9,91	8,60

Sumber: SKAP 2019 dan Renja 2020

tentang penggunaan kontrasepsi melalui kemitraan bersama dengan pemuka agama, pemuka tokoh adat, pemuka tokoh masyarakat utamanya di wilayah Indonesia Timur;

5. Peningkatan kualitas konseling penggunaan KB saat dilakukan asuhan antenatal

A.2.4 Persentase Peserta KB Aktif MKJP

Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Jenis metoda yang termasuk ke dalam MKJP adalah kontrasepsi mantap pria dan wanita (tubektomi dan vasketomi), Implant dan IUD (*Intra Uterine Device*). Realisasi capaian angka peserta KB aktif MKJP untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Pencapaian Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Persentase peserta KB Aktif MKJP	23.5 (2015-2020)	23.5 (2019)	24.6	105	105	

Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk ISS 4 adalah 24,6 persen, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja dan target RPJMN sebesar 23,5 persen maka persentase capaiannya adalah sebesar 105 persen dengan kategori sangat baik. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam tercapainya target 2019 untuk angka peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kontrasepsi MKJP melalui sosialisasi, promosi melalui berbagai media (*above the line, through the line* dan *below the line*), tenaga lini lapangan serta melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja;

(*antenatal care*) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi

6. Penguatan KIE kepada Ibu hamil oleh kader, PPKBD, sub PPKBD tentang perencanaan penggunaa kontrasepsi pasca persalinan melalui pelayanan BOKB

2. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi MKJP melalui penyediaan 569.957 IUD dan 1.560.174 implant bagi PUS;
3. Tersedia 95.406 bidan dan 25.111 dokter terlatih pelayanan KB MKJP dengan rincian tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Jumlah Tenaga Kesehatan yang terlatih

Tenaga Kesehatan	Jenis Alokasi	Jumlah
Dokter	IUD	9.804
	MOW	3.553
	MOP	2.744
	Implan	9.010
Bidan	IUD	47.906
	Implan	47.140

Sumber data : Pelkon, Desember 2019

4. Menyediakan dukungan dalam penggerakkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk 296.799 peserta;
5. Ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk penyediaan sarana penunjang pelayanan KB antara lain, implan removal kit, VTP Kit, IUD Kit, *Obgyn bed*, tempat pelayanan alat dan obat kontrasepsi; sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB yaitu mobil unit pelayanan KB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja angka peserta KB Aktif (PA) MKJP Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Adanya potensi ganti cara pemakaian kontrasepsi dari non MKJP menjadi MKJP karena peserta KB non MKJP sebesar 75,4 persen dari total peserta KB aktif (SKAP 2019);

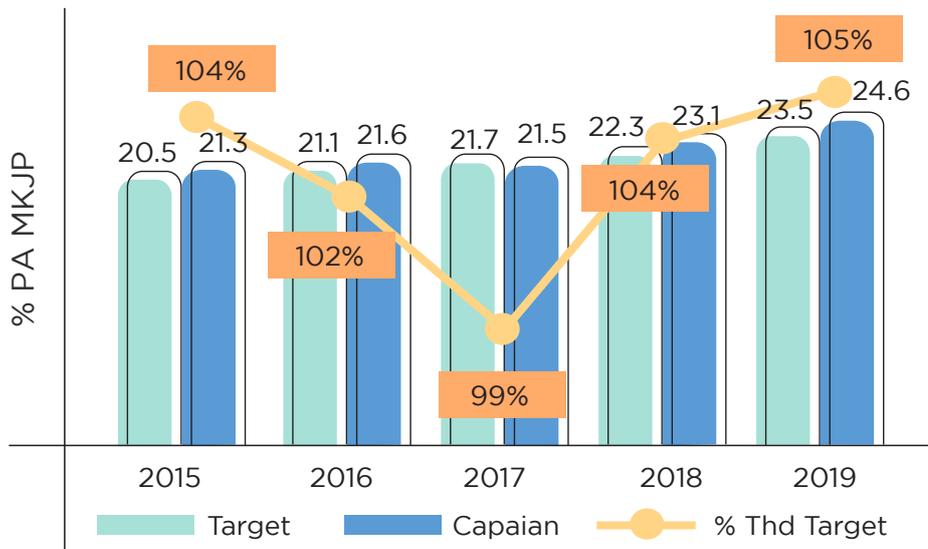
2. Adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan KB MKJP;
3. Adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan KB MKJP serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi serta surat edaran Kepala BKKBN No.637/I/KB06/E1/2018 tentang penggerakan pelayanan KB MKJP;
4. Adanya integrasi kegiatan pemasangan KB MKJP dengan pemeriksaan IVA Test/pap smear pada kegiatan momentum;
5. Adanya program bulan pelayanan MKJP serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka hari kontrasepsi sedunia dan memberikan reward kepada 3 Provinsi dengan capaian MKJP tertinggi Tahun 2019,

yaitu: Provinsi Jawa Timur (Skala target PPM >100.000), Provinsi Sumatera Barat (Skala target PPM 30.000-100.000), dan Provinsi Kalimantan Timur (Skala target PPM < 30.000).

6. Adanya pencaanangan TNI manunggal KB kesehatan tingkat Nasional dan Provinsi yang di prioritaskan pada pelayanan KB MKJP.

Tren grafik peserta KB aktif MKJP tahun 2015-2019 yang tercantum pada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa capaian realisasi ISS pada tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami tren penurunan yaitu 104 persen, 102 persen dan 99 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 104 persen bahkan pada tahun 2019 capaian meningkat lagi menjadi 105.

Grafik 3.4
Tren Pencapaian Peserta KB Aktif MKJP Periode 2015-2019



Sumber Data : Modul wanita,SKAP 2019

Tabel 3.18

Perbandingan Target Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2019 dengan Tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Persentase peserta KB Aktif MKJP	23,5	25,11

Sumber: SKAP 2019 dan Renja 2020

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa adanya peningkatan target dari tahun 2019 sebesar 23,5 menjadi 25,11 pada tahun 2020. Adapun upaya dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun 2020 dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi yang lebih difokuskan pada keuntungan metode kontrasepsi jangka panjang sesuai segmentasi sasaran melalui pendekatan platform digital dan konvensional (*offline*);

2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan tentang pembiayaan pelayanan MOW interval;
3. Penyediaan alokan MKJP yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat jenis.
4. Perluasan jangkauan pelayanan KB termasuk

KB MKJP pada menu operasional balai penyuluhan melalui BOKB 2020;

5. Pembinaan kepesertaan KB MKJP melalui Surveilans Pasca Pelayanan terutama peserta KB yang memperoleh pelayanan dari fasilitas kesehatan swasta.

A.2.5

Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (Tingkat Putus Pakai)

Angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai/*Contraceptive Discontinuation Rate*) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (*exposure*) karena suatu alasan tertentu antara lain terjadinya kegagalan atau mengalami efek samping.

Tabel 3.19

Pencapaian Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai)	24,6 (2015-2020)	24,6 (2019)	29	84,8	84,8	

Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk ISS 5 adalah 29 persen dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja dan target RPJMN sebesar 24,6 maka capaiannya sebesar 84,8 persen dengan kategori baik.

Upaya yang telah dilakukan dalam tercapainya target 2019 untuk penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta kelompok kegiatan (poktan) sebanyak 87.738 kelompok BKB, 43.874 kelompok BKR,

50.342 kelompok BKL, 24.758 kelompok PIK R dalam memberikan KIE perencanaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan tujuan reproduksi (merencanakan, menunda kehamilan pertama, menjarangkan kehamilan berikutnya dan membatasi kehamilan)

2. Meningkatkan kapasitas pengelola program (PKB/PLKB dan Kader) dalam penggunaan media promosi KIE seperti BKB Kit, GenRe Kit, BKL Kit dan lembar balik serta mengoptimalkan pemanfaatan media promosi tersebut dalam pembinaan anggota kelompok kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelaksanaan program pembangunan keluarga berbasis *online* melalui pengembangan fitur dan konten program, dan *offline* melalui ketersediaan panduan/pedoman/juknis pelaksanaan program.
4. Melakukan penguatan pembinaan pasca pelayanan kontrasepsi melalui metode Surveilans Pasca Pelayanan.
5. Menyediakan dana ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi bagi peserta KB sebanyak 157 peserta atau sebesar Rp. 314.000.000,-
6. Melakukan sosialisasi tentang kriteria kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi (*Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*) kepada petugas pelayanan KB
7. Melakukan penyusunan pedoman pelayanan kontrasepsi pada krisis kesehatan akibat bencana untuk mengurangi tingkat putus pakai pada wilayah yang terkena bencana
8. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui berbagai media (*above the line, through the line*) serta fokus pada *strategi below the line* , tenaga lini lapangan berbasis data

dan informasi pencapaian program serta melibatkan mitra kerja untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kontrasepsi modern.

- Promosi dan konseling kesehatan dan reproduksi melalui 73.491 kelompok kegiatan

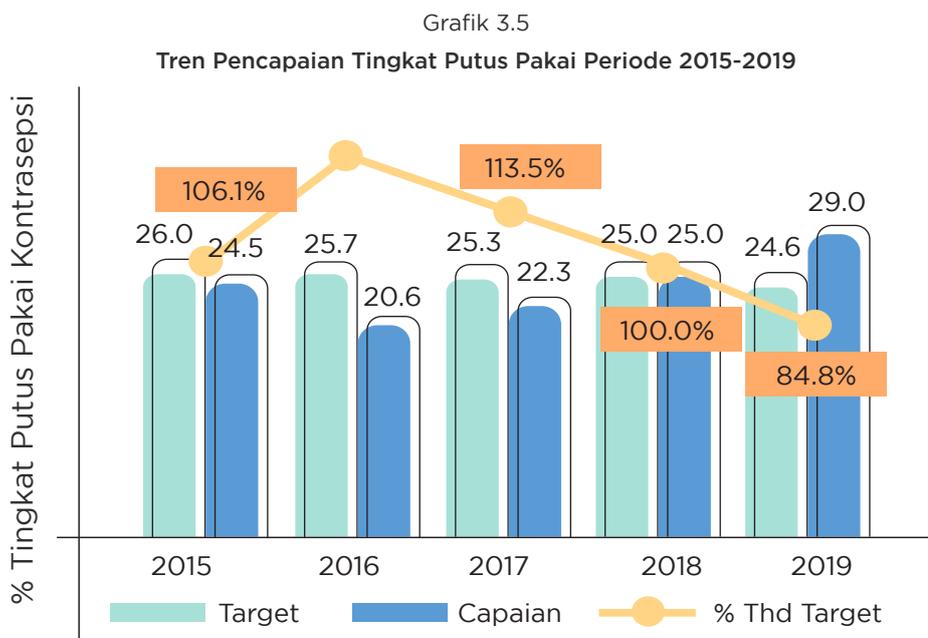
Permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya pembinaan kepada peserta kelompok kegiatan yang disebabkan karena keterbatasan jumlah PKB/PLKB tidak sebanding dengan luas wilayah binaan dengan rasio saat ini 1:6 desa/kelurahan;

- Cukup tingginya angka putus pakai kontrasepsi pada peserta KB Non MKJP yaitu Pil (37,3%), suntik (23,7%), dan kondom (33,3%) (SKAP 2019). Disisi lain, kesertaan ber-KB di Indonesia masih didominasi oleh pengguna KB Non MKJP;

- Masih rendahnya konseling yang memberikan informasi tentang efek samping/ masalah kontrasepsi yang dipakai yaitu sebesar 42% dan tentang cara mengatasi efek samping sebesar 34% yang mengakibatkan tingginya putus pakai alokon karena alasan efek samping (33%) (SDKI, 2017).

Tren pencapaian tingkat putus pakai periode tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan grafik di atas, untuk melihat perkembangan pencapaian penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) periode tahun 2015-2018 maka didapatkan hasil setiap tahun target tercapai, namun pada tahun 2019 capaian mengalami penurunan menjadi 84,8 persen.

Tabel 3.20
Perbandingan Target Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2019 dengan Tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai)	24,6	25,79

Sumber: SKAP 2019 dan Renja Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan target dari tahun 2019 yaitu sebesar 24,6 % menjadi 25,79% pada tahun 2020. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan tenaga PKB/ PLKB dan kader tentang upaya pembinaan poktan melalui *E-learning google classroom* sebagai upaya pembinaan poktan;
2. Penyediaan dan penyebaran informasi yang lebih difokuskan pada efek samping dan rumor penggunaan kontrasepsi sesuai segmentasi sasaran melalui pendekatan *platform* digital dan konvensional (*offline*);
3. Pengembangan Indeks Kualitas Pelayanan KB di faskes yang didalamnya memuat enam variabel yaitu pemberian informasi pilihan metode kontrasepsi, hubungan provider dengan klien, efek samping, kompetensi

provider, mekanisme agar klien selalu menggunakan kontrasepsi, dan pelayanan ekstra kepada klien. Pengembangan indeks ini bertujuan sebagai dasar pemetaan penurunan tingkat putus pakai;

4. Penyusunan Materi KIE pelayanan kontrasepsi di wilayah tanggap bencana untuk menurunkan tingkat putus pakai pada kondisi krisis kesehatan.
5. Penguatan pembinaan kesertaan ber-KB melalui 5. revitalisasi pola mekanisme operasional program KKBPK lini lapangan antara lain pengaktifan pertemuan konsolidasi internal/ *staff meeting*, rakor KKBPK tingkat kecamatan, rakor KKBPK tingkat kelurahan, KIE oleh Tim Operasional Program KKB tingkat kecamatan, desa/ kelurahan, KIE oleh kader, dan pelaksanaan lokakarya mini.

A.2.6 Tren Pencapaian indikator sasaran strategis RPJMN periode 2015 - 2019

Penyusunan laporan kinerja tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis BKKBN tahun 2015 - 2019. Rencana Strategis BKKBN berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Tahun 2015-2019 telah mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan indikator kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2015 - 2019

Tahun	Indikator									
	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) Per WUS (15-49 Tahun)		Persentase Pemakaian Kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ CPR</i>)		Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)		Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP		Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%)	
2015	Target	2.37	Target	60.50	Target	10.6	Target	20.5	Target	26
	Realisasi	2.28	Realisasi	59.50	Realisasi	14.4	Realisasi	21.3	Realisasi	24.5
	%	103.95	%	98.3	%	73.6	%	104	%	106.1
2016	Target	2.35	Target	60.70	Target	10.48	Target	21.1	Target	25.7
	Realisasi	2.3	Realisasi	59.40	Realisasi	15.8	Realisasi	21.6	Realisasi	20.6
	%	102.17	%	97,9	%	66.3	%	102	%	124.8
2017	Target	2.33	Target	60.9	Target	10.26	Target	21.7	Target	25.3
	Realisasi	2.4	Realisasi	57.2	Realisasi	17.5	Realisasi	21.5	Realisasi	22.3
	%	97.08	%	93.9	%	58.6	%	99	%	113.5

Tahun	Indikator									
	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) Per WUS (15-49 Tahun)		Persentase Pemakaian Kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ CPR</i>)		Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)		Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP		Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%)	
2018	Target	2.31	Target	61.1	Target	10.14	Target	22.3	Target	25
	Realisasi	2.38	Realisasi	57	Realisasi	12.4	Realisasi	23.1	Realisasi	25
	%	97.06	%	93.3	%	81.8	%	104	%	100
2019	Target	2.28	Target	61.3	Target	9.91	Target	23.5	Target	24.6
	Realisasi	2.45	Realisasi	54.97	Realisasi	12.1	Realisasi	24.6	Realisasi	29
	%	93.06	%	89.7	%	81.9	%	105	%	84.8

Sumber data : Modul wanita,SKAP 2019

A.3 Capaian Kinerja Sasaran Program

Gambar 3.5.

Kerangka Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Fertilitas



Berdasarkan diagram di atas, dijelaskan bahwa dari dua puluh (20) sasaran program BKKBN dibagi kembali dalam empat (4) program yaitu:

- Program KKBPK yang mempunyai tujuh Indikator Kinerja Program (IKP),
- Program DKM yang mempunyai enam IKP,
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN mempunyai dua IKP,

- Program Pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama internasional BKKBN mempunyai lima IKP.

Berikut penjabaran capaian kinerja Sasaran Program pada tahun 2019 beserta dengan tren capaiannya:

A.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Untuk memastikan sasaran strategis BKKBN tercapai, maka ditetapkan sasaran program BKKBN 2015-2019 yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) indikator kinerja program.

Hasil capaian sasaran program BKKBN pada tahun 2019 dapat ditunjukkan pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian	
Program Kependudukan KB & Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan KB & Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah Peserta KB Baru	Peserta KB	7,33	5,68	77,5	●
		2	ASFR 15-19 tahun	Peserta KB	38	33	115,2	●
		3	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	PUS	70	13,6	19,4	●
		4	Persentase Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga	Keluarga	50	43,2	86,4	●
		5	Indeks Pengetahuan Remaja tentang Generasi Berencana	Pengetahuan Remaja	52	60	115,4	●
		6	Persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan	Masyarakat	50	55,8	111,6	●
		7	Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	Data dan Informasi	1	1	100,00	●
Program Pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta penelitian dan pengembangan program KKBPK		Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur dan tenaga fungsional	% SDM Aparatur	100	94,8	94,8	●
			Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	Balatbang	6	4	67	●
		3	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	MOU	3	3	100	●

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian	
		4	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, peneltiaan dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	Indeks	3,4	3,2	94,1	●
		5	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Provinsi	34	34	100	●
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1	Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	Jumlah peraturan	1	1	100	●
		2	Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	Laporan keuangan	WTP	WTP	100	●
		3	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	Dokumen	4	5	125	●
		4	Persentase terlaksananya pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap	Persentase	63 (Pengembangan SDM)	100	158,73	●
		5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Indeks	4 dari skala 1-4	3,17	79,3	●
		6	Jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi	Provinsi	34	34	100	●
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1	Persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK oleh eksternal audit	LHP	0 % (dari satker yang diaudit)	0,07 %	93,46	●
		2	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker perwakilan BKKBN Provinsi	Provinsi	34	34	100,00	●

Sumber data: SKAP 2019 dan LAKIP UKE I TA 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa dari 20 (dua puluh) indikator kinerja program sasaran strategis BKKBN terdapat 15 (lima belas) capaian indikator kinerja program dengan kategori sangat baik, 1 (satu) capaian indikator kinerja program dengan kategori baik, 2 (dua) capaian

indikator kinerja program dengan kategori cukup, 2 (dua) capaian indikator kinerja program dengan kategori kurang.

Pengukuran kinerja 20 (dua puluh) indikator kinerja program dapat diuraikan sebagai berikut:

A.3.1.1 Jumlah Peserta KB Baru (PB)

Peserta KB baru (PB) adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara atau alat kontrasepsi setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Indikator peserta KB baru tidak mencakup akseptor ganti cara yang beralih dari suatu metode kontrasepsi ke metode yang lain karena alasan kenyamanan atau biaya. Realisasi capaian jumlah Peserta KB Baru (PB) untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB)
Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian	
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	RPJMN	Perjanjian Kinerja
Jumlah Peserta KB Baru (juta)	6.98 (2015-2020)	7.33 (2019)	5.68	81.4	77.5		

Sumber: Statistik Rutin BKKBN, Desember 2019

Berdasarkan tabel diatas, realisasi jumlah peserta KB baru (PB) sebesar 5,68 juta peserta KB dari target Perjanjian Kinerja sebesar 7,33 juta peserta KB dengan persentase capaian sebesar 77,5 persen dengan kategori cukup, apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 6.98 capaiannya adalah 81.4 persen dengan kategori baik.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Jumlah Peserta KB baru (PB), maka telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

1. Memperkuat penggerakan pelayanan KB MKJP melalui penyediaan dukungan dana penggerakan dengan sasaran sebanyak 296.799 peserta termasuk peserta KB baru;

2. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan KB melalui fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta pada 9.993 Puskesmas, 2.813 Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta dan 7.917 klinik pratama (Profil Kesehatan Indonesia, 2018) yang berpotensi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan KB;
3. Memperluas akses pelayanan KB pada DTPK dan wilayah miskin perkotaan melalui pelayanan KB bergerak untuk menjaring peserta KB Baru;
4. Mengembangkan serta menyediakan materi promosi dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di 11.548 fasilitas kesehatan dan 73.491 kelompok kegiatan.
5. Memperkuat promosi KB pasca persalinan di faskes antara lain melalui pemanfaatan MEC wheel bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi (POGI dan IBI) serta mitra terkait.

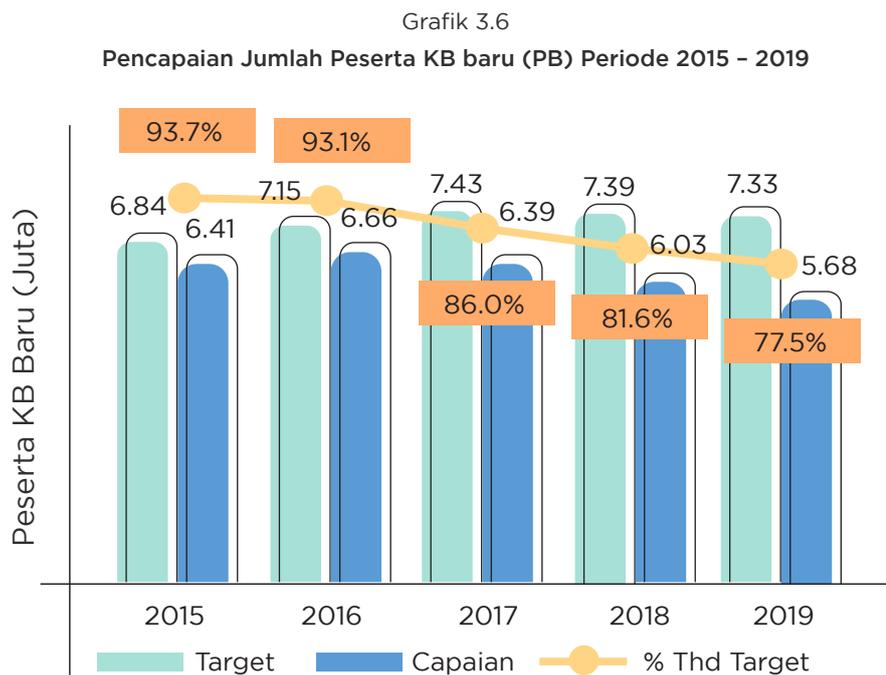
Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya jumlah peserta KB baru (PB) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan informasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, aplikatif, dan mudah diperoleh khususnya bagi calon pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan pertama;
2. Promosi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum seluruhnya menjangkau kelompok masyarakat tertentu sesuai sosiokultural secara tepat dan efektif;
3. Masih rendahnya pelayanan KB di faskes yang memberikan pelayanan persalinan yaitu rumah bersalin (0,4%), rumah sakit bersalin (0,7%), dan rumah sakit swasta (2,6%) (SKAP 2019);

4. Pembiayaan KB pasca persalinan khususnya di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) masih menjadi satu paket dengan biaya persalinan dalam skema pembiayaan jaminan kesehatan sehingga mempengaruhi minat tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan KB pasca persalinan;

5. Sebanyak 5.706 faskes yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan berpotensi memberikan pelayanan KB namun belum teregistrasi dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA), sehingga hasil pelayanan KB tidak tercatat dan terlupakan.

Adapun, tren Jumlah Peserta KB Baru (PB) periode tahun 2015-2019 terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Statistik Rutin BKKBN 2019

Peserta KB baru (PB) sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 - 2024, namun indikator tersebut secara teoritis memiliki kontribusi terhadap peningkatan angka pemakaian kontrasepsi (mCPR) sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian jumlah peserta KB baru (PB), maka pada tahun 2020 akan dilaksanakan :

1. Pengembangan materi informasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan segmentasi sasaran khususnya bagi calon pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan pertama;
2. Penyediaan kontrasepsi progestin *only pills* untuk menambah variasi jenis kontrasepsi KB pasca persalinan;

3. Penyediaan dana BOKB untuk biaya operasional penyuluhan KB pada menu biaya operasional bagi balai penyuluhan KB dimana pemanfaatannya harus dapat menghasilkan *output* PB;
4. Perluasan akses pelayanan KB melalui peningkatan cakupan faskes yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN;
5. Pengembangan promosi dan konseling KB MKJP pascapersalinan melalui video grafis di faskes;
6. Melakukan advokasi dan penyamaan persepsi antara pengambil kebijakan dan organisasi profesi terkait dengan pembiayaan pelayanan KB pasca persalinan.

A.3.1.2 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun

Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun adalah Angka kelahiran kelompok umur 15-19 tahun, menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan pada suatu tahun tertentu per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Tinggi rendahnya ASFR 15-19 tahun merupakan representasi fertilitas pada kelompok usia remaja. Tingginya fertilitas usia remaja merupakan alarm peringatan dini terhadap ancaman tingginya fertilitas secara umum. Hal tersebut karena fekunditas (kemampuan perempuan untuk hamil dan melahirkan) yang terbentang sepanjang usia reproduksinya hingga usia 49 tahun. Jika di usia muda (masa reproduksi awal) sudah hamil dan melahirkan berarti akan memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan lebih banyak lagi sampai dengan akhir usia reproduksinya. Oleh karena itu, menurunkan fertilitas remaja (ASFR 15-19 tahun) adalah upaya dalam menurunkan fertilitas secara umum (TFR).

Pada tahun 2019 angka kelahiran pada kelompok umur wanita/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun sebesar 33 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun dari target 38 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun atau persentase capaian untuk indikator ini sebesar 115,15% yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Pencapaian Age Specific Fertility Rate (ASFR)
15-19 tahun pada Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	38 (2015-2020)	38 (2019)	33	115.2	115.2	

Sumber data : Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk indikator tersebut adalah 33, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja dan target RPJMN sebesar 38 maka persentasenya adalah sebesar 115,2 dengan kategori sangat baik.

Pencapaian indikator ini merupakan hasil dari pelaksanaan program antara lain melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan kesehatan reproduksi pada remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe). Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

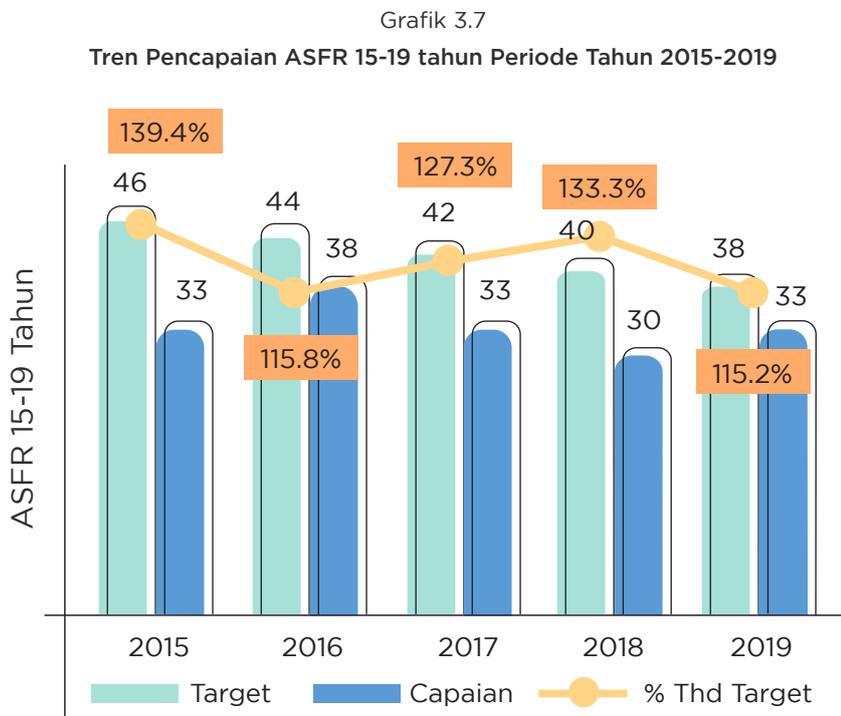
1. Memperkuat jangkauan program Generasi Berencana melalui 25.213 kelompok pada Tahun 2019 (sumber: Dallap);
2. Memperluas jangkauan program Generasi Berencana yang menasar remaja berbasis komunitas melalui kerjasama dengan kementerian sosial pada kelompok anak jalanan dan difabel, serta melalui kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM pada kelompok remaja yang ada di lembaga Masyarakat;
3. Menyediakan materi dan media KIE Generasi Berencana sampai lini lapangan melalui Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB;
4. Menyediakan pembiayaan operasional untuk kelompok kegiatan di kampung KB melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
5. Melakukan penguatan advokasi dan KIE Generasi Berencana melalui kegiatan sosialisasi bersama mitra di 33 provinsi;
6. Membangun aplikasi GenRe Apps untuk memperluas informasi kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dengan 5 (lima) transisi kehidupan remaja;
7. Membangun karakter remaja yang bersih tertib dan mandiri melalui kegiatan GenRevolution berteman.
8. Promosi dan KIE dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui berbagai saluran media sesuai segmentasi sasaran.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja ASFR 15-19 Tahun 2019 yaitu:

1. Potensi penggarapan program Generasi Berencana masih besar dengan jumlah struktur remaja 25 persen atau 66,3 juta remaja dari total jumlah penduduk (proyeksi penduduk 2010 - 2035);

2. Adanya undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan undang-undang tersebut tercantum batas usia perkawinan menjadi 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan;
4. Tersedia panduan, modul dan *prototype* program Bina Ketahanan Remaja (BKR);
5. Adanya kerjasama dengan stakeholder dan mitra kerja yang memiliki anak cabang sampai tingkat lini lapangan;
6. Tingginya akses remaja terhadap internet dan media sosial menjadi tantangan dalam memperluas akses informasi dan konseling bagi remaja melalui media sosial.
7. Tersedianya Buku Saku Promosi Kesehatan Reproduksi di kelompok kegiatan sebagai upaya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja.

Tren pencapaian ASFR 15-19 tahun periode tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: SKAP 2019 dan *Performance Monitoring and Accountability*

Pada grafik diatas menunjukkan pencapaian target selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari indikator penurunan pada angka kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) sudah tercapai. Pencapaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan ASFR dari Tahun 2015 karena perbedaan metode pengukuran dari 2 (dua) sumber data yang berbeda (Tahun 2015 bersumber dari PMA dan Tahun 2016 bersumber dari SKAP). Pencapaian ASFR ini cukup fluktuatif, meningkat pada tahun 2017 sebesar 127,3% dan 2018 sebesar 133,3%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 115,2%. Berdasarkan Renstra

BKKBN 2020 -2024 telah ditetapkan bahwa indikator *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun menjadi Indikator Sasaran Strategis BKKBN. Di sisi lain capaian hasil SKAP 2019 menunjukkan bahwa indikator tersebut sudah tercapai, sedangkan target indikator tersebut pada tahun 2020 sebesar 25 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, maka upaya pencapaian kinerja yang dilakukan tahun 2020 untuk menurunkan ASFR 15 - 19 tahun adalah :

1. Memperluas jangkauan sasaran remaja berbasis komunitas dengan latar belakang remaja broken home yang belum mendapatkan intervensi program GenRe;

2. Penyusunan modul materi kesehatan reproduksi segmentatif 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan 20-24 tahun;
3. Penguatan karakter remaja dan *life skill* sebagai upaya mendukung kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 yaitu revolusi mental dalam system sosial untuk memperkuat ketahanan kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini;
4. Pengembangan fitur konseling dokter gen Z dan *online* khusus anak-anak *broken home* melalui *platform* teman curhat;
5. Penyusunan kebijakan strategi dan peta kerja dalam penurunan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sebagai upaya pencegahan 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak) dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

A.3.1.3 Persentase PUS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua Jenis Metode Kontrasepsi Modern

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu *proximate determinant* atau faktor penentu turunnya *Total Fertility Rate*. Sebelum memilih dan memutuskan pemakai kontrasepsi, Pasangan Usia Subur harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kontrasepsi khususnya kontrasepsi modern sehingga sesuai dengan tujuan pemakaian (menunda, menjarangkan atau mengakhiri kesuburan).

Didalam indikator, yang dimaksud dengan semua jenis kontrasepsi modern yang perlu diketahui dan dipahami adalah 8 (delapan) jenis alat/cara kontrasepsi modern yaitu kondom, pil, suntik KB, susuk/implant, IUD/AKDR, Metode operatif wanita, metode operatif pria serta metode amenore laktasi.

Pada tahun 2019, terjadi penurunan terhadap pencapaian target tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 13,6 persen dari target 70 persen atau hanya tercapai 19,4 persen yang disajikan dalam tabel di samping:

Tabel 3.25

Pencapaian Persentase PUS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua Jenis Metode Kontrasepsi Modern Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	70 (2015-2020)	70 (2019)	13.6	19.4	19.4	

Sumber: SKAP, 2019

Bila dibandingkan dengan pengetahuan dan pemahaman PUS terhadap semua jenis kontrasepsi, SKAP 2019 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman kelompok wanita PUS yang mengetahui setidaknya 6 jenis alat/cara KB modern sebesar 73% (tabel). Rendahnya pencapaian ini dapat disebabkan oleh masuknya metode MAL pada tahun 2017 sebagai salah satu metode kontrasepsi modern, tetapi belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase PUS yang mengetahui dan memahami semua jenis kontrasepsi modern pada tahun 2019:

1. Melakukan sosialisasi tentang metode kontrasepsi kepada masyarakat yang melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja melalui berbagai kegiatan *offline* seperti kegiatan kemitraan.
2. Melaksanakan advokasi kepada *stakeholder*, mitra kerja, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui kegiatan momentum strategis dan tim pokja advokasi sehingga ikut berperan serta untuk mensosialisasikan tentang pentingnya perencanaan keluarga dengan menggunakan kontrasepsi yang tepat.
3. Mengembangkan isi pesan tentang metode kontrasepsi modern serta menyediakan desain yang menarik, yang diharapkan sesuai dengan selera masyarakat berupa poster, leaflet.
4. Menggunakan digital platform sebagai media untuk menyebarkan informasi termasuk videografis dan infografis.
5. Mengoptimalkan Bank data, https://archive.org/details/@bank_akie_bkkbn, sebagai *tools* untuk menyimpan materi advokasi, promosi yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang memerlukan bahan sosialisasi.
6. Bekerjasama dengan media *mainstream* (media elektronik, cetak), media *online* dan jaringan media sosial serta *key opinion leader /influencer* local /nasional, dalam menyebarkan informasi tentang metode kontrasepsi dan manfaatnya.
7. Menyediakan sarana berupa Mobil Unit Penerangan di OPD-KB dan materi berupa KIE Kit, yang dapat digunakan PKB/PLKB untuk menyampaikan informasi tentang semua metode kontrasepsi melalui Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB
8. Menyediakan biaya dukungan KIE untuk pemenuhan media KIE melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

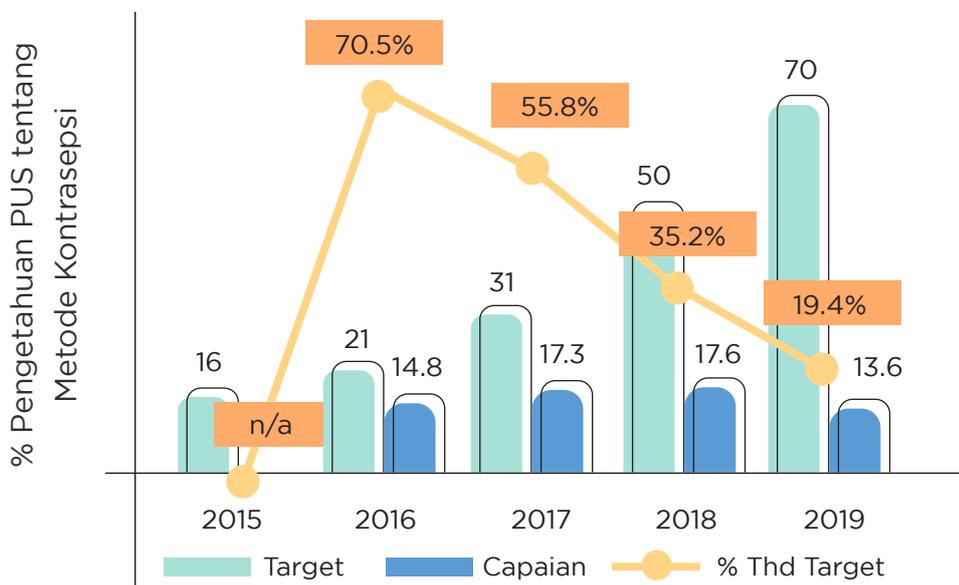
Faktor penyebab terjadinya rendahnya realisasi capaian target persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2019, sebagai berikut:

1. Promosi tentang semua metode kontrasepsi modern terutama Metode Amenore Laktasi kepada Pasangan Usia Subur belum optimal.
2. Belum efektifnya strategi pemilihan media yang digunakan untuk mempromosikan metode kontrasepsi sesuai segmentasi sasaran dan wilayah. Hasil SDKI 2017 menunjukkan bahwa wanita usia subur mendapatkan informasi tentang KB melalui Televisi (57 persen), Papan Iklan papan iklan/spanduk/umbul-umbul 39 persen, poster/pamflet 37 persen, Radio 9 persen dan yang tidak mendapatkan pesan KB melalui berbagai media yaitu 30 persen.
3. Terdapat perubahan perilaku pencarian informasi masyarakat Indonesia, sebagaimana penelitian *We Are Social*, dari laporan berjudul "*Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World*" yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, 130 juta dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa adalah pengguna aktif media sosialnya dengan penetrasi 49 persen.
4. Belum dipahaminya isi pesan tentang kontrasepsi modern dan penyediaan materi promosi belum sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Rendahnya pengetahuan tentang KB yang diperoleh Petugas KB (PKB/PLKB). SDKI menunjukkan penurunan peroleh informasi dari PKB/PLKB sebesar 7 persen menurun dari SDKI 2012 (10.4 persen). Hal ini dapat disebabkan karena jumlah PKB/PLKB tidak sebanding dengan luas wilayah binaan dengan rasio saat ini 1:6 desa serta kualitas SDM PKB/PLKB yang ada, belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi

Berdasarkan SKAP tahun 2019, terdapat penurunan tren pencapaian persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern dalam periode 2015-2019, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.8

Tren Pencapaian Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Periode Tahun 2015-2019



Sumber data: Modul wanita, SKAP 2019; n/a : Not Available

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tren pencapaian presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi periode tahun

2015 - 2019 mengalami penurunan yang secara berturut-turut yaitu 70,5% pada tahun 2016; 55,8% pada tahun 2017; 35,2 pada tahun 2018; dan 19,4% pada tahun 2019.

A.3.1.4 Persentase Keluarga yang Memiliki Pemahaman dan Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga

Salah satu kinerja ke deputian bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dalam mewujudkan keluarga berkualitas diukur melalui keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga, yang terdiri dari fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta lingkungan. Realisasi capaian indikator persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Pencapaian Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	50 (2015-2020)	50 (2019)	43.2	86.4	86.4	●

Sumber: Modul Keluarga, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk indikator ini sebesar 43,2 persen dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja dan target RPJMN sebesar 50 persen maka persentase capaiannya sebesar 86,4 persen. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan materi 8 (delapan) fungsi keluarga untuk kegiatan sosialisasi pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan Kelompok UPPKS);
2. Memperkuat kapabilitas dan kapasitas pengelola dan pelaksana program (OPD KB, PKB/PLKB, dan Kader) melalui orientasi dan *workshop* program pembangunan keluarga;
3. Melakukan penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga melalui kegiatan sosialisasi bersama Mitra Strategis “Pembangunan Keluarga Bersama Mitra” di 34 provinsi;
4. Penyusunan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang merupakan implementasi dari 8 (delapan) fungsi Keluarga;
5. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam hal pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup; penguatan karakter anak melalui pola asuh; penguatan karakter remaja melalui pembinaan ketahanan remaja dan *life skill*; penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan remaja tentang perencanaan berkeluarga dan tentang kesehatan reproduksi; dan penyiapan keluarga pra lansia dalam mewujudkan lansia tangguh yang aktif, sehat, mandiri dan produktif, pendampingan perawatan jangka panjang berbasis keluarga;
6. Sinergitas program pengasuhan anak usia dini serta pembentukan karakter dengan K/L terkait (Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkes) dan Perguruan Tinggi di dalam penyusunan modul, materi, Alat Permainan Edukatif (APE);
7. Pelaksanaan program kelas pengasuhan melalui Akademi Keluarga Hebat Indonesia (AKHI) bekerjasama dengan K/L terkait (Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkes) dan Perguruan Tinggi;
8. Pengembangan media promosi pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang antara lain buku pegangan kader, video tutorial, aplikasi, dan media partisipatif;

9. Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga melalui media online www.akutuku.com dan katalog Katalog Hasil Kelompok UPPKS Nusantara (KATHRINA);
10. Promosi tentang 8 fungsi keluarga melalui media cetak, elektronik, media sosial dan memanfaatkan momentum strategis seperti Hari Keluarga Nasional serta kegiatan lain yang melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pada tahun 2019 disebabkan antara lain:

1. Kurang optimalnya sosialisasi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh pada keluarga, karena dalam analisis lanjut terkait penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sebenarnya sudah dilakukan dalam penerapan kehidupan sehari-hari oleh keluarga namun belum diketahui penamaan dari masing-masing 8 (delapan) fungsi keluarga;
2. Belum dipahaminya isi pesan tentang 8 (delapan) fungsi keluarga oleh keluarga dan masyarakat.
3. Kurang optimalnya Sinergitas Program Pembangunan Keluarga antar kementerian lembaga yang menangani pembangunan keluarga;
4. Kebijakan pembangunan keluarga belum diterjemahkan secara operasional di seluruh tingkatan wilayah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.

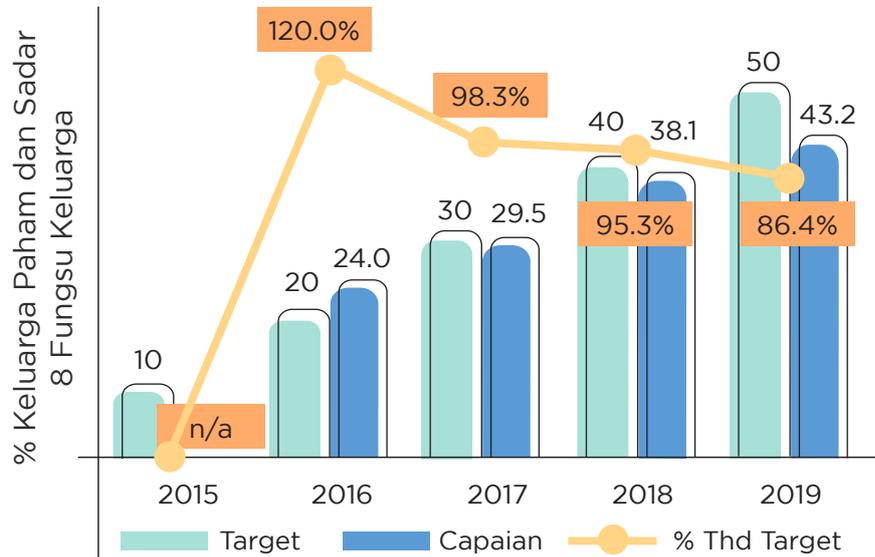
Adapun, tren persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga periode tahun 2015-2019 pada grafik ini:

Pada tahun 2019 capaian keluarga yang mengetahui seluruh fungsi keluarga mencapai

43,20 %

Grafik 3.9

Tren Pencapaian Persentase Keluarga Yang Memiliki Pemahaman dan Kesadaran
Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2015-2019



Sumber: Modul wanita, SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi indikator persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga mengalami tren penurunan dari tahun 2016 ke 2019 masing-masing sebesar 120 persen; 98,33 persen; 95,25 persen; dan 86,4 persen. Pada tahun 2019 capaian keluarga yang mengetahui seluruh fungsi keluarga hanya mencapai sekitar 43,20 persen dari responden

sebanyak 69.662 (99,6% dari 69.915 responden keluarga). Sedangkan untuk pencapaian yang mengetahui sedikitnya 1 (satu) fungsi keluarga menunjukkan capaian diatas 97,1 persen pada tahun 2019. Sandingan Prosentase keluarga yang menerapkan minimal 1 (satu) sampai 8 (delapan) fungsi keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27

Persentase Keluarga Menurut Pengetahuan Minimal Dua Nilai
di Masing-Masing Fungsi Tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019

Pengetahuan tentang fungsi keluarga	2015	2016	2017	2018	2019
Mengetahui sedikitnya 1 fungsi keluarga	85.4	77.1	94.3	96.7	97.1
Mengetahui sedikitnya 2 fungsi keluarga	64.0	78.7	86.6	91.2	92.1
Mengetahui sedikitnya 3 fungsi keluarga	52.8	70.3	78.3	84.8	86.4
Mengetahui sedikitnya 4 fungsi keluarga	43.8	62.1	69.9	77.8	80.4
Mengetahui sedikitnya 5 fungsi keluarga	36.3	53.8	61.4	70.0	73.9
Mengetahui sedikitnya 6 fungsi keluarga	29.4	45.4	52.0	61.6	66.4
Mengetahui sedikitnya 7 fungsi keluarga	22.9	36.0	41.9	51.4	57.4
Mengetahui 8 (semua) fungsi keluarga	15.3	24.0	29.5	38.1	43.2
Tidak mengetahui satupun fungsi keluarga	14.6	11.9	5.7	3.3	2.9
Jumlah responden	44.904	53.606	67.224	69.516	69.662

Sumber data : SKAP 2019

Indikator persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 – 2024, namun indikator tersebut telah terwakili melalui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang merupakan ISS dalam Renstra BKKBN 2020-2024, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung pencapaian IPK, maka pada tahun 2020 akan dilaksanakan :

1. Mensosialisasikan variabel Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) bidang Pembangunan Keluarga sebagai sebuah pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia;
2. Penguatan Kegiatan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai upaya lain internalisasi program 8 (delapan) fungsi Keluarga oleh kader.

3. Penguatan lingkungan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) melalui pembinaan poktan oleh kader.
4. Penguatan kegiatan kelas pengasuhan di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sekaitan dengan 8 (delapan) fungsi keluarga oleh kader.
5. Penguatan Akademi Keluarga Hebat Indonesia (AKHI) dengan melibatkan pihak universitas di 6 (enam) provinsi;
6. Pengembangan desain kemandirian ekonomi keluarga berbasis karakter dan siklus hidup sebagai penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga;
7. Implementasi pembangunan keluarga melalui *family welfare and happiness* di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY.

A.3.1.5 Indeks Pengetahuan Remaja tentang Generasi Berencana

Indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana merupakan ukuran untuk mengetahui keberhasilan upaya peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui pembinaan ketahanan remaja. Indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana diukur melalui 4 (empat) indikator pengetahuan remaja meliputi (1) masa subur; (2) umur sebaiknya menikah dan melahirkan; (3) HIV/AIDS ; dan (4) Narkoba. Pada tahun 2019, realisasi capaian indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase Capaian Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

115,38%

Tabel 3.28

Indeks Pengetahuan Remaja tentang Generasi Berencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Indeks Pengetahuan Remaja tentang Generasi Berencana	52 (2015-2020)	52 (2019)	60	115,38	115,38	●

Sumber: Modul Remaja, SKAP 2019

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari SKAP 2019, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 realisasi Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Generasi Berencana sebesar 60 persen dari target Perjanjian Kinerja dan target RPJMN sebesar 52 persen atau persentase capaian untuk indikator kinerja program ini sebesar 115,38 persen.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

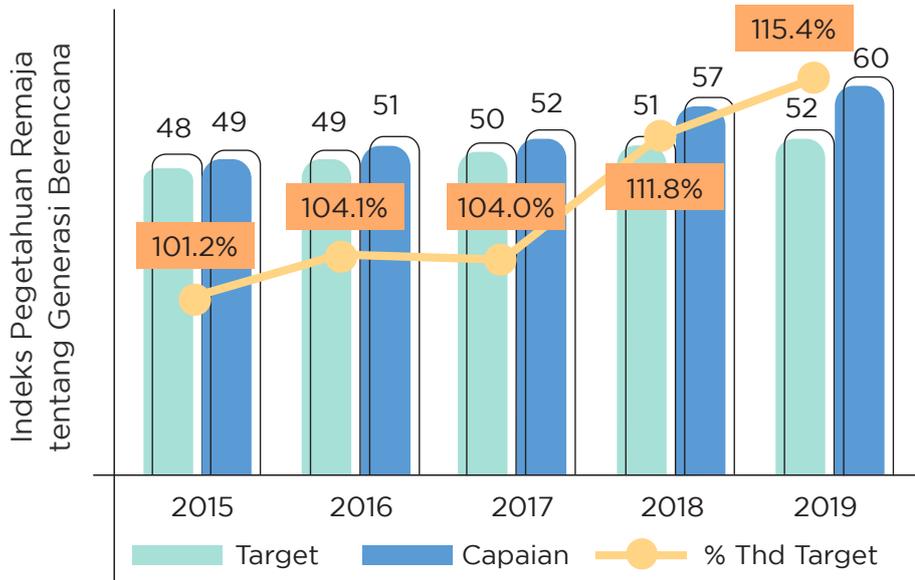
1. Tersedia panduan, modul dan *prototype* terkait Kesehatan Reproduksi Remaja;
2. Adanya kerjasama dengan *stakeholder* dan mitra kerja yang concern terhadap kesehatan reproduksi remaja (JH-CCP,Plan, Unicef,UNFPA);
3. Penguatan KIE kepada remaja tentang substansi kesehatan reproduksi remaja dengan video di youtube;
4. Peningkatan kapasitas pengelola *social media* GenRe (admin dan *content creator*) di Pusat dan Provinsi;
5. Integrasi *platform digital* GenRe Indonesia dengan Dokter Gen Z yang dikembangkan oleh JH-CCP berkolaborasi dengan media komunitas remaja terbesar di Indonesia, Hipwee.com;
6. Membangun aplikasi GenRe Apps untuk memperluas informasi kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang di dalamnya terdapat muatan kesehatan reproduksi remaja;
7. Memanfaatkan kegiatan *offline*, media *mainstream*, media sosial serta jaringannya, media *online* serta melibatkan *key opinion leader/influencer* untuk mensosialisasikan substansi kesehatan reproduksi kepada remaja.
8. Pendekatan baru BKKBN agar bisa menjadi partner yang ramah kepada remaja dengan melakukan *Rebranding* BKKBN termasuk penyegaran konten dan substansi.

Faktor keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Potensi penggarapan program Generasi Berencana masih besar dengan jumlah struktur remaja 25 persen dari total jumlah penduduk ;
2. Tersedianya kebijakan, strategi, pedoman, materi dan administrasi tentang Program Bina Ketahanan Remaja;
3. Tercapainya target menurunkan ASFR 15-19 tahun dari target 38/1000 kelahiran menjadi 33/1000 kelahiran, merupakan keberhasilan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan reproduksi pada remaja, serta Advokasi dan KIE melalui program Generasi Berencana (GenRe);
4. Tersedianya materi dan media KIE Generasi Berencana sampai lini lapangan melalui Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB.
5. Tersedianya pembiayaan operasional untuk kelompok kegiatan di kampung KB melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang mendukung program KKBPK;
6. Sinergitas dengan Kementerian/Lembaga yang membidangi kepemudaan antara lain Kementerian Koordinator PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial;
7. Tersedianya media sosial dan jaringannya serta media lain yang efektif sesuai segmentasi sasaran untuk mensosialisasikan substansi kesehatan reproduksi.

Adapun, tren indikator Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Generasi Berencana periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.10
Tren Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja
Tentang Generasi Berencana Remaja Periode Tahun 2015 - 2019



Sumber data : Modul remaja, SKAP 2019

Pada grafik diatas menunjukkan pencapaian target selama 5 (lima) tahun berturut-turut, indikator kinerja indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana sudah tercapai. Capaian indikator kinerja “indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan melebihi target kinerja setiap tahunnya. Peningkatan capaian indikator kinerja ini antara lain disebabkan semakin meningkatnya sinergitas yang dilakukan di dalam pelaksanaan promosi dan KIE Kesehatan reproduksi baik dengan melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, maupun dengan organisasi non pemerintah maupun dengan lembaga donor.

Indikator Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Generasi Berencana sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 - 2024, namun indikator tersebut telah terwakili melalui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang merupakan ISS dalam

Renstra BKKBN 2020-2024, sehingga upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IPK pada tahun 2020 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Penyusunan modul materi kesehatan reproduksi segmentatif 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan 20-24 tahun;
2. Upaya meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR);
3. Penguatan karakter remaja dan life skill sebagai upaya mendukung kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 yaitu revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini;
4. Menginisiasi membangun aplikasi edukasi dan pengukuran mandiri kesiapan berkeluarga “Aplikasi Siap Nikah” bekerjasama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen FEMA-IPB dan Departemen Ilmu Komputer IPB;

5. Pendekatan digitalisasi dalam penyusunan materi sampai dengan pengelolaan Program Bina Ketahanan Remaja sebagai adaptasi revolusi industri 5.0;
6. Pengembangan Model Pengelolaan PIK Remaja dan BKR di Kampung KB;
7. Pengembangan Materi dan Media Pengasuhan Remaja Bagi Kelompok BKR melalui 1001 Cara Bicara.
8. Memanfaatkan *rebranding* BKKBN sebagai *entry point* pendekatan kepada generasi muda.

A.3.1.6 Persentase Pengetahuan Masyarakat (Keluarga) Tentang Isu Kependudukan

Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan adalah persentase sikap, pengetahuan dan praktek keluarga tentang isu kependudukan yang meliputi, pendapat tentang pengendalian kelahiran, dampak buruk pertambahan penduduk, pernikahan remaja kurang dari 21 tahun, keluarga ingin anak banyak, mudik, persiapan masa tua dan perilaku buang sampah.

Selanjutnya, untuk pencapaian persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan 2019 telah tercapai sebesar 111,6 persen dengan kategori sangat baik yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Pencapaian Persentase Pengetahuan Masyarakat (Keluarga) Tentang Isu Kependudukan Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Persentase Capaian		Status Capaian
	RPJMN	Perjanjian Kinerja		RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Persentase Pengetahuan Masyarakat (keluarga) tentang isu kependudukan	50 (2015-2020)	50 (2019)	55.8	111.6	111.6	●

Sumber data : SKAP 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target Perjanjian Kinerja dan target RPJMN adalah 50 (skala 1-100) dan telah tercapai 55,8 dari data laporan SKAP (Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program) Tahun 2019. Pencapaian persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan 2019 telah tercapai sebesar 111,6 persen dengan kategori sangat baik

Upaya yang telah dilakukan kedeputian bidang pengendalian penduduk dalam mendukung capaian tersebut disebabkan oleh antara lain :

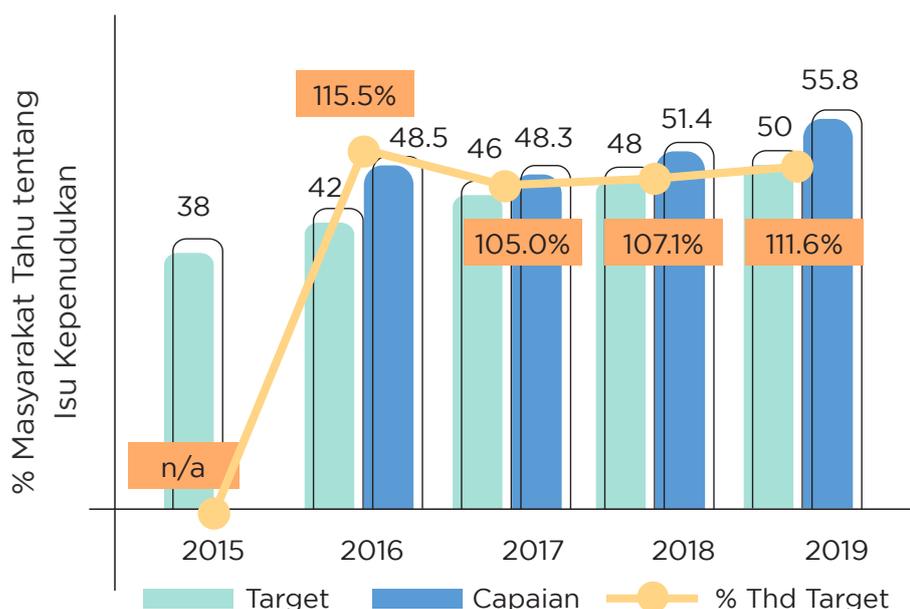
1. Penguatan kelembagaan Bidang Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah
2. Pengembangan kebijakan, strategi dan program pengendalian kependudukan (berbasis sektoral, tematik dan spasial) sebagai acuan bagi para pengelola dan pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota
3. Penguatan kemitraan strategis program perencanaan pengendalian penduduk;
4. Mengembangkan dan mendorong Perwakilan BKKBN Provinsi dalam memberikan fasilitasi program pengendalian penduduk;
5. Pendampingan langsung kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
6. Berkoordinasi dengan lintas direktorat dan bantuan pihak ketiga lain yang bersedia melakukan peningkatan kompetensi pejabat pemerintah daerah terkait dengan teknik demografi, kebijakan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
7. Penyediaan model solusi strategis dampak kependudukan, sebagai prototype kebijakan pembangunan kependudukan
8. Telah dilakukan penyempurnaan instrumen monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk serta melakukan sosialisasi kepada para pengelola program dan mitra terkait.
9. Pengembangan Rumah Data Kependudukan di setiap Kampung KB

10. Penyusunan dan penetapan parameter kependudukan (profil dan proyeksi penduduk) provinsi dan kabupaten/kota serta sosialisasi panduan aplikasi proyeksi penduduk sebagai acuan bagi para pengelola program KKBPK dalam melakukan proyeksi penduduk Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
11. Melakukan Advokasi untuk Pengintegrasian Indikator KKBPK ke dalam RKPD/RPJMD di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Tersedianya panduan penerapan pendidikan kependudukan jalur formal, informal dan nonformal serta peningkatan sosialisasi strategi penerapan kerjasama pendidikan kependudukan melalui Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan, Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, ASN Peduli Kependudukan dan Masyarakat Peduli Kependudukan
13. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang pengendalian penduduk, diantaranya: (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kewenangan bidang pengendalian

penduduk merupakan urusan konkuren antara pemerintah pusat dgn pemerintah daerah. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga; (3) Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (4) Permendagri No. 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana kerja Daerah Tahun 2018; dan (5) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;

Adapun tren pencapaian persentase pengetahuan masyarakat (keluarga) tentang isu kependudukan periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.11
Tren Pencapaian Persentase Pengetahuan Masyarakat (Keluarga)
Tentang Isu Kependudukan Periode Tahun 2015 - 2019



Sumber data : Modul Keluarga, SKAP 2019

Pada grafik diatas menunjukkan pencapaian target selama 5 (lima) tahun, indikator kinerja persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan telah tercapai dari target kinerja yang ditetapkan. Salah satu pendekatan dalam mencapai indikator tersebut dilakukan dengan menyusun agenda perubahan pada Kedeputusan Dalduk melalui pemetaan area strategis internal dan kesenjangan kapabilitas organisasi. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perbaikan paradigma, strategi yang akan ditempuh, sistem pelaksanaan dan pengendalian program, peningkatan kompetensi dan kapabilitas organisasi. Terdapat delapan area strategis internal yang menjadi fokus perhatian yaitu:

- a) Cara Pengukuran Keberhasilan (*Success Measurement*);
- b) Metode operasional (*Operational Bases*);
- c) Jejaring kemitraan (*Community Network*);
- d) Kerjasama antar fungsi (direktorat)
- e) Keorganisasian (*Organization*);
- f) Teknologi Informasi (*Information Technology*);
- g) Sumber Daya Manusia (*Human Capital*);
- h) Pengelolaan Sumber Daya (*Resource Management*);

Indikator persentase pengetahuan masyarakat (keluarga) tentang isu kependudukan sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 - 2024, namun untuk mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 - 2024 terutama bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2020 akan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan prioritas di kedeputusan bidang pengendalian penduduk yang meliputi :

1. Penyediaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU) yaitu Sistem (rangkaiian proses) pengumpulan dan analisis data, serta diseminasi informasi tentang dampak pengendalian penduduk untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan datang;
2. Penyediaan Percepatan Sinkronisasi Perencanaan dan Kebijakan Kependudukan (SIPERENJAKU) yaitu Percepatan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan serta advokasi pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah);
3. Intensifikasi Kampung KB untuk meningkatkan intervensi program KKBPK dan program-program pemerintah lainnya dalam satu lokus, berbasis data sasaran yang terintegrasi;

A.3.1.7 Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang Data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Untuk setiap tahunnya dilakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).

Tabel 3.30

Pencapaian Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2019	1	1	100

Sumber: Pendataan Keluarga (PBDKI) BKKBN 2019

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber pada Pendataan Keluarga (PBDKI) Tahun 2019 dapat diketahui bahwa capaian realisasi jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga

(Pendataan Keluarga) yang akurat dan tepat waktu adalah 100 persen .

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan evaluasi serta umpan balik terhadap hasil pendataan keluarga, pelayanan KB, dan pengendalian lapangan setiap bulannya melalui Rapat pengendalian Program (RADALGRAM) dan review (telaah) tengah tahun pelaksanaan program KKBPK serta Membentuk Tim Posko Pengelolaan SIGA yang bertanggungjawab dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi keluarga.
2. Mengintegrasikan 3 (tiga) sub sistem ke dalam Sistem Informasi keluarga (SIGA), yaitu aplikasi Pendataan Keluarga serta hasil Pemuktahiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) , aplikasi pelayanan KB (Yan KB) dan aplikasi pengendalian lapangan (Dalap).
3. Melakukan ujicoba SIGA di 66 Kabupaten/ Kota dan 1 Provinsi Jambi.
4. Melakukan harmonisasi data dengan Kemendagri, BPJS Kesehatan, Kemenkes, serta Kementerian/ Lembaga lainnya sesuai dengan implementasi Perpres 39 Tahun 2019 terkait Satu Data.
5. Melakukan koordinasi internal dalam peningkatan kualitas data seperti dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB (PULAP) dalam rangka pelaksanaan Master of Trainer (MOT) dan Training of Trainer (TOT) pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) bagi kasubbid datin dan pengelola data di OPD/KB, koordinasi dengan Direktorat Bina Lini Lapangan (Ditbinlap) dalam rangka pendayagunaan PKB/PLKB untuk pengelolaan data SIGA, koordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) dalam pembuatan atau Pengembangan aplikasi Pencatatan dan pelaporan seperti pembuatan *Application Programming Interface* (API) agar harmonisasi data lintas sektor bisa terlaksana dengan baik serta pengembangan aplikasi, serta koordinasi internal lainnya.
6. Mengadakan kegiatan temu kerja regional dengan peserta kasubbid datin dan pengelola data dan informasi OPD/KB dalam rangka mensosialisasikan kebijakan program KKBPK, peningkatan kualitas data, sebagai wadah berdiskusi permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus sebagai *reward* bagi pengelola data.
7. Melakukan persiapan Pelaksanaan pendataan keluarga 2020 seperti membuat Pedoman dan Juknis-juknis, Ujicoba PK 2020 di 12 Provinsi, membuat kurikulum bahan ajar untuk MOT, TOT, Pelatihan dan Orientasi, pembuatan aplikasi PK 2020, berkoordinasi dengan Kemendagri terkait Surat Edaran Mendagri, Koordinasi dengan Badan pusat Statistik terkait kerangka Sampel nama-nama Desa, dan lain sebagainya.
8. Mengadakan seminar pemanfaatan data, forum lintas sektor bersama mitra kerja untuk peningkatan kualitas data.

Keberhasilan capaian Indikator Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. Terlaksananya Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) setiap tahun sebagai updating hasil pendataan keluarga termasuk untuk mengakomodir data keluarga baru yang belum terdata pada pendataan keluarga Tahun 2015;
- b. Adanya dukungan dan komitmen berbagai dari pihak pusat sampai dengan lini lapangan antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Desa dan Perguruan Tinggi.
- c. Tersedianya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendataan keluarga dan PBDKI berupa:
 1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga.
 2. Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015.
 3. Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga.

4. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
6. Panduan Pengelolaan KMR (Kartu Motivasi dan Rujukan).
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Data Rutin.
9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Data Non Rutin.
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga.
11. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 119/5831/DUKCAPIL Nomor : 58/PKS/G2/2017 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
12. Kesepakatan Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1/KSM/G2/2017 Nomor: 01/PKS/M/2017 tentang Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Surat Plt. Kepala BKKBN Nomor : 319/LP.01/G4/2018 tanggal 18 Januari 2018 Perihal : Pelaksanaan PBDKI Tahun 2018.
14. Surat Plt. Kepala BKKBN Nomor : 318/LP.01/G4/2018 tanggal 18 Januari 2018 Kebijakan Pelaksana Uji Coba Sistem Informasi Keluarga Tahun 2018.

Adapun, tren pencapaian jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan Keluarga) yang akurat dan tepat waktu periode tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa telah mencapai target yang ditetapkan yang terlihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 3.31

Tren Pencapaian Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Capaian	%												
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang akurat dan Tepat Waktu	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Sumber: LAKIP Kedeputusan ADPIN 2019

Indikator jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 – 2024, maka dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 – 2024 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Memperluas cakupan ujicoba Sistem Informasi Keluarga (SIGA) menjadi 66 Kab/ Kota Ujicoba dan 1 Provinsi Jambi;
2. Melaksanakan Pendataan keluarga dengan mekanisme Pendataan keluarga seluruhnya untuk 6 Provinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi barat dan Maluku) dan sampel untuk 28 Provinsi lainnya, menggunakan smartphone dan Formulir dalam pengumpulan data;
3. Melakukan sarasehan, seminar hasil Pendataan Keluarga 2020;
4. Membentuk Tim Pos Koordinasi (Posko) pendataan keluarga 2020 dengan lintas komponen untuk memantau pelaksanaan Pendataan keluarga 2020;
5. Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam harmonisasi dan integrasi data untuk validasi data dan meningkatkan kualitas data dan informasi;
6. Melakukan analisis dan evaluasi serta umpan balik terhadap hasil pendataan keluarga, pelayanan KB, dan pengendalian lapangan setiap bulannya melalui Rapat pengendalian Program (RADALGRAM) dan review (telaah) tengah tahun pelaksanaan program KKBPK;
7. Mengadakan kegiatan temu kerja regional dengan peserta kasubbid Datin dan pengelola data dan informasi OPD/KB dalam rangka mensosialisasikan kebijakan program KKBPK, peningkatan kualitas data, sebagai wadah berdiskusi permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus sebagai reward bagi pengelola data.

A.3.2 Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Kerjasama Internasional BKKBN

A.3.2.1 Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional

Dalam rangka mendukung tercapainya target Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, BKKBN melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB (Pusdiklat KKB) di bawah Kedeputusan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang) telah menetapkan program prioritas yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Kependudukan dan KB yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional bagi tenaga pegawai dan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Untuk mengukur pencapaian hasil tersebut, maka

ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN yaitu meningkatnya persentase kualitas SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program.

Data capaian indikator ini didapatkan melalui hasil Survey Kepuasan Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS dengan mengukur tingkat atribut kepuasan pengguna (user) peserta diklat atas hasil pelatihan/orientasi Diklat yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan jабaran sebagai berikut:

Tabel 3.32
**Indikator Tingkat Atribut Kepuasan Pengguna (user) Peserta Diklat
 atas Hasil Pelatihan/Orientasi Diklat**

No.	Atribut Pelayanan Pemanfaatan Hasil Penelitian KB dan KS
1	Terjadi peningkatan pengetahuan pada pegawai setelah mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
6	Pegawai Bapak/Ibu mendapatkan jenis pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB sesuai dengan kebutuhan komponen
7	Materi pelatihan yang didapat pegawai Bapak/Ibu dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB sesuai dengan kebutuhan komponen
8	Lama pelatihan yang diikuti pegawai Bapak/Ibu dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB tidak mengganggu rutinitas pekerjaan di komponen
KOFNITIF	
4	Pegawai bersedia mensosialisasikan pelatihan yang telah diikuti dalam pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
AFEKTIF	
2	Terjadi peningkatan ketertampilan pada pegawai setelah mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
3	Terjadi peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
5	Setelah pegawai Bapak/Ibu mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Bapak/Ibu mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diinginkan komponen
9	Pegawai dapat menyebarluaskan (sharing) hasil pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB yang diikuti diikuti kepada rekan kerja di dalam dan atau lintas komponen
10	Pegawai dapat mengimplementasikan Plan of Action (PoA) hasil pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
PSIKOMOTORIK	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja peningkatan persentase kualitas SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM Peneliti, pada tahun 2018 survey tersebut tidak dilaksanakan sehingga angka capaian target tersebut untuk tahun 2018 tidak dapat disampaikan.

Pencapaian indikator persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional telah mendekati target yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel terlampir:

Tabel 3.33
**Pencapaian Persentase
 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan
 Tenaga Fungsional Tahun 2019**

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Persentase Capaian
Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional	100 % SDM Aparatur	94,8 % SDM Aparatur	94,8 %

Sumber: LAKIP Kedeputusan Latbang 2019

Secara garis besar kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung capaian target tersebut antara lain: Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Golongan II dan III, Pendidikan Jangka Panjang Strata 2; Pendidikan Jangka Panjang Strata 3; Pendidikan S1 UT bagi

PKB; Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Pengelola Keuangan; *Workshop* Fasilitator Pelatihan Program KKBPK; *Workshop Master Trainer* Pelatihan Kampung KB Percontohan; *Workshop Master Trainer* Pelatihan Pengelolaan SIGA; Pelatihan Ujicoba Program KKBPK; TOT Pelatihan Kampung KB Percontohan; TOT Pelatihan Pengelolaan SIGA; TOF (*Training of Facilitator*) Pelatihan Dasar CPNS; Seminar/ Kapita Selekt Program KKBPK; Orientasi Program KKBPK; *Workshop* Penguatan Kapasitas ASN Potensial (Agen Perubahan) BKKBN; Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa; Diklat Teknis Bidang Tugas & Jabatan; Pelatihan Peningkatan Kompetensi Program KKBPK bagi Penyuluh KB; *Workshop* Penulisan Jurnal Ilmiah bagi Tenaga Fungsional; Orasi Ilmiah Widyaiswara; serta Persiapan, Koodinasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; Evaluasi Paska Diklat Kepemimpinan; Koordinasi Kemitraan dalam Diklat; *Workshop* Penyusunan Renstra Kedepuitan Latbang; Administrasi Pengelola Keuangan Diklat KKB; Pembinaan Program KKB di Wilayah Binaan; Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Diklat; serta Monitoring dan Evaluasi Diklat.

Beberapa tantangan yang dihadapi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB dalam mencapai target persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional antara lain :

1. Jumlah target sasaran peserta pelatihan BKKBN meliputi 3.109 ASN BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi serta 14.411 Penyuluh KB yang tersebar di BKKBN Pusat dan 34 provinsi;

2. Pengembangan sistem *E-Learning* belum optimal sehingga belum dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan BKKBN;
3. Pengembangan media pembelajaran belum optimal dikarenakan terbatasnya sarana pendukung (kamera, PC, laptop) dalam mengelola, edit dan mendesain media pembelajaran;
4. Posisi definitif Kepala Pusdiklat KKB belum terisi Terbatasnya SDM tenaga pengelola dalam penyelenggaraan Diklat;
5. Terbatasnya jumlah SDM tenaga fungsional widyaiswara Pusdiklat dikarenakan sebagian besar yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
6. SOP Kediklatan masih dalam proses penyusunan;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pusdiklat KKB;
8. Belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai AJK dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan mengikuti alokasi waktu mitra komponen kegiatan.

Bila ditinjau dari perbandingan target dan realisasi persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan bahwa capaian target indikator program tersebut telah mendekati target yang ditetapkan serta menunjukkan tren peningkatan yaitu meningkat dari 135,8 persen pada tahun 2015 menjadi 94,8 persen pada tahun 2019, terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.34

Tren Capaian Presentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian												
Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional	60	81.5	135.8	70	84.3	120.5	80	85.1	106.4	90	-	0.0	100	94.8	94.8

Sumber: LAKIP Kedepuitan Latbang 2015 - 2019



Gambar 3.6.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam kunjungan Kerja di Papua

Indikator persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 - 2024, maka dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 - 2024 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Pengembangan sistem *E-Learning* sehingga dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan BKKBN;
2. Pengembangan kompetensi berbasis standar kompetensi;
3. Standarisasi Diklat
4. Penyediaan dan sosialisasi SOP Kediklatan
5. Pengisian posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB diisi oleh pejabat pelaksana tugas
6. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) dan tertib administrasi

A.3.2.2 Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi

Kedeputan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan BKKBN telah memenuhi standar pelaksanaan pelatihan yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BKKBN baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka Pusdiklat KKB mulai pada tahun 2017 melaksanakan proses akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional di lingkungan BKKBN.

Kewenangan Pusdiklat KKB dalam melaksanakan proses akreditasi didasari oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 393/K1/PDP.09/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang telah menetapkan Pusdiklat KKB BKKBN sebagai Instansi Terakreditasi dan Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Penetapan tersebut diberikan atas prestasi Pusdiklat KKB BKKBN dalam memenuhi standar kualitas untuk 2 (dua) indikator penilaian yaitu unsur organisasi lembaga diklat; serta unsur program diklat dan pengelola program diklat. Untuk mengukur pencapaian hasil tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN yaitu meningkatnya jumlah lembaga diklat yang terakreditasi dengan capaian pada tabel terlampir.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2019 adalah tercapai sebesar 67 persen. Hal ini berarti capaian tahun 2019 untuk Peningkatan Lembaga Diklat yang terakreditasi belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019. Faktor penyebab realisasi indikator kinerja kedua ini adalah belum terpenuhinya memenuhi target yang telah ditetapkan di tahun 2019 yaitu dikarenakan belum terpenuhinya batas nilai indikator penilaian ketersediaan tenaga diklat serta ketersediaan fasilitas diklat yang telah ditetapkan dalam instrumen penilaian akreditasi pada Peraturan Kepala BKKBN No. 10 Tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh 3 (tiga) Balatbang BKKBN Perwakilan Provinsi yang telah mengajukan proses penilaian akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB. Pada tahun 2019, pada tingkat provinsi masih terdapat 4 (empat) Perwakilan BKKBN Provinsi yang belum memiliki tenaga fungsional Widyaiswara yaitu Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur serta terdapat 5 (lima) Perwakilan BKKBN Provinsi yang belum memiliki Gedung Latbang yaitu Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Bangka Belitung.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu Pemetaan Potensi Balatbang; Koordinasi Kinerja Tim Jaga Mutu Diklat; Penyusunan Juknis Pelatihan; Penyusunan Modul/Materi/Media Pembelajaran; Pencetakan Juknis, Kurikulum, Materi, Modul Pembelajaran Pelatihan PKB/PLKB; Koordinasi Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara; Penilaian Akreditasi Balatbang dan Reakreditasi Diklat; Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang; Koordinasi Kinerja Tim Akreditasi Diklat; Penguatan Kerjasama Diklat Program KKBPK dengan Mitra Strategis; Workshop Peningkatan Kualitas Pelatihan Balai Diklat, serta Kelengkapan Diklat.

Tabel 3.35
Pencapaian Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2019	6	4	67%

Sumber: LAKIP Kedeputan Latbang 2019

Disamping kegiatan tersebut, Pusdiklat Kependudukan dan KB telah memfasilitasi permohonan pendampingan widyaiswara ke Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi yang belum terakreditasi untuk membantu penyelenggaraan diklat dikarenakan terbatasnya tenaga widyaiswara di Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi. Namun, jumlah tenaga fungsional Widyaiswara di Pusdiklat KKB juga terbatas dikarenakan dari 11 (sebelas)

orang Widyaiswara 5 (lima) diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar.

Sedangkan tren pencapaian jumlah lembaga Diklat yang terakreditasi tahun 2019 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan bahwa capaian target indikator program tersebut fluktuatif dari target yang ditetapkan, terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.36

Pencapaian Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Periode Tahun 2015-2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi	1	1	100	1	1	100	1	13	1300	1	8	800	6	4	67

Sumber: LAKIP Kedepatian Latbang 2019

Indikator tersebut sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020-2024, maka dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 - 2024 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Biro Kepegawaian telah menyusun kembali analisis beban kerja jabatan fungsional widyaiswara serta memfasilitasi proses insipassing ke jabatan fungsional widyaiswara, dan orasi ilmiah dalam rangka penjenjangan widyaiswara.

2. Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana juga akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas standar diklat serta kompetensi widyaiswara dalam memfasilitasi pelatihan, seperti: Koordinasi Kinerja Tim Jaga Mutu Diklat; Koordinasi Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara; Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang; Koordinasi Kinerja Tim Akreditasi Diklat; Penguatan Kerjasama Diklat Program KKBPK dengan Mitra Strategis; serta Workshop Peningkatan Kualitas Pelatihan Balai Diklat.

A.3.2.1

Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK

Kerjasama bilateral dan multilateral yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan program KKBPK, pendidikan jangka panjang dan jangka pendek serta kerjasama internasional di bidang Program KKBPK.

Tabel 3.37

Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK	3	3	100

Sumber: LAKIP Kedepatian Latbang 2019

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Jumlah Kerjasama bilateral Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam Negeri di Bidang KKBPK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dalam mencapai target tersebut antara lain adalah:

1. Pelaksanaan Identifikasi tema kerjasama kepada Lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
2. Memberikan penawaran kerjasama penelitian kepada Lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
3. Melakukan seleksi proposal penelitian yang diajukan oleh Lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri;

4. Pemantauan dan Evaluasi proses pelaksanaan penelitian;
5. Penyajian hasil penelitian dan penerbitan publikasi berupa *Research Brief*;
6. Menyelenggarakan kerjasama dengan Universitas Portsmouth Inggris pada tahun 2018 serta Asian Population Association (APA) pada tahun 2019 tentang *Writing Academic Journals for Researchers and Trainers*.

Selanjutnya jika melihat Renstra 2015-2019, maka target dan realisasi jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.38

Pencapaian Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2015-2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian												
Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian, dan Perguruan Tinggi, Dalam dan Luar Negeri	1	11.0	1100.0	2	23.0	1150.0	2	42.0	2100.0	3	29.0	966.7	3	3	100.0

Sumber: LAKIP Kedeputusan Latbang 2015 - 2019

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa indikator tersebut setiap tahun dapat dicapai tetapi sejak tahun 2019 terjadi penurunan capaian dikarenakan adanya perbaikan definisi operasional pada status ketercapaian indikator. Pada tahun 2017 dan

2018 pencapaian dilaporkan termasuk draft dokumen kerjasama/MoU sedangkan mulai tahun 2019 kerjasama yang dianggap tercapai adalah yang sudah di tandatangani kedua belah pihak.

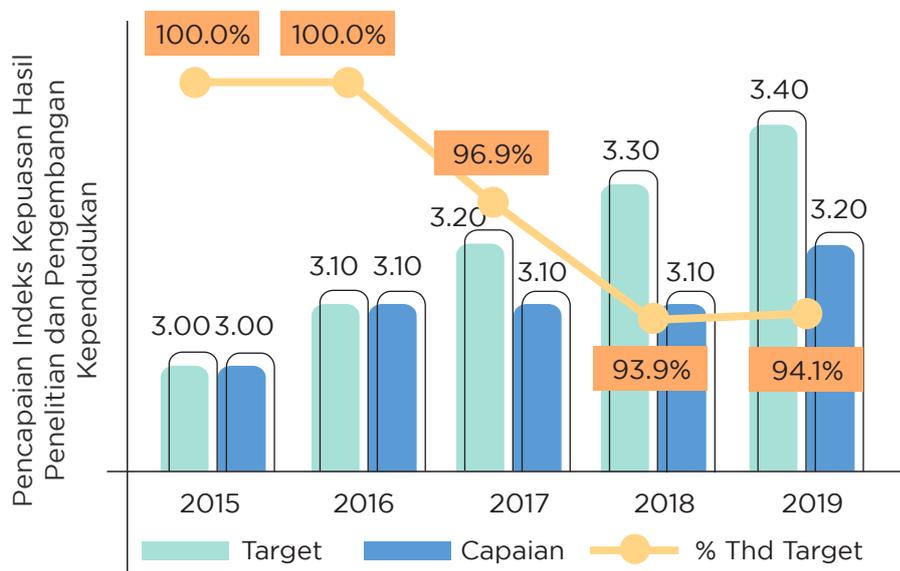
A.3.2.4 Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan

Sasaran Program (*outcome*) Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil

(*outcome*) tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN, yaitu meningkatnya Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS, dan Kependudukan.

Grafik 3.12.

Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Periode Tahun 2015-2019



Sumber: Lakip Kedeputusan Latbang Tahun 2019

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa total nilai Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS dan Kependudukan adalah 3.2. Berdasarkan kriteria kepuasan

pada perhitungan *Customer Satisfaction Index* (CSI) maka secara keseluruhan pengguna merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh BKKBN.

A.3.2.4.1 Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional

Data capaian indikator ini didapatkan melalui hasil Survey Kepuasan Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS dengan mengukur nilai indeks kepuasan *user/pengguna* peserta diklat atas hasil pelatihan/orientasi diklat yang

diselenggarakan oleh Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan perhitungan *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang dibandingkan dengan indeks kepuasan sesuai target Renstra BKKBN 2015-2019. Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja

peningkatan Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional pada tahun 2016, 2017 dan 2019. Terkait hasil capaian tahun 2018, dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM Peneliti, survey tersebut tidak dilaksanakan sehingga angka capaian target tersebut untuk tahun 2018 tidak dapat disampaikan.

Terkait perbandingan target dan realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional tahun 2019 dengan target tahun 2019, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional telah mendekati target yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel terlampir:

Tabel.3.39
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional	3,4 (Skala 1 -4)	3,23	95 %

Sumber: Lakip Kedeputusan Latbang Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan target tahun 2019 adalah sebesar 3,4 dan realisasi tahun 2019 sebesar 3,23, maka persentase realisasi 2019 dibanding target tahun 2019 adalah sebesar 95 persen.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan capaian target ini antara lain.

1. Pengembangan *platform E-Learning* dalam menunjang kegiatan pelatihan
2. Penggunaan aplikasi SIDIKA sebagai sarana dalam pencatatan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan
3. Pengembangan kerjasama dengan mitra strategis dalam pelaksanaan pelatihan bagi Penyuluh KB dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi
4. Memperkuat peran Komite Penjamin Mutu Diklat Pusat dalam penyelenggaraan diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi

Namun pada tahun 2019, capaian target Indikator Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional yang belum mencapai target dapat disebabkan antara lain:

1. Pengembangan sistem *E-Learning* belum optimal sehingga belum dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan BKKBN
2. Pengembangan media pembelajaran belum optimal dikarenakan terbatasnya sarana pendukung (kamera, PC, laptop) dalam mengelola, edit dan mendesain media pembelajaran
3. Terbatasnya SDM tenaga pengelola dan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Diklat
4. SOP Kediklatan masih dalam proses penyusunan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dikarenakan pengelolaan masih berada pada kewenangan Sekretariat Utama
6. Belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai AJK dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan mengikuti alokasi waktu mitra komponen kegiatan

Bila ditinjau dari perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan bahwa capaian target indikator program tersebut telah mendekati target yang ditetapkan serta menunjukkan trend peningkatan yaitu meningkat dari 3 pada tahun 2015 menjadi 3,23 pada tahun 2019, terlihat pada tabel dibawah ini.

Indeks Kepuasan Hasil Diklat

3,23

meningkat dari 3 pada tahun 2015 menjadi 3,23 pada tahun 2019

Tabel 3.40
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional KKBPK Tahun 2019
terhadap Target RENSTRA 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian												
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional KKBPK	3	3,07	102	3,1	3,14	101	3,2	3,1	96,8	3,3	-	-	3,4	3,23	95

Sumber: LAKIP Kedeputian Latbang 2015 - 2019

Terkait perbandingan target dan realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional tahun 2019 dengan target RPJMN Tahun 2019, apabila dibandingkan antara target dan realisasi pencapaian, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional telah mendekati target yang ditetapkan.

Indikator Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional KKBPK Tahun 2019 sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 - 2024, maka dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 - 2024 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Pengembangan *E-Learning* sehingga akses dan informasi kediklatan dapat optimal diterima oleh peserta pelatihan;
2. Pengembangan kompetensi berbasis standar kompetensi;
3. Standarisasi Diklat;
4. Penyediaan SOP Kediklatan
5. Melakukan analisis kebutuhan SDM pengelola dan analisis beban kerja jabatan fungsional widyaiswara dan mengajukan permintaan penambahan tenaga yang dibutuhkan

6. Memperkuat peran Tim Penjamin Mutu Diklat dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi
7. Meningkatkan kompetensi tenaga pengelola program dan tenaga pengajar widyaiswara
8. Memberikan bantuan teknis untuk mengantisipasi kekurangan tenaga fungsional di Balatbang dan Balai Diklat
9. Melakukan kerjasama dengan mitra kerja terkait dan koordinasi lintas sektor
10. Memperbaharui instrumen monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat dan tindak lanjut pasca Diklat
11. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional
12. Melakukan optimalisasi kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan aturan yang berlaku
13. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) dan tertib administrasi

A.3.2.4.2 Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di Luar Negeri

Data capaian indikator ini didapatkan melalui hasil Survey Kepuasan Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS dengan mengukur nilai indeks

kepuasan pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional.

Tabel.3.41
Pencapaian Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek di LN hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di LN hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	3,4 (Skala 1 -4)	3,17	93,2 %

Sumber: Lakip PULIN 2019

Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja peningkatan Indeks Kepuasan Pimpinan

Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di Luar Negeri pada tahun 2016, 2017 dan 2019. Dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM Peneliti, pada tahun 2018 survey tersebut tidak dilaksanakan sehingga angka capaian target tersebut untuk tahun 2018 tidak dapat disampaikan. Bila ditinjau dari perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di Luar Negeri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan bahwa tren pencapaian target indikator program tersebut fluktuatif dimana pada tahun 2015 pencapaian melebihi target yang telah ditentukan (106 persen) sedangkan pada tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan (93,2 persen), seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.42
Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di LN Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek Luar Negeri	3 (Skala 1-4)	3,2	106	3,1 (Skala 1 -4)	3,1	100	3,2 (Skala 1 -4)	3,1	96,8	3,3 (Skala 1 -4)	-	-	3,4 (Skala 1 -4)	3,17	93,2

Sumber: LAKIP Kedeputusan Latbang 2015 - 2019

Pada Indikator Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di Luar Negeri yang belum mencapai target disebabkan antara lain:

1. Terbatasnya substansi pendidikan Jangka Pendek Luar Negeri yang sesuai dengan kebutuhan program BKKBN;
2. Kurangnya kapasitas keterampilan peserta dalam berbahasa inggris untuk mengikuti pendidikan jangka pendek luar negeri;
3. Belum terimplementasikannya plan of action hasil pendidikan Jangka Pendek Luar Negeri (*short course*).

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka langkah-langkah antisipatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan jangka pendek luar negeri pada awal tahun dengan melibatkan mitra BKKBN, stakeholders, dan international development partners;
2. Melakukan analisis kebutuhan substansi pada komponen terkait bagi pegawai BKKBN dalam rangka meningkatkan kualitas SDM BKKBN melalui pemberitahuan surat edaran kepada seluruh komponen di Pusat maupun Provinsi;
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas berbahasa inggris bagi pegawai BKKBN.

Indikator tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian bertujuan untuk mengukur kepuasan stakeholder dan unit kerja (komponen) terhadap hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan. Perhitungan skala kepuasan dilakukan melalui survei indeks kepuasan pelayanan Puslitbang Kependudukan berdasarkan persepsi pelanggan pada masing-masing tingkat harapan dan kenyataan dari tiga aspek layanan yang meliputi aspek pelayanan data dan informasi hasil penelitian, kualitas penelitian dan pengembangan serta aspek penyajian hasil penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kependudukan. Indeks diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan Puslitbang KB dan KS dimana dasar perhitungan menggunakan *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

Tabel.3.43

Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	3,5 (Skala 1 -4)	3,13	89,42%

Sumber: Lakip PUSDU 2019

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari LAKIPKedeputusanPelatihandanPengembangan (Latbang) Tahun 2019, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 realisasi indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan sebesar 3,13 dari target 3,5 dengan skala 1-4 dan persentase capaian untuk indikator kinerja program ini sebesar 89,42 %

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan antara lain:

1. Mengoptimalkan kapasitas peneliti, baik peneliti di BKKBN Pusat maupun

- di Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan
2. Pengembangan aplikasi kemitraan untuk mengoptimalkan kegiatan kerjasama penelitian dengan mitra perguruan tinggi
3. Melaksanakan *video conference* pada saat diseminasi hasil penelitian tingkat pusat agar seluruh provinsi tersosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kependudukan, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan penyusunan program para pemangku kebijakan diseluruh indonesia
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme peneliti dan jajaran melalui *workshop* dan pelatihan, penyediaan referensi dan pengembangan forum diskusi
5. Menekankan diseminasi kepada para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada saat penyajian hasil penelitian

Indikator Indeks Kepuasan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan yang belum mencapai target dapat disebabkan atas permasalahan antara lain :

1. Data yang disediakan oleh Puslitbang Kependudukan terbatas pada provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang menjadi lokasi penelitian
2. Hasil penelitian berskala nasional yang dilakukan hanya SKAP 2019 dan SDKI 2017, selain itu tidak berskala nasional sehingga tidak semua dapat dimanfaatkan oleh responden.
3. Diseminasi hasil penelitian belum bisa menjangkau seluruh pemangku kebijakan dan mitra kerja.
4. Keterbatasan dari variabel yang dikumpulkan menyebabkan tidak dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kebijakan.
5. Sulitnya mengakses hasil-hasil penelitian yang ada di CIS BKKBN (<https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?p=13>) dan hasil SDKI pada website SDKI sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian.

Adapun, tren pencapaian indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

(2015-2019) menunjukkan bahwa capaian target indikator program tersebut mendekati target yang ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44
Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
Periode Tahun 2015-2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	3 (Skala 1-4)	2,94	98	3,1 (Skala 1-4)	2,95	95,16	3,2 (Skala 1-4)	2,99	93,44	3,3 (Skala 1-4)	3,12	94,55	3,5 (Skala 1-4)	3,13	89,42

Indikator Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 - 2024, maka dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 - 2024 akan dilakukan beberapa hal antara lain:

1. Penyelesaian penulisan hasil-hasil penelitian harus pada tahun berjalan, sehingga diseminasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan segera kepada pemangku kebijakan dan dapat segera dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan program pada tahun berikutnya
2. Menyiapkan berbagai media publikasi hasil penelitian sebagai bahan pendamping saat pemaparan hasil-hasil penelitian
3. Diseminasi hasil penelitian dilaksanakan dengan sasaran yang tepat, yaitu kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama baik Pusat maupun Provinsi

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja tahun Anggaran 2019, Puslitbang Kependudukan telah melaksanakan realokasi dana berupa :

1. Perubahan paket hibah penelitian kemitraan yang semula 10 paket @ Rp70.000.000,- untuk penelitian primer, menjadi 34 paket @ Rp12.000.000,- untuk penelitian kemitraan berupa analisis lanjut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017
2. Pengembangan Aplikasi kerjasama penelitian bidang kependudukan bagi mitra perguruan tinggi
3. Mendukung Puslitbang KB dan KS dalam memfinalisasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4. Sosialisasi hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 kepada mitra kerja, yaitu Universitas Respati Indonesia (URINDO) dan STIKES Jayakarta
5. Seminar "Penataan dan Aspek Demografi Terhadap Rencana Pindah Ibukota Negara Terkait Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga" pada tanggal 29 Oktober 2019.

A.3.2.4.3

Indeks Kepuasan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator tingkat kepuasan pengguna (*user*) terhadap hasil penelitian bertujuan untuk mengukur kepuasan *stakeholder* dan unit kerja (komponen) terhadap hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN 2015-2019. Metode yang digunakan adalah survei untuk mendapatkan data primer dengan melakukan pengumpulan data menggunakan angket untuk mengukur indeks kepuasan pengguna terhadap hasil penelitian dan pengembangan Puslitbang KB dan KS berdasarkan persepsi pelanggan pada masing-masing tingkat harapan dan kenyataan dari tiga aspek layanan yang meliputi aspek pelayanan data dan informasi hasil penelitian, kualitas penelitian dan pengembangan serta aspek

penyajian hasil penelitian dan pengembangan. Dasar perhitungan menggunakan *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

Tabel.3.45

Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3,3 (Skala 1-4)	3,15	95.5 %

Sumber: Lakip Puslitbang KB dan KS 2019



Gambar 3.7.
Seminar Sertifikasi Pernikahan

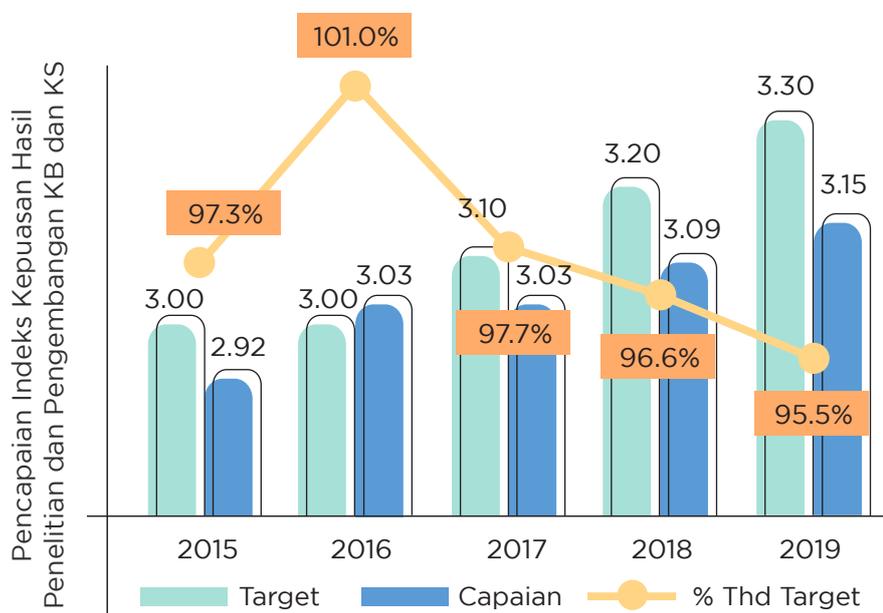
Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2019, indeks kepuasan hasil penelitian KB dan KS tercapai 3.15 dari target 3.3 (95.5 persen). Tingkat kepuasan ini mendekati target yang ditentukan.

Beberapa hambatan yang ditemui antara lain:

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum didiseminasikan secara optimal melalui forum dan teknologi informasi.
2. Pengemasan hasil penelitian dan pengembangan belum banyak menarik pengguna (*user*)
3. Penelitian berskala nasional yang dilakukan Puslitbang KB dan KS hanya SKAP 2019, selain itu tidak berskala nasional sehingga kurang dikenal dan tidak termanfaatkan oleh responden;
4. Data yang disediakan tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan pengguna (*user*) khususnya di tingkat kabupaten dan kota;

Grafik 3.13

Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Periode Tahun 2015-2019



Memperhatikan capaian kinerja Puslitbang KB dan KS atas tingkat kepuasan *user* terhadap hasil penelitian KB dan KS 2015-2019 yang cenderung menurun, Puslitbang KB dan KS selama tahun 2019 sudah melakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kualitas data/hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS agar dapat dipercaya dan tidak diragukan validitasnya.
2. Membuat desain sajian data/hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS dalam kemasan yang menarik.
3. Mensosialisasikan data/hasil penelitian dan pengembangan KB KS melalui forum terbuka (*website*) maupun seminar dan diseminasi.

4. Menyusun bunga rampai, *research brief* dan *policy paper* terkait hasil penelitian dan pengembangan.

Oleh karena tingkat kepuasan terhadap hasil penelitian dan pengembangan masih menjadi indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024, maka upaya untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang adalah:

1. Puslitbang KB dan KS secara rutin mengunggah data hasil penelitian dan pengembangan melalui website atau sistem online dan selalu memonitor teknologi IT di BKKBN untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik sehingga data hasil penelitian

- dapat diakses dengan mudah melalui *website* maupun online oleh pengguna;
2. Puslitbang KB dan KS secara reguler mengenalkan dan mencantumkan alamat *website* hasil penelitian dan pengembangan di berbagai kesempatan, baik dalam bentuk cetakan buku yang dihasilkan, cetakan barang dan saat kegiatan pertemuan;
 3. Puslitbang KB dan KS bekerjasama dan berkoordinasi dengan Direktorat Advokasi dan KIE ataupun mitra kerja (desainer) untuk membuat desain sajian/kemasan data dan informasi hasil penelitian menjadi lebih menarik dan ditampilkan dalam bentuk buku, abstrak, ringkasan, lembaran, *policy brief*, *snapshot*;
 4. Buku, abstrak, ringkasan, lembaran, *policy brief*, *snapshot* hasil penelitian dan pengembangan didiseminasikan secara rutin kepada komponen internal, Perwakilan BKKBN Provinsi dan mitra kerja serta melalui berbagai forum dan berbagai kesempatan, baik melalui seminar maupun ajang diseminasi lainnya dari dalam maupun luar Puslitbang KB dan KS;
 5. Puslitbang KB dan KS bekerjasama dan berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi ataupun mitra kerja (desainer) untuk mengemas *website* agar menjadi lebih menarik.
 6. Semakin intensif melibatkan mitra dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
 7. Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian terhadap kebutuhan program dan *user*.

A.3.2.5 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi

Tabel 3.46
Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100

Sumber: LAKIP Kedepuitan Latbang 2019

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari Lakip kedepuitan pelatihan dan pengembangan (latbang) tahun 2019, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 realisasi jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi sebesar 34 provinsi dari target 34 provinsi, dari hasil tersebut maka diperoleh persentase capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

Indikator jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi yang sudah mencapai target yang telah

ditentukan. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian tersebut adalah :

1. Pengembangan *platform E-Learning* dalam menunjang kegiatan pelatihan;
2. Penggunaan aplikasi SIDIKA sebagai sarana dalam pencatatan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. Pengembangan kerjasama dengan mitra strategis dalam pelaksanaan pelatihan bagi Penyuluh KB dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi;
4. Memperkuat peran Komite Penjamin Mutu Diklat Pusat dalam penyelenggaraan diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi;
5. Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, antara lain peningkatan kemampuan sebagai asesor melalui sertifikasi asesor di lingkungan BKKBN, dimana dari 26 peserta 20 orang dinyatakan lulus dan dapat direkomendasikan sebagai majelis asesor peneliti instansi BKKBN;
6. Mengoptimalkan kapasitas peneliti baik di BKKBN Pusat maupun di Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melaksanakan penelitian dan

- 7. Pengembangan aplikasi kemitraan untuk mengoptimalkan kegiatan kerjasama penelitian dengan mitra perguruan tinggi;
- 8. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam penyusunan dokumen kerjasama serta pelaksanaan pelatihan internasional yang berkualitas.

- 3. Pengembangan kerjasama dengan mitra strategis dalam pelaksanaan pelatihan bagi Penyuluh KB dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi;
- 4. Penguatan peran Komite Penjamin Mutu Diklat Pusat dalam penyelenggaraan diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi.

Keberhasilan atas pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1. Pengembangan *platform E Learning* dalam menunjang kegiatan pelatihan;
- 2. Penggunaan aplikasi SIDIKA sebagai sarana dalam pencatatan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan;

Adapun, tren pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.47
Tren Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Capaian	%												
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan di Provinsi	33	33	100	34	34	100	34	34	100	34	34	100	34	34	100

Sumber data : Lakip Kedeputusan Latbang, 2015 - 2019

Indikator tersebut sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Program dalam Renstra BKKBN 2020 – 2024, maka dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra BKKBN 2020 – 2024 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

- 1. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan, penelitian dan pengembangan melalui workshop/ pelatihan dan pengembangan forum diskusi *online*
- 2. Analisis kebutuhan SDM (tenaga pengelola dan fungsional) dan mengajukan permintaan penambahan tenaga yang dibutuhkan.
- 3. Memperbaharui SOP, instrumen monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat dan tindak lanjut pasca Diklat

- 4. Mengoptimalkan Tata Kerja Komite Penjaminan Mutu Tingkat Pusat dan Provinsi
- 5. Memperkuat peran Komite Penjamin Mutu Diklat Pusat dalam penyelenggaraan diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi
- 6. Pengembangan aplikasi SIDIKA sebagai sarana dalam pencatatan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan
- 7. Pengembangan *platform E - Learning* dalam mendukung proses kegiatan pelatihan
- 8. Meningkatkan komitmen pimpinan BKKBN dalam upaya pemenuhan kriteria akreditasi terkait alokasi Widyaiswara (SDM Pengajar) terutama di 4 provinsi yang belum memiliki Widyaiswara serta sarana dan pra sarana Diklat.
- 9. Meningkatkan advokasi kemitraan dengan negara lain pada pertemuan internasional.

10. Peningkatan promosi, diseminasi dan sosialisasi pelatihan dalam dan luar negeri serta hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
11. Meningkatkan jumlah dan bentuk inovasi penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan, KB dan KS melalui video grafis yang disebarluaskan melalui media sosial digital seperti Youtube, Instagram, Twitter dan Facebook serta melalui media cetak seperti *leaflet*, *wallchart* dan *standing banner* yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
12. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan, KB, dan KS melalui aplikasi pemanfaatan hasil penelitian, *website* SDKI dan *website* Puslitbang Kependudukan, KB dan KS.
13. Peningkatan kemitraan jaringan kerjasama dengan mitra kerja nasional dan *International Development Partners* untuk pelaksanaan pelatihan, kerjasama internasional, penelitian dan pengembangan dengan melalui pemetaan kegiatan nasional dan internasional yang melibatkan mitra BKKBN pada awal tahun. Penguatan kemitraan ini khususnya dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan, sejalan dengan program pemerintah Indonesia untuk lebih berperan dan memberikan kontribusi pada negara-negara di kawasan Selatan-Selatan.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan utilisasi pemanfaatan hasil penelitian oleh pengambil kebijakan.
15. Mengembangkan Kampung KB sebagai *Center of Excellence Family Happiness* tingkat internasional.
16. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
17. Mengembangkan e-jurnal hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
18. Meningkatkan jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan baik di tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 3.8.
Kunjungan Kerja di Papua

A.3.3 Program Dukungan Manajemen

A.3.3.1 Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB

Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB adalah jumlah peraturan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.48

Pencapaian Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	1	100 %

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama Tahun 2019

Dilihat dari tabel tersebut, maka persentase capaian kinerja jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB adalah sebesar 100 persen. Adapun upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah:

1. Penyusunan satu Himpunan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019 yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Badan Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
 - b. Peraturan Badan Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan

Pengembangan Dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

- c. Peraturan Badan Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. Peraturan Badan Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - e. Peraturan Badan Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peningkatan layanan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan melalui proses digitalisasi ke dalam *website* jdih.bkkbn.go.id. agar lebih mudah dan cepat diakses masyarakat termasuk 5 (lima) Peraturan Badan telah disusun pada tahun 2019.
 3. Fasilitasi Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang merupakan Regulasi/Kebijakan tentang pedoman dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada akhir tahun 2019 dengan adanya kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait penyederhanaan regulasi (*omnibus law*) maka dari 7(tujuh) NSPK yang telah diusulkan disederhanakan menjadi 1 (satu) NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang saat ini masih dalam proses harmonisasi
 4. Mengembangkan sistem pelayanan publik terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat meliputi pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

yang dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan pelayanan Dana Alokasi Khusus;

5. Pencapaian hasil evaluasi pelayanan publik yaitu pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan nilai 3,56 dengan kategori B (Baik).
6. Penyesuaian analisa jabatan terhadap jabatan pelaksana sebanyak 306 (tiga ratus enam) jabatan yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Pengembangan SOP yang mengacu pada Proses Bisnis BKKBN seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala Nomor 66/KEP/B4/2019 tentang Proses Bisnis di Lingkungan BKKBN. Hal ini sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target adalah :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal penyusunan produk hukum;
2. Tersedianya pedoman Peraturan Badan Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara pembentukan peraturan kepala badan di lingkungan BKKBN.
3. Standar Operasional Prosedur harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Penyusunan Program Legislasi (Proleg) BKKBN pada awal tahun anggaran.

Adapun, tren pencapaian jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB periode tahun 2015-2019, tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.49

Tren Capaian Jumlah Produk Hukum Dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Capaian	% Capaian												
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	4	7	175	1	2	200	1	8	800	1	2	200	1	1	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator tersebut periode 2015-2019 telah mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun, upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penataan regulasi berbasis Omnibus Law, dengan membuat Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Perban) untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Perban sehingga menjadi lebih sederhana;
2. Simplifikasi Rancangan Perban dengan menggabungkan beberapa Rancangan

Perban yang diusulkan oleh Unit Kerja Pemrakarsa;

3. Harmonisasi seluruh Rancangan Perban di Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga dan unit kerja terkait dengan substansi;
4. Seluruh Peraturan Badan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM;
5. Penyusunan Peraturan Badan sesuai dengan Keputusan Kepala Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daftar Program Legislasi Penyusunan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

A.3.3.2 Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.50
Pencapaian Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	Tercapai

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2019

Pencapaian kinerja opini BPK tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2018, karena Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2019 baru selesai disusun pada Bulan Februari 2020 dan akan diberikan opini penilaian oleh BPK pada Bulan Mei - Juni tahun 2020.

Pencapaian Indikator Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK untuk laporan keuangan tahun 2019 dipengaruhi oleh upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didukung dengan kegiatan seperti Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker (Semesteran) dan *Review* Laporan Keuangan Satker
2. Penyusunan laporan BMN yang tepat waktu dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didukung kegiatan rekonsiliasi antara BKKBN dengan DJKN setiap semester dan tahunan;
3. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan meliputi pelaksanaan anggaran dan pengelola laporan keuangan dan BMN;
4. Optimalnya penyampaian kecukupan pengungkapan di dalam LK Tahun 2018 dari sisi neraca laporan keuangan;
5. Membaiknya tata kelola keuangan di BKKBN sehingga, selisih pencatatan transfer masuk dan transfer keluar atas barang persediaan dapat berkurang secara signifikan menjadi sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- pada LK Tahun 2018.

Tren capaian kinerja indikator ini periode tahun 2015 - 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah, dimana capaian indikator kinerja ini sudah tercapai karena Laporan Keuangan Tahun 2018 sudah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian kinerja opini BPK tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2018, karena Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2019 baru selesai disusun pada Bulan Februari 2020 dan akan diberikan opini penilaian oleh BPK pada Bulan Mei - Juni tahun 2020.

Tabel 3.51

Tren Capaian Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019	
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Capaian									
Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WDP	-	WTP	WDP	-	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama

Dalam rangka mengendalikan kinerja dirancang berbagai upaya perubahan di tahun 2020 akan mengikuti arah dan kebijakan Nasional dalam pengelolaan Keuangan dan BMN di lingkungan BKKBN yaitu :

- Efisiensi dan efektifitas penganggaran untuk kegiatan benar-benar terfokus dalam upaya pencapaian sasaran kinerja dan untuk memenuhi target perjanjian kinerja biro keuangan dan pengelolaan BMN
- Pelaksanaan anggaran mengikuti peraturan tata kelola keuangan yang berlaku dengan berorientasi pada peningkatan kinerja sasaran program *quick win* BKKBN dan secara khusus *quick win* biro keuangan dan pengelolaan BMN fokus terkait rantai pasok.
- Terkait rencana peralihan tugas fungsi seluruh jajaran di BKKBN termasuk para pengelola Keuangan menjadi tenaga fungsional, akan dipetakan sesuai dengan kecakapan dan keahlian sehingga dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerjanya masing-masing.

A.3.3.3

Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran

Perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja. Tercapainya indikator ini salah satunya didukung oleh terjalannya koordinasi yang baik dengan perencana komponen baik di pusat maupun provinsi, sehingga dapat tersusunnya perencanaan program dan anggaran dalam RENJA-K/L dan RKAK-K/L yang telah mengacu pada kebijakan perencanaan *money follow* program melalui pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang *holistic, integrative*, tematik, dan spasial.

Tabel 3.52

Pencapaian Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja	4	5	125

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2019

Pada tabel di atas, persentase capaian kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja tahun 2019 adalah sebesar 125 persen dari hasil perbandingan target dengan realisasi. Kelima dokumen perencanaan tersebut yaitu :

1. Dokumen SPA tahun 2020 terselesaikan pada kegiatan KOREN II T.A. 2020;
2. Dokumen RKP/RENJA K/L TA. 2020 terselesaikan pada kegiatan KOREN II T.A 2020;
3. Dokumen RKA-KL TA.2019 terselesaikan pada kegiatan KOREN II T.A 2020;
4. Dokumen pedoman Harga Pokok Satuan Standar (HSPK) Tahun 2020 terselesaikan sebelum KOREN I TA. 2020;
5. Dokumen Draft Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, beserta matriks definisi operasional telah diselesaikan pada bulan Desember 2019.

Biro Perencanaan telah menyusun Draft Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, beserta matriks definisi operasional sebagai tindak lanjut awal dari RPJMN Tahun 2020 - 2024. Adapun upaya mencapai sasaran yang telah dilakukan di tahun 2019 diantaranya adalah:

1. Telah dilaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan para perencana baik

ditingkat pusat maupun provinsi secara personal dan intensif, serta tersediannya pedoman/panduan/juknis, sehingga diharapkan tingkat pengetahuan dan pemahaman para perencana di lingkungan BKKBN dapat seragam.

2. Mengukuhkan perencana komponen pusat melalui Surat Tugas Sekretaris Utama dalam rangka memudahkan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan;
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perencanaan melalui *workshop* perencanaan, serta konsultasi dan fasilitasi intensif dan berkesinambungan oleh Biro Perencanaan terkait perencanaan kepada SDM Perencana;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian PPN/Bappenas terkait kegiatan prioritas kependudukan dan lansia.

Adapun, tren pencapaian Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja periode tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa target indikator program tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.14.
Tren Pencapaian Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja Periode Tahun 2015 - 2019



Sumber: LAKIP Sekretaris Utama

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan capaian yang fluktuatif, namun pada indikator tersebut tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 133,3% (2015); 166,6% (2016); 133,3% (2017); 166,7% (2018); dan 125% (2019).

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah :

1. Penguatan Manajemen Kinerja melalui implementasi *Balanced Scorecard* (BSC) secara efektif dan efisien melalui tim *Strategic Management Office* (SMO);
2. Pengukuran evaluasi Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BKKBN melalui e-kinerja



A.3.3.4 Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai *roadmap*)

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan mempunyai peranan yang penting untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi maupun kompetensi setiap pegawai ASN agar menjadi pegawai yang berkinerja tinggi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi. Pengukuran kompetensi pegawai di lingkungan BKKBN dilakukan melalui *Assesment Center*, yaitu suatu metode untuk memprediksi perilaku pegawai melalui berbagai simulasi oleh Asesor. Tujuan metode tersebut untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggungjawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria standar kompetensi dalam jabatan tersebut.

Tabel 3.53

Pencapaian Presentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai *roadmap*) Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai <i>roadmap</i>)	63% Pengembangan SDM	100 % Pengembangan SDM	158,73 %

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2019

Pada tahun 2019 dilakukan pengembangan karir terhadap 265 pegawai dalam bentuk mutasi/promosi. Dari 265 pegawai yang mutasi/promosi tersebut seluruhnya telah dilakukan asesmen kompetensi dengan hasil Potensial/Potensial dengan Catatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut capaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target indicator ini sebesar 63%, maka capaian persentase indicator ini adalah 158,73 %. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan *Assessment Center* BKKBN sebagai pusat kegiatan pengembangan SDM antara lain meliputi asesmen, *feedback* dan konseling pegawai;
2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di BKKBN yang mencakup kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural;

3. Pemenuhan kompetensi dari hasil asesmen wajib menjadi persyaratan dalam setiap seleksi jabatan;
4. Pengembangan karir pegawai baik promosi maupun mutasi hanya dilakukan bagi pegawai yang memenuhi standar kompetensi.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya *Assessment Center* BKKBN yang telah memenuhi standar;
2. Terdapat tiga calon assessor yang telah lulus pelatihan;

3. Pemanfaatan assessor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh *Assessment Center* BKKBN;
4. Pemanfaatan profil kompetensi pegawai dalam menyusun bahan pendidikan dan pelatihan pegawai;
5. Komitmen pimpinan untuk mensyaratkan pemenuhan kompetensi dalam setiap seleksi jabatan serta promosi dan mutasi pegawai.

Adapun, tren pencapaian persentase terlaksananya pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai *roadmap*) dalam periode 2015-2019 terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.54

Tren Pencapaian Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai *roadmap*) Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Capaian	% Capaian												
Presentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai <i>roadmap</i>)	52	-	n/a	55	53.2	96.8	57	58.0	101.7	60	60.0	100	63	100.0	158.7

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama

Tabel 3.55

Perbandingan Target Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai *roadmap*)

Target tahun 2019 dengan tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai <i>roadmap</i>)	63% Pengembangan SDM	63% Pengembangan SDM

Sumber data : LAKIP Sekretaris Utama, 2019

Adapun upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan tentang Peraturan Kepala Badan tentang pengelolaan *assessment center*;
2. Pemanfaatan *assessment center* oleh pihak eksternal dan mengusulkannya menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKBN;
3. Melakukan pengadaan CPNS bagi formasi jabatan fungsional assessor sebanyak 6 (enam) orang;
4. Melakukan penyempurnaan talent pool BKKBN dan penerapannya dalam pengembangan karir pegawai

A.3.3.5

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

Dalam suatu Kementerian/Lembaga dibutuhkan pelayanan administrasi perkantoran kerumatanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang kinerja program. Oleh sebab itu, maka perlu adanya tolak ukur yang jelas dalam bentuk survei indeks kepuasan terkait penilaian indikator dimaksud.

Tabel 3.56

Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4	3,17	79,3

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2019

Realisasi penilaian kinerja didapatkan dari hasil survei kepuasan pelayanan yang merupakan kerjasama antara Biro Umum dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS (PUSNA). Secara kumulatif target capaian kinerja Biro Umum tahun 2019 belum sesuai dengan target yang telah di tuangkan dalam Renstra 2015 - 2019 yaitu harus mencapai 4 (sangat puas) dari skala 1 - 4 sedangkan realisasi tercapai 3,17 atau 79,3 persen yang artinya seluruh pimpinan dan pegawai BKKBN merasa puas terhadap layanan di Biro Umum Adapun upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 antara lain :

1. Sudah dibuatkan system yang dapat memberikan informasi terkait masalah tersebut yaitu SIPP (System Informasi Penghasilan Pegawai)
2. Sudah dilakukan rotasi perubahan lokasi kerja sesuai hasil pengawasan setiap triwulan
3. Sudah dilakukan pemenuhan sarana toilet berupa tempat sampah, sabun namun untuk

ember dan gayung tidak disediakan karena konsep kamar mandi kering

4. Sudah dilakukan secara rutin pelatihan kebugaran tubuh petugas keamanan, baris berbaris, pelatihan pemadam kebakaran, evakuasi bencana dan pelatihan bela diri
5. Sudah dilakukan pembinaan tentang tata kelola persuratan, pelayanan telepon/fax
6. Sudah dilakukan metode system kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI (System Reformasi Informasi Kearsipan Dinamis)
7. Akan dilakukan pemeliharaan rutin dan penggantian AC, telepon dan faximile baru dan dukungan sarana kerja seperti kursi, meja, *filling cabinet*, lemari secara bertahap pada tahun 2020 dikarenakan 2019 diprioritaskan untuk membayar tunggakan pengadaan tahun 2018.
8. Akan dilakukan pemeliharaan rutin ruang kerja serta prasarana ruang rapat secara bertahap pada tahun 2020 dikarenakan 2019 diprioritaskan untuk membayar tunggakan pengadaan tahun 2018

Faktor permasalahan dalam mencapai target kinerja adalah :

1. Informasi terkait pembayaran uang makan, gaji, tunjangan kinerja, pemotongan gaji serta peruntukannya sulit di mengerti
2. Toilet di setiap lantai belum dibersihkan secara rutin serta belum terjaga kebersihan dan kenyamanannya
3. Fasilitas pendukung sarana kebersihan seperti sabun, tempat sampah, ember, gayung untuk pelayanan kebersihan kantor tersedia belum memadai
4. Pelayanan keamanan di lingkungan kerja belum dilakukan dengan baik dan belum handal dalam pelayanan keamanan lingkungan kantor
5. Pendistribusian surat masuk ke komponen belum dilakukan dengan cepat & tepat
6. Sulit menghubungi dan menemui pegawai persuratan
7. Pegawai kearsipan dan dokumentasi belum sigap menanggapi keluhan, saran dan

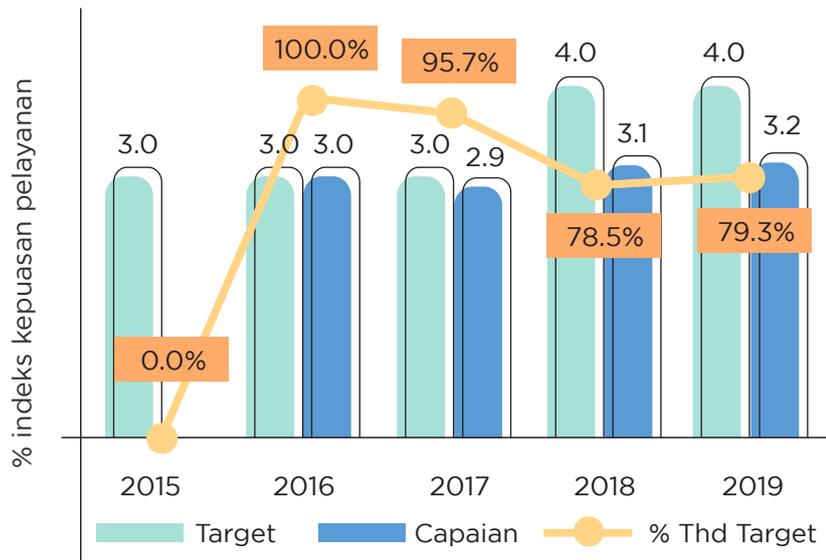
- masukannya yang berkaitan dengan penerimaan dan penyimpanan arsip dari komponen
- 8. Pegawai persuratan belum terampil dalam memberikan pelayanan administrasi perkantoran
- 9. Tata udara (AC) , Alat komunikasi seperti telepon dan faximile, dukungan sarana kerja seperti kursi, meja, *filling cabinet*, lemari diruang kerja dalam kondisi dan berfungsi kurang baik
- 10. Ruang kerja dalam kondisi kurang baik serta prasarana ruang rapat kurang memadai

- 11. Sarana toilet belum berfungsi dengan baik (Pintu, wastafel, kran, pembuangan air, lampu)

Adapun, tren pencapaian terlaksananya indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran kerumatanngaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang kinerja program periode 2015 - 2019 menunjukkan bahwa target indikator program tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.15.

Tren Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtangaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Periode 2015 - 2019



Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2017 - 2019

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Pengelolaan Administrasi Umum
 - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran seperti pelayanan pada sekretaris pimpinan, pengembangan tata kearsipan, pelayanan persuratan yang dilaksanakan dengan optimal.
2. Pelayanan Administrasi Kerumahtangaan
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kerumahtangaan yang

cepat dan tepat. Penyelenggaraan pada pelayanan administrasi kerumatanngaan seperti pelaksanaan peambayaran gaji, tunjangan dan remunerasi serta pelayanan pimpinan dan tamu pimpinan yang telah dilaksnaakan sesuai denan yang diharapkan.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan petugas protokol dan keamanan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM

3. Peningkatan kualitas pelayanan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran

dalam mendukung program perlu adanya penyediaan sarana prasarana yang maksimal serta berkualitas, sehingga output yang dicapai akan lebih optimal.

A.3.3.6 Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki Kantor Perwakilan di Provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja program terkait jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja.

Indikator Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi yang telah mencapai target. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara lain :

Tabel 3.57
Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	34 prov	100

1. Fasilitasi dukungan manajemen terkait perencanaan program dan anggaran, yaitu tersedianya dokumen RKAK/L di semua provinsi.

Sudah terdokumentasi dokumen RKAK/L setiap provinsi dalam rangka pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat provinsi.

2. Fasilitasi dukungan manajemen terkait usulan revisi anggaran dari semua provinsi Sudah terdokumentasi usulan revisi dan persetujuan kepada provinsi yang melakukan revisi.

Adapun, perbandingan target dan realisasi jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan KB dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel berikut:

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2019

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi adalah sebesar 100 persen. Sekretaris Utama telah melakukan fasilitasi dukungan manajemen di semua lini di tingkat provinsi.

Tabel 3.58

Tren Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Periode Tahun 2015-2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Capaian	% Capaian												
Jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	33	33	100	34	34	100	34	34	100	34	34	100	34	34	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2017 - 2019

A.3.4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

A.3.4.1 Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh Eksternal Audit

Dalam pengelolaan program KKBPK, BKKBN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian dari keuangan negara. Penggunaan APBN tersebut, setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan opini laporan keuangan. Pada tahun 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dengan wilayah uji petik pada seluruh satuan kerja di

BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan total anggaran sebesar Rp.2.204.491.242.000,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 99/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, nilai temuan pemeriksaan senilai Rp.1.552.484.770,00. Perhitungan persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK oleh Eksternal Audit Tahun 2019, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{\% temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit} \\
 & = \frac{\text{temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2019}}{\text{Jumlah Pagu Satker wilayah uji petik BPK}} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp.1.552.484.770,00}}{\text{Rp.2.204.491.242.000,00}} \times 100\% \\
 & = 0,07\%
 \end{aligned}$$

Dalam perencanaan sudah diantisipasi untuk mengukur persentase capaian dari perbandingan antara target dengan realisasi, jika target sebesar "0" diukur dengan rumus matematika sederhana maka akan menghasilkan nilai "0" juga, sehingga persentase capaian tidak valid. Maka untuk mengukur persentase perbandingan target dengan realisasi ketika target 0, hanya dapat diukur dengan rumus limit sebagai berikut:

$$\lim_{x \rightarrow I} \left(\frac{X + Target}{X + Capaian} \right)$$

Pada tahun 2019 target indikator tersebut bernilai "0" dengan realisasi 0,07%. Untuk memperoleh nilai absolut perlu difaktorkan terlebih dahulu dan disubstitusikan menggunakan rumus limit sebagai berikut:

$$\lim_{x \rightarrow I} \left(\frac{X + Target}{X + Capaian} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow I} \left(\frac{X + I}{X + 0,07} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow I} \left(\frac{I + I}{I + 0,07} \right) = \frac{I}{I,07} = 0,9345 \text{ atau } 93,45\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja dari temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK oleh eksternal audit sebesar 93,46%. Sehingga capaian indikator persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.59
Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0,07 %	93,46%

Sumber data : LAKIP IRTAMA, 2019

Adapun, Tren pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.60
Tren Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Periode Tahun 2015 - 2019

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit	20 % (dari 14 satker yang diaudit eksternal)	0,44%	4,545	15 % (dari satker yang diaudit eksternal)	8,25 %	181,8	10 % (dari satker yang diaudit eksternal)	1,02%	980,3	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0,12 %	4,108,7	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0,07%	93,4

Jika melihat pada tabel diatas, tren capaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh Eksternal Audit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019)

menunjukkan bahwa persentase capaian realisasi dari tahun ke tahun telah melebihi target yang ditetapkan (melebihi 100%), hanya pada tahun 2019 persentase capaian realisasi yang kurang dari 100%. Jika dilihat dari realisasi

persentase temuan material, sempat terjadi kenaikan pada tahun 2016 namun selanjutnya menunjukkan penurunan persentase temuan material yang konsisten dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Penurunan persentase temuan material menghasilkan peningkatan opini atas laporan keuangan menjadi WTP pada tahun 2018 (LK 2017) dan 2019 (LK 2018).



Jika dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2019 menunjukkan penurunan nilai temuan materialitas BPK yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, temuan materialitas BPK senilai 2,78 milyar dan pada tahun 2017 senilai Rp.58.30 Milyar. Hal tersebut dapat dilihat pada tren temuan materialitas BPK pada gambar berikut:

LK Tahun	Nilai Temuan Materiiil
2014	62,63 M
2015	60,89 M
2016	58,30 M
2017	2,78 M
2018	1,55 M

Menurunnya temuan material BPK sebagaimana terlihat dalam gambar dan tabel di atas, selaras dengan tingkat opini atas laporan keuangan. Penurunan temuan material BPK yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018 menghasilkan opini laporan keuangan BKKBN mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut sesuai dengan Keputusan BPK Nomor: 5/K/I-XIII.2/10/2013 yang mengatur bahwa Opini WTP dapat diberikan dengan batas materialitas temuan sebesar $0,5\% \leq PM \leq 5\%$.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan temuan penyimpangan strategis oleh eksternal audit antara lain:

1. Seluruh satuan kerja di lingkungan BKKBN telah meningkatkan efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Inspektorat Utama dengan unit kerja terkait cukup efektif menjadi *counterpart* dan pendampingan selama pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, sehingga temuan pemeriksaan dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi secara cepat dan memadai.
3. Inspektorat Utama telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan mempertimbangkan temuan BPK sebagai salah satunya faktor yang diukur dalam menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang memiliki tujuan *quality assurance*.

Untuk perbaikan perencanaan periode Rencana Strategis 2020-2024 dan kinerja pada tahun 2020, Inspektorat Utama akan melaksanakan:

- a. Perbaikan penetapan target yang lebih realistis dan mudah diukur untuk indikator Persentase Temuan Penyimpangan Strategis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit menjadi 0,09% pada tahun 2020;
- b. Mendorong peningkatan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan melalui kegiatan *quality assurance* diantaranya atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), *review* atas Laporan Keuangan dan audit berbasis risiko;
- c. Meningkatkan pendampingan pada kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh masing-masing kedeputian dan Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai bentuk *early warning system*.

A.3.4.1 Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki Kantor Perwakilan di Provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di Satker BKKBN Provinsi. Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang terdiri dari audit, *review*, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019. Pada tahun 2019, BKKBN memiliki kantor Perwakilan BKKBN Provinsi pada 33 provinsi. Pada Provinsi Kalimantan Utara belum dibentuk Perwakilan BKKBN Provinsi secara mandiri, melainkan masih tergabung dalam Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga hasil pengawasan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah mewakili provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi indikator Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.61
Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2019

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	100

Sumber data : LAKIP IRTAMA 2019

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar 100%.

Jika dilihat dari realisasi capaian PKPT tahun 2019, maka dapat dijabarkan capaian output kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.62
Rincian Capaian Output Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

No.	Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Output	Capaian	Keterangan
1	Audit Keuangan/Operasional/ Kinerja	Laporan Hasil Audit	42	Seluruh Satker di BKKBN
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Audit	6	Sumut, Jateng, Adpin, Dalduk, Latbang, Bengkulu
3	<i>Review</i> Laporan Keuangan	Laporan Hasil <i>Review</i>	3	LK Semester II TA 2018, Semester I TA 2019 dan Triwulan III TA 2019
4	<i>Review</i> RKA K/L	Catatan Hasil <i>Review</i>	2	Koren I dan Koren II
5	<i>Review</i> RKBMN	Laporan Hasil <i>Review</i>	1	-
6	<i>Review</i> Revaluasi BMN	Laporan Hasil <i>Review</i>	1	-
7	<i>Review</i> PIPK	Laporan Hasil <i>Review</i>	2	Semester II TA 2018 dan Semester I TA 2019
8	<i>Review</i> Penerimaan Negara	Laporan Hasil <i>Review</i>	1	-

No.	Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Output	Capaian	Keterangan
9	Review Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Hasil Review	4	Triwulan IV TA 2018, Triwulan I s.d III TA 2019
10	Pemantauan Pembangunan ZI WBK	Laporan Hasil Pemantauan	20	NTB, Sulsel, Sumbar, Jabar, Lampung, Kalteng, Kalsel, DIY, Kaltim, Bali, Jateng, SULut, Kalbar, Jatim, Jambi, Aceh, Papua, Sumsel, Babel dan NTT
11	Evaluasi Penyelenggaraan SPIP	Laporan Hasil Evaluasi	29	Sulbar, Gorontalo, Jateng, Bali, Kaltim, Aceh, Kalbar, Bengkulu, Maluku, Papua, Sulut, Sulsel, Sultra, Riau, Pulin, Pulap, NTB, Kalteng, Sumbar, Sestama, NTT, Banten, Jatim, Babel, Papua Barat, Maluku, Sulteng, Sumsel
12	Evaluasi Implementasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi	69	Seluruh Unit Kerja Eselon 2 dan Eselon 1 di BKKBN
TOTAL			180	Laporan

Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 jenis kegiatan pengawasan dengan capaian output sebanyak 180 laporan yang menjangkau seluruh satker di BKKBN.

Adapun, tren pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.63
Tren Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Periode Tahun 2019 - 2020

IKP	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Capaian	% Capaian												
Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi	33	33	100	34	34	100	34	34	100	34	34	100	34	34	100

Sumber data : LAKIP IRTAMA 2017- 2019

Indikator Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi dari tabel 17 di atas, menunjukkan realisasi dan capaian yang konsisten dari tahun 2015 s.d. 2019.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen APIP BKKBN dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam upaya memberikan penjaminan atas peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Namun, dalam hasil evaluasi implementasi SAKIP BKKBN tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indikator ini dinilai masih berorientasi output, sedangkan untuk indikator eselon I seharusnya sudah bernilai outcome.

Untuk perbaikan perencanaan periode Rencana Strategis 2020-2024 dan kinerja pada tahun 2020, Inspektorat Utama telah melakukan perbaikan indikator kinerja jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi menjadi jumlah unit kerja yang berpredikat WBK dan berpredikat WBBM

A.3 Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional

Tabel 3.64
Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional

No	Kode	Sasaran Proyek Prioritas	Penanggung Eselon II	Output Proyek Prioritas	Satuan	Target 2019	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3316020	Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (DKI Jakarta)	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes	Faskes	529	529	100
2	3331080	Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (Provinsi)	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes	Faskes	18.257	17801.71	97.51
3	3331081	Meningkatnya Promosi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak	Keluarga yang memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	Keluarga	2831614	2941277	103.87%

No	Kode	Sasaran Proyek Prioritas	Penanggung Eselon II	Output Proyek Prioritas	Satuan	Target 2019	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	3331085	Meningkatnya Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	Kelompok	29.327	28.290	96.46%
5	3331086	Meningkatnya promosi dan konseling kesehatan reproduksi Berbasis Poktan/ Komunitas	Direktorat Kesehatan Reproduksi (DITKESPRO)	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/ Komunitas	Poktan/ komunitas	66.267	73.491	111

Sumber data : LKIP Kedepatian 2019

A.4.1 Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (DKI Jakarta)

Realisasi capaian fasilitas kesehatan yang dapat terpenuhi alokonnya di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2019 telah tercapai seluruhnya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 529 Faskes atau capaian sebesar 100

persen (Tabel 3.88). Capaian kinerja output mencapai 100% karena proses penyediaan IUD, Implan, dan BMHP sudah selesai dan saat ini sudah terdistribusi ke fasilitas kesehatan.

Tabel 3.65

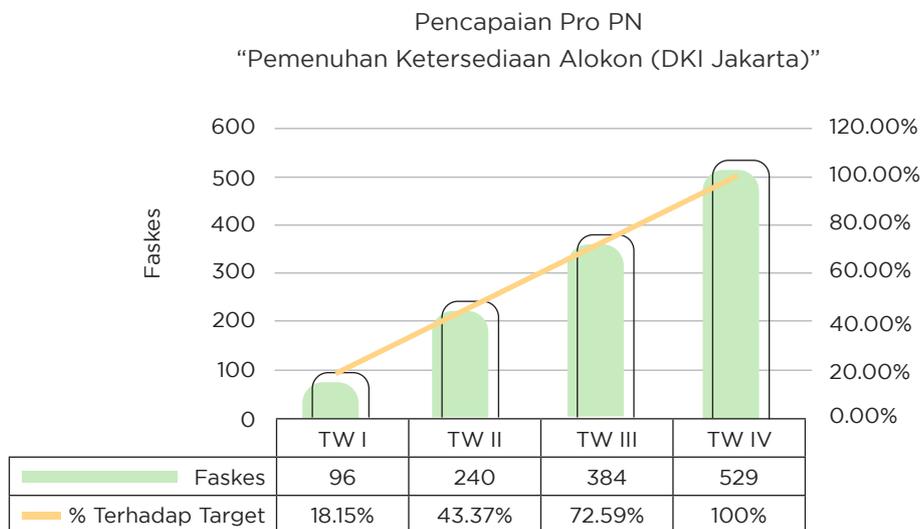
Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokon di Faskes (DKI Jakarta) Tahun 2019

Output Pro PN	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
Pemenuhan Ketersediaan Alokon (DKI Jakarta)	529	529	100%	

Sumber data : LKIP Kedepatian KBKR 2019

Grafik 3.16.

Tren Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokasi di Faskes (DKI Jakarta) Tahun 2019 per Triwulan



Target Pemenuhan ketersediaan alokasi (DKI Jakarta) tahun 2019 sebesar 529 faskes. Realisasi Capaian kinerja output secara bertahap mulai Triwulan I sebesar 96 faskes (18,15%), Triwulan II sebanyak 240 faskes (45,37%), Triwulan III sebesar 384 faskes (72,59%), sampai dengan Triwulan IV tercapai seluruhnya atau sebesar 529 faskes (100%).

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Pro PN pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan evaluasi melalui *video conference* mengenai permasalahan keterlambatan pengadaan alokasi dan memastikan ketersediaan alokasi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya;
- Melaksanakan percepatan pelaksanaan proses katalog sektoral BKKBN 2019 untuk implan;
- Menyusun rencana kebutuhan alokasi per provinsi termasuk *buffer* alokasi Nasional dan mensosialisasikan rencana kebutuhan alokasi kepada Provinsi;
- Melakukan distribusi alokasi dari *buffer stock* di gudang Pusat ke provinsi untuk mengatasi kekurangan stok;
- Melakukan distribusi dinamis dari provinsi yang berlebih kepada provinsi yang kekurangan untuk mengatasi kekurangan stok;
- Optimalisasi percepatan distribusi dari gudang alokasi OPD KB kabupaten dan kota melalui dana BOKB pada menu distribusi alokasi sampai dengan faskes yang melayani KB;
- Melakukan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan kepada provinsi dalam meningkatkan capaian kegiatan pengadaan alokasi;

A.4.2

Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokon di Faskes (Provinsi)

Pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di fasilitas kesehatan khususnya di Provinsi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PUS akan pelayanan KB di 18.257 Faskes yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN di 32 Provinsi selain wilayah DKI Jakarta. Proses pemesanan dan pembelinya dilakukan pada masing – masing Perwakilan BKKBN Provinsi.

Realisasi capaian fasilitas kesehatan yang dapat terpenuhi alokonnya di 32 provinsi pada tahun 2019 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17.802 dari 18.257 Faskes atau capaian sebesar 97,51 persen (Tabel 3.66). Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya fasilitas kesehatan yang sudah tidak aktif melayani KB dan juga adanya fasilitas kesehatan

yang telah tutup sehingga tidak lagi teregister dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN selain itu proses pembelian alokon tahun berjalan tidak berhubungan langsung dengan distribusi alokon di tahun tersebut, sebab proses distribusi masih menggunakan stok alokon yang tersedia atau stok tahun lalu.

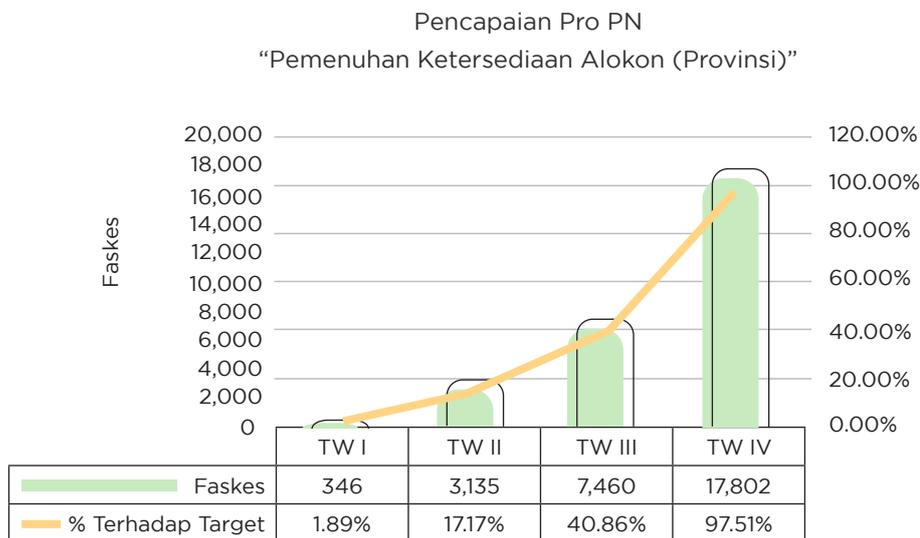
Tabel 3.66

Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Permintaan dan Pemenuhan Kebutuhan Alokon di Faskes (Provinsi) Tahun 2019

Output Pro PN	Target	Capaian	% Capaian	Status Capaian
Pemenuhan Ketersediaan Alokon (DKI Jakarta)	18.257	17.802	97,51%	●

Grafik 3.17.

Tren Pencapaian Pemenuhan Alokon (Provinsi)



Target pemenuhan ketersediaan alokon (Provinsi) Tahun 2019 sebesar 18.257 faskes. Realisasi Capaian kinerja output secara bertahap mulai Triwulan I sebesar 346 faskes (1,89 %), Triwulan II sebesar 3.135 faskes (17,17%), Triwulan III sebesar 7.460 faskes (40,86%), sampai dengan Triwulan IV tercapai sebesar 17.802 faskes (97,51%).

Dalam melaksanakan Pro PN Pemenuhan Kebutuhan alokon terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan seperti:

1. Proses *e-purchasing* Implan pada katalog sektoral BKKBN baru dimulai pada tanggal 1 November 2019 karena menunggu proses katalog sektoral BKKBN selesai.

2. Jangka waktu untuk proses penyelesaian pekerjaan pengadaan Implan mendekati akhir tahun.
3. Biaya *handling* distribusi alokon melalui Bikub tidak memadai.

Sedangkan upaya pencapaian target Pro PN yang sudah dilakukan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi melalui *video conference* mengenai permasalahan keterlambatan pengadaan alokon dan memastikan ketersediaan alokon di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya;
2. Melaksanakan percepatan pelaksanaan proses katalog sektoral BKKBN 2019 untuk implan;
3. Menyusun rencana kebutuhan alokon per provinsi termasuk *buffer* alokon Nasional dan mensosialisasikan rencana kebutuhan alokon kepada Provinsi;
4. Melakukan distribusi alokon dari *buffer stock* di gudang Pusat ke provinsi untuk mengatasi kekurangan stok;
5. Melakukan distribusi dinamis dari provinsi yang berlebih kepada provinsi yang kekurangan untuk mengatasi kekurangan stok;
6. Optimalisasi percepatan distribusi dari gudang alokon OPD KB kabupaten dan kota melalui dana BOKB pada menu distribusi alokon sampai dengan faskes yang melayani KB;

7. Melakukan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan kepada provinsi dalam meningkatkan capaian kegiatan pengadaan alokon;

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mencapai target Pro PN pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai sistem pengadaan *e-catalog*.
2. Adanya regulasi perluasan pendistribusian alokon kepada seluruh faskes dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) baik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak dengan syarat telah teregister dalam SIGA BKKBN.
3. Mengadvokasi kabupaten/kota untuk memprioritaskan pemanfaatan dana BOKB oleh Kabupaten/Kota untuk pendistribusian alokon ke faskes dan Praktik Mandiri Bidan (PMB).
4. Memberikan pelatihan perhitungan perencanaan kebutuhan alokon di provinsi.
5. Pelibatan sektor swasta dalam pemenuhan kebutuhan sektor bagi PUS melalui *public private partnership*.
6. Penghitungan kebutuhan alokon dengan mempertimbangkan hasil total *market assessment* (TMA) sehingga pengadaan alokon program sesuai kebutuhan.

A.4.3 Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)

Tahun 2019 Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga melalui Program Pembangunan Keluarga, mendukung Prioritas Nasional Kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dalam rangka Penurunan Stunting melalui Promosi dan KIE Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dengan lokus sasaran PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja

(BKR) sebesar 29.327 kelompok. Realisasi kinerja dalam mendukung Prioritas Nasional Kesehatan berdasarkan capaian laporan dalam Aplikasi Smart-Kemenkeu adalah sebesar 96,70 persen dari target 29.327 kelompok (Triwulan IV). Capaian Kinerja *Output* Proyek Prioritas Nasional Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.67

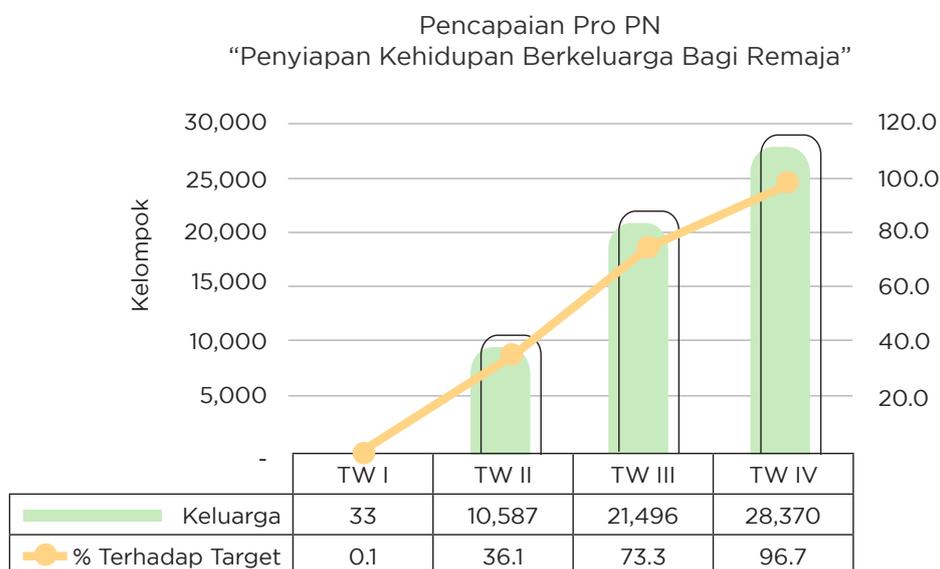
Pencapaian Terlaksananya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Tahun 2019

Output Pro PN	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	29.327	28.360	96,70	

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik dalam Rapat Pengendalian Program setiap bulan, Video *Teleconference* dan juga dilaporkan secara Triwulan kepada Bappenas dan Kemenkeu serta ke Kantor Staf Presiden. Adapun grafik perkembangan capaian secara triwulanan dapat disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.18.

Tren Pencapaian Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja



Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah di tetapkan antara lain:

1. Melaksanakan *workshop*/orientasi Sosialisasi PKBR untuk para pengelola program Bina Keatahanan Remaja di lapangan untuk lokus Pro PN;
2. Melakukan pemantauan capaian program melalui:
 - a. Laporan melalui SIGA
 - b. Laporan melalui aplikasi Smart
 - c. Monitoring ke beberapa provinsi
 - d. *Video Telecoference*
 - e. Rapat pengendalian program setiap bulan
 - f. Group WA
3. Mengembangkan materi dan media KIE Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.

A.4.4 Meningkatnya Promosi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan

Tahun 2019 Kedeputan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga melalui Program Pembangunan Keluarga, mendukung Prioritas Nasional Kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dalam rangka Penurunan Stunting melalui Promosi dan KIE 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan sasaran 2.831.614 keluarga yang memiliki Baduta. Realisasi kinerja dalam mendukung Prioritas Nasional Kesehatan berdasarkan capaian laporan dalam Aplikasi Smart-Kemenkeu adalah sebesar 103,92 persen dari target 2.942.665 keluarga yang memiliki Baduta dan terpapar promosi dan KIE 1000 HPK di sasaran lokus tahun 2018 di 160 Kabupaten/kota.

Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan disajikan dalam tabel dibawah ini :

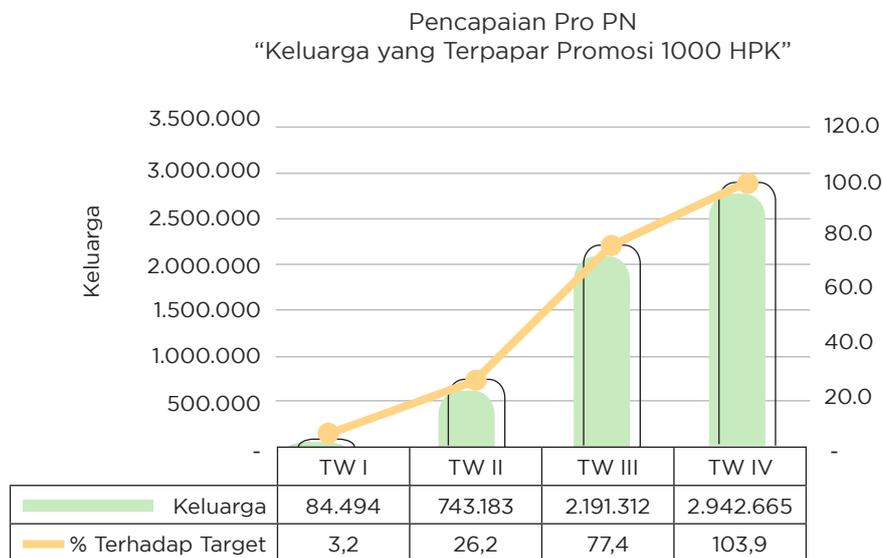
Tabel 3.68

Pencapaian Terlaksananya Promosi dan KIE pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan Tahun 2019

Output Pro PN	Target	Capaian	% capaian	Status Capaian
Keluarga Yang Terpapar Promosi 1000 HPK	2.831.614	2.942.665	103,9	●

Grafik 3.19

Tren Pencapaian Pro PN Keluarga yang Terpapar Promosi 1000 HPK



Pada triwulan 1 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan lokus di 160 Kabupaten/Kota pada triwulan 1. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan *Prototype* materi dan media KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka penurunan *stunting* sesuai dengan kearifan;
2. Peningkatan Kapasitas pengelola Pro PN;
3. Sosialisasi materi dan media KIE 1000 hari Pertama Kehidupan kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
4. Penguatan kapasitas penyuluh PKB/PLKB dan Kader BKB tentang 1000 HPK dalam rangka penurunan stunting kepada keluarga sasaran dan masyarakat;

5. Melakukan promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka penurunan stunting ke desa-desa lain yang tidak termasuk dalam sasaran tetapi masih dalam wilayah Kabupaten dan Kota tersebut.

Upaya perbaikan pada tahun 2020 akan dilakukan perbaikan materi tentang pengasuhan 1000 HPK yang lebih fokus kepada pola pengasuhan balita dan anak. Materi ini untuk memperbaiki materi tahun 2018 yang

masih fokus pada dimensi kesehatan. Selain itu juga disusun modul BKB eliminasi masalah anak stunting (EMAS), kalender pengasuhan 1000 HPK. Prototype BKB Kit stunting sebagai media penyuluhan kelompok BKB di wilayah sasaran pencegahan stunting dan kampung KB. Selain itu juga ada, permainan ular tangga dengan materi pengasuhan 1000 HPK terdiri dari 6 sesi di sesuaikan dengan jumlah pertemuan dalam modul BKB EMAS

A.4.5 Meningkatnya Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan dan Komunitas

Tahun 2019, Direktorat Kesehatan Reproduksi mendukung Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui *output* Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/Komunitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan untuk menurunkan Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Kegiatan yang dilakukan melalui promosi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dan distribusi materi yang dilakukan oleh pengelola KB, PKB terhadap poktan/komunitas dan berintegrasi K/L lain seperti dengan Pendamping PKH yang berada dibawah wewenang Kementerian Sosial.

Tabel 3.69
Pencapaian Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/Komunitas Tahun 2019

Output Pro PN	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/Komunitas	66.267	73.491	111%	●

Grafik 3.20.

Tren Pencapaian Pro PN Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/Komunitas



Target Tahun 2019 sebanyak 66.267 Kelompok Kegiatan (Poktan)/ komunitas. Realisasi Capaian kinerja output secara bertahap mulai Triwulan I sebanyak 19.606 poktan/ komunitas (29,59%), Triwulan II sebanyak 43.801 (66,1%), Triwulan III sebanyak 55.538 poktan/ komunitas (83,81%), sampai dengan Triwulan IV tercapai sebanyak 73.491 poktan/komunitas (111%) dari target 66.267 kelompok yang telah melakukan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi. Dalam melaksanakan Pro PN Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Poktan/ Komunitas mengalami beberapa permasalahan dalam pelaksanaan seperti adanya pengelola program kesehatan reproduksi yang merangkap jabatan di beberapa provinsi dan masih beragamnya kemampuan PKB/PLKB dan kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam memberikan konten penyuluhan kesehatan reproduksi.

Realisasi capaian output lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 73.491 poktan/

komunitas (111%) dari target 66.267 kelompok dikarenakan adanya faktor pendukung dan upaya pencapaian target yang telah dilaksanakan.

Faktor pendukung keberhasilan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :

Internal:

1. Integrasi kegiatan promosi kesehatan reproduksi (Bidang KBKR) dengan Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi terkait dengan pemanfaatan promosi kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatannya
2. Dukungan ketersediaan jenis materi kesehatan reproduksi yang diperbanyak disesuaikan dengan kebutuhan kelompok kegiatan di daerah
3. Eksternal:

Koordinasi yang kuat dengan komunitas mitra kerja terkait (kelompok basis komunitas masyarakat dan K/L)

Tabel 3.70

Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

No	Lokasi	Kegiatan
1	Lokasi Lama (<i>existing</i>) Poktan BKB, BKR, PIK/R, BKL, UPPKS Perwakilan BKKBN Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasie Kesehatan Reproduksi bersinergi dan berkoordinasi dengan Kasie di Bidang KSPK serta Bidang lainnya melalui insert kegiatan promosi dan konseling kespro dalam setiap pertemuan poktan 2. Pada tiap pertemuan Poktan, masing-masing Kasie Kespro dan KSPK bekerja sama dengan para Kader Poktan dalam melakukan kegiatan promosi dan konseling Kespro 3. Distribusi materi promosi dan konseling kespro di Poktan 4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan promosi dan konseling kespro di Poktan
2	Lokasi Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasie Kespro bersinergi dan berkoordinasi dengan advokasi dan Hubalila di perwakilan BKKBN Provinsi. 2. Optimalisasi materi kespro dengan advokasi 3. Optimalisasi peran PKB/PLKB dengan pendamping PKH dalam melakukan promosi dan konseling Kespro 4. Kasie kespro menyisipkan materi promosi dan konseling kespro kepada PKB/PLKB dan pendamping PKH. 5. Kasie Kespro bersinergis melalui kegiatan-kegiatan Kesehatan Reproduksi di lingkungan Dinas Provinsi 6. Kasie Kespro sebelum melaksanakan kegiatan ProPN diharapkan melakukan audiensi dengan Dinas Sosial, Bappeda, dan OPD Dalduk KB Kab/Kota atau Dinas lainnya di provinsi 7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan promosi dan konseling kespro

B Realisasi Anggaran

B.1 Realisasi Anggaran BKKBN

Kinerja sasaran yang dicapai selama tahun 2019 didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran masing-masing program dapat berjalan dengan baik. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 untuk semua jenis belanja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.71

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019

Pagu Anggaran	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
3.822.821.933.000	≥90%	3.538.301.604.038	92,56	

Sumber: Aplikasi SMART update tanggal 7 Februari 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran BKKBN Tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.538.301.604.038 dari total pagu sebesar Rp 3.822.821.933.000 atau mencapai 92,56 persen dengan kategori sangat baik.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan baseline anggaran bersama dengan kementerian keuangan pada bulan Februari 2018;
2. Melakukan simulasi kerangka pengeluaran jangka menengah Tahun 2019-2022 yang hasilnya ditelaah bersama dengan Kemenkeu dan Kemen PPN/Bappenas pada bulan Februari 2018;
3. Melakukan pembahasan usulan Struktur Program Anggaran (SPA) dari masing-masing Unit Kerja Eselon II dengan

ancar-ancar alokasi anggaran yang mempertimbangkan capaian dan target kinerja program;

4. Melaksanakan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran terhadap pagu indikatif K/L tahun anggaran 2019 tanggal 25 Mei 2018 dan pagu anggaran tanggal 24 s.d 28 September 2018 bersama seluruh Satker Pusat dan Provinsi. Hasil konsolidasi dituangkan dalam rencana kerja anggaran yang selanjutnya diteliti oleh Biro Perencanaan dan di review oleh APIP;
5. Melakukan Rapat Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Radalgram KKBPK) setiap bulannya yang memberikan umpan balik pada seluruh satker pusat dan provinsi mengenai capaian kinerja program dan anggaran. Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi yang salah satunya fokus pada percepatan realisasi anggaran;
6. Mengupayakan katalog sektoral implan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di tahun anggaran 2019;

Tersedianya petunjuk teknis percepatan kegiatan pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan Pro PN di provinsi;

Peningkatan kinerja 17.447 PKB/PLKB yang memberikan dampak pada realisasi belanja pegawai BKKBN sebesar Rp 2.060.912.937.484; Dilakukan sosialisasi terhadap peraturan terkait dengan pengelolaan anggaran.

Faktor keberhasilan capaian realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh antara lain :

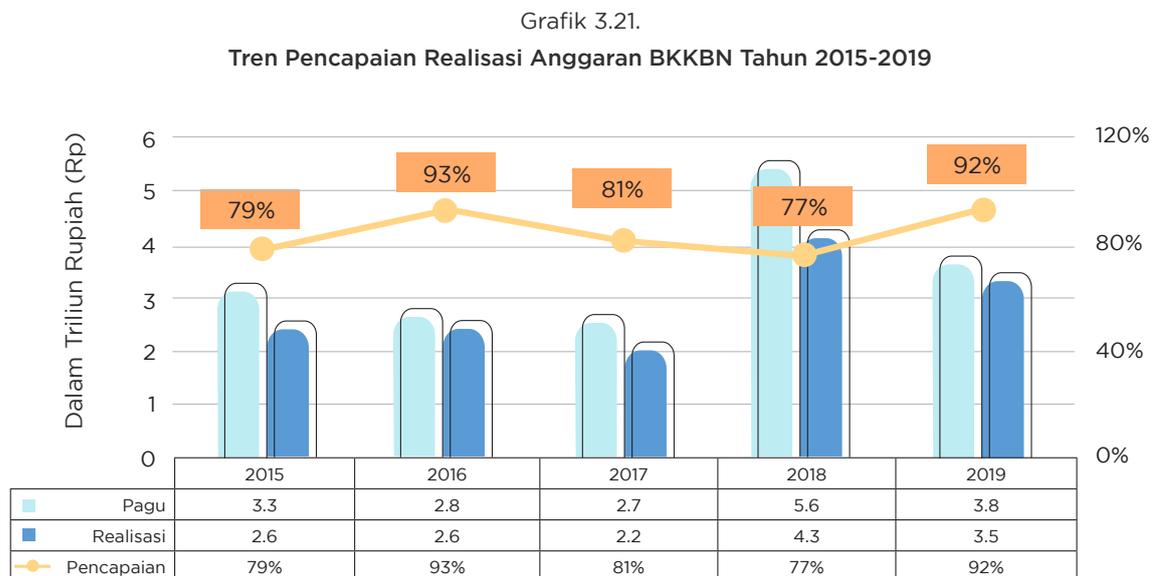
1. Komitmen Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu dalam pengalokasian anggaran terhadap pagu indikatif melalui pertemuan 3 pihak bersama dengan Kemenkeu dan Kemen PPN/ Bappenas terhadap

- pagu indikatif tanggal 25 April 2018 dan pagu anggaran tanggal 25 Juli 2018;
2. RKAKL terhadap pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran ditelaah secara tiga pihak bersama Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu terhadap pagu anggaran bulan Juni s.d Juli 2018 dan terhadap pagu alokasi anggaran bulan Oktober s.d November 2018. Dengan hasil akhir, penelaahan RKAKL terhadap pagu anggaran dan pagu alokasi telah sesuai dengan kaidah penganggaran dan fungsi BKKBN;
 3. Khusus untuk realisasi anggaran 5 output Pro PN BKKBN melakukan pemantauan secara triwulanan terhadap capaian program dan anggaran bersama dengan unit kerja penanggung jawab *output* Pro PN dan Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Adanya komitmen LKPP untuk membangun katalog sektoral bersama BKKBN.

1. Perubahan atau rotasi pejabat pengelola anggaran dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tidak adanya Pengguna Anggaran (PA) / Kepala BKKBN definitif sehingga mempengaruhi proses pencairan;
2. Adanya kebijakan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan serta pembayaran perhasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bulan Desember 2019 dibayarkan pada Bulan Januari 2020;
3. Selisih harga lebih rendah dalam dokumen pengadaan alokon implant setelah proses negosiasi dibandingkan dengan harga yang tertera dalam DIPA Satker 2019, sehingga mempengaruhi berkurangnya realisasi pengadaan alokon.

Adapun tren pencapaian realisasi anggaran periode tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam pada grafik di bawah ini :

Meskipun pencapaian sudah dalam kategori sangat baik sebesar 92,56% tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, antara lain:



Sumber : Aplikasi Smart update Tanggal 5 Februari 2020 (hasil pengolahan)

Secara nasional dalam periode waktu RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019 rata-rata realisasi penyerapan anggaran adalah 84,64%. Rata-rata penyerapan anggaran tersebut dapat dikatakan belum maksimal, hal ini disebabkan karena rendahnya anggaran pada tahun 2018 (77,1%) yang disebabkan terjadinya gagal lelang alat dan obat kontrasepsi di 19 Provinsi. Selain itu rendahnya realisasi anggaran pada program KKBPK juga diakibatkan karena adanya ketidaksinkronan regulasi dan pedoman pelaksana dari pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan klaim biaya penggerakan mekanisme operasional lini lapangan dan penggerakan pelayanan KB MKJP.

Realisasi penyerapan anggaran terbesar tercapai pada tahun 2016 (93,20%) yang disebabkan adanya surat Menteri Keuangan nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA.2016, terdapat perubahan pagu anggaran belanja BKKBN sehingga pagu BKKBN dari Rp 3.864.657.742.000,- berubah menjadi Rp 3.559.569.716.000,-. Kemudian berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA. 2016, maka BKKBN mengalami

blokir sebesar Rp 774.261.269.000,- sehingga pagu BKKBN setelah blokir adalah Rp 2.785.308.447.000,-. Kemudian terdapat tambahan dana hibah dalam dan luar negeri pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Banten serta Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta sebesar Rp 26.266.633.000,- sehingga total pagu akhir BKKBN sebesar Rp 2.811.575.080.000,-. Sedangkan realisasi total pagu sampai dengan Desember 2016 adalah Rp 2.620.199.415.129,- (93,2%).

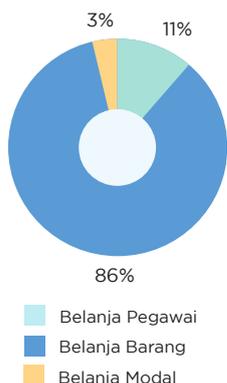
Pada akhir periode waktu RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019, BKKBN berhasil meningkatkan realisasi anggaran pada tahun 2019 menjadi 92,56%. Peningkatan realisasi anggaran tahun 2019 ini dipengaruhi kebijakan percepatan program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target dan sasaran RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019, serta percepatan kegiatan proyek prioritas nasional (Pro PN). Selain itu, terdapat percepatan pengadaan alokasi beserta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), termasuk pengadaan implant yang dilakukan melalui katalog elektronik sektoral BKKBN.

Realisasi anggaran pada BKKBN dalam periode tahun 2015-2019 diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

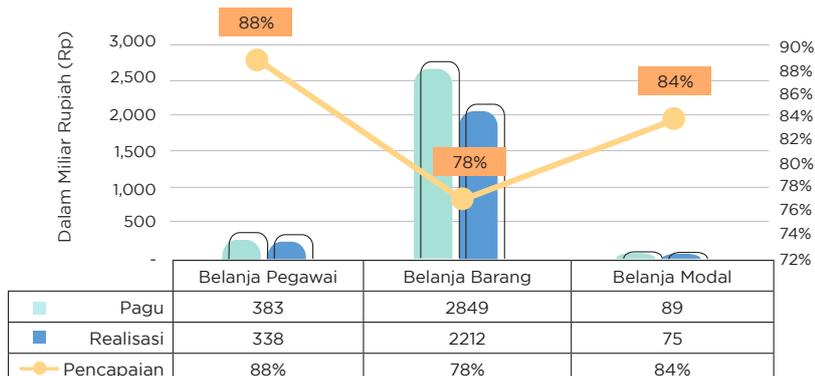
Grafik 3.22

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN Tahun 2015

Komposisi Alokasi Anggaran

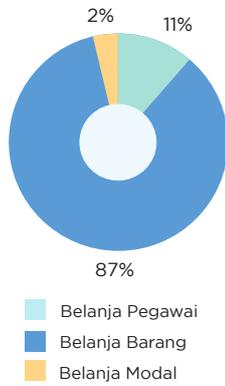


Komposisi Realisasi Anggaran

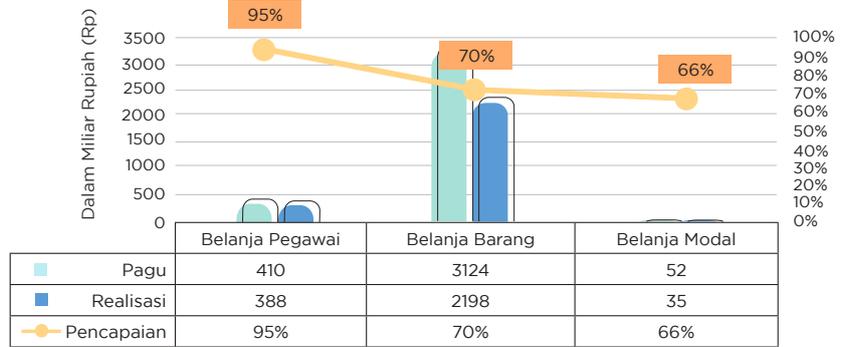


Grafik 3.23
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN
Per Jenis Belanja Tahun 2016

Komposisi Alokasi Anggaran

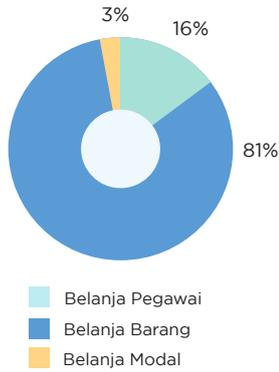


Komposisi Realisasi Anggaran

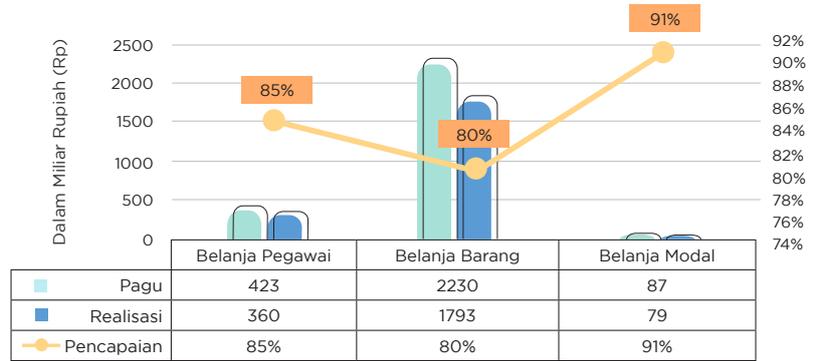


Grafik 3.24
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN
Per Jenis Belanja Tahun 2017

Komposisi Alokasi Anggaran

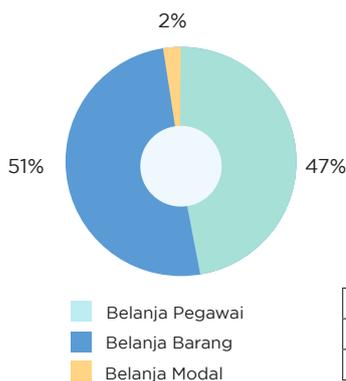


Komposisi Realisasi Anggaran

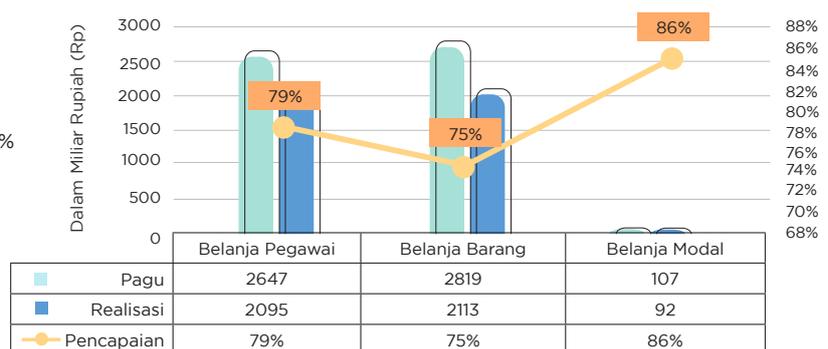


Grafik 3.25.
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN
Per Jenis Belanja Tahun 2018

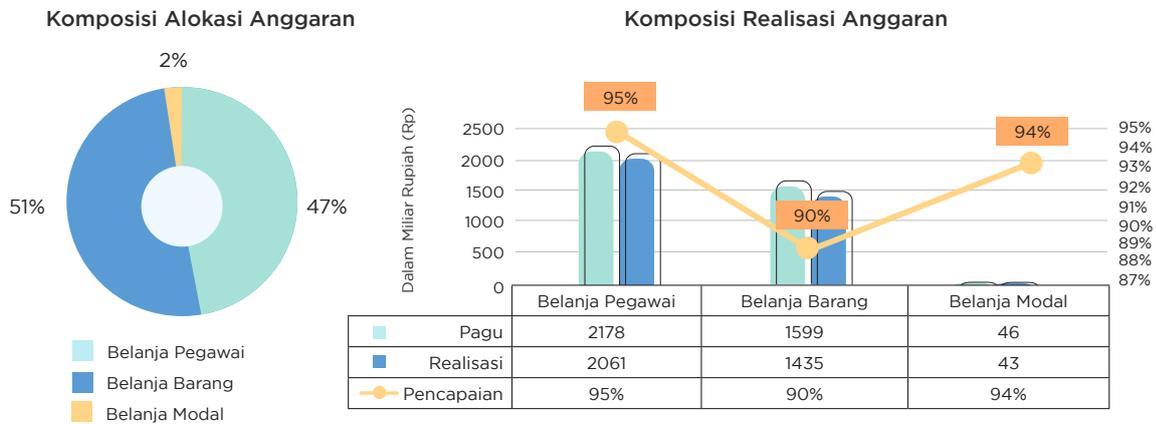
Komposisi Alokasi Anggaran



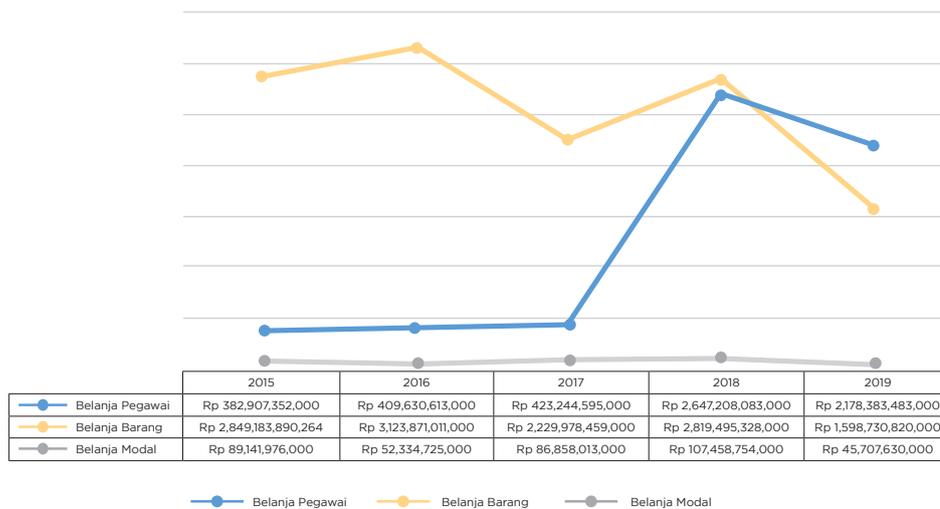
Komposisi Realisasi Anggaran



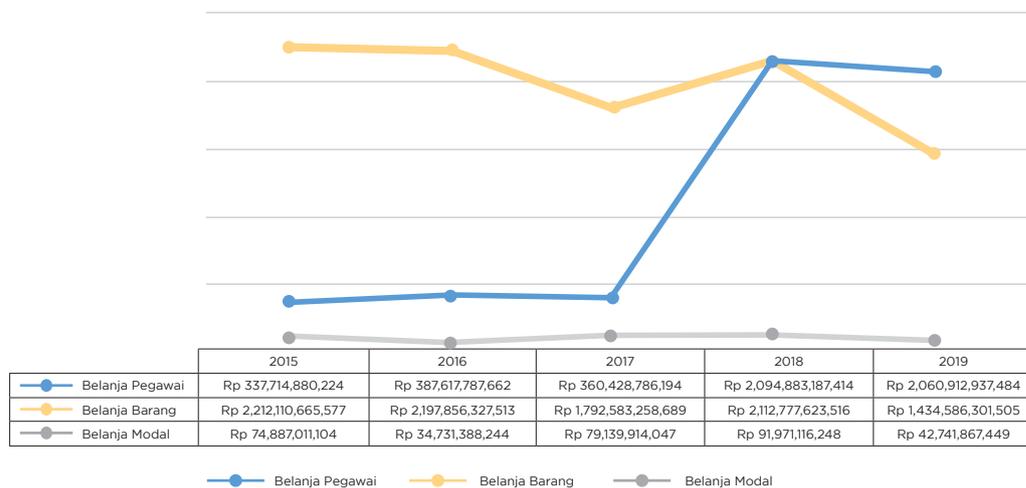
Grafik 3.26.
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran BKKBN
Per Jenis Belanja Tahun 2019



Grafik 3.27.
Tren Komposisi Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Periode Tahun 2015-2019



Grafik 3.28.
Tren Komposisi Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Periode Tahun 2015-2019



Alokasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2018 mengalami peningkatan dikarenakan kebijakan alih kelola 15.777 PKB/PLKB dari status pegawai ASN daerah menjadi pegawai pusat BKKBN. Hal ini mempengaruhi besarnya alokasi pagu BKKBN di tahun 2018. Dapat kita lihat trend alokasi belanja barang periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Kementerian

Keuangan khususnya terkait pengendalian belanja barang ke seluruh Kementerian/ Lembaga. Sementara itu alokasi belanja modal mengalami peningkatan di tahun 2018. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan prioritas khususnya untuk renovasi gedung/bangunan kantor, asrama, dan diklat. Realisasi anggaran BKKBN yang diklasifikasikan berdasarkan 4 program di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.72
Realisasi pagu anggaran per Program Tahun 2019

Program	2019		
	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (DKM)	2.466.512.841.000	2.334.423.691.607	94.64
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	13.245.071.000	12.478.400.276	94.21
Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta kerjasama internasional	129.157.928.000	122.152.525.443	94.58
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	1.213.906.093.000	1.069.246.986.712	88.08
Total	3.822.821.933.000	3.538.301.604.038	92.56

Sumber : Aplikasi Smart update Tanggal 5 Februari 2020

Adapun khusus untuk kegiatan proyek prioritas nasional realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 392.666.635.824 (82,17%). Realisasi

tersebut terbagi dalam 5 prioritas nasional yang dilaksanakan oleh BKKBN yaitu :

Tabel 3.73
Realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional TA 2019

Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	Pemenuhan ketersediaan alokon (faskes)	855.870.000	741.918.336	89.69%
Pengelolaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKBPK) Provinsi	Pemenuhan ketersediaan alokon (faskes)	382.832.604.000	303.608.147.714	79.31%
	Keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK	30.577.000.000	28.219.411.016	92.29%
	Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu (kelompok)	59.095.109.000	55.677.694.305	94.22%
	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan (kelompok)	4.515.000.000	4.419.464.453	97.88%
	Total	477.875.583.000	392.666.635.824	82.17 %

Sumber : Aplikasi Smart Update Tanggal 5 Februari 2020

Secara umum realisasi kegiatan proyek prioritas nasional (Pro PN) Tahun Anggaran 2019 dapat tercapai dengan baik. Realisasi kegiatan proyek prioritas nasional (Pro PN) menunjukkan bahwa output Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes menempati peringkat realisasi anggaran terendah yaitu sebesar 79,31%. Hal ini disebabkan karena harga satuan alokasi (implan) hasil negosiasi proses katalog sektoral BKKBN lebih rendah dari harga satuan pada saat perencanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2019. Selain itu juga

disebabkan adanya beberapa provinsi yang tidak dapat membeli BMHP secara lengkap (sudah tidak tayang di katalog nasional). Realisasi anggaran kegiatan Pro PN tertinggi pada *output* Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan yang mencapai 97,88%, yang disebabkan adanya sinergitas kegiatan antar unit kerja di lingkungan BKKBN serta lintas sektor (eksternal) dan adanya peningkatan produksi dan distribusi materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi. Lebih lanjut realisasi anggaran BKKBN per-indikator Sasaran Strategis BKKBN

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.74

Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	951.560.611.000	882.558.330.963	92,75
Persentase pemakaian kontrasepsi modern	671.029.881.000	633.363.992.904	94,39
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	575.055.851.000	544.948.584.393	94,76
Persentase peserta KB Aktif MKJP	719.703.948.000	679.969.818.518	94,48
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	905.471.642.000	797.408.619.659	88,07
Total	3.822.821.933.000	3.538.249.346.437	92.56

Sumber : data olahan dari Aplikasi SMART update tanggal 5 Februari 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum capaian realisasi anggaran per-indikator kinerja Sasaran Strategis BKKBN berdasarkan skala pengukuran kinerja dapat dikategorikan sangat baik ($\geq 90\%$). Sementara itu, untuk perbandingan realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 terhadap target tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.75

Perbandingan Target Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020

IKU	Target	
	2019	2020
Realisasi anggaran BKKBN	90 %	$\geq 95\%$

Sumber: Perjanjian Kinerja BKKBN 2020

Dalam upaya perbaikan capaian realisasi anggaran tahun 2020 akan dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan tender Pra DIPA telah dilakukan pada Bulan Desember 2019 dalam upaya percepatan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa 2020 yang terintegrasi dengan aplikasi SIRUP;
2. Peningkatan kinerja PKB/PLKB melalui peningkatan kompetensi teknis dan peningkatan versi aplikasi e-visum PKB/PLKB 3.1.2, sehingga diharapkan terjadi peningkatan realisasi tunjangan kinerja tenaga PKB/PLKB;
3. Penguatan sistem pengelolaan anggaran yang berbasis teknologi informasi dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan SDM serta sistem pengelolaan keuangan

Kemenkeu;

4. Peningkatan kedisiplinan pelaksana kegiatan terhadap AJK dan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta kedisiplinan dalam pemutakhiran

RPD;

5. Menetapkan keseragaman pengelola gaji antara BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk meningkatkan kapasitas para pengelola gaji melalui penetapan pola

B.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

pembinaan.

Realisasi anggaran BKKBN Tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.538.301.604.038 dari total pagu sebesar Rp 3.822.821.933.000 atau mencapai 92,56 persen. Dari sisa anggaran tersebut, nilai efisiensi yang dilakukan BKKBN pada tahun 2019 adalah Rp 284.520.328.962 atau mencapai 7,44 persen. Dari sisa anggaran tersebut, efisiensi yang dilakukan BKKBN pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Salah satu Indikator sasaran strategis BKKBN yaitu Indikator Persentase peserta KB Aktif MKJP, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 679.969.818.518 (94.4%) dari pagu Rp 719.703.948.000 dapat melebihi 100% pencapaian target dari 23,5% mencapai 24,6%. Alokasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian kinerja tersebut dapat dinyatakan efisien apabila hasil perbandingan masing-masing indikator sasaran strategis dengan realisasi anggarannya adalah positif.
2. Kebijakan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2019 dibayarkan pada Januari 2020 (membebani anggaran tahun 2020) karena menunggu dasar perhitungan pembayaran menggunakan Aplikasi SIPP (sesuai edaran Surat Sestama BKKBN Nomor: 3627/1/KU.01.04/B3/2019, tanggal 5 November 2019, tentang

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bagi pegawai ASN serta Pembayaran Penghasilan PPNPN bulan Desember 2019. Hal ini menyebabkan BKKBN melakukan nilai efisiensi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 118.470.545.516.

Upaya efisiensi yang akan dilakukan pada tahun 2020, antara lain :

1. Melakukan bedah anggaran 2020 bersama seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Unit Kerja Eselon II yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, yaitu :
 - a. Mengurangi belanja perjalanan dinas, paket meeting (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*).
 - b. Mengoptimalkan belanja anggaran yang langsung mendukung capaian kinerja *output* dan atau *outcome*.
 - c. Menetapkan *quick win* masing-masing unit kerja eselon 2 yang disertai dengan kebutuhan anggarannya.
2. Percepatan pengadaan alat dan obat kontrasepsi sampai dengan triwulan pertama.
 - a. Melakukan kajian ulang HPS Alkon untuk pemenuhan varian tambahan alkon sesuai dengan permintaan masyarakat.
 - b. Menumbuhkan budaya kerja berkinerja

C Kinerja dan Capaian Lain

C.1 Tingkat Nasional

dan *value for money*.

1. Opini BPK

Pada 12 September 2019 BKKBN berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2018 dapat dicapai antara lain melalui:

- Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan BMN yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan tahun 2018 dari sisi neraca laporan keuangan;
- Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan;
- Dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu serta meminimalkan terjadinya kesalahan dari tahap penganggaran, penatausahaan pertanggungjawaban;
- Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dalam memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran.

Walaupun opini BPK telah sesuai dengan target, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (a) transfer masuk dan transfer keluar yang disajikan pada laporan keuangan, (b) proses pelaporan, penyusutan, dan penghapusan asset memerlukan waktu yang lama. Upaya perbaikan untuk catatan tersebut yaitu: (a) melakukan koordinasi antara BKKBN (satker pusat dan provinsi) dengan stakeholder (Kementerian Keuangan, Bappenas, dan LKPP) terkait proses penyusunan laporan keuangan, (b) inovasi aplikasi keuangan pendukung



Gambar 3.9.
Penyerahan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BKKBN dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2019 Tanggal 12 September 2019

pengelolaan keuangan dan BMN.

2. Maturitas SPIP

Inspektorat Utama mengajukan permohonan fasilitasi peningkatan maturitas SPIP di Lingkungan BKKBN melalui surat Inspektur Utama kepada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor : 2393/PW.08/C/2018 Tanggal 12 September 2018. Menindaklanjuti surat tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menugaskan tim untuk melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP di lingkungan BKKBN.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan terhadap 59 (lima puluh sembilan) unit kerja baik di BKKBN Pusat maupun di Perwakilan BKKBN Provinsi. Mekanisme penilaian maturitas melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu penilaian mandiri oleh unit kerja, pengujian bukti dan penilaian sementara oleh tim asesor internal dari Inspektorat Utama, serta *quality assurance* oleh Tim QA dari BPKP. Berdasarkan surat Kepala BPKP Nomor LQA 121/D204/2019 Tanggal 5 Desember 2019 dinyatakan bahwa Level Maturitas SPIP BKKBN

berada pada level 3,285 “Terdefinisi”.

3. BMN Awards



Gambar 3.10.
Penghargaan BMN Award dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2019, Tanggal 12 September 2019

Kementerian Keuangan memberikan apresiasi kepada BKKBN sebagai salah satu Kementerian/ lembaga (K/L) yang telah berhasil mengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan baik melalui BMN Award sebagai juara II dalam kategori Utilisasi BMN. Penghargaan disampaikan pada tanggal 12 September 2019 di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 diterima oleh Sestama BKKBN. Kementerian Keuangan memberikan apresiasi kepada BKKBN yang telah menggunakan atau mengutilisasi, melaporkan,

dan mengamankan BMN. Penghargaan ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN. Melalui BMN Award ini BMN berhasil mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep atau cara kerja baru yang mengikut perkembangan teknologi digital, karena BKKBN telah melakukan kerja sama pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa menyewa aset untuk kantor Bank (BRI dan BNI), ATM (BRI dan BNI), Sewa *Guest House* dan Sewa Ruang Pertemuan. Utilisasi BMN ini dapat menambah Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP) bagi negara.

4. Mobile SIMSDM

BKKBN selalu berusaha untuk mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam seluruh bisnis proses kepegawaian. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Pada tahun 2019 BKKBN melakukan inovasi aplikasi mobile SIMSDM berbasis android sehingga akses pegawai terhadap pelayanan kepegawaian menjadi lebih mudah.

5. Whistle Blowing System

Dalam rangka meningkatkan integritas di lingkungan BKKBN telah dikembangkan whistle blowing system. Hal ini merupakan salah satu sistem penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.



Gambar 3.11
Screenshoot
SIM SDM BKKBN



Gambar 3.12.
Tangkapan Layar
Whistle Blowing System



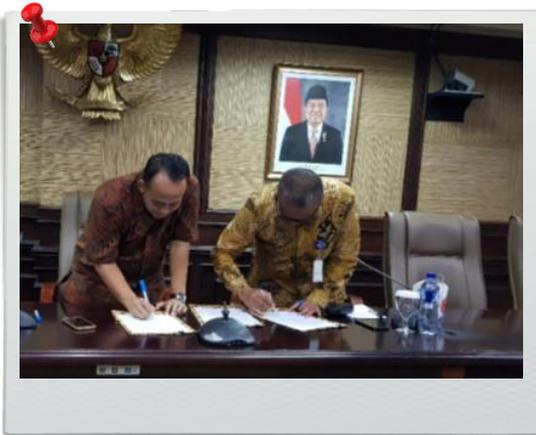
Gambar 3.13.
Penghargaan PR Indonesia Award kategori media massa dari
Asosiasi Public Relations (PR) RI Tahun 2019, Tanggal 28 Maret 2019

6. Public Relation Award

BKKBN berhasil memperoleh apresiasi dari Asosiasi Public Relation (PR) atas kinerjanya di bidang media massa, hingga menerima penghargaan PR Indonesia Award (PRIA 2019)

untuk kategori media sosial. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang ke-3 untuk BKKBN berturut-turut di ajang tahunan PRIA yang sudah terlaksana selama 4 tahun.

7. Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV



Gambar 3.14.

Penandatanganan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi



Gambar 3.15.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV

Pusdiklat Kependudukan dan KB pada tahun 2019 telah mengajukan reakreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan berdasarkan hasil penilaian pada Sidang Penilaian Akreditasi LAN untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III diperoleh nilai 88,98 (Akreditasi B) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diperoleh nilai 88,83 (Akreditasi B). Adapun unsur/indikator penilaian akreditasi tersebut antara lain meliputi 1) Organisasi

Lembaga Diklat; dan 2) Program Diklat dan Pengelola Program Diklat. Penilaian pada indikator organisasi lembaga Diklat meliputi 5 sub unsur, antara lain ketersediaan tenaga diklat, ketersediaan Renstra, ketersediaan penjaminan pembiayaan, ketersediaan fasilitas diklat dan ketersediaan penjaminan mutu diklat. Sedangkan penilaian pada indikator Program Diklat dan Pengelola Program Diklat meliputi 2 sub unsur, antara lain ketersediaan kurikulum dan pengelolaan Diklat yang memenuhi standar.

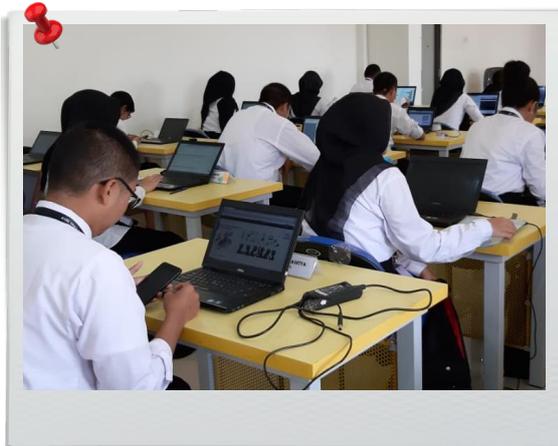
8. Penerapan E-Learning dalam Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Dasar CPNS

Pusdiklat KKB bekerjasama dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, pada tahun 2019 telah menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi pada Pelatihan Teknis Dasar-dasar Demografi dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III. Pengembangan *E-Learning* dilaksanakan Pusdiklat KKB sebagai tindak lanjut amanat UU No.5 tahun 2014 tentang ASN serta PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana PNS berhak memperoleh pengembangan

kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun yang dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan, serta PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS: Pasal 203 ayat (4) pengembangan kompetensi dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, serta Pasal 210 ayat (2) pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan; dan 3) Per LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi



Gambar 3.16.
Screenshot e-learning BKKBN



Gambar 3.17.

Peserta Pelatihan Dasar mengikuti Tes Potensi Akademik secara Online pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019



Gambar 3.18.

Peserta Pelatihan Dasar mengikuti Tes Pembelajaran secara Online pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019

PNS: Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal (*E-Learning, coaching, mentoring, magang/praktik kerja, belajar mandiri*). Pelatihan *E-Learning* ini dapat diakses melalui link: elearning.bkkbn.go.id. Pada tahun 2020, BKKBN akan bekerjasama

dengan Direktorat Bina Lini Lapangan serta JH CCP untuk mengembangkan konten media pembelajaran berbasis teknologi informasi serta pengembangan platform *E-Learning* utamanya untuk mendukung pengembangan kompetensi Penyuluh KB.

9. Penerapan ZI-WBK di lingkungan BKKBN

BKKBN telah mengusulkan 8 unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yakni: Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) dinilai dan ditetapkan sebagai unit kerja yang berpredikat “Wilayah Bebas



Gambar 3.19.

Penyerahan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Bangka Belitung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun 2019, Tanggal 10 Desember 2019

dari Korupsi” (WBK). Berdasarkan usulan tersebut, KEMENPANRB pada Tahun 2019 telah menetapkan 2 (dua) unit kerja yaitu unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebagai unit kerja “Wilayah Bebas dari Korupsi”. Keberhasilan ini menjadi modal dasar dalam rangka menyongsong era RPJMN baru melalui penetapan target yang lebih baik dalam Renstra BKKBN tahun 2020-2024.

10. Pembangunan *Prototype* E-Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan prinsip *strategic management office* bahwa pengembangan kinerja harus dapat menggambarkan pengintegrasian antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Pembangunan e-kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim. Melalui aplikasi ini dapat diketahui pencapaian nilai kinerja organisasi dan mendokumentasikan seluruh dokumen perencanaan dalam rangka evaluasi periodik pencapaian kinerja baik organisasi maupun individu. Penjabaran kinerja organisasi yang diturunkan kepada kinerja individu telah dilakukan melalui *cascading* perjanjian kinerja eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan Provinsi seluruh Indonesia. Kinerja individu tersebut akan ditampilkan dalam bentuk form Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berisi kegiatan utama (berdasarkan *cascading* perjanjian kinerja) dan kegiatan tambahan.

Sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB bahwa pemantauan pencapaian kinerja di lingkungan BKKBN belum dilakukan secara berkala dan belum berbasis teknologi informasi. Aplikasi e-kinerja ini merupakan upaya pemenuhan *quick wins* pokja akuntabilitas seperti yang tertuang dalam Perka BKKBN No. 9 Tahun 2017 tentang road map RB di BKKBN dan upaya penyelarasan kinerja organisasi dan individu. Pembangunan e-kinerja yang terintegrasi dengan manajemen kinerja *Balanced Scorecard* (BSC) ini memungkinkan pimpinan dapat memantau secara langsung dan berjenjang atas capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja pada seluruh level jabatan termasuk capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.



Gambar 3.20. Tangkapan Layar *Prototype* e-Kinerja



Gambar 3.21. Tangkapan *Dashboard Prototype* e-Kinerja

C.2 Tingkat Internasional

1. Ketua Delegasi RI pada The Nairobi Summit on ICPD 25 : Accelerating the Promice, Nairobi, Kenya, 12 – 15 November 2019

Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala BKKBN mengikuti Nairobi Summit on International Conference on Population and Development (ICPD 25) di Nairobi, Kenya, pada 12-14 November 2019. Delegasi RI terdiri dari unsur BKKBN, Kemkes, KemenPPN/Bappenas, KPPPA, Kemlu, PTRI New York dan KBRI Nairobi. Kepala BKKBN dan seluruh Delegasi RI diterima oleh Duta Besar RI di Aula Kedutaan Besar RI untuk Nairobi pada tanggal 11 November 2019.

Kepala BKKBN menghadiri pembukaan Nairobi Summit yang dibuka oleh Direktur Eksekutif UNFPA Dr. Natalia Kanem, Y.M. Crown Princess Mary dari Denmark, Deputi Sekjen PBB Y.M. Amina Mohammed, Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Denmark Y.M. Rasmus Prehn, dan Presiden Kenya Y.M. Uhuru Kenyatta. Kepala BKKBN memberikan Indonesia statement di Nairobi Summit tentang “Ending Unmet Need for Family Planning, Preventable Maternal Death, and Violence and Harmful Practices Against



Gambar 3.22.
Kegiatan ICPD 25 tanggal 12 – 14 November 2019 di Nairobi, Kenya

Women and Girls in Indonesia” (statement terlampir) pada tanggal 13 November 2019.

Adapun hasil dari pertemuan tersebut, maka rekomendasi yang dikeluarkan adalah BKKBN dan seluruh kementerian yang terkait dengan target 3 Zero agar dapat segera menyusun dokumen terkait progress Indonesia terkait 3 Zero’s. Serta memperhatikan kembali komitmen global khususnya ICPD+25, dengan tetap berada pada koridor pemerintah RI.

2. Sharing Experience Program KKBPK dengan Crown Princess of Denmark di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2 – 4 Desember 2019

BKKBN bekerjasama dengan UNFPA menerima kunjungan Delegasi dari Kerajaan Denmark HRH Crown Princess Mary bersama dengan Executive Director UNFPA Dr. Natalia Kaneem pada tanggal 2 s.d 4 December 2019. Adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk berbagi pengalaman Indonesia terkait implementasi ICPD, sekaligus dalam rangka merayakan 70 tahun kerjasama bilateral antara Kerajaan Denmark dengan Indonesia.

HRH Crown Princess Mary bersama dengan Executive Director UNFPA Dr. Natalia Kaneem mengunjungi beberapa lokasi untuk sharing experience khususnya tentang program KKBPK.

Adapun lokasi kunjungan lapangannya, antara lain :

- Ikatan Bidan Indonesia, untuk berdialog dengan Ikatan Bidan Indonesia.
- Kedai Kolega, untuk berdialog dengan remaja dan petugas kesehatan dengan tema “Access To Youth-Friendly Sexual And Reproductive Health Services And Information”.
- Puskesmas Tegalrejo, untuk berdialog dengan tema “Sexual and Reproductive Health Services in the Context of the National Health Insurance Scheme and Decentralization”.
- KUA Gondomanan tentang “Advocacy in Family Planning and Male Involvement”.



Gambar 3.23. Kegiatan *Sharing Experience Program* KKBPK dengan *Crown Princess of Denmark* di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tanggal 2 - 4 Desember 2019

3. Pengembangan MoU

Dalam rangka pengembangan kerja sama internasional Pusat Pelatihan dan Kerja sama Internasional telah melaksanakan penandatanganan MOU atau kesepakatan

kerja sama yang di lakukan oleh Pulin. Adapun bentuk implementasi dari MOU tersebut adalah sebagai berikut yaitu :

a. Pemerintah Seychelles dan *Population Commission (PopCom)* of The Philippines melalui pelaksanaan Program KKBPK

Kerjasama BKKBN dengan Pemerintah Seychelles telah dilaksanakan melalui pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sehat dengan melibatkan Direktorat Analisis Dampak Penduduk. Kedua belah pihak sepakat mengembangkan *pilot*

project/daerah percontohan di Kulon Progo untuk pengembangan program Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sehat. Selanjutnya BKKBN juga menandatangani kerjasama BKKBN dengan Popcom The Philippines.



Gambar 3.24. Penandatanganan MoU BKKBN dengan Pemerintah Seychelles dan Popcom The Philippines

b. Pemerintah Tunisia melalui pelaksanaan *Need Assessment Program* bidang Keluarga Berencana

BKKBN dengan Pemerintah Tunisia telah melakukan koordinasi melalui pelaksanaan *Need Assesment Program* bidang Keluarga Berencana. Pemerintah Tunisia sangat

berharap dapat mendapatkan pembelajaran suksesnya pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia.

c. JHUCCP melalui pelaksanaan program *My Choice*, Remaja, dan *Rebranding*

Kerjasama BKKBN dengan JHUCCP juga telah diimplementasikan dalam beberapa kegiatan melibatkan beberapa komponen program terkait seperti Dithanrem dengan program remaja-nya serta Kedepujian KBKR

dengan program *My Choice* dan manajemen rantai pasok alat dan obat kontrasepsi. Serta rebranding BKKBN melibatkan JHUCCP sebagai salah satu konsultan dan sponsor.

d. Rumah Sakit Universitas Indonesia tentang pembentukan *Center of Excellent (CoE) Pelatihan Program KB*

BKKBN, UNFPA dan Sekretariat Negara juga berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama dengan Universitas Indonesia melalui Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kerjasama tersebut dalam rangka pengembangan *International Training on Family Planning Services*.



Gambar 3.25
Penandatanganan MoU BKKBN dengan Universitas Indonesia

4. BKKBN sebagai Pusat Rujukan Negara Sahabat untuk *Sharing Best Practice* dalam Program KKBPK

Selama tahun 2019, BKKBN menerima tamu dari Negara sahabat untuk sharing best practice tentang program KKBPK dalam semangat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, atas kerja sama Sekretariat Negara RI dan UNFPA. BKKBN

sebagai *implementing agency* dan Negara rujukan dalam bidang KKBPK telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menyelenggarakan berbagi pengalaman dengan negara-negara di benua Asia dan Afrika.

Pada tahun 2019, BKKBN telah menyelenggarakan beberapa Pelatihan Internasional antara lain:

- a. *International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates* 18-29 Maret 2019;



Gambar 3.26.
Peserta *International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates* 18-29 Maret 2019

b. *Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs) 21-28 April 2019;*



Gambar 3.27.

Peserta *International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates*, Tanggal 18-29 Maret 2019



Gambar 3.28.

Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs) di Kota Solo, Jawa Tengah

c. *International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services 11 September – 2 Oktober 2019;*



Gambar 3.29.

Peserta *International Training on Comprehensive Right Based Family Planning Services for Afghanistan Delegates* 18-29 Maret 2019

d. *Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders 27 Oktober – 2 November 2019;*



Gambar 3.30.

Peserta *Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders* di Kota Surabaya, Jawa Timur



Gambar 3.31.

Peserta Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders Kunjungan di Pusyan Gatra, Kota Surabaya, Jawa Timur

e. Knowledge Sharing Program on Family Planning Reproductive Health for Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara - Malaysia, 16-21 Desember 2019.



Gambar 3.32.

Peserta Knowledge Sharing Program on Family Planning Reproductive Health for Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara-Malaysia, di D.I.Yogyakarta

f. Short Course on Bridging Leadership for Mayor of District 8-10 Oktober 2019



Gambar 3.33.

Peserta Short Course on Bridging Leadership for Mayor of District, di Kota Jakarta

g. *Scoping Mission Demographic Dividend for The Phillipines Delegates, 29 Juli – 2 Agustus 2019*



Gambar 3.34.

Peserta coping *Mission Demographic Dividend* for The Phillipines Delegates



Gambar 3.35.

Peserta *Frame Work of SSTC Between Indonesia and Philippines*, Tapos, Depok

D Evaluasi Kinerja

1. Review Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN No. 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra BKKBN berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019. Renstra BKKBN memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan BKKBN untuk tahun 2015-2019.

Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap triwulan atas program dan kegiatan dalam Renja dan disampaikan ke Bappenas melalui aplikasi e-money Bappenas. Selanjutnya, sesuai Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2006 diamanatkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana. Untuk itu, BKKBN telah melakukan evaluasi capaian RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019 paruh waktu.

2. Review Pengelolaan Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi internal serta pemanfaatan hasilnya dalam meningkatkan kinerja dilakukan melalui :

- a. Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Radalgram KKBPK) berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 445/PER/G4/2016. Radalgram KKBPK dilaksanakan secara berkala setiap bulan dipimpin oleh Kepala BKKBN

atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mewakili melalui *video conference* dengan seluruh perwakilan BKKBN Provinsi di Indonesia. Radalgram KKBPK difokuskan pada pembahasan materi analisis dan evaluasi Program KKBPK, realisasi anggaran KKBPK dan stok alat dan obat kontrasepsi (alokon) serta penyajian materi pendukung lainnya. Dalam Radalgram KKBPK juga dibahas evaluasi atas Perjanjian Kinerja Tahunan (yang mengacu pada Renja) sehingga dapat selalu mendapatkan *update* tentang pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja.

- b. Telaah Tengah Tahun (*Review*) Program KKBPK dilakukan secara rutin setiap tengah tahun untuk mengetahui gambaran pencapaian kinerja masing-masing unit kerja sekaligus sebagai evaluasi atas kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis.
- c. Optimalisasi percepatan pencapaian target kinerja BKKBN melalui penetapan *Quick Wins*.

3. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BKKBN telah melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dipandang perlu sebagai tools untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah

- b. Menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah;
- c. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal instansi pemerintah periode sebelumnya.

Di samping itu, melalui PMPRB ini diharapkan dapat meningkatkan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi BKKBN oleh Kementerian PAN dan RB. Evaluasi atas penyelenggaraan

RB Kementerian Keuangan tahun 2018 telah dilaksanakan ditahun 2019 terhadap 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat BKKBN tahun 2018 adalah 68,70 dengan predikat B atau baik, dengan rincian

Tabel 3.76
Evaluasi PMPRB Periode Tahun 2015 - 2018

No	Komponen Penilaian	Bobot	2017	2018
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	2,37	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,09	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3,51	3,76
4	Penataan Tatalaksana	5	3,38	3,22
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,31	12,15
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,12	3,47
7	Penguatan Pengawasan	12	7,87	6,81
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,48	3,67
	Total Pengungkit	60	39,13	37,62
B	Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,11	8,87
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,15	4,48
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	6,04	6,24
	Opini BPK	3	2,00	3,00
	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,22	8,49
	Total Hasil	40	29,52	31,08
	INDEKS RB	100	68,65	68,70

Hasil evaluasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, yaitu 68,65. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB di BKKBN telah dijalankan dengan baik namun perlu sedikit perbaikan. Adapun perbaikan yang perlu segera dilaksanakan yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi berdasarkan uraian tugas serta ukuran keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai;
2. Memetakan ASN daerah yang baru bergabung karena amanat UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- sebanyak 15.141 orang terkait pemahaman atas RB dan kemungkinan tingginya tingkat resistensi terhadap program RB dari pusat;
3. Menerapkan manajemen SDM berbasis merit sistem sesuai dengan UU ASN nomor 5 Tahun 2014 dan PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dengan ditetapkannya PP nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempertegas larangan untuk mengangkat tenaga honorer di lingkungan BKKBN;
4. Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala, melakukan

penyelarasan antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan terhadap hasil/kinerja tersebut, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya

5. Menentukan tim evaluasi kelembagaan tidak hanya dari kapasitas pengetahuan pegawai yang mengerti tentang perkembangan BKKBN, tetapi juga harus memiliki wawasan memadai tentang kelembagaan instansi pemerintah, baik dari sisi konsep maupun kebijakan, serta memiliki kemampuan melakukan analisis organisasi yang tajam, komprehensif dan sistematis sesuai dengan tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 Tahun 2018;
6. Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
7. Mengisi jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama yang masih dirangkap oleh pejabat lain antara lain Kepala BKKBN, Deputi ADPIN, Deputi Dalduk dan 11 (sebelas) jabatan pimpinan tinggi pratama;
8. Melakukan evaluasi atas penanganan gratifikasi, implementasi kebijakan *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan unit kerja sebagai zona integritas, secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;
9. Melanjutkan pembinaan unit kerja yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
10. Mengembangkan survey kepuasan masyarakat secara berkala yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi/ pelayanan yang diberikan, serta menindaklanjuti setiap hasil survei dalam upaya memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan;
11. Memberikan sanksi/penghargaan (*reward/ punishment*) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar baku.

Upaya yang telah dilakukan BKKBN sebagai tindak lanjut perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2019 antara lain:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi,
4. Penataan Tatalaksana,
5. Penataan Sistem SDM
Mengisi jabatan pimpinan tinggi utama, dan pratama antara lain Kepala BKKBN, dan 11 (sebelas) jabatan pimpinan tinggi pratama,
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
 - a. BKKBN mendapatkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,285 dan Kapabilitas APIP level 3 sesuai dengan target roadmap reformasi Birokrasi
 - b. Melakukan sosialisasi implementasi pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan kepada seluruh unit kerja pusat dan provinsi melalui *video conference* pada tanggal 11 oktober 2019
 - c. Membangun saluran pengaduan *whistle blowing system* berbasis web,
 - d. Terdapat 2 unit kerja yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Kep. Bangka Belitung yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB
 - e. Menetapkan 42 unit kerja percontohan pembangunan ZI WBK/WBBM melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor 76/KEP/C/2019 tentang Penetapan Satuan Kerja/ Unit Kerja Percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan BKKBN
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya tindak lanjut perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2020 :

1. Menetapkan indikator RB menjadi salahsatu IKU dalam Renstra 2020-2024 dengan target 80;
2. Menetapkan target RB sebesar 23 untuk seluruh unit kerja baik pusat maupun provinsi, serta mencascading dalam Perjanjian Kinerja 2020;

3. Menyusun Tim RB untuk periode 2020-2024;
4. Menyusun *Roadmap* Pelaksanaan RB 2020-2024;
5. Menyusun Rencana kerja RB untuk masing-masing unit kerja sebagai pedoman peningkatan kinerja RB;
6. Penandatanganan akta pernyataan dan maklumat bersama dnegan melakukan cap jempol darah yang disaksikan oleh notaris;
7. Penandatanganan dan pembacaan Pernyataan Komitmen Penolakan Gratifikasi Kepala BKKBN dan PTM dalam Rakernas Program Banggakencana Tahun 2020.

4. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

BKKBN telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas unit organisasi eselon I dan II dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi SAKIP tersebut dipandang perlu sebagai tools untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Di samping itu, melalui Evaluasi SAKIP unit kerja ini diharapkan dapat meningkatkan nilai hasil evaluasi SAKIP BKKBN oleh Kementerian PAN dan RB. Evaluasi atas implementasi SAKIP BKKBN tahun 2018 telah dilaksanakan di tahun 2019 terhadap 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tingkat BKKBN tahun 2018 adalah 64,53 dengan predikat B atau baik, dengan rincian:

Tabel 3.77

Evaluasi SAKIP BKKBN Periode Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Bobot	2015	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,65	20,85	20,56	20,78
2	Pengukuran Kinerja	25,00	16,13	14,41	13,91	14,43
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,87	10,08	10,10	10,14
4	Evaluasi Kinerja	10,00	6,96	5,89	6,01	6,05
5	Capaian Kinerja	20,00	12,09	13,91	12,79	13,13
TOTAL		100	67,60	65,14	63,37	64,53
PREDIKAT			B	B	B	B

Hasil evaluasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, yaitu 63,37. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di BKKBN telah dijalankan dengan baik namun perlu sedikit perbaikan. Adapun perbaikan yang perlu segera dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan RENSTRA BKKBN dengan merumuskan indikator kinerja tujuan BKKBN dan indikator kinerja yang akan mengukur keberhasilan pengendalian penduduk sesuai mandat yang diterima BKKBN berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009. Hasil *review*

renstra tersebut dapat digunakan dalam penyusunan Renstra BKKBN periode tahun 2020-2024.

2. Menyempurnakan kembali perjenjangan kinerja (*cascading*) BKKBN sedemikian rupa sehingga terlihat keselarasan indikator kinerja mulai dari tingkat lembaga sampai unit kerja terendah bahkan sampai dengan tingkatan individu dengan melakukan analisis terhadap hubungan/ turunan kinerja dari Kepala Badan ke unit kerja dibawahnya sampai dengan unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja BKKBN.

3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian kinerja yang mencantumkan target triwulanan untuk digunakan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dan memantau (*monitoring*) capaiannya berikut dengan analisis ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja secara berkala setiap triwulan.
4. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja (*e-Performance*) yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan BKKBN.

Upaya yang telah dilakukan BKKBN sebagai tindak lanjut perbaikan implementasi SAKIP pada tahun 2019 antara lain:

1. Menyusun Renstra BKKBN periode tahun 2020-2024 dengan merumuskan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja yang akan mengukur keberhasilan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai mandat yang diterima BKKBN berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009.
2. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian kinerja yang mencantumkan target triwulanan untuk digunakan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan memantau (*monitoring*) capaiannya berikut dengan analisis ketercapaiannya/tidak tercapainya kinerja secara berkala setiap triwulan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan BKKBN, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

E Perbaiki Perencanaan Program dan Anggaran TA 2020

Perbaikan perencanaan Tahun Anggaran 2020 dilakukan untuk mengantisipasi adanya penurunan alokasi anggaran Program KKBPK TA 2020 yang cukup signifikan. Total pagu anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.3.581.554.060.000, baik untuk Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2019 yang sebesar Rp 3.822.821.933.000,- maka terdapat penurunan Rp. 241.267.873.000,- Dengan kondisi tersebut maka diperlukan peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Penggunaan anggaran dituntut agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Langkah perbaikan dilakukan antara lain dengan bedah anggaran Tahun 2020 pada 42 Satuan Kerja yang terdiri 9 Satker di BKKBN Pusat dan 33 Satker Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi. Tujuan bedah anggaran adalah untuk mengidentifikasi kembali alokasi anggaran yang telah dituangkan ke dalam RKAKL 2020 untuk dimanfaatkan (realokasi) ke dalam kegiatan yang lebih prioritas sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: 220/I/RC.01/B1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Tindak lanjut Rapimtas Penjabaran Rancangan Renstra BKKBN 2020-2024 dan bedah anggaran dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Memastikan alokasi anggaran untuk mendanai *Quick Wins* (QW) tahun 2020 yang telah ditetapkan, dengan prinsip bahwa QW adalah kegiatan yang tidak membutuhkan sumber daya yang besar tetapi memiliki dampak yang besar terhadap capaian *output* kegiatan.
2. Melakukan efisiensi terhadap anggaran berjenis akun perjalanan dinas dan melakukan revisi untuk kegiatan yang bisa langsung memberikan dampak pada capaian *outcome* serta bermanfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
3. Memastikan alokasi anggaran yang dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi seperti kegiatan yang mendukung SPIP, ZI WBK, atau yang sejenis per unit kerja eselon 1 dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi,
4. Revisi kegiatan tidak diperjkenankan pada kegiatan dengan tagging Pro PN, kegiatan kemitraan dan akun belanja modal.
5. Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000 per unitkerja eselon 1 untuk mendukung kegiatan *omnibus law*.

Penjelasan hubungan sebab akibat masing-masing unit eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.78

Dukungan Unit Eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2015-2019

No.	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Dukungan Unit Eselon I	
		Program Utama	Program Generik
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	Deputi Bidang KBKR	1. Sekretaris Utama 2. Irtama 3. Deputi Bidang Latbang
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	Deputi Bidang KBKR	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	Deputi Bidang ADPIN	
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Deputi Bidang KBKR	
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	Deputi Bidang ADPIN	

Berdasarkan tabel di atas, beberapa unit kerja eselon I Program Utama dapat dipetakan memiliki hubungan sebab akibat terhadap pencapaian 5 (lima) ISS dalam Renstra BKKBN 2015-2019, sedangkan unit kerja eselon I program generik dipetakan mendukung seluruh pencapaian ISS. Adapun, pada tahun 2018 dilakukan perbaikan melalui penetapan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 bahwa Persen Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menjadi Indikator Kinerja Tujuan, sehingga dapat dipetakan bahwa Deputi Bidang Pengendalian Penduduk memiliki hubungan sebab akibat terhadap capaian ISS BKKBN. Namun demikian, untuk Deputi bidang

KSPK belum menjelaskan secara spesifik memiliki hubungan sebab akibat terhadap 5 (lima) ISS dalam Renstra BKKBN 2015-2019. Oleh karena itu, hasil telaah terhadap Renstra 2015-2019 perlu dirumuskan ISS yang secara spesifik memiliki hubungan sebab akibat terhadap setiap unit kerja eselon I.

Dalam merencanakan perumusan ISS Periode Renstra BKKBN 2020-2024 telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan ISS mengacu kepada hasil telaah Renstra BKKBN 2015-2019. Adapun rumusan ISS yang telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Renstra BKKBN 2020-2024 dapat dijelaskan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.79

Dukungan Unit Eselon I terhadap Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

No.	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Dukungan Unit Eselon I	
		Program Utama	Program Generik
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	1. Sekretaris Utama 2. Irtama 3. Deputi Bidang Latbang
2	Angka prevelensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	Deputi Bidang KBKR	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	Deputi Bidang ADPIN dan Deputi KBKR	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Deputi Bidang KBKR	
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	Deputi Bidang KSPK	
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Deputi Bidang KSPK	

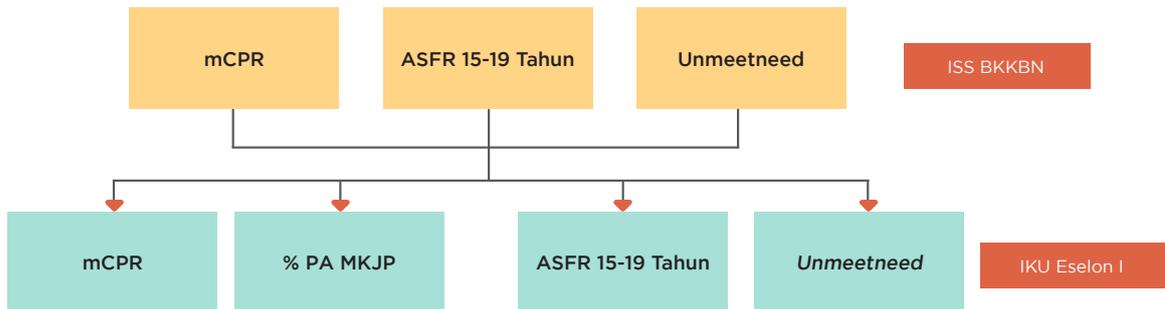
Berdasarkan tabel di atas, seluruh unit kerja eselon I Program Utama dapat dipetakan secara spesifik memiliki hubungan sebab akibat terhadap pencapaian seluruh ISS dan unit kerja eselon I program generik mendukung seluruh pencapaian ISS dalam Renstra BKKBN 2020-

2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh unit kerja eselon I telah dapat dipetakan hubungan fungsional terhadap pencapaian ISS BKKBN dalam dengan penjelasan sebagai berikut:

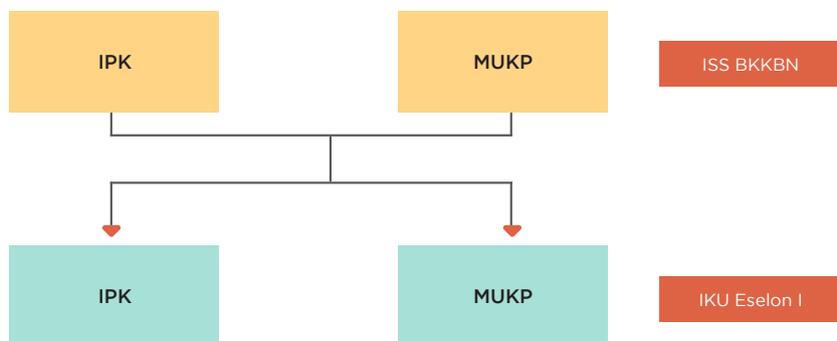
1. Hubungan Fungsional Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Pengendalian Penduduk terhadap ISS BKKBN



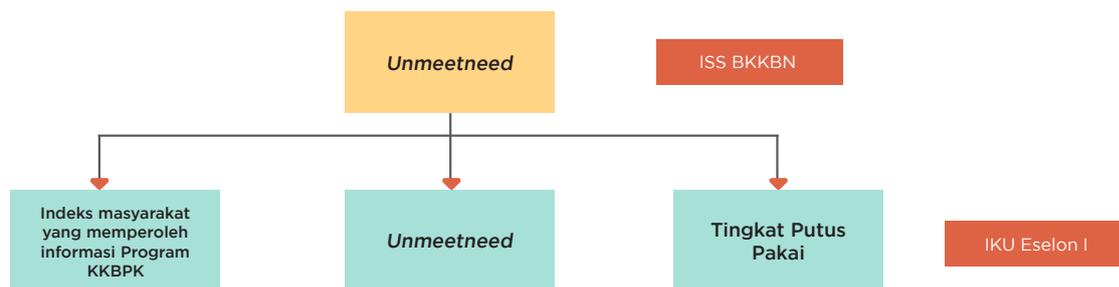
2. Hubungan Fungsional Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi KBKR terhadap ISS BKKBN



3. Hubungan Fungsional Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi KSPK terhadap ISS BKKBN



4. Hubungan Fungsional Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy ADPIN terhadap ISS BKKBN



Selanjutnya, target ISS dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 telah tercantum dalam

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.80

Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

No.	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target Renstra 2020-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,26	2.24	2.21	2.19	2.1
2	Angka prevelensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	25	24	21	20	18
5	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	53,57	55,0	57,00	59,00	61,00
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1

Berdasarkan Tabel 3.79 di atas, penentuan target mCPR, *Unmetneed* per tahun sangat ditentukan dari hasil proyeksi TFR. Adapun awal rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 telah ditentukan Bappenas/Kementerian PPN bahwa target TFR sebesar 2,1 dipertahankan konstan dari tahun 2020-2024, meskipun capaian TFR tahun 2019 hanya sebesar 2,45. Penetapan target awal TFR berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045 yang telah disusun oleh Badan Pusat Statistik menggunakan baseline SUPAS tahun 2015 dengan TFR sebesar 2,28.

Penentuan target TFR sebesar 2,1 pada tahun 2020 menjadi kondisi yang sulit untuk dicapai dengan melihat hasil capaian SDKI/SKAP, terkecuali dibandingkan dengan hasil capaian SUPAS. Hal tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN dengan melakukan audiensi

dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN pada tanggal 13 Agustus 2019 di Kantor Bappenas/Menteri PPN mengenai penyesuaian target TFR agar dikembalikan lagi kedalam dokumen RPJP Tahun 2005-2025, dimana TFR ditargetkan 2,1 pada tahun 2025. Hasil kesepakatan salah satunya menyetujui target TFR sebesar 2,1 akan dicapai pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, target TFR sebesar 2,1 tahun 2024 memiliki pengaruh terhadap penetapan target mCPR sebesar 63,41% dan *Unmetneed* sebesar 7,4% pada tahun 2024. Adapun, hasil perhitungan target TFR, mCPR, *Unmetneed*, ASFR 15-19 Tahun dan MUKP tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Surat Sestama Nomor 3544/RC.03.01/B1/2019 tentang Penetapan Target Program KKBPK Tahun 2020-2024.





Penutup

B A B 04

Penutup

187

Penutup

Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN periode tahun 2015-2019. Sebagai pertanggungjawaban BKKBN kepada publik maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP BKKBN tahun 2019 menggambarkan capaian keberhasilan 1 (satu) Indikator Sasaran Tujuan, 5 (lima) Sasaran Strategis, 25 (dua puluh lima) Indikator Sasaran Program dan 5 (lima) Program Prioritas Nasional (Pro PN) sebagaimana tertuang di dalam Renstra BKKBN 2015-2019.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, pencapaian skor kinerja BKKBN berdasarkan aplikasi SMART-Kemenkeu RI secara keseluruhan pada periode tersebut adalah 88,04 (*update SMART per 21 Februari 2020*). Capaian sasaran strategis sebesar 92,01%. Realisasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran sebesar Rp.3.538.241.106.438.000.- (92,56%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.3.822.821.933.000.-.

Upaya-upaya perbaikan ke depan dalam menjawab tantangan program KKBPK dengan tetap fokus pada kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit untuk mencapai sasaran

strategis melalui *Design Program/Thematic* yang sinergi, fokus dan lokusnya, antara lain melalui (1) Rebranding BKKBN dengan sasaran generasi milenial; (2) Penguatan sistem pelaporan pencatatan dan data terutama melalui peningkatan kualitas hasil pendataan keluarga 2020 yang akurat, valid, dan relevan; (3) Melakukan intensifikasi program KKBPK melalui koordinasi kepada kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja; (4) Penguatan rantai pasok alkon dan kebijakan alkon sektoral guna memastikan ketersediaan, pemenuhan kebutuhan, dan distribusi bagi masyarakat; (5) Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi; (6) peningkatan advokasi kepada *stakeholder* terkait untuk memasukkan indikator KKBPK dalam penilaian evaluasi kinerja daerah; dan (7) optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang KB untuk hal-hal yang dapat memberikan hasil atau nilai tambah kepada masyarakat.

Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi BKKBN kepada publik dan para pemangku kepentingan. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BKKBN untuk mewujudkan visi dan misi BKKBN.

Pencapaian skor kinerja BKKBN berdasarkan aplikasi SMART-Kemenkeu RI secara keseluruhan

88,04

(*update SMART per 21 Februari 2020*)

Capaian sasaran strategis

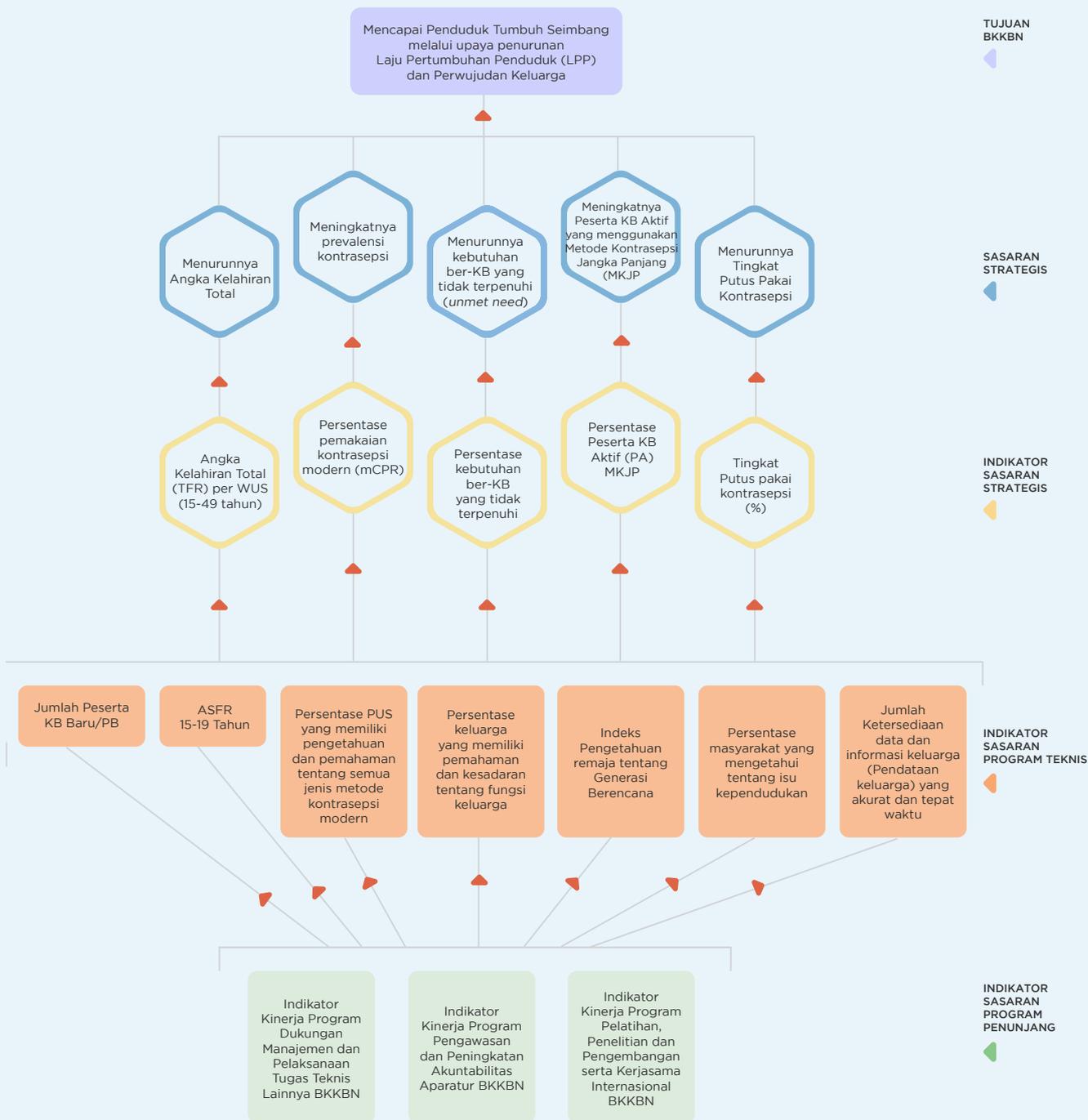
92,01%

Realisasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran sebesar:

Rp.3.538.241.106.438.000.- (92,56%)

Lampiran

Pohon Kinerja BKKBN



SISTEM NERACA REGIONAL

Tabel 13.1.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (miliar rupiah), 2015-2018
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Type of Expenditure in Nusa Tenggara Timur Province (billion rupiahs), 2015-2018

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	56 851,5	61 506,3	66 707,5	71 254,4
a. Makanan dan Minuman Non beralkohol / Food and Non-alcoholic Beverages	20 233,0	23 276,2	24 840,0	26 918,0
b. Minuman Beralkohol dan Rokok / Alcoholic Beverages	3 537,8	4 073,6	4 907,0	5 150,2
c. Pakaian / Clothing	2 742,2	2 862,1	3 125,8	3 325,7
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya / Housing, Water, Electricity, Gas, and Other fuel	7 917,4	7 971,6	9 055,1	10 175,1
e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah/ Furniture, Household Equipment and Routine	2 018,8	1 723,8	1 560,4	1 272,8
f. Kesehatan / Health	1 556,2	1 820,9	2 034,4	2 231,5
g. Transportasi / Transportation	9 402,8	9 051,5	9 020,1	8 809,7
h. Komunikasi / Communication	2 730,2	3 047,2	3 686,5	4 105,7
i. Rekreasi dan Budaya / Recreation and Culture	584,0	789,5	826,7	791,0
j. Pendidikan / Education	2 483,1	2 649,8	2 800,1	2 927,0
k. Restoran dan Hotel / Restaurant and Hotel	1 918,0	2 362,8	2 808,3	3 771,0
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan/ Personal Goods and Personal Services	1 728,0	1 877,2	2 043,1	1 776,8
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	2 539,4	2 636,9	2 920,5	3 286,9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	22 091,1	23 994,7	26 728,4	30 187,1
a. Konsumsi Kolektif/Collective	11 921,9	14 553,2	16 033,1	19 290,7
b. Konsumsi Individu/Individual	10 169,2	9 441,5	10 695,3	10 896,3

SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS

Lanjutan Tabel / Continued Table 13.1.5

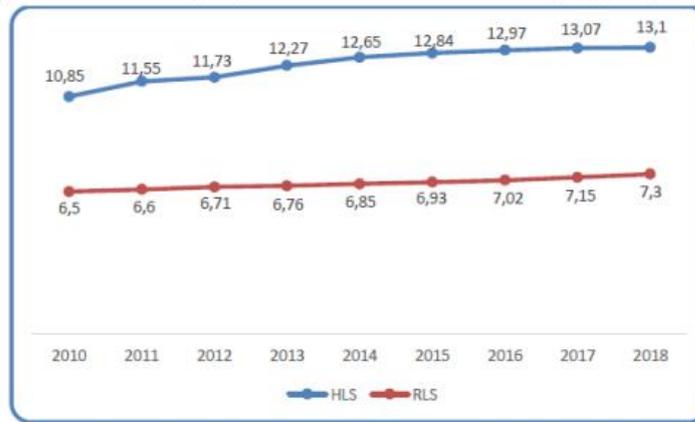
Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	969,1	458,3	571,0	884,1
Ekspor Luar Negeri / <i>Foreign Export</i>	14 632,7	8 465,0	8 716,0	10 716,1
Dikurangi Impor Luar Negeri / <i>Less Foreign Import</i>	51 959,1	53 041,4	61 091,3	66 488,7
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Bruto</i>	76 120,8	83 742,8	90 757,6	99 087,3

Catatan/Note: *Angka Sementara/Preliminary figures
** Angka Sangat Sementara/Very preliminary figures

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain
Source: BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

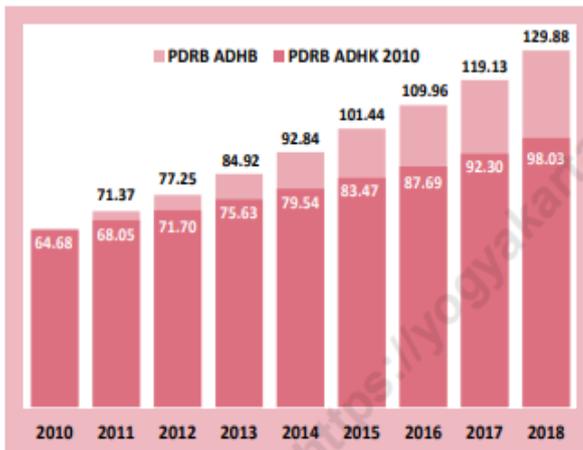
INDEKS PEMBANGUNAN INDONESIA

Gambar 10.3
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) NTT, 2010-2018



“ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (selisih antara nilai output dengan biaya antara) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan dari mana faktor produksi yang digunakan berasal ”

PDRB DIY Series 2010 Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) dan Konstan (ADHK), 2010-2017 (Rp Triliun)



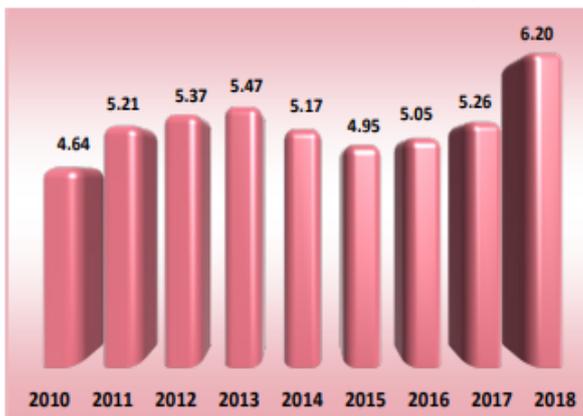
Sumber : BPS DIY

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB beserta beberapa indikator turunannya menjadi alat ukur kemajuan kegiatan perekonomian suatu wilayah atau negara. Penghitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan yang lazim digunakan di Indonesia adalah pendekatan produksi (PDRB lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran.

Kinerja perekonomian makro DIY selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB 2010-2018 yang semakin meningkat. Secara nominal atau atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB meningkat dari Rp64,7 triliun di tahun 2010 menjadi Rp129,9 triliun di tahun 2018. Secara riil atau atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, nilai PDRB meningkat dari Rp64,7 triliun di tahun 2010 menjadi Rp98,0 triliun di tahun 2018.

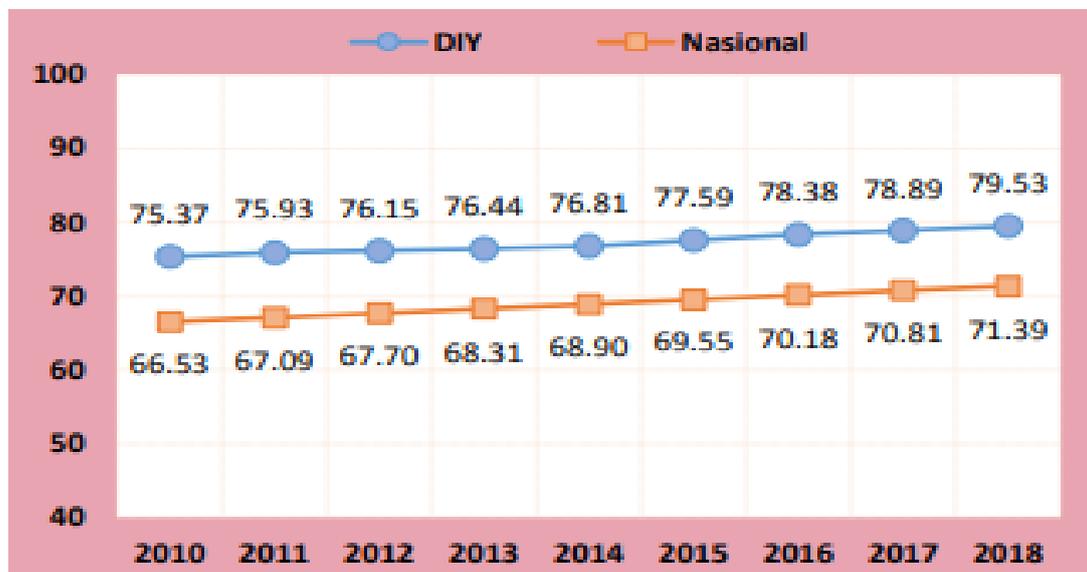
Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2010-2018 (Persen)



Sumber : BPS DIY

Kinerja perekonomian yang semakin membaik juga ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu memiliki arah positif. Laju pertumbuhan ekonomi DIY periode 2010-2018 berfluktuasi antara 4,6 persen sampai 6,2 persen, setelah sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup dalam selama periode 1998-1999 akibat krisis ekonomi. Secara bertahap perekonomian DIY mulai pulih yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi

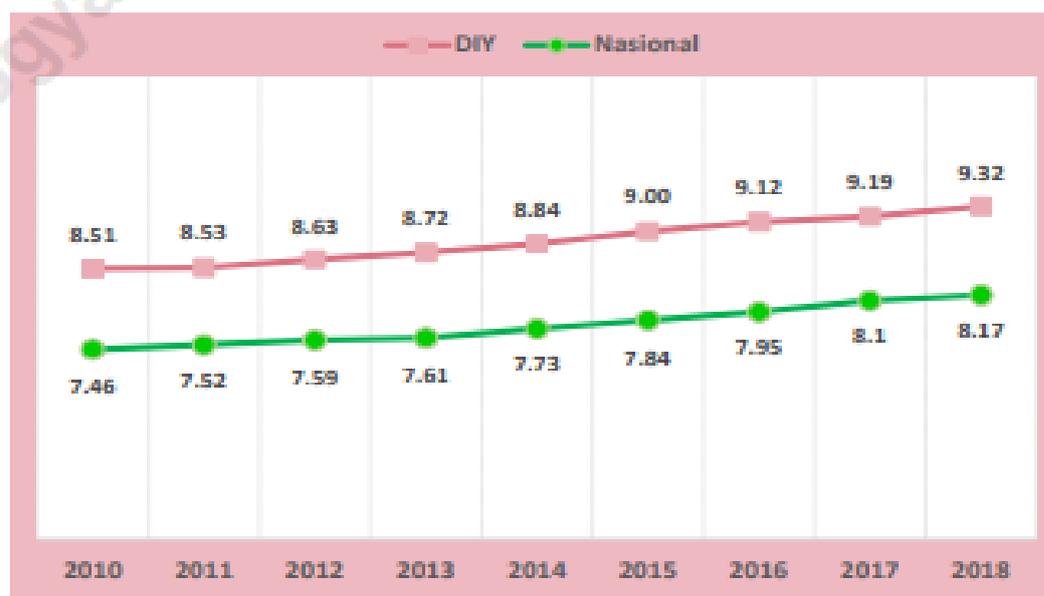
Perkembangan Capaian IPM DIY dan Nasional 2010-2018



Sumber : BPS

“ IPM DIY selama periode 2010-2018 sudah berada pada kategori tinggi (IPM antara 70-80) ”

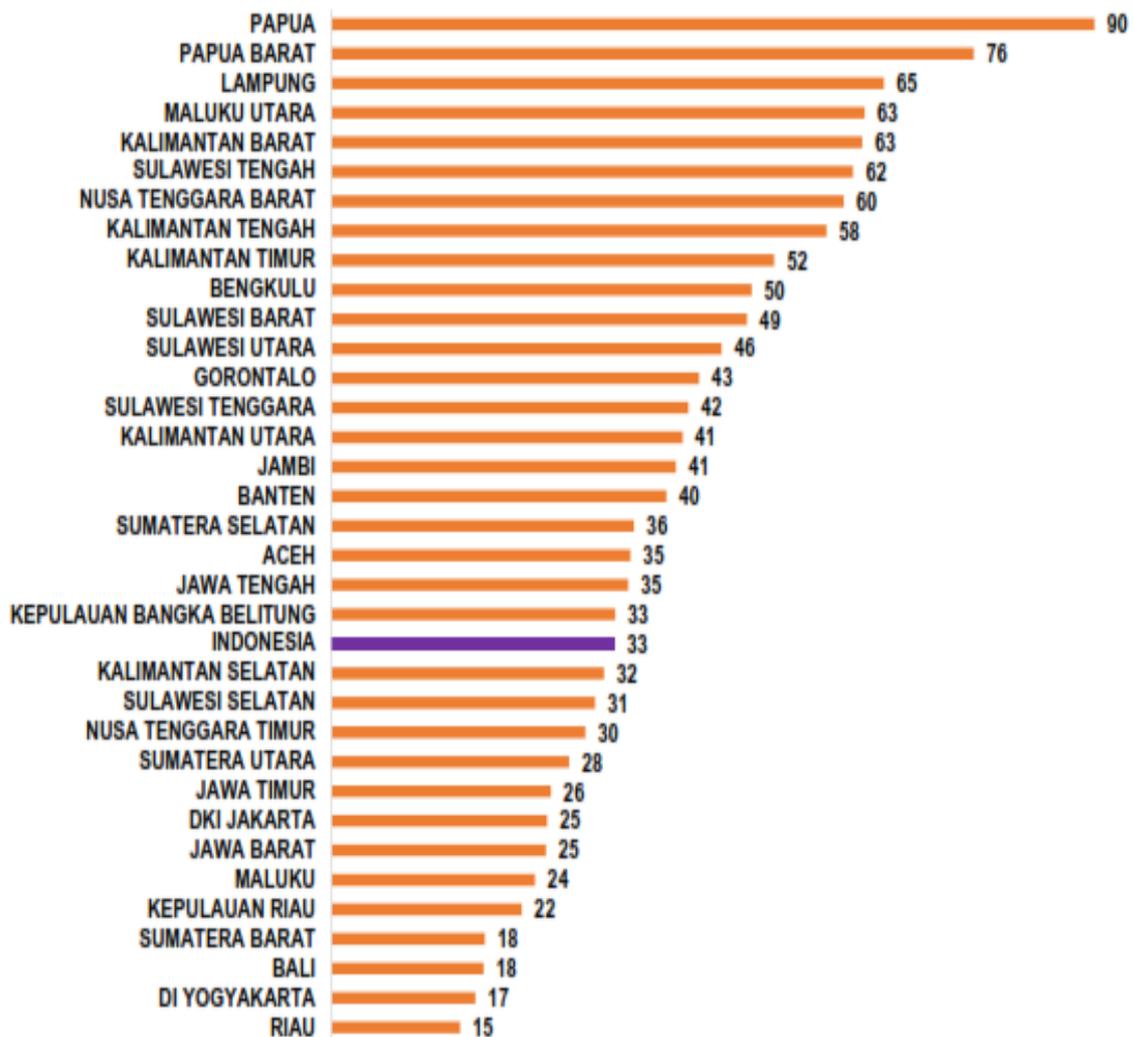
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di DIY dan Nasional, 2010-2018 (Tahun)



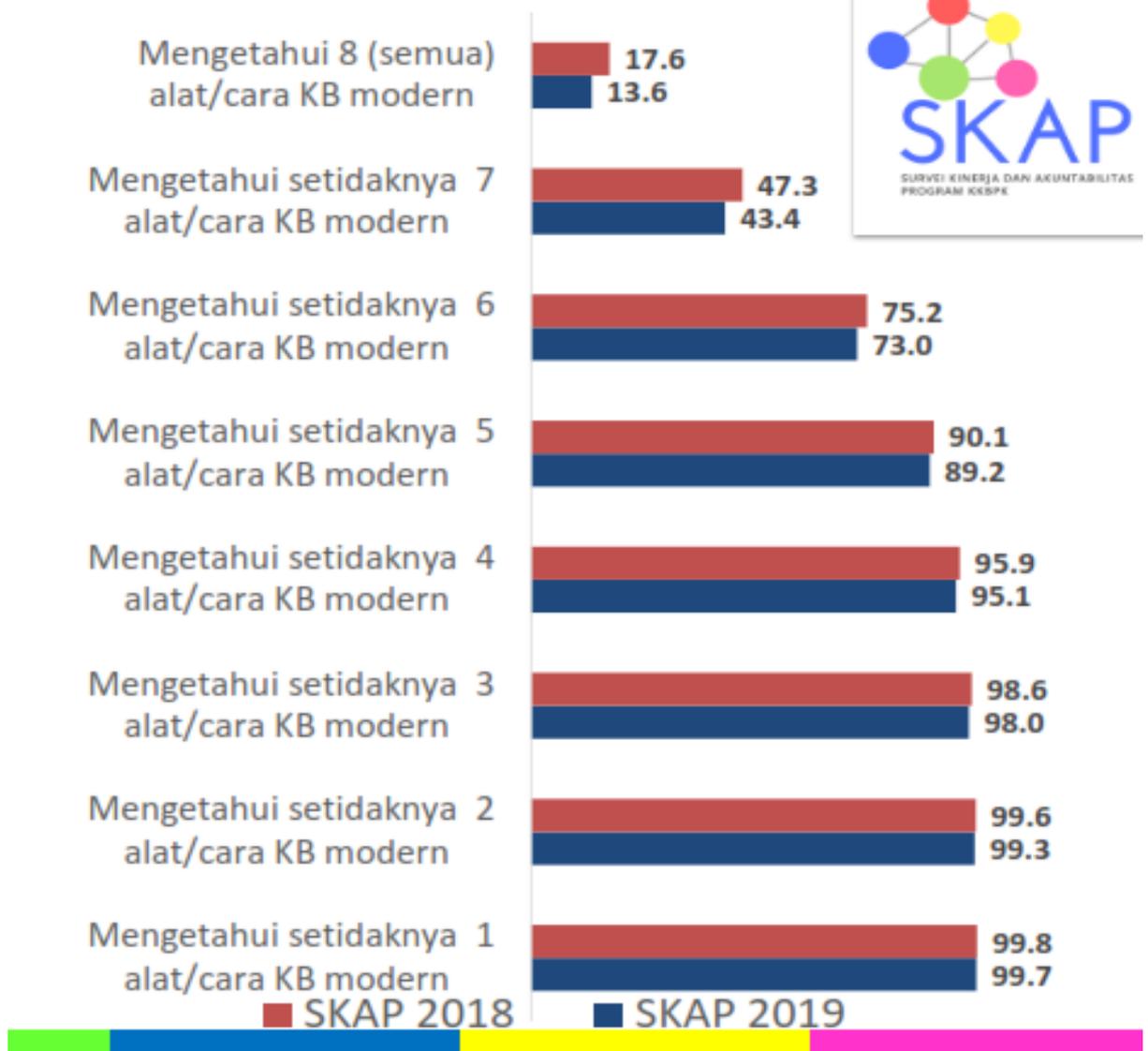
Sumber : IPM 2010-2018, BPS

Angka Kelahiran Kelompok Umur 15-19 Tahun Menurut Provinsi *Kelahiran per 1.000 Wanita*

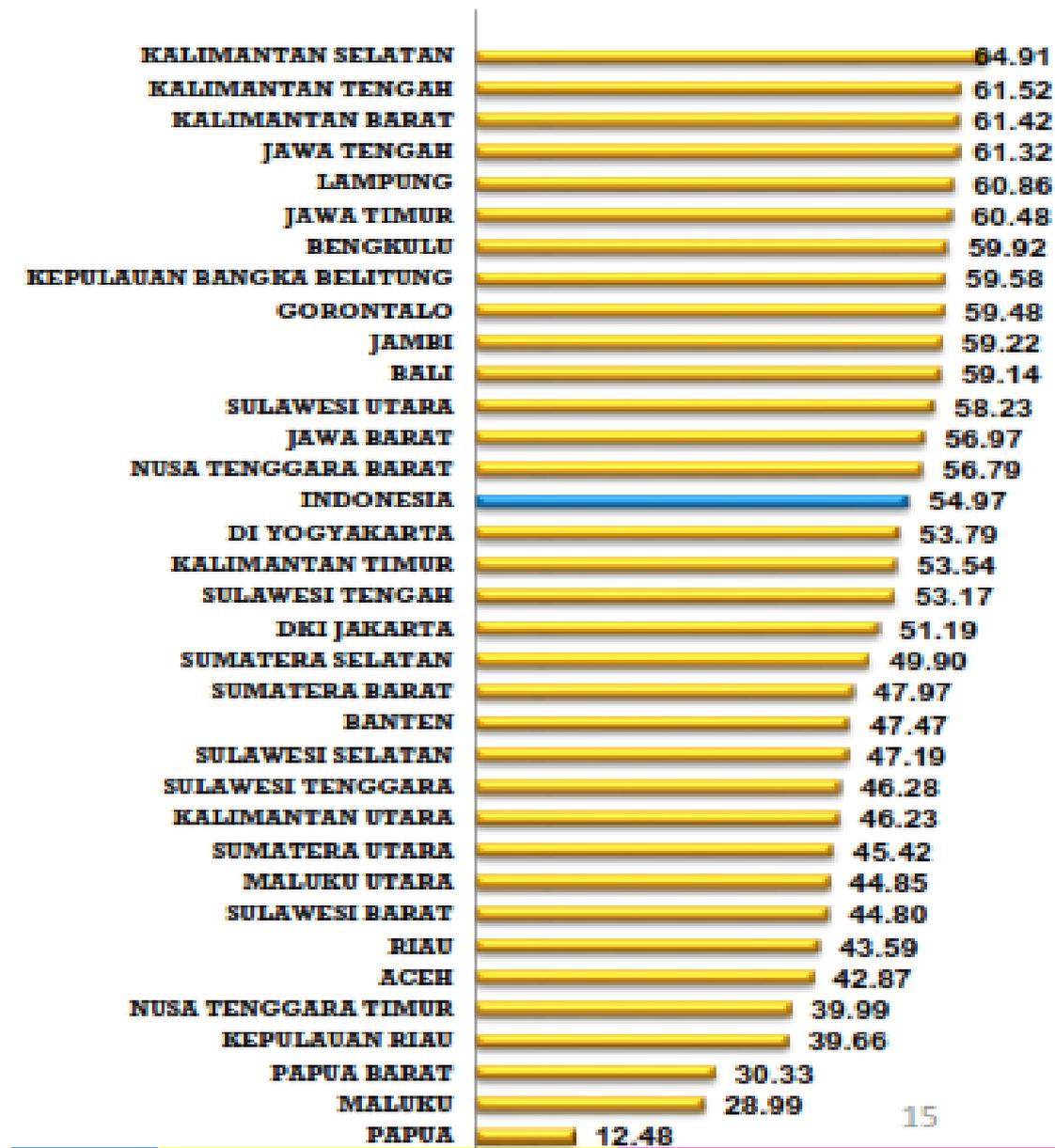
Angka Kelahiran Kelompok Umur 15-19 Tahun Menurut Provinsi
Kelahiran per 1.000 Wanita



Pengetahuan PUS tentang kontrasepsi Modern

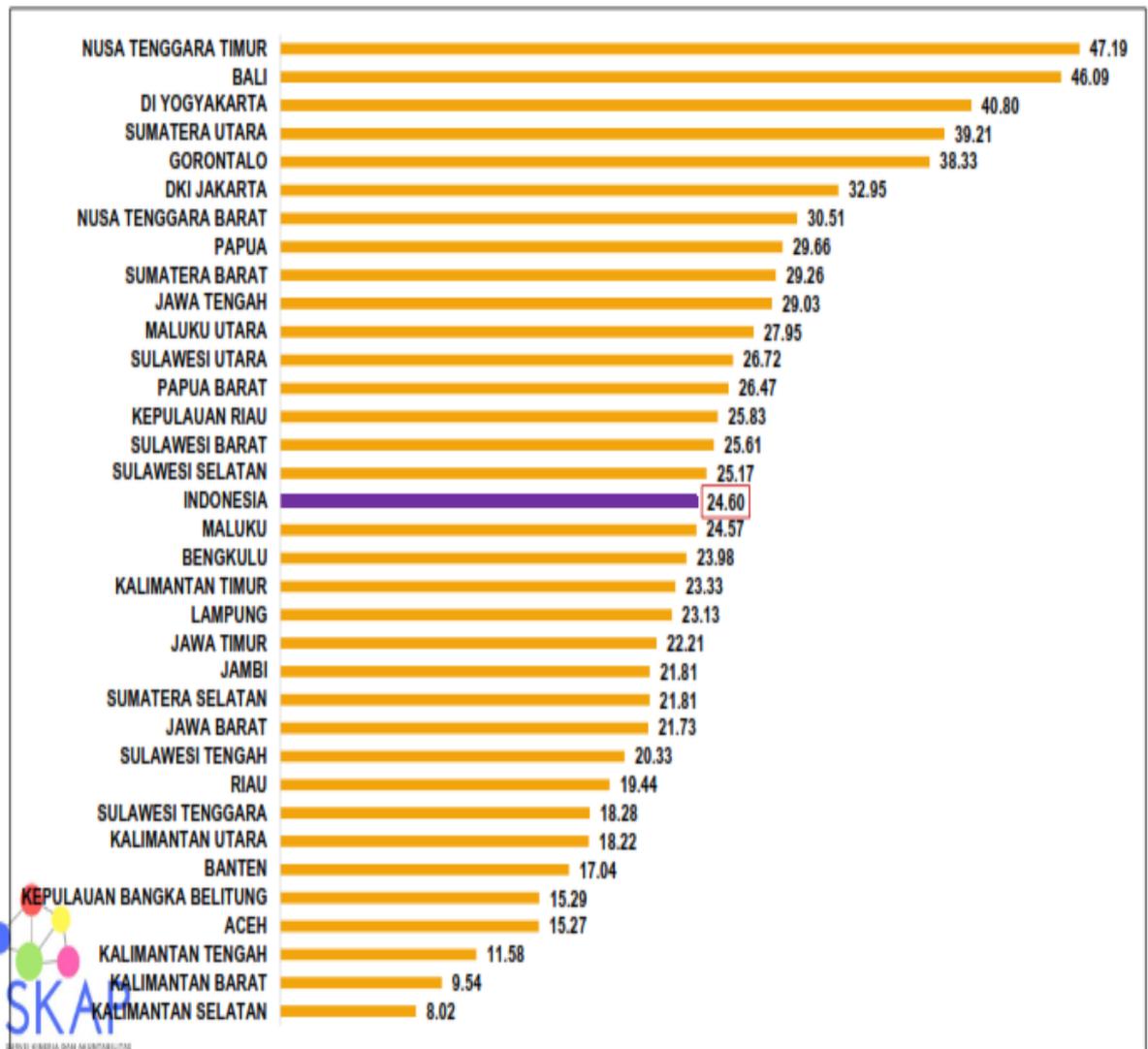


Target mCPR Th 2019 → 61,3%



Pemakaian Kontrasepsi Mix MKJP menurut Provinsi, Tahun 2019

Target MKJP, 2019	23,5%
-------------------	-------





Gambar 4.1. Arahan Kepala BKKBN dalam Kegiatan workshop penguatan dan pembangunan ZI WBK



Gambar 4.2. Workshop penguatan SPIP dan Pembangunan ZI WBK/WBBM dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Program KKBPK



Gambar 4.3. Arahan Kepala BKKBN dalam kegiatan Workshop Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah



Gambar 4.4. Peserta Workshop Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

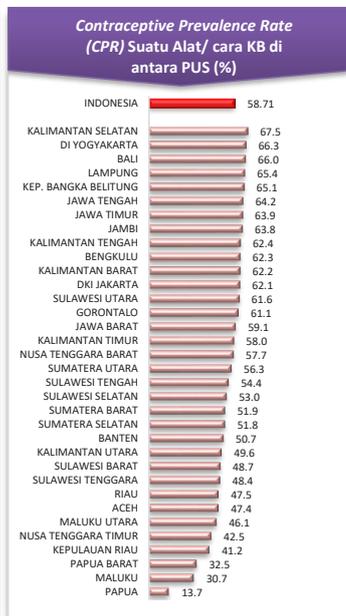
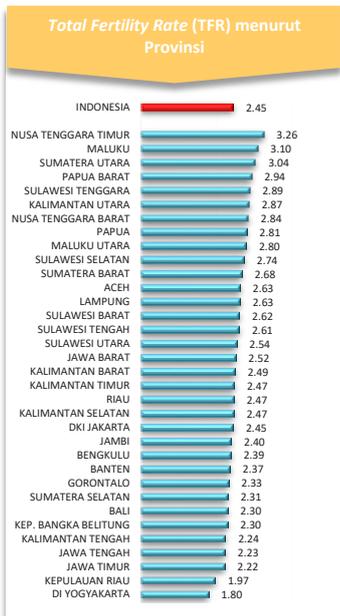
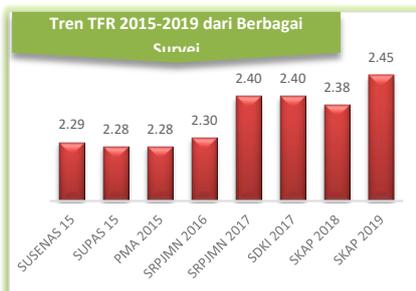


SURVEI KINERJA DAN AKUNTABILITAS PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN KELUARGA SEJAHTERA (SKAP) TAHUN 2019

Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera (SKAP) bertujuan untuk mengetahui capaian indikator Program KBPK sesuai sasaran yang tertuang dalam Renstra dan RPJMN 2015-2019. Indikator program yang diukur mencakup aspek Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Pembangunan Keluarga.

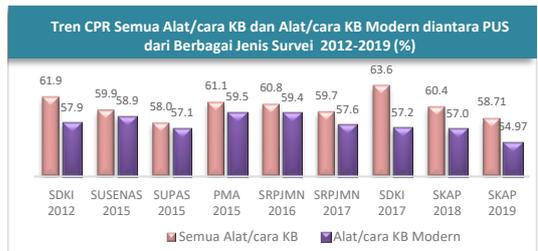
Pengambilan sampel dan pengolahan data SKAP 2019 dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan sampel dilakukan melalui pendekatan rumah tangga dan menggunakan kluster sebagai wilayah pencacahan dengan metode *stratified multistages random sampling* melalui. Wilayah sampel mencakup 1.935 kluster yang terdistribusi di seluruh provinsi di Indonesia, dan masing-masing kluster diambil sebanyak 25 rumah tangga dengan metode *systematic random sampling*. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Mobile Collection* (MOCO) melalui telepon pintar.

Survei ini terselenggara berkat kerjasama yang dilakukan Puslitbang KB dan KS bersama-sama Badan Pusat Statistik (BPS), Latbang Perwakilan BKKBN provinsi, dan Perguruan Tinggi yang menjadi mitra kerja perwakilan BKKBN provinsi.



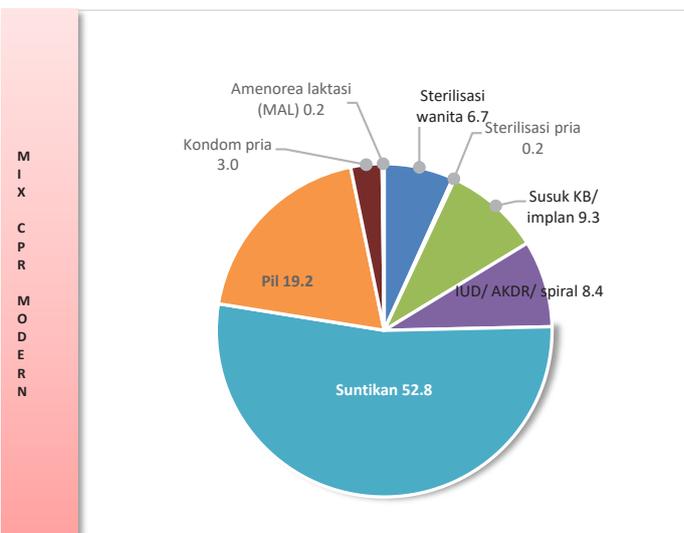
Tren Age Specific Fertility Rate (ASFR) 2012-2019 dari Berbagai Survei

	(15-19)	(20-24)	(25-29)	(30-34)	(35-39)	(40-44)	(45-49)
SUSENAS 2015	33	112	126	102	60	22	3
SUPAS 2015	36	99	121	98	58	26	16
PMA 2015	48	114	129	98	56	14	2
SRPJMN 2016	36	114	131	102	61	20	3
SRPJMN 2017	33	119	136	104	65	19	4
SDKI 2017	36	111	138	113	63	20	4
SKAP 2018	30	123	141	107	59	16	1
SKAP 2019	33	123	140	107	65	20	2

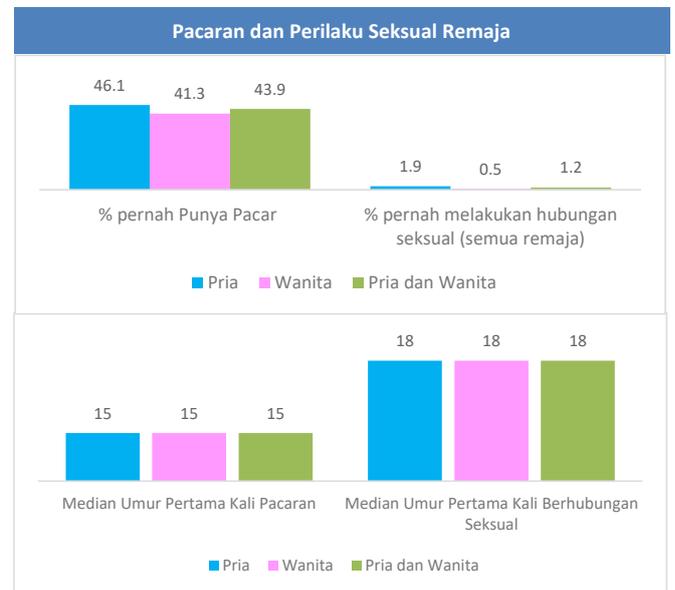
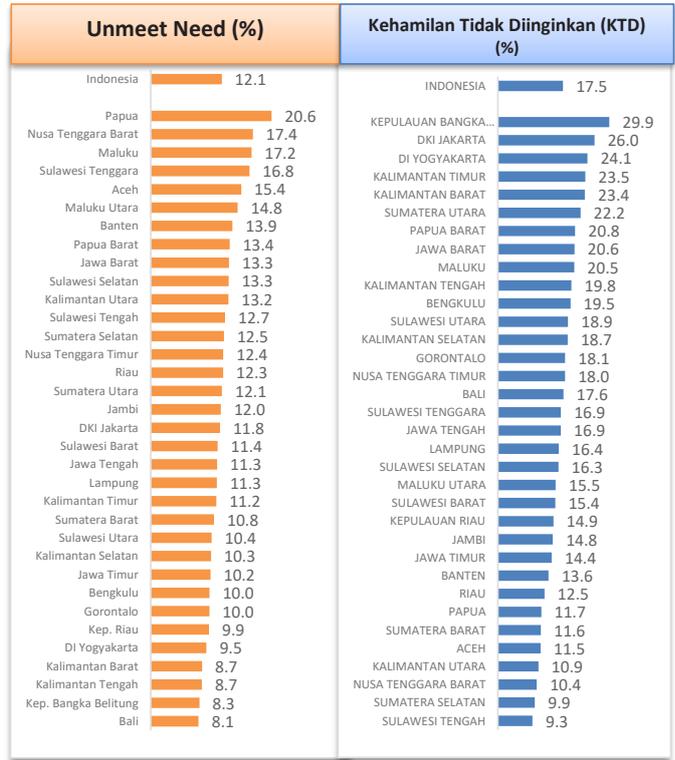


%	PMA 2015	SRPJMN 2016	SRPJMN 2017	SDKI 2017	SKAP 2018	SKAP 2019
CPR MKJP	13,2	12,8	12,4	13,5	13,2	13,5
Mix MKJP *	22,1	21,5	21,5	23,6	23,1	24,6
Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	14,4	15,8	17,5	10,6	12,4	12,1
Total Permintaan KB	75,5	76,6	77,2	74,2	72,8	70,8
Permintaan KB yang terpenuhi (semua metode)	78,8	79,4	77,3	85,7	83,0	82,9

*) di antara pemakaian alat/cara KB modern



Berdasarkan data SRPJMN/SKAP 2012-2019



	Median Umur Kawin Pertama	Median umur hubungan sex pertama	Median umur melahirkan pertama	median umur pertama KB	Rata-rata ALH pada saat pertama memakai KB
2019	20	20	21	22	1,0
2018	21	21	22	22	0,7
2017	20	20	21	22	0,8
2016	20	20	21	23	1,2



Lembar informasi ini diterbitkan sebagai salah satu bentuk diseminasi yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Data dari lembar informasi ini merujuk dari hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) 2019.

Laporan SKAP 2019 dapat diunduh pada <http://cis.bkkbn.go.id/latbang?p=15>

Untuk kepentingan data skripsi/thesis dapat menghubungi Puslitbang KB dan KS (PUSNA) BKKBN, Gedung 2, Lantai 2, Jl. Permana No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, 13650.



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL